



Pustaka Aksara

Menolak Mati: Jejak Ideologi Ormas dan Partai Islam

Prof. Dr. H. Abdul Chalik, M.Ag
Zaky Ismail M.S



Editor : Moh. Khoirul Umam, M.H.

MENOLAK MATI JEJAK IDEOLOGI ORMAS & PARTAI POLITIK ISLAM

**Prof. Dr. H. Abdul Chalik, M.Ag.
Zaky Ismail, M.S.I**



Pustaka Aksara

**MENOLAK MATI
JEJAK IDEOLOGI ORMAS & PARTAI POLITIK ISLAM**

Penulis : Prof. Dr. H. Abdul Chalik, M.Ag.
Zaky Ismail, M.S.I
Desain Sampul: Az Zahra Mutia Rahma
Tata Letak : Az Zahra Mutia Rahma
Editor : Moh. Khoirul Umam, M.H.

ISBN : 978-623-161-436-0

Diterbitkan oleh : **PUSTAKA AKSARA, 2025**

Redaksi:

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Telp. 0858-0746-8047

Laman : www.pustakaaksara.co.id

Surel : info@pustakaaksara.co.id

Anggota IKAPI : 277/JTI/2021

Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR PENULIS

Buku ini disusun pada saat perang di Gaza dan Lebanon membara. Tujuan Israel untuk menumpas Hamas dan Hizbullah. Upaya genosida dilakukan segala cara dan dalam ragam bentuk, agar dua kelompok perlawanan habis tak tersisa. Namun demikian, meskipun Gaza nyaris rata dengan tanah, target Israel belum sepenuhnya tercapai. Setahun dibombardir, tak ada sesuatu yang diharapkan tercapai kecuali kematian nyahid yang tiap menit dan jam berjatuh.

"Hamas is not a religion. You can't describe an idea. The political echelon needs to find an alternative or it [Hamas] will remain," kata Jenderal Daniel Hagari (Jerusalem Post, 9 Juni 2024). Pengakuan ini menunjukkan bahwa Hamas bukan sekedar pasukan atau organisasi yang bersenjata. Hamas adalah ideologi atau keyakinan yang tak bisa dihayati dengan senjata canggih. Ia tersembunyi, tak terlihat dan tidak terorganisir.

Ideologi merupakan senjata yang tersembunyi. Ideologi juga merupakan kekuasaan (power) yang memerintah dan mengendalikan manusia. John Gavena menyebutnya dengan istilah *"hidden power"* atau kekuasaan yang terselubung yang tanpa sadar manusia diarahkan dan digerakkan oleh kekuatan tersebut. Dalam teori Powercube, Gavena menyebut tiga jenis kekuasaan yang ia sebut sebagai *visible power*, *invisible power* dan *hidden power*.

Tesis-tesis tentang kematian ideologi terbantahkan semua. Kecamuk perang di berbagai benua yang hingga saat ini belum merasa sesungguhnya perang ideologi atau melibatkan kekuatan ideologi. Di dunia Islam pertarungan ideologi bukan wacana tetapi seperti sebuah senjata yang tiap saat siap diledakkan. Begitu pula yang terjadi di Indonesia.

Ketika PKI dibubarkan dan menjadi partai terlarang bukan berarti secara ideologis sudah mati. Begitu juga ketika DI/TII dibubarkan. Mereka hidup dengan cara dan pola berbeda dengan menyelinap di beberapa Ormas, NGO dan bahkan partai politik. Begitu pula HTI yang dibubarkan pemerintah tahun 2017. Bukan berarti sudah terkubur dalam-dalam ke lapisan tanah terbawah. Ia tetap hidup dengan caranya masing-masing dan secara ideologis eksis hingga sekarang.

Bagaimana dengan Ormas dan partai politik yang masih eksis hingga sekarang. Mereka merupakan keniscayaan. Mereka bisa tumbuh, berkembang dan survive karena ideologi yang keyakinan. Ideologi merupakan darah dan nyawa bukan materi sel dalam kehidupan organisasi. Persekeluaian itu ibarat materi seperti sel kromosom yang terdiri DNA (Deoxyribonucleic Acid) berupa materi genetik yang berinstruksi untuk pertumbuhan, perkembangan dan perubahan.

Meskipun dalam kerjanya ada proses pertumbuhan, perkembangan dan pergeseran, namun ideologi Ormas dan partai Islam tetap 'menolak mati'. Perubahan sosial-politik yang begitu cepat memang pada satu sisi menuntut adanya 'adaptasi' agar tidak tertinggal oleh konstituen. Namun pada hakikatnya Ormas dan Partai bisa hidup karena ideologi yang diperjuangkannya.

Buku ini disusun dalam rangka menjelaskan semua itu. Ada keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penyusunan buku. Artikel terpilih mereka kemudian ditata ulang oleh editor sehingga menjadi jamuan yang enak dibaca. Buku ini sangat membantu bagi para akademisi dan mahasiswa untuk mendalami tentang ideologi, terutama bagi mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Ideologi, Agama dan Politik.

Kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan proses ini, terutama kepada editor Moh. Khoirul Umam, S. Sos. MH. Pengalamannya sebagai penulis lepas di Kompas dan beberapa media cetak nasional memberikan ramuan yang beda dalam penyusunan buku. Begitu pula kepada penerbit yang sudah bersedia mempublikasikan buku.

Selamat membaca.



Kampus Gunung Anyar,
0 Desember 2024

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

PENGANTAR EDITOR

Buku ini menyajikan dinamika Islam politik di Indonesia yang kompleks, terutama dalam konteks sosial-politik. Hubungan antara Islam politik dan politik ke Indonesiaan menjadi topik yang termanifestasi ke dalam gerakan ideologi ormas dan partai politik. Bukan sekedar membicarakan dalam konteks sejarah melainkan juga memberikan pemahaman lebih luas tentang isu-isu yang berkaitan dengan gerakan kelompok politik Islam di Indonesia. Buku ini lahir dari fenomena pasang-surut ideologi partai politik hingga kebangkitan mas Islam dalam menjawab tantangan perubahan social-politik yang cepat.

Materi yang disajikan dalam buku ini mencakup berbagai aspek dari sejarah perkembangan diskursus ideologi politik Indonesia, skala iras partai politik Islam, model-model partai Islam di Indonesia hingga pasang surut keberadaan politik Islam di dalam pemilu nasional. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan gambaran teoretis, tetapi juga analisis kritis-empiris terhadap hubungan antara Islam dan politik di Indonesia.

Sebagai sebuah buku, tema-tema di dalam buku ini dipilih secara sistematis agar mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan kurikulum pendidikan tinggi. Kami berharap, buku ini dapat menambah khazanah keilmuan yang mengupas peran dan kontribusi Islam dalam perkembangan politik di Indonesia, serta mempersembahkan temuan-temuan terbaru seputar politik di Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca yang budiman, serta turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Surabaya, 10 Desember, 2024

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS.....	iii
PENGANTAR EDITOR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I	
IDEOLOGI DAN POLITIK; CATATAN DINAMIKA	
ORMAS DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA	1
BAB II	
BELAJAR DAN MENYALAFI ARABIA: MENYALAFI MOTIF	
PERGESERAN IDEOLOGI ANTARA PERUMUSAN	
PRAGMATIS DAN KEBUJUKAAN.....	10
A. Peran Ideologi Wahabi Dalam Berdirinya	
Kerajaan Arab Saudi.....	14
B. Pergeseran Ideologi Arab Saudi dan Wahabi	
Ke Model.....	20
C. Motif Dan Kepentingan Pergeseran Ideologi.....	28
D. Catatan.....	34
BAB III	
KELOMPOK ISLAM DALAM DISKURSUS IDEOLOGI	
INDONESIA.....	35
A. Tokoh Islam Dan Nasionalis Dalam Perumusan	
Ideologi Negara.....	38
B. Kelompok Nasionalis Dalam Perumusan Pancasila.....	42
C. Ketegangan Kelompok Nasionalis Islam-Nasionalis	
Skuler Pasca Perumusan Pancasila.....	45

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

BAB IV

AGAMA VERSUS KOMUNISME TAHUN 1955-1965 49

- A. Sejarah Pendirian Masyumi..... 53
- B. Islam, Kapitalisme Dan Komunisme..... 54
- C. Pengaruh Partai Komunis Indonesia..... 56
- D. Awal Konflik Anti Komunis..... 57
- E. Konflik Ideologi Dan Konfrontasi Pemilu 1955 58
- F. Kegagalan Masyumi Dan Pembubaran Partai Masyumi.. 64
- G. Kejayaan PKI Pasca Perpecahan Masyumi..... 66
- H. Kemerosotan Komunisme Hingga Pembubaran PKI.. 67

BAB V

GENEALOGI GERAKAN POLITIK ISLAM
KONSERVATIF DAN MODERATIF 71

- A. Histori Genealogi Idear Konservatif Islam Indonesia 72
- B. Islam Konservatif Sebagai Code of Law 78

BAB VI

NU, ICMI DAN PEREDUTAN RI MELAWAN PENGUASAAN 82

- A. Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perjalanan
Politik Indonesia..... 82
- B. Gerakan Sosial-Politik NU Membunikan Paham
Ahlussunnah Waljamaah..... 98
- C. Cendikiawan Muslim Dan Pemerintahan Soeharto..... 125

BAB VII

GERAKAN IDEOLOGI KHILAFAH DI INDONESIA:
SEBUAH ANALISIS HISTORIS DAN POLITIK
KONTEMPORER..... 140

- A. Akar Ideologi Khilafah Muncul Dan Berkembang
Di Indonesia Perspektif Historis 145
- B. Perspektif Kontemporer 149

C. Faktor-Faktor Yang Mendorong Popularitas Ideologi Khilafah Di Kalangan Masyarakat Indonesia	153
D. Pandangan Para Pakar Dan Ahli Terkait Dengan Ideologi Khilafah Di Indonesia	161
BAB VIII	
IDEOLOGI KANAN DAN KIRI DALAM PARTAI	
POLITIK ISLAM DI INDONESIA	164
A. Partai Islam Bercorak Ideologi Kanan.....	167
B. Partai Islam Bercorak Kiri	182
BAB IX	
PERGESERAN IDEOLOGI REAKTANSI POLITIK	
DAN PILIHAN RAGU PARTAI	193
A. Pilihan Politik Dan Ideologis	193
B. Membaca Ragam Ideologi Di Pemilu 2024.....	203
C. PPP Nasib Kini.....	206
D. Catatan.....	210
BAB X	
NEOLIBERALISME DAN POPULISME	
DALAM POLITIK ELEKTORAL INDONESIA	211
A. Pengaruh Neoliberalisme Terhadap Politik.....	221
B. Kebangkitan Populisme	225
C. Golongan-Golongan Yang Termasuk Neoliberalisme Dan Populisme Di Indonesia.....	229
D. Pengaruh Neoliberalisme Dan Populisme Pada Politik Elektoral	231
EPILOG “MENOLAK MATI”	234
BIBLIOGRAFI	239
PROFIL PENULIS DAN EDITOR.....	260



ILMU HUKUM
JEJAK EKOLOGI MAS
& PARTISIPASI ISLAM

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

BAB I

IDEOLOGI DAN POLITIK; CATATAN DINAMIKA ORMAS DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA ¹

Salah satu gagasan penting Francis Fukuyama dalam bukunya *'The End of History and The Last Man'* yang terbit tahun 1992 tentang asumsi berakhirnya perdebatan ideologi karena kuatnya cengkraman demokrasi liberal dan sekaligus menandai berakhirnya sosialisme dan fasisme. Runtuhnya Tembok Berlin dan keluarnya Uni Soviet menjadi dasar utama untuk runtuhnya ideologi-ideologi yang digunakan sebagai dasar kajian. Tesis tersebut menjadi landasan perdebatan hingga sekarang karena dalam kenyataan sejarah berkata lain. Ideologi sosialisme dan fasisme belum hilang dalam aneka ragam bentuk dan struktur baru. Begitu pula demokrasi liberal.

Satu dekade setelah buku terbit tentang peristiwa black September 2001 di New York sebagai simbol kemegahan dan supremasi demokrasi liberal luluh lantah ditabrak pesawat yang (diindikasikan) dilakukan oleh kelompok ekstrimis muslim. Ribuan manusia mati secara sia-sia. Apa yang kemudian disebut dengan aksi 'teror' secara cepat menimbulkan balasan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Afghanistan dan Irak menjadi sasaran balasan Amerika Serikat dan sekutu. Dua negara tersebut luluh lantah. Ribuan nyawa manusia melayang dengan sia-sia.

Belum genap satu dekade muncul perlawanan baru dari kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Dua tanah di negara tersebut sebagian dikuasai oleh kelompok tersebut. Disinyalir lebih ekstrim dari al-Qaeda yang bermarkas di

¹ Abdul Chalik, Guru Besar Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Afghanistan. Kawasan Timur Tengah bergejolak. Karena ISIS melakukan teror di berbagai lokasi lintas negara.

Situasi kekacauan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan perlawanan dengan menggulingkan pemerintahan dengan acara anarkis. Mesir, Tunisia, Libya dan Suriah berkecamuk. Pemimpin negara diganti melalui proses yang tidak normal karena desakan rakyat melalui aksi 'people power'. Kelompok ekstrim seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir hidup kembali. Mereka merayakan kebebasan atas nama hak-hak rakyat, meskipun pada akhirnya ditulahi karena dianggap membahayakan keamanan negara sebagaimana yang terjadi di Mesir.

Cerita di atas menggariskan bahwa tesis Fukuyama sudah tamat. Ideologi berkembang begitu cepat dengan ragam derivasi dan peristiwanya dalam bentuk organisasi dan kelompok. Tidak ada yang dapat membantah bahwa ideologi terus berkembang dan memberdayakan era baru dalam merespon dunia yang terus berubah. Meskipun pada kenyataannya demokrasi liberal tetap menjadi kiblat dan mempengaruhi praktik berpolitik dan bernegara, namun tidak dapat terbantahkan masih banyak kelompok yang berusaha terus melawan dengan cara yang halus hingga ekstrim melalui kekerasan.

Di Indonesia, perkembangan ideologi cukup dinamis. Dua kutub ideologi baik yang bercorak kanan dan kiri menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah bangsa. Dinamika ideologi mulai tampak di permukaan pada awal abad 20 ketika kelompok pergerakan nasional menemukan momentum melawan tirani penjajah. Dua blok 'nasional dan Islam' teridentifikasi melalui gerakan Budi Utomo, Sarekat Islam dan Sarekat Dagang Islam. Tidak berselang lama muncul Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' (NU).

Pada tahun-tahun tersebut dunia juga sudah terpolarisasi melalui dua blok antara Barat yang liberal dengan blok Timur yang bercorak sosialis. Blok Barat dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan Inggris yang mulai masuk ke Asia termasuk Indonesia. Sementara blok Timur dipengaruhi oleh ajaran sosialis-komunis melalui jalur Soviet dan China. Interaksi pemuda Indonesia mulai intens dengan ideologi mereka saat Belanda mulai memperkenalkan sekolah formal. Begitu pula banyak kelompok pribumi terpelajar yang memperoleh pendidikan di Belanda.

Sementara itu, organisasi keagamaan juga tidak dilepaskan dari para terpelajar yang bersentuhan dengan paham keagamaan di Arab Saudi dan Mesir. Banyak pelajar Indonesia yang menunaikan ibadah haji dan tinggal cukup lama tinggal di Makkah dan Madinah. Begitu pula dengan banyaknya kementerian yang merupakan studi di al-Azhar. Mesir dan Makkah-Madinah menjadi kiblat peradaban yang mempengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia.

Lahirnya ragam aliran keagamaan yang teridentifikasi melalui organisasi keagamaan tidak dapat dilepaskan dengan interaksi internasional pelajar Indonesia. Dua kelompok nasionalis dan Islam mengidentifikasi diri sebagai kelompok berhaluan berbeda. Kelompok nasionalis ada kalanya berhaluan demokrasi Barat dan ada pula yang bercorak sosialis-komunis. Lahirnya SI haluan kanan dan kiri merupakan cikal bakal polarisasi ideologi di awal abad 20. Kelompok pergerakan yang dipimpin oleh Soekarno melalui ajaran Marhaenis merupakan bagian tak terpisahkan dari polarisasi tersebut. Begitu pula kelompok yang berhaluan kiri yang dipimpin oleh Semaun, Muso, dkk merupakan kelompok organisasi yang berhaluan kiri.

Lahirnya PNI dan PKI pada Pemilu 1955 merupakan bagian penting dari produk ideologi yang merambah pada ranah politik praktis. Dua partai tersebut menjadi kekuatan dominan pada pemerintahan Orde Lama yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan negara. Tahun 1971 PNI ikut kembali sebagai kontestan Pemilu yang kedua. Tahun 1973 PNI melebur dalam partai PDI akibat kebijakan fusi partai oleh pemerintahan Orde Baru. Sementara PKI menjadi partai terlarang karena menjadi otak pemberontakan yang dikenal dengan sebutan G 30 S/PKI.

Setelah Reformasi, PDI berganti nama menjadi PDI-P. Sejarah pergantian PDI terjadi setelah adanya tekanan terus-menerus Orde Baru untuk melakukan inovasi terhadap kepemimpinan yang dipimpin oleh Megawati. Puncaknya terjadi tahun 1997 ketika terjadi pengambilan Kantor PDI yang dikawal oleh militer. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan 'Kudeta' atau Kudeta 27 Juli yang dilakukan oleh keluarga Megawati. Huruf P yang beraru perjuangannya merupakan akumulasi dari sejarah partai yang berdarah-darah untuk menjaga agar terus eksis dari tekanan rezim waktu itu.

PDI-P merupakan partai yang konsisten menegakkan prinsip ideologi Marhaen dan eksis hingga sekarang. Beberapa partai yang memiliki kemiripan ideologi tidak eksis atau tidak lolos ambang batas parlemen. Mereka juga menjual ideologi Marhaen atau dikawal oleh keluarga Soekarno, tetapi tidak mendapatkan dukungan luas di masyarakat. Beberapa partai serupa seperti PNBK, Partai Marhaens dan PNI Marhaen juga pernah menjadi bagian dari kontestan pada Reformasi.

Sementara kelompok Islam juga mengalami fragmentasi cukup tajam. NU dan Muhammadiyah menjadi organisasi kemasyarakatan dengan ideologi yang berbeda. Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912 yang bergerak di bidang dakwah,

sosial dan pendidikan. Paham keagamaannya memiliki keterhubungan dengan ulama' Mesir terutama Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh. Di bidang amaliah keagamaan mengikuti mazhab Hanafi yang dikenal dengan corak fiqih rasional. Organisasi ini eksis dan berkontribusi penting dalam sejarah bangsa dari sebelum kemerdekaan hingga sekarang.

Muhammadiyah konsisten di jalur pendidikan dan dakwah, dan tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu. Namun dalam perjalanan panjangnya Muhammadiyah banyak disalurkan melalui Masyumi yang mendapatkan suara signifikan hasil pemilu 1955. Masyumi menjadi bagian dari pemerintahan sebelum dilakukan oleh Soekarno pada tahun 1960 karena menolak terlibat dalam pemerintahan melawan pemerintah pada tahun 1971 untuk mendirikan sebuah partai yang dipimpin oleh H. A. Y. M. Pada tahun tersebut ikut Pemilu dengan mendapatkan suara yang cukup besar. Tahun 1973 Parmusi (Partai Muslimin) bergabung dengan Muhammadiyah sebagai akibat dari kebijakan fusi partai oleh pemerintahan Soeharto.

Reformasi 1998 menjadi awal lahirnya partai politik yang memiliki irisan dengan Muhammadiyah. PAN (Partai Amanat Nasional) didirikan oleh Amin Rais, tokoh Reformasi dan menjadi Ketua Muhammadiyah waktu itu. Selain gambar partai yang memiliki kemiripan dengan lambang Muhammadiyah, PAN teridentifikasi memiliki ikatan historis dan ideologis dengan Muhammadiyah. Tokoh-tokoh utama partai banyak berlatar belakang organisasi tersebut. Secara ideologis, PAN masuk dalam kategori partai nasional-Islam yang bercorak inklusif, partai terbuka dan menerima Pancasila dan kebhinekaan Indonesia.

Sementara perjalanan NU lebih dinamis. NU didirikan tahun 1926 dengan dua tokoh sentral utama yakni KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah. NU awalnya

didirikan sebagai organisasi keagamaan yang bergerak di bidang dakwah, sosial dan pendidikan untuk menjaga akidah umat atas rongrongan paham modernis yang dianggap bertentangan dengan amaliah umat. Dengan jaringan pesantren, madrasah dan tarekat yang tersebar luas di kawasan perdesaan, NU menjelma menjadi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Kyai dan santri menjadi aktor utama dalam sejarah perialanan NU hingga sekarang.

Namun seiring dengan perjalanan waktu, NU menjadi bagian dari kekuatan politik. Setelah ikut andil sebagai kontestan Pemilu tahun 1955. Saat itu NU cukup signifikan dan menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan. Sejak Pemilu 1955 tersebut, NU turut ambil bagian dalam pengelolaan negara baik melalui institusi hingga jabatan strategis di pemerintahan. Namun pada tahun 1971 NU ikut serta dalam kontestan Pemilu pada awal dekade berikutnya yang cukup besar. Atas kebijakan fusi politik tahun 1973 NU bergabung dengan PPP bersama dengan PKB dan PKI. Pada tahun 1984, NU resmi keluar dari PPP dan kembali menjadi organisasi sosial yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan 'Kembali ke Khittah 1926'. Sejak keluar dari PPP, NU menjadi kekuatan *civil society* yang cukup kritis pada kebijakan pemerintah di bawah pimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Reformasi 1998 melahirkan babak baru hubungan NU dengan politik praktis. NU kembali terjebak dalam kubangan politik ketika turut andil dalam pendirian PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Gus Dur yang waktu itu menjadi Ketum PBNU memfasilitasi pendirian PKB. Dengan kendaraan PKB, Gus Dur terpilih sebagai Presiden pertama pada Reformasi. Namun posisi tersebut hanya berlangsung dua tahun. Gus Dur diturunkan dari jabatan Presiden oleh

pendukungnya melalui Sidang Istimewa MPR tahun 2001 yang digerakkan oleh Amien Rais ketua MPR waktu itu.

Karakteristik PKB hampir sama dengan NU. Partai ini bercorak inklusif, yang mengedepankan prinsip *ahlussunnah waljamaah* sebagai dasar dan pijakan dalam berpolitik. Para pendukung PKB sebagian besar berlatar belakang NU, santri dan alumni pesantren dan sebagian besar berada di kawasan pedesaan. Sejak Reformasi PKB selalu eksis dan lolos *parliamentary threshold* dan menjadi bagian penting dalam pemerintahan.

Selain PA, PKS dan PKB, ada pula PKS yang eksis di parlemen hingga sekarang. Partai ini dilihat dari aspek ideologi dan model organisasinya memiliki kemiripan dengan Ikhwan Muslimin Mesir dan Jamaah Islami Pakistan. Sering disebut sebagai partai yang berideologi 'transnasional' yang diimporkan ke Indonesia pada awal abad 20. Di awal berdiri, PKS banyak dipimpin oleh mahasiswa. Tokohnya yang bertebaran di beberapa lembaga pendidikan di Indonesia. Selain itu juga dari kalangan kampus dan profesional yang bekerja di perusahaan ternama. Basis massa dari kalangan menengah dan terdidik menjadi motor untuk memobilisasi suara. Partai ini menarik perhatian karena dikenal tertib, disiplin dan loyal terhadap ideologi yang diperjuangkan.

Ada pula PBB yang juga eksis namun sejak Pemilu 2009 tidak lolos di ambang batas parlemen. PBB merupakan partai produk Reformasi untuk mengusung kembali ideologi Masyumi sebagai motor dalam menjalankan roda organisasi. Basis massa PBB dari kalangan konservatif. Beberapa organisasi Islam yang memiliki corak konservatif seperti DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia), LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), Persis dan al-Irsyad. Di awal Reformasi PBB merupakan partai yang selalu konsisten

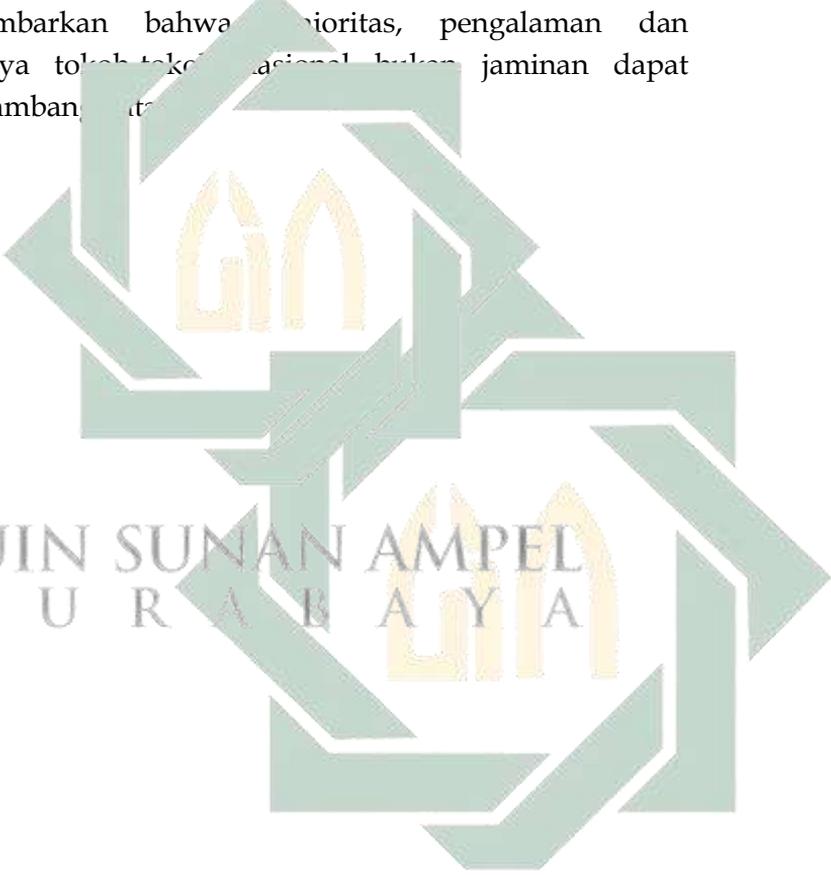
mengangkat isu peleburan 'Piagam Jakarta' dalam konstitusi negara. Piagam Jakarta berisi tujuh kata yang berisi tentang keharusan muslim Indonesia menjalankan sesuai dengan prinsip syariah. Namun usulan tersebut selalu kandas di parlemen karena tidak didukung oleh kekuatan mayoritas terutama dari partai Islam seperti PKB dan PAN. Dalam perjalanan waktu, isu tersebut redup dan tidak lagi menjadi perdebatan di parlemen.

Dalam sejarah partai di era Reformasi masih muncul beberapa partai yang bercorak ideologi baik nasionalis maupun Islam namun tidak boleh melampaui ambang batas parlemen. Beberapa partai tersebut seperti Partai Matahari Bangsa dan Partai Ummat yang melupakan sejarah dari Pemilu 2024 muncul Partai Reformasi sebagai pengganti PKS. PKNU pernah muncul pada Pemilu 2009 sebagai pengganti dari PKB, namun tenggelam karena tidak memiliki dukungan yang kuat. Sementara partai nasionalis justru tidak sedemikian rupa. Beberapa partai seperti PPP dan PKS mampu menembus ambang batas parlemen yang cukup tinggi.

Sebagaimana dimaklumi bahwa ambang batas parlemen semakin tahun semakin naik. Pada Pemilu 2009 hanya 2,5 %, Pemilu 2014 dinaikkan menjadi 3,5 % dan Pemilu 2019 dan 2024 menjadi 4 %. Jumlah 4 % jika dihitung dari total DPT 200 juta setara dengan 8 juta pemilih. Jumlah yang tidak mudah ditembus oleh partai baru. Namun tidak menutup kemungkinan peluang tembus dapat terjadi kepada Pemilu berikutnya. Beberapa partai baru yang cukup memperoleh respon positif seperti Partai Gelora, PSI dan Partai Ummat, dan cukup berpeluang untuk mengalami kenaikan pada Pemilu berikutnya jika konsisten menjaga konstituen.

Kecenderungan partai yang bercorak ideologis akan terus menjadi bagian dari dinamika partai di Indonesia.

Dalam sejarah, beberapa partai lahir dari Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) baik yang berlatar belakang agama maupun non-agama. Dalam praktiknya partai-partai tersebut bertahan hingga sekarang. Sementara partai yang lahir bukan dari Ormas atau tidak memiliki ikatan kuat dengan Ormas, tidak mudah untuk menjaga kejegan suara di tengah ketatnya persaingan dan kenaikan ambang batas parlemen. Kasus PPP yang gagal masuk Parlemen di tahun 2024 menggambarkan bahwa prioritas, pengalaman dan banyaknya tokoh-tokoh nasional bukan jaminan dapat menembus ambang batas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

BELAJAR DARI SAUDI ARABIA: MENELUSURI MOTIF PERGESERAN IDEOLOGI: ANTARA PILIHAN PRAGMATIS ATAU KEBUTUHAN

Arab Saudi merupakan negara dengan sistem pemerintahan monarki. Dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam aspek penegakan hukum, Arab Saudi berpegang teguh pada syaria Islam yang telah digariskan dalam ajaran Wahabisme Islam yang hanya menjadikan teks Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum. Islam (Wahabisme Islam) yang merupakan Ideologi Arab Saudi, semacam negara yang menganut pemerintahan kerajaan Arab Saudi sehingga memengaruhi kebijakan, baik dalam aspek politik, ekonomi maupun aspek keagamaan.²

Wahabisme Islam merupakan ideologi Islam Arab Saudi bahkan sebelum menjadi sebuah negara seperti sekarang ini, tetapi memasuki fase kekuasaan di wilayah Najd (Jazirah Arab bagian utara), dimana Raja Saud sudah membangun koalisi dengan Muhammad bin Abdul Wahhab³ Keduanya sama-sama berkepentingan, perebutan kekuasaan bagi Raja Saud dan penyebaran hegemoni Wahabisme bagi Muhammad ibn Abdul Wahhab karena bagi al-Wahhab, agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Tanpa kekuasaan negara, agama adalah dalam bahaya; begitupun negara tanpa agama, akan menjadi kekuasaan tirani.⁴

² Zaky Ismail, Wulandari Septiana Dewi, Dosen Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya

³ M. Imdadun Rahmat, "Reformasi Keagamaan Arab Saudi dan Wahabisme di Indonesia", Opini NU Online, 29 November 2017, diakses pada 22 April 2021, <http://www.nu.or.id/post/read/83753/reformasi-keagamaan-arab-saudi-dan-wahabisme-di-indonesia>.

⁴ Renée van Diemen, "Politics and Religion in Saudi Arabia", Undergraduate Study, Loughborough University, 2012, 2, diakses pada 22 April 2021,

Wahabisme kemudian menjadi paham keagamaan resmi di Saudi Arabia. Bahkan ada proses importasi paham keagamaan ini yang sangat massif ke berbagai belahan dunia lainnya dengan motif ideologi, di samping tentu saja motif lain seperti ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan⁵. Dalam kenyataannya, Wahabisme muncul menjadi ajaran yang konservatif dan tak segan menafikan kelompok Islam lainnya.⁶

Begitulah Wahabi dan Arab Saudi muncul sebagai bukti kuat berkelindannya ideologi keagamaan dan politik dan satu institusi negara Wahabi yang dikenal sangat konservatif, dan menjadi representasi sekte Islam paling puritan⁷. Bahkan mengutip John O. Voll, Hasan menyimpulkan bahwa Wahhabisme merupakan prototipe fundamentalisme yang kaku dalam pengalaman Islam modern⁸. Wahabisme diadopsikan sebagai "agama" nasional dan unsur *de jure* menjadi agen negara yang selalu siap memenuhi tujuan dan dukungan publik bagi keputusan pemerintah, termasuk dalam masalah yang memicu kontroversi.

Namun seiring perkembangan waktu terjadi pergeseran pendulum yang cukup signifikan terkait ideologi dalam beberapa tahun belakangan. Kebijakan-kebijakan negara yang cukup terbuka terkait hak-hak perempuan di ruang publik, dan lain sebagainya membuktikan terdapat perubahan

<http://www.lboro.ac.uk/departments/phir/undergraduate/student-work/politics-and-religion/>.

⁵ Ali Muhtarom, *Ideologi dan Lembaga Pendidikan Islam Transnasional di Indonesia*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 39.

⁶ *Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME)*, Saudi Arabia and Wahhabism, *Factsheet Series No. 201*, created: August 2016, diakses pada 22 April 2021, http://www.cjpme.org/fs_201.

⁷ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES-KITLV, 2008), 33.

⁸ Jhon O. Voll, *Islam: Continuity and Change in the Modern World*, Cetakan Ke-2 (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1994), 53-56 dalam Hasan, *Ibid*.

⁹ *Ibid*, 41

orientasi ke arah yang lebih moderat. Pergeseran arah kebijakan Arab Saudi juga terjadi dalam penanggulangan terorisme dan ekstremisme. Adel Al-Jubeir, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, dalam pidatonya menyampaikan bahwa Arab Saudi telah memecat ribuan imam masjid yang dianggap telah mengupayakan penyebaran paham ekstremis. Bahkan menurut laporan *Al Arabiya*, pemecatan ulama yang dicurigai mendakwahkan ajaran ekstrimis mencapai angka kisaran 3.500 orang sejak pemerintah melakukan kebijakan pada tahun 2003.¹⁰ Demikian juga reformasi kebijakan di bidang pendidikan Islam dan penanggulangan penyebaran terorisme melalui internet dan media online dan sebagainya.

Dalam kebijakan ekonomi, Arab Saudi juga akan membangun kota baru yang didisipkasi sebagai kota wisata internet, sehingga menjadi sumber pendapatan baru Arab Saudi dan melepaskan ketergantungan pada minyak bumi. Untuk membiayai proyek ini, Muhammad bin Salman berencana menjual saham perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco. Dengan penjualan saham tersebut, perusahaan minyak terbesar di dunia yang sebelumnya tertutup akan dikelola secara terbuka dan transparan.

Pembaharuan kebijakan demi kebijakan, utamanya dalam sektor sosial, politik dan ekonomi, terlihat lebih longgar dibandingkan kultur dan karakteristik yang sebelumnya ditunjukkan Arab Saudi dimana negara tersebut terkesan konservatif bahkan eksklusif.¹¹ Munculnya Pangeran Muhammad bin Salman menjadi faktor penting

¹⁰ *Report: 3,500 Saudi imams dismissed to 'curb extremism'*, *Al Arabiya*, 21 Juli 2013, diakses pada 23 April 2021, <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/07/21/Report-3-500-Saudi-imams-dismissed-to-curb-extremism-.html>.

¹¹ Abdullah Alrebh, "Wahabism and Power in Saudi Arabia: a Practical Test of Weberian Theory", Thesis of Michigan State University, 2011, 1.

perubahan tersebut. Ia percaya bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi jika ada reformasi sosial. Bahkan MBS dalam suatu kesempatan pernah berjanji mengembalikan Saudi ke jalur Islam Moderat dan meminta dukungan global untuk mewujudkan masyarakat Saudi yang lebih terbuka.¹² Sehingga melalui reformasi di dalam aspek sosial masyarakat Arab Saudi dapat memberikan pengaruh signifikan dan menguntungkan untuk perubahan secara radikal di bidang ekonomi.

Menurut Masdar Hilmy, ketertarikan Pangeran Muhammad bin Salman untuk kembali menerapkan Islam Moderat di Arab Saudi menjadi semacam “oase” di tengah krisis kemanusiaan akibat kekacauan peradilan Timur Tengah serta gelombang islamophobia di beberapa negara di Eropa yang memunculkan begitu banyak para pendulum peradaban yang sedang bergerak ke kanan”.¹³

Gelombang reformasi kebijakan Arab Saudi telah menarik perhatian ke seluruh dunia. Banyak media internasional yang menjadikan hal tersebut sebagai *headline* berita. Begitu pula dengan respon negara-negara di dunia, beberapa di antara mereka menyambut positif rencana Arab Saudi untuk lebih membuka diri secara global. Akan tetapi, tak sedikit pula yang menyangsikan sikap Arab Saudi hari ini sebagai upaya untuk mewujudkan kepentingan ekonomi politik semata. Terutama jika dikaitkan dengan ambisi Arab Saudi untuk melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap sumber daya minyak dan menjadikan sektor ekonomi non-migas sebagai alternatif penunjang kebutuhan Arab Saudi di masa yang akan datang.

¹² Akhmad Muawal Hasan, *Membaca Arah Reformasi Sosial di Arab Saudi*, Tirto, 2 November 2017, diakses pada 23 April 2018, <https://tirto.id/membaca-arrah-reformasi-sosial-di-arab-saudi-czos>.

¹³ Masdar Hilmy, *Menggeser Pendulum Peradaban ke Tengah*, Opini Jawa Pos, edisi 22 November 2017, 4.

Argumentasi demikian cukup benar, mengingat Arab Saudi sangat bergantung pada hasil minyak bumi sebagai sumber pemasukan terbesar negara. Bahkan ketergantungan tersebut terjadi sejak sumber minyak ditemukan pada 3 Maret 1938.¹⁴ Hal itu diperparah dengan defisit yang cukup parah diakibatkan anjloknya harga minyak dunia belakangan ini. Sektor yang menyumbang 70% pendapatan Arab Saudi ini turun harga sampai pada kisaran US\$40 per barel. Padahal di awal 2014 harga minyak masih US\$100 per barel.¹⁵ Ketergantungan itulah yang menjadi perhatian Pangeran Muhammad bin Salman dalam mengantisipasi *kolaps*-nya Arab Saudi jika pada saat persediaan minyak menjadi semakin menipis, mengingat kebutuhan ekonomi Arab Saudi terus meningkat.

A. Peran Ideologi Wahabi Dalam Berdirinya Kerajaan Arab Saudi

Wahabi adalah paham keagamaan yang berpengaruh di Saudi Arabia. Pendirinya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Banyaknya praktek bid'ah, khurafat, dan takhayul menjadikan Abdul Wahhab sangat mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk syirik yang merupakan dosa terbesar dalam Islam. Akidah dan praktik seperti itu mengancam aqidah dan ketauhidan umat Islam.¹⁶ Muhammad bin Abdul Wahhab melihat di beberapa negara Islam yang dikunjunginya, kehidupan Islam telah lenyap karena telah meninggalkan kebiasaan yang bernafaskan Islami, dan kehidupan umat Islam mengalami

¹⁴ Sita Hidriyah, "Reformasi Ekonomi Arab Saudi", Majalah Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016, 6.

¹⁵ Ibid., 6.

¹⁶ John L Esposito, *Islam Warna-Warni Ragam Ekspresi Menuju "jalan lurus"*, Penerjemah Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 147.

kemunduran yang merata.¹⁷ Di sisi lain, ia juga mengecam para ulama yang telah lama membiarkan praktik-praktik semacam itu. Untuk itu, ia juga menyuruh umat Islam agar menyelaraskan pikiran dan hati mereka dengan al-Qur'an dan hadis dan bukan kepada penafsiran-penafsiran yang salah.¹⁸ Kondisi umat yang telah rusak tauhidnya itu yang mendorong Muhammad bin Abdul Wahhab untuk memperbaikinya melalui pemikiran dan ajaran-ajarannya. Muhammad bin Abdul Wahhab mempunyai konsep mengubah praktik-praktik keagamaan yang masuk dalam ajaran Islam seperti *bid'ah*, *khurafat*, dan takhayul. Dengan demikian ia mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang murni.¹⁹ Muhammad bin Abdul Wahhab dalam gerakannya telah memusatkan dirinya kepada masalah keagamaan dan ia mengikuti paham mazhab Hanbali dan pemikirannya dipengaruhi oleh tokoh Ibnu Taimiyah,²⁰ seperti yang dinyatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam *Ijtihad Ibnu Taimiyah* "walaupun dipengaruhi oleh pikiran-pikiran reformatif Ibnu Taimiyah, gerakan Wahabi tidak sepenuhnya merupakan duplikat pikiran-pikiran Ibnu Taimiyah".²¹

Timbulnya gerakan ini juga tidak dapat dilepaskan dari keadaan politik, perilaku keagamaan, dan sosial ekonomi umat Islam. Secara politik, umat Islam di seluruh kawasan kekuasaan Turki Utsmani sedang berada dalam

¹⁷ Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam*. Penerjemah Muljadi Djojomartono (Jakarta: T.p, 1966), 30.

¹⁸ Edward Mortimer, *The Politics of Islam*. Terjemahan oleh Enna Hadi & Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1984), 51.

¹⁹ George Antonius, *The Arabs Awakening* (New York: Gordon Press, 1939), 22.

²⁰ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah* (Jakarta: INIS, 1991), 34.

²¹ Mansur Mangasing, "Muhammad Ibn Abd Wahab dan Gerakan Wahabi". *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No 3 Desember 2008. <http://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/181>, diakses Mei 2021.

keadaan yang lemah. Turki Utsmani yang menjadi kekuasaan tunggal Islam pada saat itu sedang mengalami kemunduran dalam segala bidang. Banyak daerah kekuasaannya yang melepaskan diri, terutama daerah-daerah di bagian daratan Eropa. Kelemahan ini juga menyebabkan kekacauan politik di daerah-daerah timur (Arab, Persia, dll). Keadaan tersebut menyebabkan timbulnya emirat-emirat²² kecil yang berusaha menguasai daerah tertentu.

Di samping kelemahan politik, faktor keagamaan umat di masa itu merupakan faktor yang paling mendorong munculnya gerakan-gerakan. Pada umumnya, terutama di Jazirah Arab, terjadi kesalahan dalam pemahaman al-Qur'an. Sifat-sifat dan kebiasaan pada zaman klasik yang sangat religius malah pada akhirnya menimbulkan sikap dan kebiasaan yang cenderung ke arah bid'ah, khurafat, dan bid'ah.²³ Kondisi keagamaan yang demikian di Jazirah Arab, maka lahir gerakan Wahabi sebagai paham keagamaan yang berusaha memperbaiki keagamaan dari segala pemahaman dan praktik yang sudah menyimpang dari tuntunan yang sebenarnya.

Masyarakat Arab mempunyai sifat dwitunggal isme, yaitu paduan antara negara dan agama. Dwitunggal Isme ini lebih nyata lagi di Saudi Arabia.²⁵ Sejarah pembentukan kerajaan Saudi telah menunjukkan dan mengungkapkan beberapa fakta. Pada awal sejarah dimulainya upaya pembentukan kerajaan Saudi terdapat dua aspek yang saling bekerjasama dalam mencapai

²² Emirat adalah pemerintahan (negeri, negara) yang dikepalai oleh seorang emir. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia "Emirat" dalam <https://kbbi.web.id/emirat>, diakses 29 April 2021.

²³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 156.

²⁴ Ibid

²⁵ Nehed Algadri, *Tentang Jang Besar* (Jakarta: Pusaka, 1966), h. 74.

tujuan yang sama. Aspek agama dan aspek politik, yang mana Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil peran sebagai pelopor dari gerakan Wahabi dan Muhammad bin Saud mengambil peran sebagai seorang pemimpin daerah. Dua aspek tersebut saling membutuhkan satu sama lain, Abdul Wahhab membutuhkan Ibnu Saud untuk membela dakwah yang disebarkan, dan Ibnu Saud membutuhkan dakwah Abdul Wahhab untuk mempersatukan Jazirah Arab dan menjadi penggerak Jazirah Arab.

Kerjasama yang dilakukan oleh kedua aspek ini bukanlah sekedar kerjasama biasa, karena dalam kerjasama pasti terdapat perjanjian-perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak. Kesepakatan tersebut meliputi tentang peran masing-masing aspek. Gerakan Wahabi yang dipimpin oleh Abdul Wahhab merupakan urusan agama dan keluarga Saudi melalui urusan politik. Kedua aspek berbeda namun saling bersinergi yang memberikan perlindungan dan dukungan serta bertolak belakang namun tidak menjaukan kedua aspek ini pecah.²⁶

Menurut Muhammad Al-Bahiy dalam bukunya *Pemikiran Islam*, Kerajaan Saudi saat kekuasaannya semakin meluas dan pengaruhnya semakin kuat atas dunia Islam, mereka melakukan pengembangaran gerakan Wahabi. Jika tiba saatnya musim haji, dimanfaatkan untuk menerangkan pokok-pokok ajaran Wahabi di Makkah, dan menyebarluaskan ajarannya.²⁷ Bisa dikatakan bahwa pokok ajaran Wahabi tidak akan meluas di Jazirah Arab bahkan di dunia, jika pada akhir abad ke-18 keluarga Saud tidak menjalin kerjasama dengan gerakan Wahabi dan

²⁶ Am Waskito, *Bersikap Adil kepada Wahabi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 189.

²⁷ Muhammad Al-Bahiy, *Pemikiran Islam* (Bandung: Risalah Bandung, 1985), 139.

berperang melawan kekuasaan Dinasti Turki Usmani di Jazirah Arab.

Masyarakat Arab terkenal dengan kesukuannya yang sangat kental, setiap orang saling membanggakan sukunya masing-masing. Setiap suku di Arab mempunyai pemimpin masing-masing. Suku-suku di Arab menjadi tolak ukur kelas mereka di masyarakat. Jika Muhammad bin Saud dengan membawa nama suku Saud tidak bekerjasama dengan faham keagamaan Wahabi, mungkin tidak akan bisa mendirikan Kerajaan Saudi Arabia. Karena masyarakat Arab tidak bisa disatukan dengan agama dan peranan tersebut diambil oleh gerakan Wahabi.

Abdul Wahhab dan gerakan Wahabi mempunyai peran untuk memperbaiki masyarakat dari segi keagamaan dan moral. Pada tahun 1140 M, Abdul Wahhab mulai aktif menyebabkan penerapan Wahabi sendiri meratakan makam Husayn, sehingga menimbulkan kecaman dan kemarahan oleh masyarakat yang menganut paham Syi'ah. Mereka pun menunduk di Hijaz dan merebut dua kota suci, Makkah dan Madinah. Di Madinah, mereka menghancurkan kubah-kubah yang ada di atas kuburan, hiasan-hiasan yang ada di makam Nabi Muhammad SAW. Di Makkah, mereka merusak kiswah Ka'bah yang terbuat dari sutera. Mereka juga menghancurkan beberapa makam dan berhala yang dihormati dan memerangi semua orang yang memuja berhala.²⁹ Hal tersebut tidak dapat terlaksana jika Abdul Wahhab tidak menjalin kerjasama dengan Muhammad bin Saud sebagai pemimpin kabilah pada masa itu, karena setiap aktifitas dakwah dan keagamaan yang dilakukan gerakan Wahabi mendapat pertentangan keras dari pihak Turki Utsmani.

²⁸ Am Waskito, *Bersikap Adil*, 195

²⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 158.

Maka, gerakan Wahabi sangat membutuhkan perlindungan dan dukungan dari seseorang yang mempunyai kuasa dan pengaruh secara politik.

Peranan gerakan Wahabi juga sangat terlihat pada tahun 1912, pada saat itu Abdul Aziz mendirikan satu organisasi militer yang bernama "Ikhwan", mereka terdiri dari orang-orang fanatik Wahabi dan suku-suku Arab termasuk Baduy. Mereka dimukimkan di dalam perkampungan-perkampungan pertanian. Pada tahun tersebut Abdul Aziz sudah dapat mengumpulkan kurang lebih 75.000 orang dari berbagai kabilah, seperti Kabilah Mutair, Utair, Harb dan Ajman. Abdul Aziz sangat mengandalkan Ikhwan untuk menjaga garda terdepan dalam melawan kekhaifan Turki Ottoman dan al-Rasyid. Sejarah Inggris membuktikan bahwa kemurnian ideologi Wahabi yang disatukan dengan politik sebuah negara dapat menimbulkan perubahan, hal tersebut juga merupakan kombinasi gabungan antara agama dan politik merubah mesin politik yang kuat.³¹

Namun dalam sejarah Ikhwan, sempat terjadi pertentangan antara kebijakan politik Abdul Aziz dengan prinsip paham Wahabi. Gerakan dakwah yang dilakukan oleh Wahabi tidak selalu sepaham dengan kebijakan politik Kerajaan Saudi. Ikhwan yang dibentuk oleh Abdul Aziz, dalam upaya mendirikan kerajaan Saudi ketiga, tidak setuju dengan kebijakan Abdul Aziz untuk menjalin hubungan dengan Inggris. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan prinsip Wahabi. Pada awalnya Abdul Aziz dan Ikhwan menjadi satu padu dalam satu barisan untuk mendirikan Kerajaan Saudi Arabia, namun ketika Abdul

³⁰ John L. Esposito, *Identitas Islam pada Perubahan Sosial-Politik*. Terjemah: A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 193.

³¹ *Ibid*, 195.

Aziz menjalin kerjasama dengan pihak Barat yaitu Inggris, Ikhwan langsung menjadi pihak yang menentang kebijakan politik Abdul Aziz. Hal tersebut mengungkapkan bahwa aspek agama dan aspek politik masing-masing mempunyai peranan yang berbeda satu sama lain dan terkadang berseberangan.

B. Pergeseran Ideologi Arab Saudi Dari Wahabi Ke Moderat

Meskipun dalam sisi paham keagamaan Wahabi yang dianut dan sangat radikal pada sisi lain peranan Arab Saudi dalam perjuangan Islam sedunia mempunyai arti yang tidak kecil. Banyak negeri-negeri Islam ataupun organisasi-organisasi, badan-yayasan, lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan diseluruh negeri melihat kesungguhannya dengan membentangkan bendera Islam. Indonesia sendiri sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, banyak mendagalkan produk-produk Arab Saudi, di bawah kepemimpinan Nabi Salman sekarang ini nampaknya memberi warna baru pemerintahannya. Beliau adalah sosok pemimpin yang sering turun ke jalan untuk melihat kondisi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam kasus jatuhnya alat berat crane saat kaum muslimin dalam melakukan ibadah haji tahun 2015

Salman bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Provinsi Riyadh pada tanggal 4 Februari 1963. Masa jabatannya berlangsung selama empat puluh delapan tahun, dari tahun 1963 sampai 2011. Sebagai gubernur, ia memberikan kontribusi untuk pengembangan Riyadh dari kota menengah ke kota besar metropolitan. Ia meningkatkan pariwisata, proyek-proyek penting, dan investasi asing di dalam negaranya. Dalam waktu 48 tahun, Pangeran Salman berhasil mengubah kota padang

pasir, Riyadh, yang terisolasi menjadi kota yang dipadati gedung-gedung pencakar langit, universitas, dan jaringan makanan cepat saji.

Pangeran Salman berjuang memenuhi tuntutan ketersediaan rumah yang terjangkau dan fasilitas transportasi publik yang layak bagi empat juta penduduk kota itu. Jabatan Gubernur Riyadh ini membuat Salman sangat dikenal di dunia internasional, terutama juga karena kota ini kerap dikunjungi utusan internasional dan tamu-tamu VIP. Salman dengan cakap berhasil mengamankan investasi asing bagai kota Arab Saudi itu. Ia juga membuka hubungan politik dan ekonomi dengan Barat.

Ketika Pangeran Salman menjabat Gubernur Riyadh, King Saud University di Riyadh didirikan. Sekarang universitas ini merupakan salah satu yang terbaik di Arab Saudi dan nilai diperhitungkan di dunia pendidikan tinggi internasional. Di saat ketika akan tegas yang Pangeran Salman putuskan Salman pada tahun 2011 ia mendeportasi pengemis asing dari Arab Saudi dan mengadakan program rehabilitasi di departemen sosial bagi pengemis asli Arab Saudi. Pengemis-pengemis tersebut sengaja memanfaatkan kemurahan hati penduduk Arab Saudi.

Pada 5 November 2011, Pangeran Salman diangkat menjadi menteri pertahanan menggantikan saudara kandungnya yang menjadi putra mahkota, Pangeran Sultan bin Abdul Aziz. Pada hari yang sama, Pangeran Salman juga terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan Nasional (NSC). Alasan pengangkatannya sebagai menteri pertahanan karena memang ia memiliki kompetensi yang luar biasa. *Pertama*, sifatnya yang mengedepankan perdamaian dan diplomasi. Hal ini juga diketahui bahwa

ia aktif berurusan dengan masalah internal keluarga kerajaan dan menengahi perselisihan di antara mereka. Kepandaiaannya dalam diplomasi juga membuat ia disegani di kalangan suku-suku Arab Saudi. Menurut surat kabar Asharq al-Awsat sebagaimana dikutip Associated Press, Salman dikenal memiliki hubungan yang sangat luas dengan suku-suku di Arab Saudi dan pengaruhnya semakin memperluas jaringan bisnis keluarga kerajaan. Kedua, Pangeran Salman adalah putra generasi tengah dalam keluarga kerajaan. Oleh karena itu, ia bisa mengengam hubungan dengan kedua generasi dalam masalah sosial dan lainnya. Setelah jalan diplomasi dianggap buntu, Pangeran Salman juga tidak segan menantang kekuatan militer. Contohnya ketika Arab Saudi terlibat tentara militer dalam melakukan serangan udara terhadap Libia pada ahir 2014.

Pada 18 Juli 2012, Pangeran Salman diangkat sebagai Putra Mahkota Arab Saudi. Hal ini lama setelah wafatnya saudaranya, Putra Mahkota Nayef bin Abdul Aziz. Dan sekaligus diadakan sebagai wakil perdana menteri. Pecalonannya sebagai putra mahkota dan wakil perdana menteri dianggap sebagai sinyal bahwa reformasi Raja Abdullah akan terus berkembang. Orang-orang pun menilai bahwa Pangeran Salman mengambil pendekatan yang lebih diplomatik terhadap tokoh oposisi, berbeda dengan bangsawan Arab Saudi lainnya. Mereka juga berpendapat bahwa Pangeran Salman sama seperti Raja Abdullah, sebagian besar fokus pembangunan pada peningkatan ekonomi bukan pada perubahan politik. Pada tanggal 27 Agustus 2012, dewan kerajaan mengumumkan Pangeran Salman bertanggung jawab atas urusan negara karena Raja Abdullah mulai sakit-sakitan. Untuk mendekatkan hubungannya dengan rakyat, Pangeran

Salman meluncurkan akun twitter @KingSalman pada tanggal 23 Februari 2013.

Berbeda dengan raja-raja lainnya, Raja Arab Saudi justru memiliki gelar *khadim* yang secara *harfiah* diterjemahkan sebagai pembantu. Raja-raja Arab Saudi adalah pembantu atau pelayan dua kota suci, Mekah dan Madinah. Raja pertama yang mengenakan gelar ini adalah Raja Fahd bin Abdul Aziz *rahimahullah* -kakak tertua Pangeran Salman pada tahun 1986. Setelah Raja Abdullah bin Abdul Aziz wafat pada dini hari tanggal 23 Januari 2015, dewan *shura* menunjuk Pangeran Salman sebagai raja baru Arab Saudi menggantikan ayahnya tirinya tersebut.

Pergeseran ideologi di Arab Saudi mulai terasa ketika Pangeran Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz al Saud, resmi menunjuk putranya, Mohammed bin Salman, sebagai penerus tahta pada 11 Juni 2017. Keputusan tersebut diambil setelah sang pangeran mengeluarkan dekret soal penghapusan jabatan. Sebelumnya, Pangeran Mohammed diarsyadkan raja Salman menjadi salah satu penasihat pribadi untuk urusan politik dan ekonomi. Ia juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Dilansir dari BBC Putera Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, mengatakan kembali ke 'Islam Moderat' merupakan kunci dalam rencananya untuk memodernisir negara kerajaan itu. Kepada para wartawan dia mengatakan 70% penduduk Arab Saudi berusia di bawah 30 tahun dan mereka ingin 'kehidupan dengan agama yang diwujudkan menjadi toleransi'.

Pangeran Mohammed juga bertekad untuk 'menghapuskan sisa-sisa ekstrimisme dengan segera'. Dia menyampaikan hal tersebut setelah mengumumkan investasi sebesar US\$500 miliar atau sekitar Rp6.783 triliun untuk membangun satu kota dan kawasan bisnis baru.

Disebut sebagai NEOM, lokasinya yang mencapai seluas 26.500km² terletak di kawasan pesisir Laut Merah di sebelah barat laut Arab Saudi, dekat Mesir dan Yordania.

Dikenal sebagai Vision 2030, termasuk di dalamnya adalah usulan untuk swastanisasi sebagian dari perusahaan minyak negara Aramco lewat penjualan sahamnya dan juga dengan pembentukan dana investasi negara terbesar di dunia.

Pemerintah juga ingin menempuh investasi sektor hiburan dan konser musik seperti digelar sementara bioskop umum juga akan dibuka, yang diumumkan Mohammed yang berusia 30 tahun menjelaskan rencana reformasinya dalam sebuah konferensi ekonomi di Riyadh, yang dihadiri oleh para investor asing dan para diplomat. Pangeran Mohammed bin Salman mengatakan beliau ingin Arab Saudi menjadi negara yang sepenuhnya, sebuah negara Islam modern yang terbuka untuk semua agama, tradisi, dan orang-orang dari seluruh dunia, ingin hidup yang normal. Sebuah kenid yang dengan agama yang diwujudkan menjadi toleransi, menjadi tradisi keramahan.

Pangeran menegaskan Arab Saudi 'tidak seperti ini sebelum 1979, ketika terjadi revolusi Islam di Iran dan para militan meruduki Masjidil Haram di Mekkah. Setelah peristiwa-peristiwa tersebut, hiburan umum dilarang di Arab Saudi dan para ulama mendapat lebih banyak wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat umum.

Sejak ditunjuk sebagai pewaris tahta Arab Saudi, sejumlah perubahan mendasar terjadi di sana. Salah satunya adalah diizinkan perempuan untuk menyetir. Perempuan di Arab Saudi pun disebut-sebut mulai mendapat 'tempat'. Selain itu, ada beberapa hal lain yang dulu dianggap tabu namun kini telah dihalalkan. Seperti dirangkum dari sejumlah sumber, berikut 7 hal yang

dahulunya dilarang namun kini 'dihalalkan'. *Pertama*, Perempuan Diizinkan Mengemudi. Arab Saudi merupakan satu-satunya negara yang melarang perempuan menyetir mobil. Dikutip dari BBC.com Pada 26 September 2018, untuk pertama kalinya kaum hawa di Arab Saudi akan diizinkan menyetir. Pengumuman tersebut menandai perluasan hak perempuan secara signifikan di satu-satunya negara yang melarang mereka berada di balik kemudi. Perubahan ini adalah "langkah pertama dalam banyak hal yang diizinkan kaum hawa di Saudi".³²

Kedua, Perempuan Arab Saudi Menduduki Posisi di Pemerintahan. Pada akhir September 2017, untuk pertama kalinya seorang perempuan ditunjuk untuk menempati posisi senior di pemerintahan Arab Saudi. Dilansir *Gulf Digital* dan *perempuan.com* nama perempuan itu adalah Abdullah Al-Ghamdi. Ia menempati posisi sebagai Asisten Ketua Teknologi Informasi di Kota Al-Jubail, Provinsi Timur. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja, Khalid bin Mohammed Al-Jubeir, adalah orang yang mengeluarkan dekrit tersebut. Al-Ghamdi akan menjadi satu-satunya perempuan yang bekerja di pemerintahan Al-Khobar.

Dikutip dari *The Straits Times*, dalam sebuah pernyataan Pusat Komunikasi Internasional di Kementerian Kebudayaan dan Informasi menyebut, diberikannya posisi tersebut merupakan bagian dari rencana untuk mendongkrak jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan. Selain itu, Arab Saudi bercita-cita untuk meningkatkan proporsi perempuan di pasar tenaga kerja, yakni dari 22 persen menjadi 30 persen, pada 2030. Al-Khobar mendirikan sektor khusus perempuan untuk

³² <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44191171> di akses 20 April 2021.

terus mengikuti perkembangan peran perempuan Arab Saudi untuk terlibat dalam aktivitas komersial.³³

Ketiga, Perempuan Boleh Masuk Stadion. Arab Saudi memperbolehkan perempuan untuk memasuki stadion nasional olahraga King Fahd untuk pertama kalinya. Peristiwa pada September 2017 itu menandakan reformasi Arab Saudi sekaligus merayakan 87 tahun ulang tahun negara itu dengan sejumlah konser musik dan penampilan lainnya. Acara itu juga pertama kalinya memperbolehkan perempuan untuk menjadi penonton di Stadion Riyadh. Kaum wanita diperbolehkan menonton konser di Jeddah yang menampilkan 11 artis Saudi. Meski memperbolehkan masuk ke stadion sepak bola, perempuan tidak boleh bercahup dengan penonton laki-laki. Kebijakan baru ini adalah bagian yang dikhususkan untuk perempuan di keluarga.

Keempat, Membuka Gym Khusus Perempuan. Pada Februari 2017, Arab Saudi membuka gym atau pusat kebugaran khusus perempuan di setiap lingkungan. Hal tersebut dinilai sebagai langkah kecil kerajaan itu menuju kemerdekaan perempuan. Gym tersebut bertujuan untuk memotivasi perempuan untuk menjadi lebih sehat. Walaupun demikian, Saudi belum memberikan izin bagi perempuan untuk mengikuti olahraga kompetitif, seperti sepak bola, voli, basket, atau tenis.

Kelima, Perempuan boleh Menonton Pertandingan Sepak Bola. Pada pertengahan Januari 2018, untuk pertama kalinya Arab Saudi mengizinkan perempuan untuk menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung.

³³ <https://www.liputan6.com/global/read/3110599/pertama-kali-perempuan-arab-saudi-duduki-posisi-pemerintahan> di akses 20 April 2021.

Keenam, kegiatan yoga “halal” dilakukan. Kementerian Perdagangan dan Industri Arab Saudi telah 'menghalalkan' segala kegiatan terkait yoga pada akhir November 2017. Bahkan pihak kerajaan juga memberikan lisensi bagi mereka yang hendak berlatih dan mengajar olahraga senam gerak badan tersebut.³⁴ Orang pertama yang mendorong pengesahan ini adalah seorang wanita bernama Nouf Marwaai. Ia adalah instruktur yoga bersertifikasi pertama di Arab Saudi. Pendiri Yayasan Yoga Arab itu juga seorang muslim dan agama tidak bertentangan.

Ketuju... 'menghalalkan' Bioskop (Kino) setelah lebih dari 35 tahun dilarang. Pada pertengahan Desember 2018, Pemerintah Arab Saudi mengumumkan bioskop di negaranya segera dibuka kembali pada awal tahun 2018. Ini adalah pertama kalinya setelah lebih dari 35 tahun dilarang beroperasi seluruh bioskop di Arab Saudi bangkit kembali. *Blackpanther Tandai Kembalinya Bioskop di Saudi*, sebuah judul pada pemberitaan Jawa Pos edisi 20 April 2018. Dalam berita tersebut, menjelaskan bahwa kini Arab Saudi kembali mengambil kebijakan untuk mengikis kesan ultra-konservatif dan kuno dengan membuka studio untuk pemutaran film layar lebar.³⁵

Mereka menambahkan, pemerintah segera mengurus perizinan bioskop. Menghidupkan kembali dunia layar lebar menggambarkan adanya pergeseran paradigma Arab Saudi. Pangeran Mohammed bin Salman mempromosikan hiburan sebagai bagian dari perubahan sudut pandang yang diimplementasikan.

³⁴ <https://www.idntimes.com/news/world/komang-triyani/yoga-halal-di-arab-saudi-c1c2/full> diakses 20 April 2021.

³⁵ *Harian Jawa Pos, Blackpanther Tandai Kembalinya Bioskop di Saudi*, Edisi 20 April 2018, 1 dan 19.

C. Motif Dan Kepentingan Pergeseran Ideologi

1. Motif dan Kepentingan Politik

Arab Saudi adalah sebuah negara yang masih menganut sistem kerajaan di kawasan Timur Tengah. Kerajaan Arab Saudi berasal dari Dinasti Saud yang dirintis sejak abad ke-18 di daerah Najd yang terletak di bagian tengah Semenanjung Arab. Sistem pemerintahan negara-negara di jazirah Arab yang pada saat itu tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa wilayah ini sampai kira-kira satu abad sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan Kekhalifahan Umayyad yang menganut sistem pemerintahan yang berbentuk kekhalifahan. Terhitung pada awal abad ke-75 hamsel seluruh wilayah Arab berada di bawah kekuasaan Umayyad.

Arab Saudi adalah sebuah negara yang sangat religius dan politiknya sangat konservatif. Meskipun demikian, beberapa kerajaan Saudi tetap mendapat kritikan dari masyarakat internasional. Sasaran kritik yang utama adalah hubungan mereka dengan Amerika Serikat, dan gaya hidup kerajaan. Keluarga kerajaan Saudi pernah dihina sebagai keluarga korup dan tidak lnelami oleh orang-orang Iran sejak revolusi tahun 1979, dan ini menimbulkan konflik dalam pelaksanaan haji orang-orang Iran di Mekah.³⁷

Putra Mahkota Mohammed bin Salman dalam sebuah wawancara dengan The Guardian pada Oktober 2017, mengatakan bahwa dia berjanji untuk mengembalikan Arab Saudi ke "Islam moderat" dan meminta dukungan global untuk mengubah kerajaan Saudi

³⁶ Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 143

³⁷ Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*. (Yogyakarta: Qalam, 2004). 432.

yang berhaluan garis keras menjadi masyarakat terbuka yang memberdayakan warga dan memikat para investor dalam artian mereka tidak memperlakukan agama laksana monumen yang baku, tetapi memperlakukannya dalam kerangka iman yang dinamis dan aktif. Konsekuensinya, Islam moderat menghargai pencapaian-pencapaian sesama muslim di masa silam, untuk mereaktualisasikan konteks kekinian.³⁸

Mohammed bin Salman juga mengatakan bahwa Arab Saudi telah menjadi negara ultra-konservatif dalam 30 tahun terakhir, dan menuduhnya itu bukan hal yang normal. Dia menuduh bahwa lahirnya doktrin-doktrin baru dari ulama terhadap masyarakat adalah sebagai reaksi dari revolusi Iran. Menurut Mohammed bin Salman, raja-raja sebelumnya tidak tahu bagaimana menghandle-nya.

Setelah diangkat menjadi putra mahkota, Mohammed bin Salman meluncurkan program "perang melawan korupsi" dan menawan sebelas pangeran, empat menteri, serta puluhan mantan menteri dengan tuduhan korupsi. Mereka bukan hanya ditangkap, melainkan juga dibekukan aset kekayaannya, dicopot jabatannya, serta dipermalukan di depan umum. Hal ini berbeda dengan tradisi Dinasti Saud dimana meski sebagian pangeran tidak diberi posisi penting, kesejahteraan mereka dijamin. Tindakan keras Mohammed bin Salman memunculkan prediksi adanya upaya pembalasan dendam terhadap Mohammed bin Salman.³⁹

³⁸ Chafid Wahyudi, "Tipologi Islam Moderat Dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2011.

³⁹ S. Stenslie, "The End of Elite Unity and the Stability of Saudi Arabia", *The Washington Quarterly*, Spring, 2018, 65-79

Untuk saat ini, kampanye anti-korupsi Mohammed bin Salman cukup populer di kalangan warga Saudi, terutama kelas menengah ke bawah yang muak dengan para elit yang menyalahgunakan kekuasaan dan memperkaya diri sendiri. Mohammed bin Salman telah menggunakan kampanye anti-korupsi untuk menampilkan dirinya sebagai Robin Hood Arab yang mengambil dari orang kaya dan memberi kepada orang miskin. Beberapa petinggi kerajaan yang ditangkap telah memutar sejumlah besar uang kepada kas negara sebagai imbalan kebebasan mereka. Pangeran Mohammed bin Abdullah diizinkan dibebaskan setelah setuju membayar sebanyak 1 miliar US Dollar dan secara tidak resmi kiranya kas negara bertambah 50-100 miliar US Dolla⁴⁰

Sebagaimana dikemukakan Stepan (2018) bahwa pilar Kerajaan Arab Saudi adalah persatuan Dinasti Saud, kinerja pemerintah, dan keluarga, Mohammed bin Salman teringat kontrol produk dengan upaya menjalin persatuan. Mereka telah menyusun sebuah skenario sistematis yang menempatkan Mohammed bin Salman menjadi penguasa tunggal. Sistem kekuasaan tunggal seperti ini lebih mudah untuk dijatuhkan dalam sebuah revolusi.

2. Motif dan Kepentingan Ekonomi

Facchini mengilustrasikan bahwa jika seseorang akan mengubah dasar gerakan didasarkan pada logika pembiayaan. Misalnya, mereka memiliki pilihan apakah tetap menganut ideologi (opsi A) atau mengubahnya (opsi B). Pertimbangannya adalah pada

⁴⁰ Ibid

biaya (cost). Jika individu memilih opsi B, itu karena keuntungan yang terkait dengan pilihan dianggap lebih unggul dari opsi A. B dipilih karena memiliki peluang pembiayaan yang lebih rendah. Sehingga perubahan ideologi tergantung pada kemungkinan-kemungkinan ideologis dan peluang tingkat pembiayaan.⁴¹

Menyikapi konteks Arab Saudi, maka dipahami bahwa Arab Saudi merupakan negara kaya dari hasil minyak. Pada tahun 1938, perusahaan AS, Chevron, menemukan minyak di daerah gurun pasir Saudi, dan selama Perang Dunia II kebangsaan produksi minyak berkembang pesat. Namun, penampatan Saudi dari minyak yang terbesar baru terjadi pada tahun 1973-1974 ketika saat bersamaan dunia Barat sedang mengalami krisis energi akibat satu pemicu krisis adalah perlawanan Israel, dimana negara-negara Arab yang bergabung dalam *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC) melakukan embargo minyak terhadap AS dan beberapa negara Barat lainnya karena mendukung Israel. Akibatnya, harga minyak dunia meroket hingga mencapai empat kali lipat dari harga normal (www.history.state.gov). Dilihat dari sumber ladang minyak yang sudah ditemukan, Arab Saudi memiliki hampir seperlima dari cadangan minyak dunia.

Arab Saudi dapat dikatakan sebagai *rentier state* terbesar di dunia, yakni sebuah negara yang pendapatan nasionalnya sepenuhnya atau sebagian besarnya berasal dari sumber daya alam lokal. Pendapatan utama kerajaan berasal dari penjualan minyak dan investasi luar negeri (yang modalnya berasal dari penjualan minyak).

⁴¹ François Facchini, Political ideological shift: A theoretical approach, *Social Science Information*, Vol 55: 4, 2016, 7.

Hanya sebagian kecil saja pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi. Kerajaan menggunakan sebagian hasil minyak itu untuk menjamin kenyamanan materi warga negara dan sebagai imbalannya, warga diharuskan untuk menerima hak penguasa untuk memerintah. Sistem ini juga diistilahkan dengan *authoritarian bargain* (tawar menawar penguasa otoriter).⁴²

Namun dalam perjalanan waktu, tentu saja tidak semua berjalan mulus. Misalnya, di tahun 2014, Arab Saudi menanggung krisis akibat melonjaknya harga minyak dunia ke level 40 dollar/barel. Kemudian menjadi di bawah 30 dollar/barel pada tahun-tahun selanjutnya harga minyak dunia juga mengalami fluktuasi. Menggantungkan diri pada sumber daya alam yang terbatas disadari akan membuat banyak negara rentan terhadap krisis, atau dengan kata lain akan mengalami krisis stabilitas ekonomi jika tidak ditangani dengan baik.

Dalam *Saudi Vision 2030* pemikiran di atas menjadi dasar penting. Salah satu konten penting isinya adalah rancangan diversifikasi ekonomi guna melepaskan ketergantungan terhadap minyak. *Saudi Vision 2030* memiliki 3 pilar penting di dalamnya yaitu, *A Vibrant Society*, *Thriving Economy*, dan *An Ambition Nation*. *A Vibrant Society* atau masyarakat yang dinamis dimaksudkan disini adalah Arab Saudi ingin memperkuat sumber daya manusia yang dimiliki, hal ini didasarkan bahwa kekayaan suatu negara sesungguhnya tidak hanya terletak pada sumber daya alam, namun kekayaan yang sebenarnya dimiliki suatu negara terletak pada sumber daya manusia. Keberadaan Arab Saudi sebagai jantung dari

⁴² S. Stenslie, "The End of Elite Unity and the Stability of Saudi Arabia", *The Washington Quarterly*, Spring, 2018, 66

dunia Arab dan Islam juga mendorong pemerintah kerajaan untuk memperkuat masyarakat Arab Saudi untuk tetap berada pada prinsip-prinsip keIslaman yang menjadi identitas nasional mereka yang telah mengakar dan harus diperkuat.⁴³

Thriving Economy atau pengembangan ekonomi merupakan fokus dalam visi ini. Minyak dan gas merupakan pilar penting dalam perekonomian Arab Saudi, namun dalam hal ini Arab Saudi akan melakukan pengembangan perekonomian dalam jangka panjang yang berkelanjutan dengan melepaskan ketergantungan mereka terhadap minyak dan gas dan melakukan diversifikasi ekonomi. Perlunya mendiversifikasi perekonomian Arab Saudi guna mempertahankan investasi sebagai sumber tambahan yang berkelanjutan.⁴⁴

Pilar yang terakhir adalah reformasi nasional negara, merupakan upaya pemerintah untuk mengefektifkan seluruh jajarannya secara birokrasi. Kerajaan yang memiliki kejelasan terhadap transparansi dan akuntabilitas yang bernilai tinggi. Transparansi dan akuntabilitas dirasa sangat diperlukan dalam kontrol pemerintahan, terutama kontrol terhadap proyek-proyek yang berdampak signifikan dan tinggi terhadap perekonomian Arab Saudi. Adapun fokus utama dari visi Arab Saudi 2030 ini sesungguhnya berorientasi pada pengembangan perekonomian Arab Saudi.⁴⁴

D. Catatan

⁴³ B.A. Albassam, "Political Reform in Saudi Arabia: Necessity or Luxury?" *Middle East Studies Online Journal*, Vol. 3, No.6, 2011.

⁴⁴ Nevlita Sianturi, "Pengaruh Saudi Vision 2030 Dan Agenda Foreign Direct Investment(Fdi) Arab Saudi Di Indonesia", *Jurnal FISIP* Volume 4 NO. 2 Oktober 2017

Beberapa kesimpulan dari pembahasan di atas adalah, *pertama*, Pergeseran ideologi di Arab Saudi mulai terasa ketika Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz al Saud, resmi menunjuk putranya Mohammed bin Salman sebagai pewaris tahta pada 21 Juni 2017. Sebuah pilihan paling rasional yang diambil di tengah persoalan ekonomi politik global yang sangat dinamis.

Motif dari pergeseran ideologi tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari motif politik dan juga motif ekonomi. Secara politik tentu saja ini sangat penting untuk mendapatkan dukungan politik secara lebih massif baik dari internal maupun eksternal. Sedangkan motif ekonomi didasarkan pada faktor kesadaran bahwa tidak selamanya sumber daya alam yang merupakan penopang utama stabilitas ekonomi negara, sehingga perlu eksploitasi dan pemanfaatan sumber-sumber lain yang lebih rasional sehingga dikembangkannya dalam bentuk Saudi Vision 2030.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

BAB III

KELOMPOK ISLAM DALAM DISKURSUS IDEOLOGI INDONESIA

Perumusan Pancasila merupakan tahapan krusial dalam sejarah Indonesia yang penuh dengan kompleksitas. Pada masa itu terjadi pertarungan antara dua kekuatan utama, yaitu kubu Islam dan nasionalis. Walaupun kami kurang sepakat dengan pandangan tersebut, tetapi sebagai realitas sejarah hal itu memang diketahui. Tokoh Islam dan Nasionalis memiliki pandangan yang berbeda mengenai bentuk negara dan landasan ideologi yang semestinya diadopsi Negara Indonesia. Kubu Islam yang diwakili para pemimpinnya seperti Haji Agus Salim dan Mohammad Natsir serta Achmad Hanyal. Para nasionalis memperjuangkan agar Islam menjadi pilar dan tumpuan negara. Di sisi lain, para nasionalis yang di mandani Soekarno dan Mohammad Hatta dan M. Yamin menginginkan landasan ideologi yang lebih inklusif yang mencerminkan pluralitas masyarakat Indonesia. Perdebatan antara kedua kekuatan ini menjadi semakin tajam dalam proses perumusan Pancasila⁴⁵. Namun, perdebatan tersebut menemukan titik kulminasi setelah dibentuk tim 9 yang dipimpin Soekarno. Tim ini mampu menyelesaikan konflik tersebut dengan merumuskan nilai-nilai Pancasila yang mampu mencakup kepentingan semua pihak⁴⁶.

⁴⁵ Suciyani, *Diskursus Tokoh Islam Dalam Perumusan Pancasila Sebagai Ideologi Negara*, 2017, https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/27861/2/1420311069_BAB-I_IV-atau-v_daftar-pustaka.pdf.

⁴⁶ Dalam catatan sejarah BPUPKI Tim 9 dalam perdebatan mengenai dasar Negara, setelah semua utusan menyampaikan pandangan dan usulan, mereka mempertimbangkan aspek keragaman kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia secara sosiologis dan politis

Dalam perjuangan perumusan Pancasila, kubu Islam menekankan pentingnya menjadikan agama sebagai landasan utama negara. Mereka menganggap Islam sebagai identitas nasional yang dijunjung tinggi dalam menyusun dasar negara. Argumentasi yang mereka ajukan adalah bahwa Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga negara semestinya mencerminkan nilai-nilai Islam dalam konstitusi untuk mewakili aspirasi mayoritas. Contoh dari konteks ini adalah tuntutan dari kelompok Islam agar Syariat Islam dijadikan landasan hukum yang ada dalam pembentukan negara.⁴⁷

Sementara itu, kubu nasionalis mendorong untuk merumuskan Pancasila sebagai landasan ideologis yang inklusif dan dapat mengakomodasi keberagaman yang sudah lama hidup dan berkembang di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa dasar negara harus meneruskan semangat persatuan dan kesatuan yang telah membangun identitas nasional yang beragam. Contoh dari pandangan ini adalah upaya para nasionalis untuk melaksanakan berbagai aksi kebangsaan seperti gotong royong, adu daya bakmur, serta persatuan Indonesia dalam rumusan Pancasila.

Peran BPUPK dan Tim 9 yang dibentuk oleh BPUPI sebagai usaha untuk mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan Pancasila telah berhasil memadukan nilai-nilai agama dan kebangsaan, menghasilkan dasar ideologi yang kokoh, memungkinkan keberagaman agama, dan menjamin kebebasan beragama masyarakat Indonesia. Namun, hal itu dihasilkan setelah melalui proses persidangan yang panjang, akhirnya para utusan Islam dan Nasionalis mengesahkan Pancasila pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan

⁴⁷ Muhammad Ilham Gilang, "Dasar Negara Islam Atau Pancasila : Sikap Politik Partai Nahdlatul Ulama Dalam Majelis Konstituante," *Jurnal Candrasangkala Pendidikan Sejarah* 4, no. 1 (2018): 49, <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v4i1.3433>.

Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 dengan bunyi teks seperti yang kita kenal hingga saat ini. Proses tersebut tidak mudah, melewati diskursus panjang sebagaimana ditulis sejarawan Indonesia.

Setelah disahkan Pancasila kembali diuji dengan menghadapi berbagai tantangan, seperti gerakan separatis, persaingan politik, dan lainnya. Serta masalah ekonomi mengancam stabilitas dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya, pemimpin dan elit politik tetap mempertahankan Pancasila sebagai semangat kebangsaan, keadilan, dan keutuhan bangsa dalam menjaga stabilitas negara.

Dari penelusuran kesejarahannya ditulis oleh sejarawan bahwa perdebatan antara kubu Islam dan nasionalis dalam perumusan Pancasila mencerminkan kompleksitas politik dan ideologi pada masa itu. Tidak saja hal itu dipengaruhi oleh latar belakang budaya, tetapi juga kompleksitas pemahaman pendiri bangsa. Baik kelompok nasionalis maupun Islam sama-sama memiliki pandangan yang disarikan pada kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Banyak yang menjelaskan mengenai kompleksitas dinamika politik perumusan Pancasila. Nurcholish Madjid sebagaimana dikutip Ngainun Naim⁴⁹ mengatakan bahwa Pancasila itu ideologi yang modern, dimana Pancasila itu menjadi *common platform* (pijakan dasar bersama) yang dimana Pancasila ini menyatukan perbedaan yang ada di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menurutnya peran

⁴⁸ Nur Syam, "Islam Dan Pancasila Dalam Pertarungan Ideologi Dunia: Perspektif Sosiologis," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 18, no 1 (2020): 100–125.

⁴⁹ Ngainun Naim, "Islam Dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.2.435-456>.

tokoh-tokoh Islam Indonesia ini tidak boleh dilupakan karena begitu sangat signifikan dalam perumusan Pancasila sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nurcholish mengatakan bahwa umat Islam juga memegang peran kunci dalam perumusan Pancasila ini dan peran tersebut tidak boleh dilupakan.

Perdebatan yang ditulis dalam buku sejarah kemerdekaan Indonesia mencerminkan dinamika konflik antara nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan yang diperjuangkan dalam upaya menciptakan landasan bernegara yang kokoh yang memancarkan nilai dan identitas budaya masyarakat Indonesia.

A. Tokoh Islam Nasionalis Dalam Perumusan Ideologi Negara

Sebelum menyerah kepada Sekutu dan Jepang membentuk Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPPKI), dan Panitia Sembilan itu sebagai salah satu anggotanya⁵⁰. Panitia Sembilan dalam Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan tokoh nasionalis yaitu Mr. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Mr. A.A. M. Wattuwatena, Adikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Mr. Agus Salim, Mr. Ahmad Soebardjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Tim ini, yang dikenal sebagai Panitia Sembilan, menyetujui rancangan preambule UUD Republik Indonesia, yang ditandatangani pada 22 Juni 1945 dan dikenal sebagai "Piagam Jakarta." Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, lima sila dalam Piagam Jakarta ditetapkan menjadi Pembukaan UUD 1945 dengan beberapa perubahan, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.

Catatan sejarah di atas menunjukkan bahwa perumusan Pancasila tidak terlepas dari peran tokoh-

⁵⁰ Umi Musaropah, "Pendidikan Kebangsaan Dalam Pesantren Perspektif Abdul Wahid Hasyim," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 1-22, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.284>.

tokoh Islam di dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Tokoh Islam yang ditunjuk sebagai Panitia Sembilan bertugas untuk merumuskan konsep dasar negara yang nanti menjadi ideologi bangsa. Para tokoh Islam memiliki kontribusi penting bagi landasan ideologi bangsa Indonesia.⁵¹

Di Antara mereka ada yang berlatar belakang Tokoh Islam dari Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan ada pula Muhammadiyah seperti K.H. A. Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakar. Semerta di luar panitia Sembilan ada tokoh lain seperti K.H. Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo dan KH. M. Syamsudin yang ikut andil dalam perdebatan mengenai dasar negara. Atas usaha bersama dan setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya perumusan pancasila dapat diterima sepenuhnya.

K.H. Wahid Hasyim adalah tokoh seorang nasionalis-religius yang ranciat terhadap air Indonesia. Dalam diri K.H. Wahid Hasyim terdapat al tersebut, yakni antara agama dan politik. Keduanya tidak boleh saling bertentangan. K.H. Wahid Hasyim adalah sosok nasionalis religius yang progresif menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara, baik di bidang agama, politik, sosial maupun pendidikan sejak awal era kemerdekaan Indonesia.⁵²

⁵¹ Istilah ideologi pertama kalinya dikenalkan seorang filsuf berkebangsan Perancis, yang bernama Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1796, sewaktu revolusi Perancis tengah menggelora. Istilah ideologi saat itu digunakan untuk menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat dan perkembangan ide-ide manusia atau yang biasa dikenal sebagai "Science of idea". Di mana gagasan ini diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Namun Napoleon mencemoohnya sebagai khayalan, yang tidak memiliki nilai praktis. Dan pemikiran De Tracy ini sebenarnya mirip dengan impian Leibnitz yang disebut "one great system".

⁵² Zudi Setiawan, "Peran Tokoh Nahdlatul Ulama Dalam Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia," Spektrum 18, no. 2 (2021): 80-95, <http://www.indonesia.go.id>.

K.H. Wahid Hasyim memiliki sikap yang bijak saat perumusan pancasila. Yang pada gilirannya menerima penghapusan tujuh kata di dalam UUD 1945. Hal ini menggambarkan pilihan ideologi tokoh-tokoh Islam yang cukup progresif. K.H. Wahid Hasyim menjunjung tinggi pancasila sebagai dasar Negara. Walaupun pada perkembangannya, "blok Islam" pernah mengusulkan "Piagam Jakarta" dimasukkan dalam UUD 1945, baik dalam mukadimah (pembukaan) maupun batang tubuhnya. Dengan demikian "tujuh kata" kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" adalah hadiah dari tokoh-tokoh Islam kepada bangsa Indonesia.

Para penjenius sejarah mengagumkan bahwa tokoh Islam kala itu memiliki pemahaman atau kondisi sosio politik dan budaya masyarakat Indonesia, bahwa negara tetap mempertahankan tujuan nasionalnya, jika berpotensi menimbulkan disintegrasi. Mereka menyadari kesadaran tersebut pada konsep "Ghaidhar" yaitu konsep yang berpandangan bahwa menurut suatu nilai yang berakibat kepada hal yang buruk bisa melahirkan kemaslahatan. Konsep inilah yang menjadi acuan ataupun petunjuk bagi tokoh Islam dalam perumusan pancasila. Dengan konsep tersebut penghapusan tujuh kata yang terkandung dalam piagam Jakarta diterima oleh seluruh warga Indonesia.

Hatta menyampaikan bahwa akibat yang terjadi jika tujuh kata itu tetap diresmikan maka bisa menimbulkan perpecahan terhadap persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara lebih rinci Hatta menyampaikan alasan jika tujuh kata tersebut tetap dipertahankan; *Pertama*, Masyarakat timur yang menganggap bahwa kata-kata tersebut merupakan bentuk

dari diskriminasi terhadap kaum minoritas mengancam untuk keluar dan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, Hatta juga menyampaikan pesan dari para pemeluk agama Protestan dan Katholik (yang sebagian besar berdomisili) di wilayah Timur Indonesia terhadap beberapa unsur islami dari Piagam Jakarta.

Maka dari itu golongan Islam yang mendengar usulan Hatta menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, merasa berpandangan bahwa mempertimbangan hal-hal yang akan timbul kalimat 'ketuhanan dengan segala isi' menjadikan a'ri'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya' tetap disahkan akan menimbulkan hal-hal yang buruk bagi kehidupan berbangsa seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jawa besar yang dapat dilihat oleh para Ulama dari golongan Islam ini menunjukkan bahwa para ulama sangat menjunjung tinggi toleransi, sangat cinta keutuhan NKRI, bahkan mereka adalah para pejuang kemerdekaan Indonesia. Para Ulama menjelaskan bahwa terbentuknya Piagam Jakarta merupakan hasil dari 52 ribu surat-surat dari para alim ulama dan pemimpin-pemimpin Islam yang dikirim kepada Djawa Hokokai.⁵³

Perdebatan berlanjut atas pandangan seorang tokoh Islam yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo ini merupakan tokoh agama Islam yang kala itu memiliki pemahaman tentang hubungan agama dan negara. Ki Bagus Hadikusumo mempunyai pandangan bahwa tidak ada pemisahan antara negara dan agama. Agama merupakan pondasi suatu negara. Dengan agama dapat terjaminnya pembangunan pemerintahan yang adil dan mencapai musyawarah.

⁵³ Ali Ahmad Yenuri, Penghapusan Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta, "Jurnal Maramis" 4, no. 1 (2021).

Dalam perumusan dasar negara, upaya Ki Bagus Hadikusumo untuk mengakomodasi syariat Islam dalam dasar negara dengan mengubah frasa “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya”. Pandangan tersebut disampaikan Ki Bagus Hadikusumo berpidato pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Ajaran Islam dianggap pondasi yang paling dasar dalam sistem bernegara.⁵⁴

B. Kelompok Nasionalis Dalam Perumusan Pancasila

Peran nasionalis dalam perumusan Pancasila sangat signifikan. Beberapa tokoh nasionalis seperti Ir. Soekarno, Mohammad Yamin dan Soeparno memusulkan dasar Negara pada sidang pada enam belah berwujud bernuansa keislam. Usul dari ketiga politikus itu yang menjadi perdebatan awal tentang Negara Baru sejak awal memiliki visi kemerdekaan Indonesia yang didasarkan pada konsep keislaman dan kebangsaan bangsa:

1. Ir. Soekarno

Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam konferensi BPUPKI menyampaikan gagasannya tentang dasar-dasar negara. Soekarno mengusulkan landasan nasional yang terdiri dari lima prinsip: nasionalisme (nasionalisme Indonesia), internasionalisme (humanisme), konsensus (demokrasi), kesejahteraan sosial, dan keyakinan budaya. Kelima asas ini dikemukakan oleh sahabat Soekarno, seorang ahli bahasa, dan disebut “Pancasila”.

Menurut Soekarno, Pancasila dapat disempurnakan lagi menjadi trisila, nasionalisme sosial yang merupakan sintesa nasionalisme dan kemanusiaan (kosmopolitanisme),

⁵⁴ Qisthi Faradina Ilma Mahanani “Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo Tentang Islam Dan Negara Dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953),” *Jurnal El Tarikh* 1 (2020): 1-14.

dan sosial demokrasi yang merupakan sintesa konsensus (demokrasi) dan kesejahteraan sosial. Kepercayaan terhadap Tuhan.

Rumusan Pancasila yang disampaikan Soekarno mempunyai "teori emosi" yang dianggap bersifat sekuler. Bagi Soekarno, Pancasila dapat diringkas dalam tiga sila (trisila): nasionalisme sosial (termasuk kebangsaan dan kemanusiaan Indonesia), sosial demokrasi (termasuk demokrasi dan kesejahteraan sosial), dan ketuhanan. Terhadap perintah Tuhan selalu menjadi yang kedua. Menurut Sukarno, ketuhanan dari Trisila prinsip ketuhanan yang dihilangkan dan didorong lebih jauh ke eka atau yang royong.⁵⁵

2. Muhammad Yamin

Bahwa Muhammad Yamin telah memberikan kontribusi penting dalam perumusan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berdiskusi dengan mengemukakan lima asas yakni : Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Secara singkat bahwa tafsir rumusan dasar negara Mohammad Yamin adalah sebagai berikut.

- a. Peri Kebangsaan adalah gagasan bahwa Indonesia selayaknya didirikan atas dasar sifat bangsa (menurut adat istiadat), tidak mencontek dari luar negeri.
- b. Peri Kemanusiaan adalah pengakuan hukum sedunia atas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lainnya.

⁵⁵ Ahidul Asror, "kontekstualisasi wawasan islam kebangsaan kiai abdul muchith muzadi" Jurnal Teosofi agustus (2016): 30-59.

- c. Peri Ketuhanan adalah kondisi di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab luhur dan peradabannya melibatkan Tuhan YME; atau bangsa yang hendaknya berketuhanan.
- d. Peri Kerakyatan adalah dasar musyawarah atau semua yang menyangkut kehidupan negara selayaknya dimusyawarahkan; negara harus disusun atas demokrasi sehingga tidak boleh dipimpin seorang pemimpin saja, namun juga melibatkan di dalam dengan masyarakat luas.
- e. Kesejahteraan rakyat sama halnya dengan keadilan sosial atau Indonesia yang merdeka nantinya akan menjadi suatu "Negara Kesejahteraan Baru".

3. Soepomo

Pada saat ketemu dengan petinggi PUPKI, 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara yang akan dimiliki Indonesia yang merdeka hendaknya disusun atas sifat khas bangsanya sendiri. Soepomo mengemukakan lima rumusan dasar negara menurut Soepomo adalah:

- a. Persatuan;
- b. Kekeluargaan;
- c. Keseimbangan Lahir dan Batin;
- d. Musyawarah; dan
- e. Keadilan Rakyat.

Soepomo berpandangan bahwa dasar Negara Indonesia hendaknya tidak mengikuti kebudayaan barat yang berpegang pada individualism. Konsep orang Timur menurutnya dinilai sebagai konsep yang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Justeru menurut Soepomo individualisme ala barat akan

menimbulkan persaingan yang keras yang bisa saling menjatuhkan. Soepomo menekankan pentingnya asas kekeluargaan dan gotong royong untuk memenuhi cita-cita persatuan Antara rakyat dan pemimpinnya.⁵⁶

C. Ketegangan Kelompok Nasionalis Islam-Nasionalis Skuler Pasca Perumusan Pancasila

Baik tokoh islam maupun nasionalis sama-sama memainkan peran krusial dalam menyelesaikan perbedaan pandangan tentang ideologi negara. Dalam situasi yang penuh tantangan saat perumusan anggota Panitia Sembilan menunjukkan kebijaksanaan, kemampuan negosiasi, dan komitmen terhadap persatuan bangsa. Mereka terdiri dari berbagai tokoh penting, termasuk Soekarno, Mohammad Yamin, dan Ki Hajar Widikusumo, yang masing-masing membawa perspektif mendalam tentang dasar negara yang membatasi kepentingan bangsa. Melalui dialog terbuka, terdapat kompromi serta kebijaksanaan, Panitia Sembilan berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif dan diterima oleh berbagai golongan di Indonesia. Proses ini tidaklah mudah, mengingat adanya perbedaan ideologis yang tajam antara kelompok Islam yang menginginkan negara berdasarkan syariat Islam dan kelompok nasionalis yang mendukung gagasan negara berkebudayaan.

Namun, dengan pendekatan yang terbuka dan dialog konstruktif, Panitia Sembilan mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk mencapai konsensus. Salah satu hasil penting dari upaya ini adalah Piagam Jakarta, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

⁵⁶ Rozali Abdullah, *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.

Panitia Sembilan menunjukkan bahwa dengan kerja sama, toleransi, dan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama, perbedaan ideologi dan pandangan politik dapat dijumpai. Pancasila yang mereka rumuskan tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam. Peran mereka dalam sejarah Indonesia menjadi contoh bagaimana dialog dan kompromi dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak.

Perdebatan tentang hubungan agama dan negara yang terjadi saat itu merupakan lanjutan dari polemik antara Muhammad Natsir dan Soekarno di awal kemerdekaan mereka berdebat tentang negara Republik Turki tahun 1933 dan keruntuhan Mustafa Kemal Atatürk, yang dipandang sebagai lambang modernisasi karena berhasil memisahkan agama dari negara, sebuah pandangan yang dianggap salah oleh Natsir.⁵⁷ Perdebatan ini kemudian muncul tulisan di majalah Panji Islam pada tahun 1940, dengan Soekarno mewakili golongan nasionalis sekuler dan Natsir mewakili golongan nasionalis Islami. Golongan nasionalis sekuler berpendapat bahwa agama harus dipisahkan dari negara karena tidak bisa menyelesaikan masalah negara yang rumit, sementara golongan nasionalis Islami percaya bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan.

Perdebatan ini berlanjut dalam sidang Tim 9 BPUPKI, yang akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang menginspirasi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, meskipun butir pertama tentang

⁵⁷ Yanwar Pribadi, "Politik Identitas dan Potret Demokrasi di Indonesia (Book Review Studi Islamika Volume 28 No 2 Studia Islamika 28, no. Book Review (2021).

kewajiban pelaksanaan syariat Islam dihapus setelah perdebatan sengit antara kelompok nasionalis dan Islam.

Ketegangan antara negara dan agama berlanjut setelah kemerdekaan dengan munculnya Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1949, yang diprakarsai oleh Kartosuwiryo, bertujuan menjadikan Indonesia negara teokrasi dengan Islam sebagai dasar negara. Konflik antara pandangan sekuler dan religius dalam perjalanan sejarah Indonesia tidak berhenti di era kemerdekaan saja. Pada tahun-tahun berikutnya, dinamika hubungan antara agama dan negara terus menjadi isu sentral dalam politik Indonesia. Melalui pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di bawah pimpinan Kartosuwiryo, yang memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1949, mereka mencetuskan ketegangan yang berkelanjutan. Gerakan ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi berdasarkan hukum Islam, yang berlawanan dengan upaya membangun negara yang bersifat sipil dan demokratis.

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi pemberontakan ini. Upaya meredam gerakan DI/TII menunjukkan tekad pemerintah untuk mempertahankan prinsip-prinsip negara kesatuan yang berdasar pada Pancasila⁵⁸. Pemberontakan ini akhirnya berhasil dipadamkan, tetapi peristiwa tersebut menegaskan bahwa perdebatan tentang tempat agama dalam

⁵⁸ Faisal Ismail, "Panorama Sejarah Islam Dan Politik Di Indonesia-Google Buku, June 2024, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=c1FHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=Panorama+sejarah+islam+Dan+Politik+di+Indonesia+-+dakwah+...+accessed+June+4,+2024,+http://dakwah.uinsuka.ac.id/id/kolom/detail/20/panorama-sejarah-islam-dan-politik-di-indonesia.&ots=3UqHU4Phll&sig=UcVg8Z1QKrsOUts1Ldiynz8Pmml&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

kehidupan bernegara terus berlangsung. Pada era Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah berusaha keras untuk menegakkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan politik dan organisasi kemasyarakatan. Ini termasuk larangan terhadap berbagai partai politik dan organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Upaya ini menimbulkan berbagai reaksi, baik dari kelompok sekuler maupun keagamaan, yang masing-masing memiliki interpretasi dan kepentingan tersendiri mengenai penempatan Pancasila. Pada masa reformasi yang dimulai tahun 1998 setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia merdeka mengikuti perjalanan demokratisasi.

Kebebasan berekspresi dan berorganisasi kembali dibuka, dan forum-forum baru kembali perdebatan tentang hubungan antara agama dan negara. Dalam konteks ini, Partai Islam sebagai partai politik yang mampu menampung keragaman aspirasi politik dan keagamaan di Indonesia. Kembali kepada Panitia Sembilan dan peran mereka yang monumental, perumusan Pancasila tetap menjadi landasan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila berhasil menjadi titik temu yang memayungi berbagai pandangan yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dialog dan kompromi merupakan kunci dalam menyelesaikan perbedaan ideologi dan pandangan politik, seperti yang ditunjukkan oleh para founding fathers bangsa dalam perumusan dasar negara kita.

UIN SUNAN AMPE
S U R A B A Y A

BAB IV

AGAMA VERSUS KOMUNISME TAHUN 1955-1965

Pemilihan umum 1955 adalah momen penting dalam sejarah politik Indonesia, menandai pemilu nasional pertama pada masa demokrasi parlementer. Pemilu ini diikuti oleh 118 peserta, termasuk 36 partai politik, 34 organisasi, dan 48 individu untuk DPR, serta 91 peserta untuk Majelis Konstituante.⁵⁹ Hasilnya menunjukkan empat partai pemenang: Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan ketat ini menciptakan kontestasi ideologi dan kepentingan terbagi dalam aliran pemikiran: Nasionalisme Radikal, Tradisionisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokrat, dan Komunisme. Perbenturan ideologi ini memicu konflik, terutama antara NU, Masyumi dan PKI, dua kekuatan politik utama dengan pandangan yang saling berlawanan.

Pemilu umum 1955 adalah pemilu pada masa yang Ricklefs sebut sebagai eksperimen demokratis,⁶¹ sebuah fase dimana Indonesia terus-menerus mencari bentuk pemerintahan dan sistem politik yang paling sesuai dengan situasi daerah, sebuah waktu yang sebagian besar orang sekarang lihat sebagai yang paling dinamis dalam sejarah demokrasi Indonesia. Sementara pemilu tersebut berfungsi sebagai latihan dalam demokrasi, tujuan utamanya adalah untuk membentuk parlemen yang mengakomodasi semua spektrum politik,

⁵⁹ Dian Aulia, "Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi," *Masyarakat Indonesia* 42, No. 1 (2016): 117.

⁶⁰ Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, "Sejarah Dan Hasil Pemilihan Umum 1955," 2023, <https://kesbangpol.kapuashulukab.go.id/Sejarah-Dan-Hasil-Pemilihan-Umum-1955/>.

⁶¹ Ajeng Kusuma Ayu, Singgih Tri Sulistiyon, Dan Alamsyah, "Masyumi's Campaign Strategies In The 1955 Election In Jakarta," *Iltis (Indonesia Historical Studies)* 3, No. 2 (2020): 33.

mengakhiri krisis kabinet yang sering terjadi, dan menciptakan koherensi di antara partai politik, dengan kata lain adalah terciptanya stabilitas politik.

Ide pemilu nasional di Indonesia mulai dibahas pada Oktober 1945, dengan langkah awal berupa Peraturan Pemerintah pada 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Usulan ini memperoleh dasar hukum dengan Undang-Undang Pemilu 1949 (UU No. 12/1949),⁶² yang awalnya menetapkan pemilihan tidak langsung. Wacana pemilihan langsung muncul di bawah Kabinet Natsir pada akhir 1950 dan menjadi undang-undang pada 1953 di bawah Kabinet Wilopo. Pemilu 1955 menggunakan sistem proporsional, dan persiapan dimulai pada Kabinet Ali

Di beberapa wilayah mencapai tamat dua bulan untuk melakukan pemilihan. Masyumi sebagai partai politik, bertahan lama dan berhasil mencapai dominasi yang ditunjukkan dalam tahun 1955.⁶⁴ Topo Santoso dan Ida Budhiati, pemilu umum tahun 1955 dianggap sebagai salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan,⁶⁵ maka Pemilu 1955 dianggap pemilihan yang paling demokratis. Antusiasme besar dari mayoritas rakyat yang berharap pemilu tersebut dapat menyelesaikan berbagai persoalan politik, ekonomi, dan keamanan yang dihadapi

⁶² Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Cetakan Kedua (Depok: Nadi Pustaka, 2017).

⁶³ Ketut Sedana Arta, "Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di Indonesia," *Jurnal Widya Citra* 1, No. 2 (2020).

⁶⁴ Utari Mariaty, Ridwan Melay, dan Marwoto Saiman, "HISTORY THE MOVEMENT OF MASJUMI IN INDONESIA AT 1943-1960," *Jurnal Online Mahasiswa* 3, no. 2 (2016).

⁶⁵ Topo Santoso Dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

bangsa pada saat itu.⁶⁶ Melalui persaingan yang ketat antar partai, Pemilu tersebut menjadi panggung di mana persaingan ideologis antara Islam politik yang diwakili oleh Masyumi dan komunisme yang diwakili oleh PKI terwujud secara konkret.

Masyumi yang mewakili suara Islam politik di Indonesia dan PKI yang merupakan partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok,⁶⁷ saling bertarung dalam ranah ideologi dan kebijakan politik. Masyumi yang sebagai representasi Islam politik memiliki tujuan untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Islam dalam politik Indonesia.⁶⁸ Sementara itu, PKI sebagai partai komunis berfokus pada pengembangan ideologi komunis dan meningkatkan kekuatan politiknya di Indonesia.

Konflik ideologis antara Masyumi dan PKI pada periode tersebut merupakan cerminan dari polarisasi politik yang mendalam di Indonesia. Masyumi, sebagai representasi Islam politik yang keras mengemukakan ideologi komunis PKI sebagai ateis dan menuduhnya merongrong nilai-nilai agama.⁶⁹ Sebaliknya, PKI mengkritik Masyumi sebagai penghalang bagi kemajuan sosial dan ekonomi dengan mengeksploitasi keberpihakan agama.⁷⁰ Keduanya saling memprovokasi dengan retorika yang keras, memperdalam jurang antara pendukung mereka.

⁶⁶ Santoso Minarno, "Strategi Pni Dalam Memenangkan Pemilihan Umum 1955 Di Jawa Tengah" (Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2011)

⁶⁷ Imam Walid Asrofuddin Ulil Huda, Zia Hulhak, Dan Ahmad Bajuri, "Partai Masyumi: Mercusuar Politik Identitas Islam Positif Di Indonesia 1945-1960," *Jurnal Historia* 6, No. 1 (2023)

⁶⁸ Gili Argenti, "Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia," *Jurnal Politikom Indonesia* 5, no. 1 (2020)

⁶⁹ Firman Noor, "Masyumi dan Sikap Anti-PKI," *Republika*, 2015

⁷⁰ Samsuri Samsuri, "Komunisme dalam Pergumulan Wacana Ideologi Mastumi," *Millah* 1, no. 1 (15 Agustus 2001): 99-121, <https://doi.org/10.20885/millah.vol1.iss1.art8>

Konfrontasi ini tidak hanya menimbulkan ketegangan politik, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang mendalam dalam masyarakat Indonesia pada saat itu.

Propaganda anti-komunis Masyumi menyoroti apa yang mereka anggap sebagai esensi sebenarnya dari komunisme.⁷¹ Para pemimpin partai secara terus-menerus mengajak rakyat untuk kembali kepada sumber-sumber doktrin musuh politik mereka, dengan mengutip ajaran Lenin tentang eliminasi lawan Revolusi. Mereka juga menggambarkan pengalaman pribadi di Moskow sebagai bukti bahwa kompromi antara agama dan komunisme tidak mungkin. Selain itu, Masyumi memperingatkan tentang usulan PKI untuk mengubah referensi kepada Pancasila dengan prinsip kebebasan beragama yang dianggap sebagai langkah awal menuju "kekejaman" propaganda anti-Islam.⁷² Selain berfokus pada isu agama, Masyumi juga menyoroti alasan di balik daya tarik PKI terhadap sistem Soviet dengan merujuk pada potret tokoh-tokoh Soviet yang tampil dalam rapat-rapat PKI.⁷³ Meskipun serangan terhadap PKI tidak terbatas pada isu keagamaan, Masyumi secara teratur mengaitkan insiden-insiden kekerasan dengan agenda anti-agama dan anti-kapitalis PKI untuk membenarkan sikap anti-komunis mereka.⁷⁴

⁷¹ Firman Noor, "Islamic Party and Pluralism: The View and Attitude of Masyumi towards Pluralism in Politics (1945-1960)," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 54, no. 2 (14 Desember 2016): 273, <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.273-310>

⁷² Idwar Anwar, Suriadi Mappangara, Dan Ilham Makkelo, "Kegagalan Partai Komunis Indonesia Pada Pemilihan Umum 1955 Di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara," *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, No 2 (23 Desember 2021): 239-52, <https://doi.org/10.36869/Pjhpish.V7i2.208>.

⁷³ Hikmat Maswara, "Analisis Historis Konflik Partai Masyumi Dengan Partai Komunis Indonesia (1946-1955)" (Universitas Paramadina, 2024)

⁷⁴ Kusuma Ayu, Singgih Tri Sulistiyon, dan Alamsyah, "Masyumi's Campaign Strategies in the 1955 Election in Jakarta."

A. Sejarah Pendirian Masyumi

Pada bulan-bulan pertama kemerdekaan Indonesia, kedudukan umat Islam secara politis tidak terlalu menggembirakan, terlihat dari kurangnya keterwakilan tokoh Islam dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Kesadaran untuk membentuk partai politik Islam tumbuh di kalangan tokoh-tokoh Islam setelah melihat kondisi ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, diadakan serangkaian pembicaraan dan diskusi.

Pembicaraan ini diawali pada September 1945 di Jakarta dengan H. Wanda Husain, Abdul Kahar Muzakir, dan M. N. Roem, yang kemudian berkembang menjadi rencana aksi untuk mendirikan partai politik Islam.⁷⁵ Setelah itu, pada 10 Desember 1945 tanggal 3 November 1945 yang mengawali uraian pendirian partai politik, kemudian berkembang di kalangan umat Islam untuk membentuk partai politik Islam yang mendapat legitimasi. Hanya empat tokoh yang menghadiri pertemuan tersebut, diadakanlah muktamar Ulama Islam pada tanggal 7 dan 8 November 1945 di Gedung Muallimin Yogyakarta, yang diselenggarakan oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia.⁷⁶

Muktamar ini menghasilkan beberapa keputusan penting: Masyumi ditetapkan sebagai partai politik Islam satu-satunya, dengan tujuan memperkuat persiapan umat Islam untuk berjihad fi sabilillah melawan penjajahan dan memperkuat pertahanan negara dengan membentuk Barisan Sabilillah di daerah-daerah.⁷⁷ Lebih lanjut, Dr.

⁷⁵ Insan Fahmi Siregar, "Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)," *Jurnal Thaqqafiyat* 14, No. 1 (2019)

⁷⁶ Khaerul Amri, Amrullah Amir, dan Ilham Daeng Makkelo, "Kembali ke Pangkuan NKRI: Sulawesi Selatan dalam Mata Rantai Sejarah Partai Masyumi," *Jurnal Patiingaloang* 10, no. 3 (2023)

⁷⁷ Suwarno Suwarno, "Muhammadiyah Dan Masyumi Di Yogyakarta, 1945-1960," *Jurnal Patrawidya* 16, No. 3 (2015)

Soekiman terpilih sebagai ketua, dengan Abikusno dan Wali al Fatah sebagai wakil ketua. Mereka diberi mandat untuk menyusun kepengurusan partai yang terdiri dari Pimpinan Partai dan Majelis Syuro. Pimpinan Partai, yang didominasi oleh politisi berpendidikan Barat, bertugas membuat pernyataan politik dan kebijakan partai, sementara Majelis Syuro, yang didominasi ulama, memberikan nasihat dan fatwa.

Bergabungnya berbagai organisasi keagamaan dalam Masyumi menambah kelengkapan politik tambahan dengan menarik minat dan anggotanya terutama dari kalangan umat Islam. Organisasi-organisasi seperti NU dan Muhammadiyah,⁷⁸ yang dipimpin tokoh-tokoh seperti K.H. Abdurrahman Asy'ari, K.H. Wahid Hasyim, dan Ki Bagus Hadikusno, memiliki kebesaran dan semangat persaudaraan yang direguk dari ideologi Masyumi. Masuknya unsur-unsur organisasi memperkuat Masyumi dalam menjalankan politikanya dan meningkatkan pengaruhnya di kalangan umat Islam.

B. Islam, Kapitalisme Dan Komunisme

Pada awal pembentukan Masyumi sebagai partai Islam belum memberikan pernyataan secara resmi apabila Masyumi dilandaskan oleh Islam. Ideologi masyumi baru diungkap setelah Manifesto Politik Masyumi yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 1947. Meskipun telah ada ungkapan Manifesto Politik Masyumi, tetapi partai masyumi belum menyampaikan keterangan yang detail dan resmi terkait ideologi Islam.⁷⁹

⁷⁸ Miftahuddin Dan Hasbi Mawardi, "Dinamika Perjuangan Badan Federasi Umat Islam Menuju Kemerdekaan Indonesia, 1937-1945," *Jurnal Istoria* 17, No. 2 (2021)

⁷⁹ Nurdiana, "Partai Bulan Bintang Penerus Cita-cita Masyumi" (Tesis, Jakarta, Universitas Indonesia, 2008).

Partai Masyumi menguatkan posisi Islam sebagai ideologi utama melalui Tafsir Asas yang dihasilkan pada Mukhtamar VI di Jakarta pada 1952. Mereka menolak baik Kapitalisme yang diusung Barat di bawah Amerika Serikat, maupun Komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet-Rusia, menganggap keduanya sebagai materialisme yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁸⁰ Meskipun ada persamaan antara Islam dan Komunisme dalam isu keadilan sosial dan kelas masyarakat, Masyumi menegaskan perbedaan mendasar, terutama dalam hal pembagian kelas dan pengakuan hak milik individu.

Sjafrudin Prawiranegara menyatakan bahwa Islam merupakan kompromi antara Kapitalisme dan Komunisme,⁸¹ dengan menekankan pentingnya individuitas manusia dan penghargaan terhadap hak individu. Perbedaan antara Islam dengan Kapitalisme dan Komunisme juga ditegaskan oleh Muhammad Natsir yang menyoroti kebebasan manusia dan hak kepemilikan individu dan pentingnya kewajiban zakat dalam mempromosikan kemakmuran bersama.

Dari pertarungan ideologi ini, Masyumi memandang tugasnya sebagai pertahanan terhadap kedaulatan Republik Indonesia, memperingatkan masyarakat akan bahaya Kapitalisme dan Komunisme, serta menolak kekerasan dalam penyelesaian konflik baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional. Dengan pendekatan ini, Masyumi berusaha mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, melalui jalan yang sah dan berdasarkan pada kebenaran serta ajaran Al-Qur'an.⁸²

⁸⁰ Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004)

⁸¹ Supardi Dwimaputra, "Agama, Negara, Ekonomi Dan Kesejahteraan: Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989)," *Jurnal Saqifah*, no. 6 (2021)

⁸² Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis*

C. Pengaruh Partai Komunis Indonesia

Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, PKI menentukan sikap dengan menempuh jalan legal parlementer sesuai garis kanan yang digariskan Moscow, sambil merangkul golongan non-Komunis berdasarkan Marxisme-Leninisme konvensional.⁸³ Aidit berpendapat bahwa orientasi politik lebih menentukan kelas sosial dibandingkan kelas sosial itu sendiri. Oleh karena itu, kaum Komunis dapat bekerjasama dengan borjuis kecil dan borjuasi nasional melawan borjuis besar dan feodal. Berdasarkan orientasi ini, PKI bersekutu dengan kaum buruh dan tani serta golongan non-Komunis yang anti-pelembahan.⁸⁴

Namun, penyusunan dukungan oleh borjuasi pribumi dan bersikeras anti-Komunis Persatuan Islam sebagai borjuasi kecil.⁸⁵ PKI yang lebih berkelas dan bisa menerima PKI tidak melihatnya sebagai borjuasi nasional, sehingga PKI juga mendekati PNI dan Masyidatul Ulama. Menyadari bahwa perjuangan politik dan revolusi tergantung pada hubungan dengan borjuasi nasional, strategi Aidit bersifat defensif untuk melindungi PKI dari pihak-pihak yang ingin menghancurkannya.⁸⁶

Di satu sisi, dalam era kebangkitan PKI dibawah D.N. Aidit, kekerasan menjadi strategi utama untuk mencapai tujuan. Aidit, yang menjadi ketua PKI pada

⁸³ Yusuf Perdana Dan Rinaldo Adi Pratama, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2019)

⁸⁴ Runalan Soedarmo, "Perkembangan Politik Partai Komunis Indonesia (1948-1965)," *Jurnal Unigal 2*, No. 1 (2019)

⁸⁵ Moh. Sonhaji dan Faishal Hilmy Maulida, "Komunikasi Politik dan Kecenderungan Pilihan Partai Kaum Santri dan Abangan pada Pemilu 1955," *Nyimak: Journal of Communication 4*, no. 1 (24 Maret 2020): 109, <https://doi.org/10.31000/nyimak.v4i1.2220>.

⁸⁶ Hendrikus Christianus, "Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia Dalam Gerakan 30 September 1965" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2007)

tahun 1951, memperkenalkan konsep "demokrasi terbuka" yang berarti memungkinkan PKI untuk bergerak secara bebas dan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan. PKI menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan dengan cara menghilangkan perbedaan antara kelas sosial dan menguasai alat produksi. Dalam pandangan PKI, perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis, dan pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika berwujud di bawah dominasi partai. PKI juga menganggap sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, cara pemukiman modalitas individu sangat dibatasi dengan negara sebagai federasi komune-komune.⁸⁷

D. Awal Kebijakan Anti Komunis

Penggunaan kekerasan sebagai implementasi tujuan menghalalkan segala cara yang dianut setelah kalangan sosialisme-nasionalisme dalam paham Komunis tidak dapat diterima dalam Muktamar VII Masyumi yang membahayakan pencapaian tujuan masyarakat. Karena kondisi semacam ini, Majelis Syuro Pusat Masyumi mengeluarkan fatwa hukum Islam tentang Komunisme yang diputuskan dalam Muktamar VII Masyumi pada 3-7 Desember 1954 di Surabaya.

Fatwa Anti-Komunis yang dikeluarkan oleh Majelis Syura Pusat Masyumi pada Muktamar VII Masyumi pada 3-7 Desember 1954 di Surabaya menolak penggunaan kekerasan sebagai implementasi tujuan menghalalkan segala cara yang dianut oleh kalangan sos keyakinan bahwa paham Komunisme adalah benar, maka hukumnya adalah kafir, yang berarti tidak beriman. Komunisme

⁸⁷ Dwiki Anugrah Gustiawan Putra Hatama, Anwar, Dan La Batia, "Perkembangan Komunisme Di Indonesia Tahun 1914-1927," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah Uho* 7, No. 1 (2022)

⁸⁸ Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis*

adalah sesat: Seseorang yang mengikuti Komunisme atau organisasi komunis tanpa disertai pengetahuan, kesadaran, dan keyakinan pada falsafah, ajaran, tujuan, dan cara-cara perjuangan komunis, maka hukumnya adalah sesat, yang berarti tidak berada di jalur yang benar.

Fatwa tersebut tidak hanya menandai Komunisme sebagai bertentangan dengan ajaran Islam dan sebagai ancaman besar bagi kehidupan agama dan negara, tetapi juga memberikan panduan tindakan bagi umat Islam dalam menghadapinya, termasuk larangan bergabung dengan organisasi Komunis dan seruan untuk membentuk Front Anti Komunis. Keyakinan bahwa paham Komunisme adalah benar maka mukmin adalah kafir, yang berarti tidak beriman. Komunisme adalah sesat: Seseorang yang mengikuti Komunisme atau organisasi komunis tanpa disertai pengetahuan, kesadaran, dan keyakinan pada falsafah, ajaran, tujuan, dan cara-cara perjuangan komunis adalah sesat, yang berarti tidak berada di jalur yang benar.

Fatwa tersebut tidak hanya menandai Komunisme sebagai bertentangan dengan ajaran Islam dan sebagai ancaman besar bagi kehidupan agama dan negara, tetapi juga memberikan panduan tindakan bagi umat Islam dalam menghadapinya, termasuk larangan bergabung dengan organisasi Komunis dan seruan untuk membentuk Front Anti Komunis.

E. Konflik Ideologi Dan Konfrontasi Pemilu 1955

Masyumi memperhatikan dengan cermat gelagat yang mengindikasikan ketidak-sungguhan Pemerintah Ali Sastroamidjojo, yang dipimpin oleh PNI, dalam

menjalankan pemilu sesuai UU Pemilu.⁸⁹ Diketahui Ali Satroamidjojo merencanakan pemilu baru dalam jangka waktu 16 bulan sejak Januari 1954, yang dinilai lamban oleh Masyumi, mengingat sebelumnya Program Kabinet Wilopo merencanakan pemilu pada pertengahan 1954. Kabinet Ali dianggap sebagai tindakan darurat sebelum pemilihan umum dilaksanakan, menurut pandangan Mohammad Natsir. Ali Satroamidjojo juga didukung oleh PKI, meskipun PKI tidak ada dalam kabinet.⁹⁰

Namun Masyumi menilai bahwa PKI tidak berperan sebagai oposisi, melainkan memegang peran penting dalam kabinet tersebut. Oposisi Masyumi terhadap Kabinet Ali mempengaruhi bagian kampanye pemilu. Ketika Masyumi berhadapan dengan PKI atau mengislahkan rekayasa administrasi untuk memusatkan hubungan antara Kabinet Ali dan PKI.

Kampanye pemilu dimulai pada Mei 1954, ketika tanda gambar "Palu Arit" milik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI),⁹¹ diambil untuk membuka jalan bagi kampanye berdasarkan tanda gambar. Namun, masalah muncul ketika PKI mengajukan daftar "PKI dan Orang-orang Yang Tak Berpartai" dengan tanda gambar "Palu Arit" yang disahkan oleh PPI.

Masyumi menyampaikan protes kepada PPI terhadap pengesahan tanda gambar PKI dengan sejumlah alasan. Pertama, protes ini didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan PPI bertentangan dengan UU Pemilu yang berlaku. Kedua, Masyumi menganggap pengesahan tersebut sebagai upaya untuk secara tidak langsung

⁸⁹ Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis*

⁹⁰ Dian Aries Mujiburohman, *Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen Uud 1945* (Yogyakarta: Intan Media, 2012)

⁹¹ Singgih Bambang Permadi, "Proses Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014)

mengasosiasikan orang-orang yang tidak berafiliasi dengan partai dengan PKI melalui manipulasi.

Hal ini dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kebebasan dan kemerdekaan serta pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Ketiga, Masyumi khawatir bahwa pengesahan ini akan dimanfaatkan oleh PKI untuk mempengaruhi pemilih, terutama mereka yang kurang teredukasi di pedesaan, dengan membuat mereka percaya bahwa tanda gambar "balu arit" telah disahkan oleh pihak berwenang. Untuk PKI dan orang-orang yang tidak berafiliasi dengan partai, Masyumi merujuk pada ketentuan hukum yang menegaskan bahwa hanya partai politik dan organisasi atau calon pemerintahan yang berhak menggunakan tanda gambar, yang dianggap dilanggar oleh tindakan PKI dengan demikian, Masyumi menolak pengesahan tanda gambar PKI karena dianggap melanggar asas hukum dan bertentangan dengan manipulasi proses pemilu yang dilakukan oleh PKI tertentu.

Sejak Pemberontakan Madiun pada September 1948, Partai Masyumi telah memandang manipulasi yang dilakukan oleh PKI dalam pengajuan tanda gambar sebagai peserta pemilu sebagai ancaman serius. Dalam brosur "Waspadalah Menghadapi Pemilihan Umum," Masyumi menggambarkan perilaku masa lalu PKI serta rencana jahatnya di masa depan terkait pemilu, serta mengungkap alasan PKI mendukung Pemerintah Ali meskipun tidak menjadi bagian dari kabinet.

Bagi Masyumi, PKI merupakan hambatan besar bagi penegakan ajaran Islam di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, respons dari PKI atas brosur Masyumi adalah menyebutnya sebagai pemalsuan dan kepalsuan. PKI juga merespons dengan "Manifesto Pemilihan Umum PKI" yang mengancam bahwa pemilu

dengan kemenangan Masyumi (dan PSI) menghasilkan pemerintahan yang mendukung imperialisme dan menindas rakyat.

Dalam menghadapi ancaman Komunis, tokoh-tokoh Masyumi gencar melakukan serangan anti-komunis, baik melalui kampanye maupun perdebatan di media cetak. Mereka, seperti Sjarif Usman dan Sukiman Wirjosandjojo, menyerukan umat Islam yang tergabung dalam PKI atau organisasi komunis lain untuk meninggalkan partai tersebut dan kembali ke organisasi Islam, bukan karena benci terhadap Komunis, tetapi sebagai upaya untuk menyelamatkan mereka dari perusakan. Selain itu, Muhammad Ali Anshary, salah satu tokoh radikal di Masyumi dan pendiri Front Anti-Komunis, dalam kampanye juga mengukuhkan Komunis sebagai kafir dan bahkan mempromosikan orang-orang Komunis tidak dikuburkan menurut Islam.

Pada 1 Desember 1954, Majelis Ulama Surabaya pada 23-27 Desember 1954, Majelis Ulama mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa komunisme adalah "kufur", dan para penganutnya akan dihukum sebagai "kafir" jika mereka dengan pengetahuan, keyakinan, dan kesadaran mengikuti ajaran Komunisme. Masyumi menjelaskan bahwa fatwa ini tidak hanya ditujukan untuk mencapai kemenangan jangka pendek dalam pemilu, tetapi juga sebagai kewajiban untuk mengingatkan umat Islam terhadap bahaya Komunisme.

Melalui media resminya, Masyumi berupaya mengimbangi kampanye yang dilakukan oleh PKI terhadap massa petani, nelayan, dan buruh. Perhatian besar juga diberikan kepada nasib kaum nelayan, buruh, dan petani, dengan tujuan untuk mencapai ketentraman dan kemakmuran bagi kedua golongan ini, serta

memastikan kestabilan politik sambil menolak kehadiran kaum komunis.

Pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPR dan Konstituante pada dasarnya berhasil diselenggarakan oleh kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu pada tanggal 29 September untuk memilih 257 anggota DPR dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih 514 anggota Konstituante diikuti oleh 118 peserta untuk pemilihan DPR dan 91 peserta untuk konstituante. Namun, tidak semua peserta ikut serta di setiap daerah pemilihan, sehingga tidak semua surat suara memiliki 118 tanda gambar.

Meskipun pelaksanaan pemilu oleh kabinet yang dipimpin oleh Masyumi berhasil, namun tidak menghasilkan mayoritas bagi partai yang hasil pemilu membagi partai politik kea tiga aliran ideologi politik di DPR, di mana partai Islam memperoleh 5,2% kursi (116 dari 257 kursi), Partai Masyumi 12,1% (31 dari 257 kursi), dan partai Sosialis KIR (KORPRIAS) 10,2% (39 dari 257 kursi). Politik Islam Anti Komunis yang digagas oleh Masyumi, meskipun menduduki urutan kedua secara nasional, namun tidak meraih mayoritas suara yang diharapkan. Masyumi berhasil memerangkan perolehan suara di 10 dari 15 daerah pemilihan yang berhasil melaksanakan pemilu, termasuk Jawa Barat, Jakarta Raya, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Selatan, dan Maluku. Meskipun demikian, hasil pemilu yang mengecewakan membuat Masyumi menyadari bahwa PNI dan PKI, meskipun tidak berlandaskan Islam, mendapat dukungan yang besar.

Namun, Masyumi Pada tanggal 7 dan 8 September, Letnan Kolonel Ahmad Husein dari Sumatera Barat, Letnan Kolonel Ventje Sumual dari Sulawesi Utara, dan Letnan Kolonel Barlian sebagai tuan rumah mengadakan pertemuan yang menghasilkan Piagam Palembang. Piagam tersebut mencakup beberapa poin, antara lain: pemulihan Hatta dalam kepemimpinan nasional, pembersihan pimpinan Angkatan Bersenjata dari simpatisan komunis dan penggantian Mayor Jenderal AH Nasution dan Wakil Kepala Pemerintahan untuk memberikan komando yang lebih baik kepada daerah, pembentukan kabinet untuk membeberatkan kepentingan daerah, dan larangan terhadap ideologi komunisme karena bertentangan dengan Pancasila.

Pada tanggal 5 Februari 1958, Ahmad Husein dan rekan-rekannya menandatangani beritanya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang. PRRI mendapat dukungan dari berbagai daerah, termasuk Sumatra Utara dan Sulawesi Utara, serta Permesta di Sulawesi yang bergabung dengan PRRI dua hari setelah proklamasi. Namun, setelah Presiden Soekarno mengetahui hal ini, AURI menyerang instansi PRRI di Bukittinggi, Padang, dan Manado pada akhir Februari.

Pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani tiba di Padang pada awal Maret 1958, berhasil menduduki Bukittinggi dan Padang pada tanggal 5 Mei, dan menekan pasukan PRRI ke dalam gerilya. Akhirnya, seluruh anggota PRRI berhasil diamankan oleh pemerintah.

Tindakan Soekarno yang tidak melibatkan wakil-wakil Partai Masyumi dalam badan-badan negara hasil bentukan rezim Demokrasi Terpimpin tidak mengurangi ketegasan Partai Masyumi dalam mengkritik kepemimpinan Soekarno dan politik ideologi Nasakom

yang tetap berharap pada keberhasilan perjuangan membentuk Undang-Undang Dasar di Konstituante. Dengan keyakinan penuh, Masyumi memegang pendirian bahwa hanya Undang-Undang Dasar Islam yang dapat menghapuskan keberadaan Komunis di Indonesia.

F. Kegagalan Masyumi Dan Pembubaran Partai Masyumi

Krisis politik di Indonesia mulai dari tahun 1956, ditandai dengan peristiwa 30-September-Permesta. Ketidakpuasan militer terhadap jabatan Kabinet Boerhanuddin Harahap, yang telah melemahkan hubungan baik dengan Angkatan Darat, semakin memperparah dengan terdapatnya kabinet Ali untuk kedua kalinya, yang dianggap mengecewakan pihak militer. Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga menjadi penyebab munculnya PKRI-Pergerakan di mana daerah-daerah menuntut pemerintah memperhatikan kepentingannya sendiri dan tidak memperhatikan pembangunan nasional.

Beberapa tokoh Masyumi terlibat dalam PRRI, seperti Syafruddin Prawiranegara, Boerhanuddin Harahap, dan Moh Natsir. Selain itu, beberapa tokoh PSI juga bergabung dengan PKRI, seperti Sumitro Djojohadikusumo, Mr. St. Mohd Rasyid, dan Des Alwi. Pertemuan di Gubernuran Sumatera pada Januari 1958 menghasilkan kesepakatan bahwa tindakan Presiden Soekarno yang menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur dan membentuk kabinet karya dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Mereka yang hadir mempertimbangkan bahwa jika Kabinet Djuanda mundur, maka Mohammad Hatta dan Hamengkubuwono IX adalah orang yang pantas menjadi formatur, karena dianggap sebagai pasangan yang ideal dengan representasi dari Jawa dan luar Jawa.

Pada tanggal 7 dan 8 September, Letnan Kolonel Ahmad Husein dari Sumatera Barat, Letnan Kolonel Ventje Sumual dari Sulawesi Utara, dan Letnan Kolonel Barlian sebagai tuan rumah mengadakan pertemuan yang menghasilkan Piagam Palembang. Piagam tersebut mencakup beberapa poin, antara lain: pemulihan Hatta dalam kepemimpinan nasional, pembersihan pimpinan Angkatan Bersenjata dari simpatisan komunis dengan penggantian Mayor Jenderal A.H. Nasution, desentralisasi pemerintahan untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah, pembentukan senyawa untuk membela kepentingan daerah, dan larangan terhadap ideologi komunisme karena bertentangan dengan Pancasila.

Pada tanggal 15 Februari 1953, Soekarno, Husein dan rekan-rekannya menerbitkan proklamasi berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang. PRRI mendapat dukungan dari beberapa diperjuangkan oleh Mayor Jenderal Soekarno menolak Nasakom karena dianggap sebagai upaya Soekarno untuk memaksakan ideologi komunis ke segala lapisan negara. Sikap keras ini membuat Soekarno merasa perlu untuk menyusun langkah-langkah guna menyingkirkan Partai Masyumi dari panggung politik dengan menggunakan cara-cara yang dianggap "legal konstitusi" namun tetap bersifat represif. Presiden Soekarno bahkan menggunakan logika revolusi dengan mengaitkan penolakan Partai Masyumi terhadap Nasakom dengan penolakan terhadap Pancasila, sehingga memicu perdebatan yang semakin memanas antara kedua pihak.

Upaya Soekarno untuk memecah belah pemimpin Partai Masyumi seperti Sukiman Wirdjosandjojo dan Jusuf Wibisono dengan mengikutsertakan mereka dalam DPR GR tidak sepenuhnya berhasil. Meskipun Sukiman

menolak pengangkatannya sebagai anggota DPR GR, Jusuf Wibisono menerima hal tersebut. Namun, pertentangan antara Soekarno dan Partai Masyumi semakin meruncing dengan keterlibatan beberapa pemimpin partai tersebut dalam PRRI. Soekarno akhirnya mengambil langkah tegas dengan mengundang tokoh-tokoh Partai Masyumi ke Istana Bogor dan mengumumkan pembubaran Partai Masyumi dalam pidato 17 Agustus 1960. Pembubaran tersebut dilakukan dengan alasan partai Partai Masyumi dalam pemberontakan PRRI yang dianggap mengancam keselamatan negara dan bangsa. Meskipun Partai Masyumi berdaya nyalawa dengan menggugat pembubaran tersebut, namun akhirnya terpaksa bubar setelah ketidakefektifan perjuangan mereka.

G. Kejayaan PKI Pada Pembubaran Masyumi

PKI semakin berkembang atas dasar keputusan Presiden Soekarno di berbagai bidang, terutama karena Soekarno memberikan dukungan yang luas pada PKI dalam ekspresi politiknya.⁹² Sementara partai politik lain mengalami penindasan, PKI malah semakin diperlakukan dengan baik, menciptakan kesan bahwa masa Demokrasi Terpimpin sangat menguntungkan bagi PKI. Meskipun Soekarno sendiri bukan komunis, namun ia bergantung pada PKI untuk menghadapi militer yang semakin kuat secara politik. Hal ini disebabkan oleh kekuatan PKI di tingkat daerah, organisasi yang luas dan terorganisir dengan baik di kalangan masyarakat kelas bawah, serta kemampuan PKI untuk menggerakkan massa pada acara-acara publik di mana Soekarno berbicara.

⁹² Iswara N Raditya, "Sejarah Kejayaan & Kejatuhan PKI Bersama D.N. Aidit Usai G30S," *Tirto.id*, 2022

Tindakan Soekarno ini diikuti oleh PKI dalam usahanya merongrong kewibawaan negara dan masyarakat, dengan organisasi-organisasi seperti CGMI, Lekra, Pemuda Rakyat, dan BTI yang semakin agresif dalam melakukan teror terhadap militer dan organisasi Islam.⁹³ Mereka juga menggunakan taktik distribusi tanah dari perkebunan pemerintah untuk memperkuat basis massa mereka. PKI juga menargetkan HMI, yang dianggap sebagai organisasi demokratis, dengan tindakan-tindakan agresif. Mereka juga mengadakan tuntutan balik terhadap tindakan serikat buruh dan konstitusi ekonomi yang tidak stabil, namun seringkali tuntutan tersebut tidak dijawab secara memuaskan, sehingga gagasan Soekarno seperti Nasakom digunakan oleh PKI untuk menekan dan menghebatkan tuntutan buruh dari kalangan...

H. Kemerosotan Komunisme Hingga Pembubaran PKI

Pada masa Demokrasi Terpimpin, PKI memiliki pengaruh yang signifikan di seluruh pulau Indonesia. Salah satu usaha yang mereka lakukan adalah mengusulkan pembentukan Angkatan ke-5, yang bertujuan untuk melibatkan buruh dan petani sebagai kekuatan militer dalam mobilisasi massa untuk mendukung operasi-operasi militer, terutama operasi Dwikora melawan Malaysia. Meskipun PKI mendukung usulan tersebut, TNI meresponsnya dengan skeptis, khawatir bahwa PKI memiliki agenda tersembunyi untuk menggunakan kekuatan militer tersebut dalam pemberontakan. Para militer curiga bahwa PKI sedang melatih secara rahasia

⁹³ Sapti Eka Pratiwi, "Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin," *Journal Unesa* 4, No. 3 (2016).

⁹⁴ Viva Yoga Mauladi, "Niat PKI untuk Menganyang Membubarkan HMI" *Detik News*, 2021

masyarakat buruh untuk menggunakan senjata dan merencanakan kudeta. Meskipun secara implisit mendukung usulan tersebut untuk memperkuat pasukan melawan Malaysia, Soekarno tidak secara resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut.

Pada malam tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Di antara mereka adalah Letjen Ahmad Yani (Men/Pangad), Mayjen R. Soeprapto (Deputi II Men/Pangad), Mayjen Harjono Mas Tirtodarmo (Deputi I Men/Pangad), Brigjen S. Parman (Asisten I Men/Pangad), Brigjen D.L. ... (Asisten VI Men/Pangad), dan Brigjen Soetjono Swomihardjo (Inspektur ...). Meskipun ... General A.H. Nasution ... berhasil ... upaya penculikan, ... a Surya dan ajudannya Lettu Piere Andre ... meninggal dalam peristiwa tersebut.⁹⁵ Pada ... keluar dari persembunyiannya dan ... dengan pasukan Kostrad yang dipimpin oleh Soeharto. Nasution melaporkan bahwa penculikan dan pembunuhan tersebut dilakukan oleh pasukan Tjakrabiwara, pasukan gabungan militer yang bertugas mengamankan Presiden. Setelah mengetahui hal ini, Soeharto segera mengambil alih komando Angkatan Darat karena ia adalah perwira tertinggi yang tersisa.

Meskipun berita tersebut masih belum jelas, banyak pihak yang mengklaim bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh PKI, mengingat adanya rumor tentang rencana kudeta yang dilakukan oleh mereka. Pada malam itu, Letnan Kolonel Untung Syamsuri, komandan platoon

⁹⁵ John Roosa dan Hersri Setiawan, *Dalil pembunuhan massal: gerakan 30 september dan Kudeta Suharto* (Jakarta: Hastan Mitra, 2008)

Tjakrawibawa, mengumumkan di radio bahwa ia adalah pemimpin dari gerakan tersebut, yang bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Setelah mendengar berita ini, Soeharto bersama Angkatan Udara memutuskan untuk menghadapi pasukan pemberontak dalam operasi pemberantasan yang dipimpinnya. Meskipun tidak terjadi konflik senjata, karena Soekarno memerintahkan langsung pasukan pemberontak untuk menyerah.

Pada hari berikutnya, para petinggi militer mengumpulkan seluruh ketua partai politik, namun PKI dan Parkindo tidak hadir. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menentukan pilihan partai mana yang akan mendukung angkatan Darat dan Komandemen, khususnya PKI. Kemudian, para pemimpin partai-partai ormas dari berbagai daerah mengadakan pertemuan di Taman Sunda Kelapa Jakarta. Para peserta termasuk H.M. Subchan dan Yahya Ubal (keduanya dari NU), Projokusumo (PSII), Soedjono Marhaban (PSII), Tejomulyo (Katonik), dan lain-lain. Acara tersebut diakhiri dengan pernyataan bersama yang mengutuk tindakan kudeta 30 September yang telah merenggut nyawa 6 jenderal.

Pernyataan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa PKI adalah dalang di balik kudeta tersebut, sehingga PKI dan ormas-ormasnya harus segera dibubarkan. Ini menyebabkan dilakukannya operasi penumpasan terhadap PKI beserta ormas dan simpatisannya oleh Angkatan Darat.⁹⁶ Proses penghancuran PKI di Pulau Jawa dan daerah Jawa Tengah serta Jawa Timur dilakukan dengan keras karena wilayah-wilayah tersebut memiliki banyak anggota yang mengikuti PKI. Operasi pemberantasan ini tidak hanya dilakukan oleh militer

⁹⁶ "Peristiwa G30S 1965, penumpasan PKI, dan hari-hari sesudahnya," *BBC News Indonesia*, 2017

tetapi juga melibatkan berbagai organisasi rakyat. Proses operasi ini berlangsung hingga bulan Desember, dan ketika memasuki tahun 1966, PKI sudah menjadi sejarah. Pada bulan Maret, Soeharto dengan surat perintahnya langsung membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya secara resmi, yang mendapat dukungan besar dari masyarakat dan kaum anti-komunis.⁹⁷ Kemudian, pada bulan Juli, Jenderal Abdul Haris Nasution, sebagai pimpinan parlemen, menyetujui TAP MPRS No: XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan Larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran atau Ajaran Komunis/Marksisme-Lenisme. Hal ini secara signifikan mengakhiri kemungkinan PKI atau penerusnya untuk bangkit kembali di seluruh Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

⁹⁷ Rebeca Bernike Etania dan Tri Indrawari, "Operasi Penumpasan G30S," *Kompas*, 2023

BAB V

GENEOLOGI GERAKAN POLITIK ISLAM KONSERVATIF DI INDONESIA

Istilah “genealogi” dimaksudkan sebagai suatu wacana yang berfokus pada pencarian asal-usul (asal muasal) dan sejarah suatu individu, keluarga, atau masyarakat. Dalam konteks filosofis, genealogi dikembangkan oleh Michel Foucault dan Friedrich Nietzsche, dua filsuf yang berbeda dalam pendekatan dan tujuan mereka. Namun, keduanya memiliki elemen yang sama, yaitu mencari asal-usul dari sejarah yang kompleks dan berkelanjutan.

Foucault, dalam tulisannya *Genealogy of Knowledge in Classical Greece* dan *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, menekankan bahwa genealogi tidak hanya mencari identitas tunggal atau garis keturunan, melainkan juga mencari perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam sejarah.⁹⁸ Nietzsche menekankan bahwa genealogi harus beroperasi dengan “kelembutan” yang teliti, serta tidak berusaha untuk menemukan suatu identitas tunggal yang dapat dihubungkan ke suatu “pohon-keluarga” yang sempurna. Sebaliknya, genealogi harus mengakui bahwa asal-usul adalah sesuatu yang bersifat diseminatif, tidak dapat disatukan ke dalam identitas tunggal, dan memiliki banyak awal yang tak terhitung. Dengan demikian, genealogi tidak hanya mencari asal-usul, tapi juga mencari kompleksitas dan perbedaan yang terjadi dalam sejarah.

⁹⁸Ulva Hasdiana, “Geneologi Dan Transformasi Ideologi Partai Berbasis Islam Di Indonesia Pasca-Orde Baru.” *Analytical Biochemistry*, 2018 11 (1): 15. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-593791%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.000027%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw.torrad.cl/sync/showroom/lam/es/>

Nietzsche, dalam karyanya, juga memahami genealogi sebagai suatu cara untuk mencari asal-usul dan sejarah, tetapi dengan fokus pada pencarian kekuatan dan nilai yang terlibat dalam proses sejarah. Ia berpendapat bahwa genealogi harus memahami bahwa nilai dan kekuatan yang terlibat dalam sejarah tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan juga dari berbagai sumber yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Dengan demikian, genealogi harus mencari kekuatan dan nilai yang terlibat dalam sejarah, serta memahami bagaimana mereka berinteraksi dan mempengaruhi proses sejarah. Dalam konteks filosofis, genealogi dikembangkan oleh Foucault dan Nietzsche, yang memiliki elemen yang sama yaitu mencari asal-usul dan sejarah yang kompleks dan berkelambatan. Namun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, Foucault fokus pada kompleksitas dan perubahan dalam sejarah, dan Nietzsche fokus pada pencarian kekuatan dan nilai yang terlibat dalam proses sejarah.

A. Histori Genealogi Islam Konservatif Di Indonesia

Islam “konservatif” menurut Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, dapat dilihat sebagai suatu pandangan yang berorientasi pada teks agama, yang percaya bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia. Ia juga percaya bahwa negara Islam adalah konsep negara yang pas untuk diterapkan di Indonesia dan bahwa Islam harus dijadikan sebagai prinsip partai dalam politik.¹⁰⁰

⁹⁹Amrin Ma’ruf, Wilodati Wilodati, dan Tutin Aryanti, “Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi. 2021” *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20 (2): 127-46

¹⁰⁰Rudiansyah, “Analisis Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo Tentang Negara Islam Indonesia.” 2021

Secara historis pemikiran islam yang membahas negara dan islam sebagaimana disebut berakar dari pemikiran politik Ibnu Taimiyah, menurut Ibnu Taimiyah dalam pemikiran islam dan negara, Seseorang yang dipercayakan sebagai pemimpin harus menunaikan amanah kepada pihak yang berhak dan bersikap patuh terhadap kepentingan rakyatnya, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya.¹⁰¹

Menurut Ibnu Taimiyah, negara juga diwajibkan untuk menegakkan hukum pidana yang berlandaskan ketentuan Tuhan. Seseorang dikatakan sebagai pencuri, pezina, dan lain sebagainya. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, maka selama penyelesaian tersebut harus dilakukan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun pendapat Al-A Ma'dudi yang memandang bahwasanya Islam menjadi dasar organisasi negara karena pandangan Islam menganggap bahwa pembentukan organisasi dan pemerintahan adalah suatu kewajiban yang diperintahkan demi kelangsungan Islam dan misi besar Islam.

Maududi membuat perbedaan antara demokrasi Islam dan demokrasi Barat. Di dalam demokrasi Barat, kekuasaan berada di tangan rakyat, sementara dalam Islam, kekuasaan berada di tangan Tuhan dan rakyat dianggap sebagai khalifah-Nya atau wakil-Nya. Dalam demokrasi Barat, rakyat memiliki kewenangan untuk membuat hukum mereka sendiri, sedangkan dalam demokrasi Islam, rakyat diharapkan untuk patuh dan

<http://repository.uinsu.ac.id/15474/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/15474/1/tesis-rudiansyah-nim-3001193007.pdf>

¹⁰¹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993

mengikuti hukum (syari'ah) yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul-Nya.¹⁰²

Dalam menelusuri asal-usul pemikiran politik, dapat dimulai dengan mempertimbangkan pandangan politik Islam yang berkembang di Timur Tengah mengenai konsep negara (dawlah) dan politik (siyâsah). Dalam sejarah pemikiran politik Islam, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai bentuk dan ide negara Islam yang diinginkan dan final.¹⁰³ Setelah wafatnya Nabi Muhammad, fokus utama umat Islam bukanlah agama, melainkan politik. Dengan tidak adanya panduan yang pasti mengenai konsep negara Islam, intelektual Muslim berupaya menemukannya di Qur'an dan Hadith untuk menerjemahkan ajaran Islam ke dalam bentuk politik. Hal ini menyebabkan percobaan-percobaan pendapat di kalangan intelektual Muslim yang dimulai dari warisan keilmuan Islam.¹⁰⁴

Titik tolak utama bagi para intelektual Muslim adalah posisi agama dan negara serta pertanyaan bagaimana menciptakan kembali negara ideal yang sesuai dengan ajaran Islam. Melihat arus pemikiran politik yang berkembang, dapat dibedakan tiga aliran pemikiran.¹⁰⁵ Mazhab pertama berpendapat bahwa Islam adalah agama universal dan pleno. Islam bukanlah agama sebagaimana

¹⁰² Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Editan Bumi Aksara, 2019

¹⁰³ Zaprul Khan, "Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2014. 22 (1): 105-32. <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.261>.

¹⁰⁴ Harun Nasution. 1979. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI Press.

¹⁰⁵ Galang Gerald, "Ideologi Dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme Di PDIP, Sosialisme Demokrasi Di PSI Dan Islam Fundamentalisme Di PKS." *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 2019 1 (2): 134-57. <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6268>

ditafsirkan oleh Barat Barat yang hanya mengatur urusan transendental tapi lengkap dengan urusan duniawi, sehingga agama dan negara harus menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Gagasan kedua berpendapat bahwa kedudukan agama dan negara saling terkait namun tidak saling eksklusif. Islam tidak secara eksplisit memerintahkan negara apa yang harus dilakukan, sehingga sepenuhnya berada di bawah komunitas Muslim di negara tersebut.¹⁰⁶ Pemikiran ketiga cenderung sekularis dan berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua hal yang terpisah.

Hasan Ali Binâ merupakan salah satu tokoh yang memadukan pemikiran keagamaan dan kenegaraan. Pendiri *Jurnal Muallim* tersebut berpandangan bahwa *Ummah Islamiyah* merupakan sistem yang dapat berkembang karena nilai-nilai yang ada dalam Islam adalah Al-Qur'an dan *Sunnah*.¹⁰⁷

Menuju ke arah Islam yang didasarkan pada sistem pemerintahan Islam wajib menjunjung tinggi syariah. Hukum tertinggi di negara tersebut harus didasarkan pada Alqur'an dan Sunnah. Tokoh lain yang mengikut pandangan serupa adalah Abû al-A'la al-Mawdûdî. Dilakukannya, kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah dan manusia hanya sebagai pelaksana. Sistem politik Islam bersifat universal dan tidak mengenal batas wilayah geografis, bahasa, dan kebangsaan. Pemikiran Al-Mawdûdî dikenal dengan pemikiran fundamentalis karena ingin melakukan reformasi sistem sosial, sistem pemerintahan, dan negara agar kembali pada konsep Islam secara keseluruhan dan menolak konsep lain

¹⁰⁶ Munawir, Sjadzali. 2017. "Islam Dan Tatanegara," 87

¹⁰⁷ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Postmodernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996

di luar Islam. Penganut konsep ini beranggapan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Barat tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga ajaran politik yang dikembangkan berupaya untuk mensucikan kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai awal Islam.

Berdasarkan pemikiran politik Islam di atas melahirkan pemikiran Islam konservatif dalam ormas dan partai-partai di Indonesia, baik secara asas maupun konstituen sesuai yang aturan yang berlaku di negara yang mana konservatif itu tumbuh dan berkembang.¹⁰⁸ Seiring dengan pemberlakuan yang terjadi di atas itu, sebenarnya telah terdapat beberapa upaya golongan konservatif untuk mencapai tujuan dengan melalui jalan konstitusional.

Pada pemilihan umum pada tahun 1955 dari total 27 partai politik yang berpartisipasi terdapat empat partai politik yang mendasar dalam Islam, yaitu Masyumi, NU, Partai Syariat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Tarbiyah Islamiah. Hasil pemilihan tahun 1955 menempatkan Masyumi dan NU dalam empat besar pemenang dengan masing-masing memperoleh 57 dan 47 kursi dari total 257 kursi. Namun, meskipun partai-partai Islam meraih jumlah kursi yang signifikan, terdapat perbedaan mendasar dalam visi masing-masing partai politik Islam. Perbedaan ini juga yang menyebabkan perpecahan Masyumi dengan PSII pada tahun 1947 dan Partai NU pada tahun 1952. Akibatnya, meskipun kelompok Islam memiliki posisi yang cukup baik secara jumlah, ketidaksolidan kedua partai dan perbedaan cara dalam menginternalisasi nilai-nilai agama Islam ke dalam perundang-undangan berakibat pada gagalnya pembuatan undang-undang berdasarkan ideologi Islam.

¹⁰⁸ Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*. newyork: 1957

Selain itu, sulitnya partai Masyumi dan NU secara konstitusional mengarahkan negara ke jalur syariat disebabkan karena kedua partai tersebut tidak mendapatkan kemenangan mutlak dalam pemilu 1955. Tidak adanya perolehan suara yang dominan menyebabkan partai-partai nasionalis dan berlandaskan ideologi Marxisme tetap memegang kendali dan pengaruh kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰⁹

Pada masa pemerintahan liberal, kelompok konservatif dan Islam bersikap berseberang terkait rencana Soekarno untuk mengabdikan dekrit Presiden dengan tujuan kemudiannya UUD 1945. Perlawanan terhadap dekrit Presiden ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dianggap melanggar UUD 1950 karena membatalkan hasil pemilu 1955, jalan ke konstitusional tersebut merupakan jalan yang tepat bagi kelompok konservatif untuk merealisasikan nilai-nilai Islam ke dalam rancangan undang-undang yang ada (demikian tulis Barton, Yilmaz, and Moneer dalam bukunya yang terbit tahun 2021). Perlu diingat bahwa sejak ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi negara dan kesepakatan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Republik, kelompok konservatif tidak lagi berusaha membentuk negara Islam, melainkan lebih fokus pada proses nomokrasi Islam yang dimana suatu konsep hukum dengan landasan hukum Islam dari Allah.¹¹⁰

¹⁰⁹ Irvan Tasnur, dan Zulkarnain, "Melacak Akar Dan Perkembangan Konservatisme Islam Dalam Dinamika Perpolitikan Indonesia." 2019 *JRP (Jurnal Review Politik)* 9 (1): 50-71. <https://doi.org/10.15642/jrp.2019.9.1.50-71>.

¹¹⁰ Fatkhurohman, *Perubahan Partai Politik Di Indonesia: Tinjauan Historis Normatif Pembubaran PARPOL Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi*. Malang, 2010

Pasca dekrit Presiden, Masyumi dibubarkan karena menolak terkait rencana rencana dekrit tersebut hingga dituduh sebagai pemberontak oleh Soekarno dan menjadi dalang pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatra Barat dan Sulawesi Utara.

Hal ini menimbulkan kemunduran kekuasaan konservatisme Islam di Indonesia lalu digantikan TNI dan PKI dalam dunia pemerintahan di Indonesia.¹¹¹ Setelah lengsernya orde lama dengan segala metafora yang terjadi membuat nafas secerun dengan gelangan Islam dan Masyumi lahir dengan nama yang baru yaitu Pancasila (persatuan Muslim Indonesia) tahun 1968. Namun di balik lahirnya nama yang baru terdapat biaya penekanan.¹¹²

B. Islam Konservatif Setelah Orde Baru

Gerakan Islam konservatif yang muncul setelah era Orde Baru di Indonesia memiliki akar yang kompleks dan beragam. Era Orde Baru merupakan masa transisi yang signifikan bagi perkembangan gerakan Islam konservatif di Indonesia. Untuk memahami lahirnya gerakan ini, kita perlu menggali faktor-faktor historis, sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhinya.

Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Islam di Indonesia mengalami sejumlah pembatasan dan kendala. Pemerintah Orde Baru mempromosikan konsep Pancasila sebagai ideologi negara yang harus diikuti oleh seluruh warga negara, termasuk umat Islam. Selain itu, pemerintah juga mengendalikan lembaga-lembaga keagamaan Islam melalui Departemen

¹¹¹ Opcit

¹¹² Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi: Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015

Agama, sehingga membatasi ruang gerak dan otonomi umat Islam dalam menyampaikan ajaran agamanya.¹¹³

Pembatasan ruang gerak terhadap Parmusi terjadi saat awal pembentukan partai dimana pada saat itu ketua dari Permusi ialah Muhammad Roem. Namun kehendak pemerintah pusat untuk menggantikan Mohammad Roem dan hasilnya Muhammad Roem mengundurkan diri dan diganti oleh H. Djarnawi Hadiekoesomo dengan sekretaris Lukman Harun Sebagai Sekretaris. Hal itu bertujuan untuk menghindari konflik internal Parmusi dalam perebutan kursi di parlemen yang dipanggil oleh tokoh nasional seperti M.Roem.¹¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dominasi kuat pemerintah pada masa Orde Baru tidak bisa ditentang, bahkan oleh kekuatan belia yang pernah berjaya pada masa Orde Lama. Pada pemilu tahun 1997 Golkar telah mendominasi posisi sebagai pemenang dengan 62,82%, sedangkan partai-partai konservatif seperti NU, Permus, dan PKI hanya memperoleh lebih dari 50% suara (Biro Humas Komisi Pemilihan Umum, 2000). Pada era reformasi di Indonesia, perombakan regulasi yang dimana reformasi ini menuntut perubahan secara bertahap, namun upaya de-orde baruisasi terus dilakukan di semua bidang, termasuk pemerintahan, politik, ekonomi, dan kebudayaan.¹¹⁵

Konstelasi politik yang terjadi akibat gelombang reformasi kemudian dimanfaatkan oleh berbagai kelompok, baik nasionalis, Islam, sosialis, maupun Kristen, untuk

¹¹³ Abdul Malik Abdul, "New Variants of Ultra-Conservative Islamic Schools in Indonesia: A Study on Islamic School Endeavor with Islamic Group Movement." *Power and Education*, 2024 16 (1): 14-28. <https://doi.org/10.1177/17577438231163042>.

¹¹⁴ Hasyip Basaid, Dkk, *Mengapa Partai Islam Kalah?: Perjalanan Politik Islam Dari Pra-Pemilu '99 Sampai Pemilihan Presiden*. Bandung: Pustaka alfabeta. 2015

¹¹⁵ Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Gerakan Revivalisme Islam Ke Indonesia*. Jakarta: Airlangga, 2005

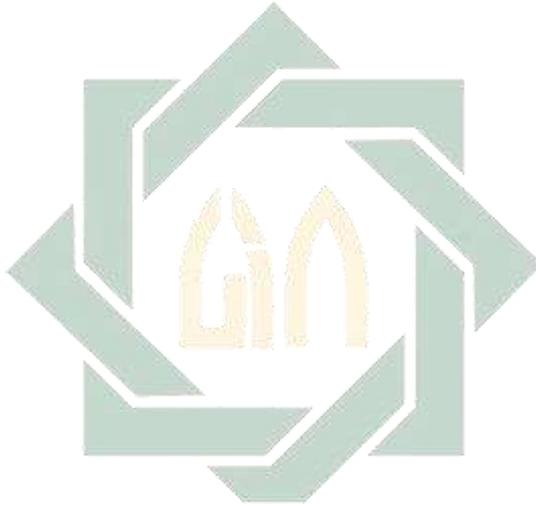
mendirikan kembali partai-partai politik baru sebagai bentuk perlawanan terhadap penyatuan paksa partai-partai ke dalam tiga kelompok utama, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Dalam hal ini partai Islam di Indonesia melebur jadi satu dalam partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan). . Partai-partai Islam konservatif, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menjadi aktor politik yang memiliki basis massa yang kuat dan dapat mempengaruhi kebijakan publik. Partisipasi gerakan Islam konservatif dalam pemilu dan pemilihan lokal maupun nasional turut membentuk lanskap politik Indonesia yang pluralistik.¹¹⁶

Tercatat saat terjalnya reformasi, partai-partai Islam ternyata meradi beberapa golongan karena perbedaan visi, arah, dan dalam menekankan nilai-nilai Islam dalam agenda.¹¹⁷ Pada masa itu partai informal dengan tujuan menjunjung tinggi platform pluralisme terbentuk seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PK (Partai Keadilan), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dan PAN (Partai Amanat Nasional) Ada keunikan dalam pola konservatisme Islam setelah reformasi, di mana partai-partai yang didukung oleh masyarakat Islam mulai terbagi. Mereka tidak hanya bergabung dengan partai-partai berbasis agama seperti PBB, PPP, PK, Masyumi, dan PSII, tetapi juga mulai menerapkan strategi melawan arus dengan mendirikan partai-partai beraliran nasionalis yang memiliki basis pendukung Islam, seperti PKB dan PAN. Dalam konteks politik nasional yang terus berkembang setelah jatuhnya

¹¹⁶ Muhammad Anzor, "Asas Islam Dan Artikulasi Politik Partai Islam" 2012

¹¹⁷ Hanta Yuda, *Presidensialisme setengah hati*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013

Orde Baru, ideologi kanan, termasuk Islam konservatif, berperan penting dalam membentuk sejarah Indonesia. Temuan baru dari artikel ini menunjukkan bahwa ideologi kanan, terutama dalam bentuk Islam konservatif, telah mempengaruhi berbagai aspek politik, sosial, dan budaya di Indonesia dari masa kolonial hingga era reformasi sekarang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VI

NU, ICMI DAN PEREBUTAN RUANG KEKUASAAN

A. Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perjalanan Politik Indonesia

1. NU dan Soekarno

Pada masa pemerintahan Soekarno, NU dianggap memiliki hubungan yang sangat erat dengan Presiden Soekarno. Kedekatan NU dengan Soekarno bahkan dinilai setara dengan hubungan antara Soekarno dan PKI, meskipun keduanya memiliki ideologi politik yang berbeda dan sering bertentangan dengan NU. Sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, NU merasa terancam dan terganggu untuk mengantisipasi potensi bahaya yang mungkin timbul akibat kedekatan PKI dengan pemerintah Soekarno. Oleh karena itu, NU berusaha mempererat hubungannya dengan pemerintahan Soekarno. Pada akhirnya pendekatan ini mendapat kritikan dari anggota NU sendiri serta pihak luar, yang menilai NU terlalu oportunis dan materialistis karena memanfaatkan hubungannya dengan pemerintah untuk keuntungan kelompok tertentu dengan menempatkan orang-orangnya dalam birokrasi pemerintahan¹¹⁸. Selain itu, NU juga memiliki tujuan yang tidak boleh diabaikan, seperti upaya untuk seimbangkan kekuatan PKI dari dalam dengan membentuk lembaga-lembaga yang bersaing dengan lembaga-lembaga yang sudah ada dalam tubuh PKI, seperti LEKRA yang bersaing dengan LESBUMI, BTI yang bersaing dengan PERTANU, dan SOBSI yang bersaing dengan SUBURMUSI.

¹¹⁸ Greg Fealy, "Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967," Yogyakarta: LKIS, (2003).

2. NU Pada Era Orde Baru

Pada tahun 1979 sampai dengan 1987, NU mengalami perubahan signifikan dalam struktur organisasinya. Munculnya orde baru membuat NU dan kekuatan politik Islam lainnya berharap bisa memperoleh kekuasaan lebih besar dibandingkan di bawah orde lama. Harapan itu ternyata hanyalah harapan palsu. NU kurang menyadari bahwa situasi telah berubah pasca munculan Orde Baru yang mengakibatkan pemerintahan dikendalikan oleh birokrat, militer dan teknokrat. Hal ini mudah berkat kemenangan Golkar, organisasi politik pemerintah yang berliberal. Dari sudut pandang pemerintah, hal itu membuat pergerakan politik NU untuk membangun negara tidak sesuai dengan sama perantara politik tidak lagi sekuler pada masa Orde Lama.

Upaya yang dilakukan melalui sidang MPRS bulan Februari-1967 yang berakhir semesta-mata untuk mengesahkan kelanjutan presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden, berhasil dilaksanakan. Namun ada beberapa tuntutan Islam yang menjadi agenda sidang: ditolak MPRS, misalnya presiden harus beragama Islam dan negara harus berdasarkan Islam. Upaya pada sidang Dewan Rakyat bulan Maret 1968 untuk mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945 juga ditolak.

Perihal Undang-Undang Pemilu Orde Baru, Subchan Z.E. Saat itu, salah satu tokoh penting NU berkomentar, secara umum UU Pemilu bisa dikatakan tidak ada gunanya dan tidak sepenuhnya demokratis.

¹¹⁹ Safari Daud. Re-Orientasi Politik Nu Pada Masa Orde Baru (Analisis Tiga Strategi Politik NU Tahun 1984-1998). (Bandarlampung: PUSAKA MEDIA, 2021).

Di bawah kepemimpinan Subchan, ia mempunyai berbagai ide dan tujuan untuk mentransformasikan NU menjadi kekuatan sosial dan politik yang disegani. Di saat posisi NU sedang tertekan khususnya di lembaga ketatanegaraan, Subchan memberikan resep untuk mengangkat posisi NU di ranah politik. Menurut Subchan, sikap ekstremis bukan bagian dari perjuangan NU. Namun, oportunisme bukanlah sikap yang baik. Menurut Subchan, oportunisme hanya membuat NU disukai dan dimengerti namun tidak dihormati dan didengarkan oleh orang-orang lain. Perilaku Subchan menimbulkan kontroversi di NU. Bahkan, politisi senior KR. Idris Cholid mengkritik Subchan. Namun Idham Chalid tidak mempunyai banyak dukungan. Kongres NU di Surabaya hampir menyetujui Subchan Tanfiziah sebagai Ketua PBNU, namun mendapat tekanan dari KH Bisri Syansuri dan para senior yang kemudian mengundurkan diri dari pencalonan Subchan. Harapan Subchan akhirnya pupus dengan keluarnya surat penolakan Rois Am KH Bisri Syansuri pada bulan Januari 1972. Namun Subchan menolak keras pemecatan tersebut dan menuntut diadakannya konferensi lanjutan¹²⁰.

Pada masa rezim orde baru, NU secara keseluruhan sempat muncul sebagai kekuatan oposisi yang kuat. Setelah tahun 1967 dan awal tahun 1970-an, muncul perbedaan penting dalam hubungan antara NU dan Orde Baru. Pada akhir tahun 1960-an hingga 1971, “pemisahan Orde Baru dari NU” paling menonjol, ketika para pejabat senior dari kalangan NU digantikan

¹²⁰ Ibid

oleh orang-orang dari kalangan modernis, sehingga mereka kehilangan jabatan menteri agama dan tidak terwakili dalam pemerintahan. pemerintah sama sekali.

Pada putaran ketiga tahun 1973-1984 NU bergabung dengan PPP. Saat itu, NU kembali ke posisi relatif semula, di mana calon merupakan pemilik daerah pemilihan terbesar di koalisi, namun kendali partai tidak berada di tangan elite politik NU. Perpecahan di PPP terjadi ketika NU kembali diangkat ke posisi Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, pembagian kursi tidak didistribusikan pada perolehan kursi di parlemen, melainkan ke partai-partai terselenggara. Reaksi sebagian politisi NU terhadap perlakuan tersebut tidak pernah mendapat respon positif dari pemerintah. Faktanya, posisi NU semakin menurun. Kepemimpinan PPP yang dipegang oleh M. Y. S. (Indonesia) dan didukung oleh pemerintahan Orde Baru semakin menguat sehingga NU semakin terpinggirkan.¹²¹

Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, yang dimulai dengan pelantikannya secara resmi oleh MPR pada tahun 1968, menandai awal dari sebuah perubahan sejarah bagi Bangsa Indonesia serta bagi seluruh lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama. Kebijakan penggabungan partai politik serta upaya pembersihan dan penegakan Pengamalan Pancasila yang diusung oleh rezim Orde Baru mengharuskan semua lembaga atau organisasi untuk menerima dan menerapkan Pancasila sebagai azas tunggal. Bahkan upaya penyeragaman ini juga mencakup dunia

¹²¹ Ibid

pendidikan pesantren dengan program penyeragaman kurikulum pesantren pada era 1970-an¹²².

NU yang pada saat itu telah terlibat dalam politik nasional dengan bertransformasi menjadi partai politik, dianggap sebagai kekuatan yang potensial dan dapat mengancam posisi pemerintahan Orde Baru jika terjadi ketidakselarasan. Dilihat dari hasil pemilu Desember 1955, di mana NU berhasil meraih 45 kursi di parlemen, meningkat secara signifikan dari sebelumnya hanya 8 kursi, menunjukkan peningkatan politik NU yang semakin menguat seiring dengan perubahan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa NU telah memiliki pengaruh dalam politik nasional sejak era Orde Lama dan berlanjut hingga Orde Baru. Setelah jatuhnya Pancasila ke Orde Baru, NU tidak langsung menjadi organisasi-organisasi sosial politik yang ada yang mengakibatkan NU terpaksa bergabung dalam Perti sebagai beberapa organisasi politik di bawah payung Perti.

Pemerintahan Orde Baru mengadopsi pendekatan yang lebih fokus pada aspek budaya Jawa dalam administrasinya. Trikotomi antara Abangan, Priyayi, dan Santri masih berperan penting selama masa Orde Baru, di mana golongan yang dominan dalam masyarakat menunjukkan kekuatan terbesar. (Gertz 1980) Pemerintah, di bawah kepemimpinan Soeharto, menyadari pentingnya memperoleh dukungan massa yang luas, sehingga mereka mencari cara untuk menggalang dukungan dari berbagai golongan, termasuk agama, ras, bahasa, ekonomi, dan

¹²² As'ad Said Ali, "Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati," Jakarta: LP3ES, (2008).

¹²³ M. Ali Haidar dan Arif Hidayatullah Depolitisasi Nahdlatul Ulama 1968-1983. e-Journal Pendidikan Sejarah. Volume 2, No 3. 2014

pendidikan. Kelompok Golkar, yang didorong oleh beberapa organisasi seperti Kosgoro, merupakan respons pemerintah Orde Baru terhadap tantangan untuk memperoleh dukungan massal. Bentuk organisasi ini cukup unik dan kompleks, karena Golkar bukanlah partai seperti PPP atau PDI, tetapi memiliki posisi yang setara dengan kedua partai tersebut. Pemerintah memberikan jalur partisipasi kepada Golkar dalam pemilihan umum, dan secara tidak langsung mendorong organisasi ini untuk mendapatkan dukungan sebanyak mungkin, termasuk melalui tekanan pada pegawai negeri untuk memberikan suara kepada Golkar.

Sebagaimana dikutip Anwar Zircus (1998) tentang Islam dan negara dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, kelompok kompromis yang diformulasikan oleh Nurcholis Madjid, dimana dia berpandangan bahwa kehidupan spiritual dan duniawi merupakan kehidupan duniawi diatur oleh logika dunia. Pernyataan ini menyatakan bahwa Islam lebih cenderung memiliki sifat liberal dan humanis, menawarkan kebebasan dan kemanusiaan kepada para penganutnya daripada menjadi sebuah kekuasaan politik yang menakutkan, terutama bagi para pejabat negara. Di kalangan NU pemikiran akomodatif dapat dilihat pada diri Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dimana sukses menarik gerbong NU ke khittah 1926 yang intinya ialah memisahkan NU dari politik dan bukan sebagai institusi. (Ali Maschan 2012) Artinya bahwa konsekuensi logis dari khittah adalah tidak ada politik Islam dan selanjutnya juga tidak ada lembaga politik Islam atau dengan kata lain menegaskan

124 Ibid

pentingnya lembaga politik Islam. *Kedua*, kelompok moderat, dengan tokoh Amien Rais, Jalaluddin Rahmat dan Imaduddin yang berpendirian bahwa Islam tidak hanya dipahami sebagai agama, akan tetapi juga sebagai ideologi. Hal ini berbeda dengan kelompok akomodatif yang menginginkan perubahan dari dalam negara, kelompok moderat justru menginginkan perubahan dari luar negara. *Ketiga*, kelompok idealis radikal, yang beranggapan bahwa Islam berada di atas semua ideologi sehingga untuk memenerjuangkannya diperlukan kekerasan dan prinsip menolak ideologi Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi kehidupan organisasi sosial kemasyarakatan dan menggantikannya dengan ideologi Pancasila¹²⁵.

Pada tahun 1973, H. M. Haliq yang menjabat sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia langsung menerima keputusan untuk berkoalisi dengan PPP tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan anggota PBNU lainnya. Keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anggota lainnya, akhirnya mereka menyetujui keputusan tersebut karena dianggap sebagai langkah terbaik mengingat kondisi saat itu. Wakil ketua PBNU Ahmad Syaihu berpendapat bahwa perubahan ini akan terbukti menguntungkan NU. Sebab selama ini keterlibatan NU dalam panggung politik telah melupakan misi utamanya, terutama dalam pengembangan pendidikan dan dakwah. Pendapat realistik ini tidak umum pada zamannya, karena para kiai sudah terbiasa dengan

¹²⁵ Ali Maschan Moesa, "Kiai NU dalam Paradigma Politik Kebangsaan," *Jurnal Al-Daulah* (2012).

patronase politik.¹²⁶ Walaupun pada akhirnya, akibat terlalu mendalam persoalan dalam bidang politik praktis ini berpengaruh terhadap terbengkalainya kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang sebenarnya menjadi tujuan utama NU sebagai organisasi sosial agama.

Menghadapi krisis yang menimpa organisasi, NU melakukan introspeksi mendalam terhadap kepemimpinan internalnya. Ketika mencapai puncak krisis tersebut, NU memutuskan untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasarnya yang tertanam dalam khittah. KH. Wahid Husein dalam selawat ke-100 am PBNU dalam pidato iftitah-nya mengajak warga NU untuk kembali pada khittah. Gagasan ini memperoleh sambutan lebih banyak dari sebelumnya. Dalam salah satu keputusannya yang bersifat konsolidasi struktur organisasi, partai "berpegangan: mempertimbangkan gagasan berwujud wadah baru non-politis untuk menampung aspirasi dan aspirasi Islam ahlussunna wal jama'ah kalangan umat yang oleh karena pekerjaannya atau oleh karena faktor-faktor lain harus meninggalkan ikatan-ikatan politiknya dengan partai politik"¹²⁷. Dari pidato yang disampaikan disepakati bahwa NU kembali ke Khittah 1926, saat dilakukannya Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984.

Antara tahun 1979 dan 1987, NU menggunakan kemampuan beradaptasi politik, yang memungkinkan mereka menavigasi lingkungan politik Indonesia yang

¹²⁶ Moh. Mahbub, "NU Tulang Punggung Negara: Strategi NU Pasca-Khittah dalam Membangun Relasi Sosial, Politik, dan Keagamaan." Yogyakarta: Sulur Pustaka, (2023).

¹²⁷ Moh. Mahbub, "NU Tulang Punggung Negara: Strategi NU Pasca-Khittah dalam Membangun Relasi Sosial, Politik, dan Keagamaan." Yogyakarta: Sulur Pustaka, (2023).

kompleks sambil mempertahankan identitas agama mereka. Karena mudah beradaptasi, NU mampu membentuk aliansi dengan berbagai partai dan faksi, sehingga memastikan pentingnya NU dalam politik Indonesia. Namun, pendekatan adaptif NU bukannya tanpa kritik. Beberapa orang berpendapat bahwa pendekatan ini mengkompromikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama mereka, sehingga menyebabkan hilangnya otoritas moral politik terhadap pendekatan akomodatif NU. Pendekatan ini memungkinkan mereka dikooptasi oleh elit politik, sehingga meniadakan independensi dan otonomi mereka. Sebenarnya, pendekatan oposisionistik NU pada periode ini didiklatkan oleh keinginan untuk memanfaatkan peluang politik yang muncul, seringkali dengan mengorbankan prinsip-prinsip agama. Pendekatan oposisionistik NU melalui serangkaian aliansi dan koalisi dengan berbagai aktor politik, yang terkadang menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen mereka terhadap nilai-nilai agama. Pentingnya pendekatan politik NU pada masa itu tidak bisa dianggap remeh, hal ini berdampak besar terhadap perkembangan politik Indonesia dan peran agama dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan politik NU pada periode ini mengingatkan kita pada sifat politik agama di Indonesia yang kompleks dan seringkali kontradiktif, dimana nilai dan prinsip agama harus diimbangi dengan tuntutan realitas politik.

3. NU dan PPP

Menurut Syamsuddin Haris (1991), PPP baru mengalami konflik internal yang besar menjelang pemilu 1982. Penyebab utama konflik tampaknya

adalah kekecewaan NU terhadap daftar calon anggota DPR PPP sebelum pemilu 1987. Beberapa tokoh nahdliyin melakukan perlawanan terhadap kekuasaan orde baru dan menjadi salah satu faktor penting terjadinya konflik internal PPP, selain adanya intervensi pemerintah dalam pelembagaan konflik tersebut, maka pamor partai Islam tersebut lambat laun berubah. ditinggalkan Akibatnya, perolehan suara PPP turun tajam dari 27,1 persen pada pemilu tahun 1977 dan 19,29 persen menjadi 15,97 persen pada pemilu tahun 1982. Kemudian secara bertahap meningkat menjadi 17 persen pada pemilu tahun 1987 dan 22,43 persen pada pemilu tahun 1992 hingga akhirnya mencapai pemilu tahun 1997.

Di sisi lain, menurut Mas Soedarmo (1983), pukulan politik yang dialami NU adalah ketika Naro secara sepihak memasukkan daftar calon pada pemilu 1982, yang persentasenya NU hanya 10,21. Para aktivis dan anggota NU yang paling vokal seperti Yusuf Riasjim, Syaifuddin Zuhri dan Imam Rosjidi berada pada posisi terbawah sehingga kecil kemungkinannya untuk terpilih. Meskipun ada perolakan keras, pemerintah menerima daftar Naro sebagai satu-satunya daftar yang sah. Sebelum dan saat pemilu 1982, ada 29 calon NU yang dicopot dari daftar calon PPP. Akibatnya, banyak tokoh NU yang kecewa dan menarik dukungannya terhadap PPP. Insiden tersebut memperdalam konflik antara Fraksi NU dan Fraksi Muslim Indonesia (MI) di PPP, dan di internal NU sendiri, insiden tersebut memicu perdebatan sengit tentang manfaat terlibat dalam politik parlemen. Politisi-politisi yang sudah disingkirkan ikut bersuara dengan tokoh-tokoh lain

karena berbagai alasan, menyarankan NU untuk meninggalkan PPP dan meninggalkan politik praktis¹²⁸.

Di Indonesia, pemilu sudah tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1955, hal tersebut menimbulkan banyak pertidebatan. NU menginginkan pemilu cepat dilaksanakan kembali, karena mereka yakin sikapnya yang anti komunis akan membuatnya memenangkan pemungutan suara di tingkat nasional. Pada tahun 1966, Anson meminta pemilu dilaksanakan paling lambat tahun 1967, namun MPRS memutuskan pemilu dilaksanakan pada Juli 1968.

Semerang Orde Baru, Suharto mulai membuka bantuan dan penanaman modal dari luar negeri seperti dari Amerika, Jepang, dan lain-lain. Bantuan dan penanaman modal tersebut seolah-olah tidak terikat dengan aturan resmi pemerintah. Pada tahun 1967, bantuan dari asing mencapai 200 juta dolar dan pada tahun 1969 bantuan mencapai 300 juta rupiah. Bantuan tersebut terus meningkat sampai tahun 1975. NU sangat menekankan dampak bantuan asing tersebut serta mengawasi dampak budaya asing yang kelak masuk di Indonesia. NU meminta kepada Soeharto supaya penanaman modal dan bantuan asing dibatasi.¹³⁰

Dalam kondisi perpolitikan masa Orde Baru dimana Parnpol menjadi sangat lemah posisinya, akibat ditiadakannya unsur Parnpol di birokrasi. Jika pada masa Soekarno hingga masa transisi sampai Pemilu

¹²⁸ Munawir Ariffin, Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru. Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol. 5, No. 1.2019

¹²⁹ Nurul Shobacha, "Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru." Jurnal Review Politik 02, no. 1 (2012).

¹³⁰ Shobacha, Nurul. "Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru." Jurnal Review Politik 02, no. 1 (2012).

1971, masih ada wakil-wakil partai di kabinet, maka setelah Pemilu 1971 seluruh anggota kabinet bebas dari unsur Parpol. Kabinet didominasi oleh ABRI dengan dwi fungsinya menjadi semakin kokoh di birokrasi dan politik. Kondisi tersebut dapat dilihat pasca Pemilu 1971 disepakati bahwa wakil ABRI sejumlah 100 orang di DPR, tanpa dipilih. Parpol sangat lemah dengan sumberdaya manusia yang dipaksa sesuai dengan kebutuhan pembangunan Orde Baru. Tokoh-tokoh Parpol dianggap sebagai masalah sistem Soekarno yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dan tentu saja dalam perekrutan partai-partai politik lebih cenderung mengutamakan massanya daripada kualitas sumberdaya manusianya¹³¹.

Di samping itu, selain dalam konteks kepartaian, Orde Baru yang dipelopori Suharto mengingkarkan partai politik menjadi lebih sedikit. Sehingga terjadi penggabungan paksa partai-partai politik menjadi partai, dan hal tersebut cukup mengejutkan masyarakat. Sehingga NU, Parmusi, PSII, dan Perti digabungkan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PNI, Pakindo, Partai Katholik, IPKI dan Murba digabungkan pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PPP sendiri mulai dibentuk pada tanggal 5 Januari 1973, dengan tujuan mempertahankan dan membangun negara Republik Indonesia di atas landasan Pancasila dan UUD 1945, menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah¹³².

Penyatuan partai-partai Islam kedalam PPP sebetulnya merupakan upaya penyederhanaan partai

¹³¹ M. Ali Haidar dan Arif Hidayatullah, Depolitisasi Nahdlatul Ulama 1968-1983. e-Journal Pendidikan Sejarah. Volume 2, No 3. 2014

¹³² Shobacha, Nurul. "Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru." Jurnal Review Politik 02, no. 1 (2012).

yang merugikan partai-partai Islam sendiri. Sebab sejarah keberadaan partai-partai Islam, sejak semula hanya bersifat organisasi sosial keagamaan seperti halnya NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam dan Perti, yang selalu diwarnai dengan ketegangan antara tokoh-tokohnya karena perbedaan cara pandang dan perbedaan-perbedaan lainnya. Ini artinya usaha pemerintah dalam menyatukan partai di balik obsesinya untuk menyederhanakan pemerintahan, sebenarnya sudah mengabaikan latar belakang organisasi dengan latar belakang ideologi gerakan yang berbeda.

Memang pada kondisi tertentu diantara organisasi-organisasi Islam itu pernah bersatu, seperti halnya pada masa penjajahan Belanda dengan didirikannya IAI. Kemudian pada zaman Jepang dan Partai Masyumi pada era kemerdekaan. Namun stabilitas organisasi itu hanya bersifat sementara, pada saat mereka sama-sama menghadapi ancaman dari luar yang harus dihadapi dengan kesatuan Islam. Namun setelah berjalan beberapa lama, benih-benih konflik lama kembali muncul menjadi pemicu konflik. Penyebab konflik itu dari waktu ke waktu memiliki benang merah berupa upaya mempertahankan ideologi gerakan dan perebutan status dan kekuasaan dalam organisasi pemersatu, dengan demikian yang semula diharapkan menjadi pemersatu, kemudian menjadi wadah dimana tokoh-tokohnya saling memperuncing konflik.

Di sinilah NU mulai diperlakukan tidak adil sejak Partai Islam dijadikan satu. Lambat laun, orang-orang tradisional menilai, tersisihnya NU dikarenakan kurangnya "kematangan Politik NU sendiri". Hasyim Lathif pun mengatakan, dalam Orde Baru ini, ABRI lah satu-satunya kekuatan yang mempunyai konsep

pemerintahan yang sudah siap. Menjelang tahun 1980-an, karakteristik yang mewarnai Indonesia adalah perdebatan ideologis dan perubahan yang mendalam di dalam tubuh lembaga-lembaga Islam. Salah satu pengaruh juga dikarenakan adanya ideologi Timur Tengah mulai bebas masuk ke Indonesia. Di dalam tubuh PPP sendiri terjadi banyak sekali persoalan terutama antara NU dan Parmusi yang telah berganti menjadi Muslimin Indonesia (MI) setelah masuk ke dalam PPP. Pada sistem pertama partai ini tahun 1975, susunan kursi yang diperoleh adalah kursi yang diperoleh NU, MI, PSII dan PIR dalam Pemilu 1971 dijadikan sebagai ukuran tetap dan kekuatan masing-masing pada pemilu berikutnya. Daftar calon dalam daftar PPP baru dan dihidil bagi setiap komponen ini dalam proporsi pelaksanaan pemilu 1971, dengan beberapa penyesuaian untuk membantu partner partai lainnya. Hasil pemilu 1977 menunjukkan peningkatan bagi PPP tetapi karena redistribusi kursi maka kursi untuk NU berkurang sedikit, dari 58 kursi menjadi 56 kursi (1996).

Kekecewaan NU semakin menjadi-jadi ketika Naro, ketua umum PPP menggantikan Mintaredja, secara sepihak mempersiapkan daftar calon untuk pemilu 1982 yang proporsi anggota NU di dalamnya dikurangi secara drastis dan diletakkan di urutan paling bawah sehingga kemungkinan untuk dipilih sangat kecil. Walaupun terdapat protes yang keras namun usulan daftar calon tersebut disetujui oleh pemerintah dan menjadi satu-satunya daftar calon yang sah. Kejadian ini semakin memperburuk hubungan antara faksi NU dan faksi MI dalam PPP. Di dalam NU sendiri kejadian ini menimbulkan perdebatan panas

tentang kegunaan dan keikutsertaan NU dalam politik parlementer. Para politisi yang “dibersihkan” dalam PPP menyatukan suara dengan para tokoh NU lain untuk keluar dari PPP dan meninggalkan politik praktis¹³³.

Di tahun 1975, NU memutuskan untuk mengadakan konferensi besar dengan mengundang para ulama membahas situasi yang serba baru. Sebab saat itu para pemimpin NU tampak meninggalkan ormas NU dan partai. Karena kekosongan itu, wilayah daerah mulai mengambil inisiatif. Para ulama memutuskan untuk “mempertahankan usaha di bidang sosial” sambil menyesuaikan diri dengan identitas baru organisasi keagamaan “Niyah”. Pada tanggal 12 Februari 1975, dibentuk lembaga pendidikan dan penelitian (Lembaga Ta’arif) di Yogyakarta sebagai rintisan pada sekolah-sekolah NU agar masuk dalam Yayasan¹³⁴.

Pada Mei 1977 di Surabaya, Rais Am Kiai Wahab Hasbuan menggerakkan para aktivis agar kembali ke khittah 1926. Ada beberapa faktor terkait mengarah pada penolakan keikutsertaan kehidupan politik. Pertama, ada tekanan yang diderita para pegawai negeri/para pengusaha yang tergantung pada administrasi untuk mendapatkan bagian tender pekerjaan umum. Kedua, ketidakpuasan terhadap pengabaian tugas-tugas utama yang bersifat sosial/pendidikan. Pengabaian jangka panjang dapat membuat NU kehilangan akarnya dalam masyarakat. Ketidakpuasan juga banyak muncul karena kepemimpinan Idham Chalid yang suka merahasiakan

¹³³ Arif Wicaksana, “Nahdlatul Ulama Pada Masa Orde Baru.” <https://medium.com/> (2016).

¹³⁴ Ibid

hal yang mestinya diketahui oleh umum dan tidak memberikan dukungannya pada cabang-cabang daerah yang menderita tekanan dari pemerintah sehingga dalam beberapa kasus menyebabkan hancurnya (cabang tersebut)¹³⁵

Musyawarah Nasional Situbondo tahun 1983 dan Mukhtar Situbondo ke 27 tahun 1984 menandai perubahan besar dalam NU yang ditandai dengan rekonsiliasi NU dengan pemerintahan Orde Baru dan juga munculnya generasi baru di puncak pimpinan NU. Tahun 1984 merupakan titik balik sejarah NU. Bagaimana tidak, tahun ini NU memutuskan kembali ke khittah 1926 yang berarti NU memutuskan keluar dari politik yang ketat praktik kerja politisi NU kemudian bebas masuk partai politik ke Golkar dan PPP sesuai keinginan. Keputusan menarik diri dari politik praktis dan menerima konsultasi sebagai satu-satunya bentuk politik NU merupakan respons terhadap tekanan pemerintah negeri.¹³⁶

Pasca Mukhtar Situbondo tahun 1983, setelah 34 tahun merdeka, NU memasuki babak baru dan hakikatnya terlibat dalam kanvas politik praktis. Era pasca kongres ini juga diwarnai dengan hadirnya generasi muda dalam kepemimpinan Tanfidziah PBNU yaitu KH. Abdurrahman Wahid dan beberapa tokoh organisasi muda lainnya pengganti KH. Idham Chalid terpilih. Kepemimpinan PBNU Tanfidziah yang dimulai pada tahun 1984 didominasi oleh generasi yang memiliki cara berpikir dan bertindak yang kritis,

¹³⁵ Feillard, Andree. "Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil." Yogyakarta: LkiS, (1997).

¹³⁶ Akhmad Syaekhu Rakhman, Dinamika Perkembangan Politik Nahdatul Ulama Pasca Khittah Tahun 1984-1999. Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah. Vol 1 No 1 2021.

rasional, dan cenderung berubah dalam budaya NU yang sudah mapan. Ide-ide yang dikembangkan tokoh muda NU mendapat legitimasi resmi melalui Kongres Situbondo. Di sini, warga NU mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan sesuai dengan haknya, kebebasan itu timbul karena tidak mempunyai ikatan politik formal dengan organisasi mana pun, yang berasal dari kembalinya organisasi tersebut ke Khittah pada tahun 1926¹³⁷. Dengan demikian, NU fokus pada pengembangan organisasi sebagai organisasi keagamaan yang berdiri di atas nilai-nilai serta dalam politik kekuasaan praktis.

B. Gerakan Sosial Politik NU dan Pembentukan Paham Ahlussunnah Wal Jama'ah

Ahlussunnah Wal Jama'ah merupakan dasar dan pijakan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Dasar dan pijakan tersebut membentuk sikap, cara pandang, sikap dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial-politik NU. Ajaran *Ahlussunnah Wal Jama'ah* tidak hanya menyediakan landasan keagamaan, tetapi juga menjadi pemandu bagi Nahdlatul Ulama dalam menyikapi realitas sosial politik¹³⁸. Pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai *Ahlussunnah wal jama'ah* inilah yang menjadi kunci yang menentukan arah gerakan sosial politik NU.

Ahlussunnah Wal Jama'ah merupakan sebuah pemahaman tentang akidah yang berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. *Ahlussunnah Wal Jama'ah* ditafsirkan sebagai paham yang

¹³⁷ Arif Hidayatullah, M. Ali Haidar, Depolitisasi Nahdlatul Ulama 1968-1983. e-Journal Pendidikan Sejarah. Volume 2, No 3. 2014

¹³⁸ Maya Putri, "Dinamika Hubungan NU dengan Pemerintah: Studi Kasus Peran NU dalam Kebijakan Pembangunan Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, 2022. 17(2), 30-45.

menganut empat madzhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki. Selain itu, *Ahlussunnah Wal Jama'ah* juga mengikuti Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam bidang akidah, serta Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali dalam bidang tasawuf¹³⁹. Konsep ini tidak hanya memiliki dimensi teologis dan spiritual, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya dalam kehidupan umat Islam. Dalam konteks Indonesia, *Ahlussunnah Wal Jama'ah* memiliki peran yang penting terutama dalam salah satu organisasi terbesar seperti Nahdlatul Ulama. Selain itu, *Ahlussunnah wal jama'ah* juga membentuk kerangka pemikiran yang kokoh dan stabil bagi Nahdlatul Ulama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan politik¹⁴⁰.

Ahlussunnah wal jama'ah sebagai landasan teologis dan ideologis telah menjadi pondasi penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Khususnya, *Ahlussunnah wal jama'ah* sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah lama menganut paham Aswaja dan mengimplementasikannya dalam berbagai kegiatan sosial dan politik.

Dalam konteks dinamika sosial-politik di Indonesia, peran NU sebagai agen pembangunan sosial-politik sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh landasan ideologis yang kuat dalam Aswaja, yang memandu NU dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan politik masyarakat.¹⁴¹

¹³⁹ M. Khairul Anwar, "Dinamika Peran Nahdlatul Ulama dalam Pembangunan Sosial-Politik di Era Digital." *Jurnal Pemikiran Islam*, 2021. 18(2), 89-104.

¹⁴⁰ <https://unupurwokerto.ac.id/pengertian-dan-metode-berpikir-ahlussunnah-wal-jamaah/>

¹⁴¹ M. Ridwan Idris, "Kontribusi NU dalam Pendidikan Politik Masyarakat: Pendekatan Aswaja." *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 2020. 7(1), 20-35.

Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Kota Surabaya oleh seorang ulama dan para pedagang untuk membela praktik Islam tradisional. Organisasi ini didirikan oleh Hasyim Asy'ari, seorang ulama dan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng dari Jombang, Jawa Timur. Nahdlatul Ulama memiliki anggota yang berkisar dari 40 juta di tahun 2013 dan lebih dari 95 juta pada tahun 2021⁵ menjadikannya organisasi Islam terbesar di dunia. Nahdlatul Ulama lahir sebagai respons terhadap dua peristiwa yang penting pada masa itu yaitu penyebaran paham modernisme Islam yang dianggap mengancam tradisi keagamaan dan pendidikan kolonial Belanda terutama kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Nahdlatul Ulama telah banyak merintis berbagai kegiatan keagamaan, terutama yang menjadi alat perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Selama masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia.

Nahdlatul Ulama juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas umat Islam di Indonesia dan menyebarkan ajaran Islam yang toleran seperti kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Nahdlatul Ulama juga aktif dalam pembangunan nasional, menciptakan stabilitas politik, dan berkontribusi dalam merumuskan kebijakan nasional. Nahdlatul Ulama memiliki berbagai lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama sesuai dengan kelompok masyarakat tertentu dan memerlukan penanganan khusus. Lembaga-lembaga ini meliputi Lembaga Dakwah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan, dan lain-lain. Masing-masing lembaga ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial. Nahdlatul Ulama terus beradaptasi

dan berkembang untuk menghadapi tantangan masa depan¹⁴². Organisasi ini akan tetap menjadi kekuatan yang menjaga persatuan umat Islam, memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial, dan mendorong dialog dan kerukunan antar agama. Nahdlatul Ulama akan terus berperan dalam pembangunan masyarakat yang inklusif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil'alam.⁷

Ahlussunnah Wal Jama'ah merujuk pada kelompok mayoritas umat Islam yang berpegang pada ajaran yang dianggap paling benar yang lurus, mengikuti sunnah Nabi Muhammad *S.A.W.* dan para sahabatnya. Beberapa pandangan ahli tafsir paksa mengenai *Ahlussunnah Wal Jama'ah* sebagai gerakan sosial-politik Islam di kalangan Ulama.

Menurut K.H. M. H. Abdurrahman, Ahlussunnah Wal Jama'ah yang dipimpin oleh khatibul waqf KH. M. Hasyim Ashari ialah golongan ulama ahli tafsir, ahli hadits, dan ahli fikih yang berpegang teguh mengikuti dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin¹⁴³. *Ahlussunnah Wal Jama'ah* adalah jalan tengah yang menolak ekstremisme dalam bentuk apapun, baik yang terlalu keras maupun terlalu longgar.

Qur'aisy Shihab menjelaskan bahwa, Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah kelompok yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Menurutnya, Ahlussunnah Wal Jama'ah mengedepankan moderasi dalam beragama, sehingga dikenal dengan sikap yang seimbang dan tidak ekstrim. Kemudian Said Aqil

¹⁴²Wahyu Hidayat, "Pengaruh NU dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Pendekatan Aswaja." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 2021. 25(2), 110-125

¹⁴³Bambang Budiman, "Tantangan dan Peluang NU dalam Pengentasan Kemiskinan: Perspektif Aswaja." *Jurnal Ilmu Sosial*, 2020 15(1), 45-58

Siradj juga menekankan bahwa Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah landasan bagi umat Islam untuk mengembangkan sikap toleran, moderat, dan seimbang. Ahlussunnah Wal Jama'ah menurutnya harus menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan radikalisme dan intoleransi.

Selain itu, Azyumardi Azra menjelaskan bahwa Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah kerangka teologis dan kultural yang digunakan oleh berbagai organisasi Islam di Indonesia, terutama Nahdlatul Ulama. *Ahlussunnah Wal Jama'ah* membantu menegakkan keberagaman dan pluralisme dalam masyarakat Indonesia. Abdurrahman Ghazali berpendapat bahwa Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah jalan tengah yang diadopsi oleh mayoritas umat Islam untuk menegakkan keseimbangan. *Ahlussunnah Wal Jama'ah* menurutnya harus menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengembangkan sikap toleran dan inklusif.¹⁴⁴ Ahmad Syafii Maarif mengungkapkan bahwa *Ahlussunnah Wal Jama'ah* harus tetap relevan dan relevan dengan tantangan zaman modern. Ia mendorong interpretasi ulang ajaran *Ahlussunnah Wal Jama'ah* yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Nur Syam menekankan bahwa *Ahlussunnah Wal Jama'ah* harus dipahami sebagai jalan tengah yang menolak segala bentuk ekstremisme. *Ahlussunnah Wal Jama'ah* menurutnya, harus menjadi panduan bagi umat Islam dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Ulama. Dalam konteks politik, *Ahlussunnah Wal Jama'ah* membawa nilai-nilai seperti toleransi, keberagaman, dan modernisme, yang menjadi landasan bagi Nahdlatul Ulama dalam berinteraksi dengan

¹⁴⁴A. Rofiqul Hasan, "Kontribusi Nahdlatul Ulama dalam Pendidikan Karakter Bangsa: Perspektif Aswaja." *Jurnal Pendidikan Islam*, 2020(7. 1), 45-58.

masyarakat yang beragam di Indonesia.¹⁴⁵ *Ahlussunnah Wal Jama'ah* juga memberikan legitimasi agama untuk Nahdlatul Ulama dalam menyuarakan aspirasi politiknya, sehingga memperkuat posisi Nahdlatul Ulama sebagai salah satu kekuatan politik yang penting di Indonesia.¹⁴⁶

Di samping itu, penulis menemukan bahwa *Ahlussunnah Wal Jama'ah* juga memiliki implikasi yang penting dalam aktivitas sosial Nahdlatul Ulama. Konsep ini mendorong Nahdlatul Ulama untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, *Ahlussunnah Wal Jama'ah* tidak hanya menjadi landasan ideologis, tetapi juga menjadi pendorong Nahdlatul Ulama untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.¹⁴⁷

1. Pembangunan Sosial Politik melalui Konsep *Ahlussunnah Wal Jama'ah*

Konsep *Ahlussunnah Wal Jama'ah* memiliki peran yang sentral dalam pembentukan landasan ideologis Nahdlatul Ulama (NU) dalam konteks pembangunan sosial-politik di Indonesia. *Ahlussunnah wal Jama'ah* tidak hanya menjadi landasan teologis, tetapi juga menjadi pedoman praktis yang memandu NU dalam mengembangkan program-program dan kebijakan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Zaenuddin, *Ahlussunnah wal Jama'ah* menekankan pentingnya moderasi dan toleransi dalam menjalankan

¹⁴⁵ Rizki Hadi, "Tantangan Baru dalam Dakwah NU: Tinjauan dari Perspektif Aswaja." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 202113(1), 110-125.

¹⁴⁶ Maya Putri, "Dinamika Hubungan NU dengan Pemerintah: Studi Kasus Peran NU dalam Kebijakan Pembangunan Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, 2022. 17(2), 30-45.

¹⁴⁷ Ahmad Firdaus, "Strategi Dakwah Media Sosial NU dalam Masa Pandemi COVID-19: Perspektif Aswaja." *Jurnal Media Sosial*, 2024 12(1), 45-

ajaran Islam, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial-politik NU. Konsep ini menjadi pondasi bagi NU dalam membangun hubungan yang harmonis antara agama dan politik, serta antara umat Islam dengan pemeluk agama lain dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Aswaja juga menekankan prinsip keadilan sosial, yang menjadi landasan bagi NU dalam mengembangkan berbagai program untuk meringankan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah menjadi titik tolak NU dalam mengembangkan strategi yang inklusif dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan-tantangan sosial-politik yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.¹⁴⁸

Dalam konteks pembangunan sosial-politik, Ahlussunnah wal Jama'ah juga memberikan landasan untuk menrelakan dialog antaragama yang konstruktif dan berkeadilan serta toleransi antarumat beragama. NU telah aktif dalam berbagai kegiatan dialog antaragama sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia.¹⁴⁹ Namun, implementasi konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam pembangunan sosial-politik tidak terlepas dari tantangan. menyoroti kompleksitas dalam mengelola hubungan antara agama dan politik dalam konteks demokrasi Indonesia yang pluralistik. NU dihadapkan pada tuntutan untuk tetap konsisten dengan prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal*

¹⁴⁸Ana Rahmawati, "Tantangan NU dalam Mengatasi Ekstremisme Agama: Perspektif Aswaja." *Jurnal Ekstremisme Agama*, 2021 5(2), 110-125.

¹⁴⁹ Muhammad Putra, "Peran Nahdlatul Ulama dalam Mengatasi Tantangan Sosial-Politik di Indonesia: Tinjauan Sejarah." *Jurnal Sejarah Nasional*, 2024 3(1), 45-58.

Jama'ah sambil tetap mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam.

Selain itu, adaptasi terhadap dinamika sosial-politik juga menjadi tantangan tersendiri bagi NU. Mencatat bahwa NU perlu terus melakukan kajian dan refleksi terhadap relevansi prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah dalam menghadapi perubahan sosial-politik yang terus berubah di Indonesia. Hal ini menuntut NU untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan dalam rangka memastikan relevansinya dalam konteks masyarakat yang berkembang.¹⁵⁰ Meskipun demikian, prospek konsep Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai landasan ideologis dalam pembangunan sosial-politik oleh NU di Indonesia tetaplah cerah. Ahlussunnah wal Jama'ah memiliki daya tarik yang kuat sebagai kerangka nilai yang moderat, inklusif, dan toleran yang sangat sesuai dengan semangat Pancasila dan pelaksanaan antarumat beragama di Indonesia dengan mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah sambil tetap adaptif terhadap perubahan sosial-politik, NU memiliki potensi untuk terus menjadi motor penggerak dalam pembangunan sosial-politik yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagai landasan ideologis NU telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan sosial-politik di Indonesia. *Ahlussunnah wal Jama'ah* bukan hanya menjadi panduan teologis, tetapi juga menjadi panduan praktis yang memandu NU dalam mengembangkan program-

¹⁵⁰Fitri Rahmawati, "Dinamika Organisasi Nahdlatul Ulama dalam Era Digital: Perspektif Aswaja." *Jurnal Sosiologi Politik*, 2020. 15(1), 20-35.

program dan kebijakan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, prospek *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam konteks pembangunan sosial-politik di Indonesia tetaplah cerah dan relevan dengan semangat kebangsaan serta kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan landasan ideologis Nahdlatul Ulama (NU) dalam pembangunan sosial-politik di Indonesia sebagai ajaran yang berakar dari ajaran Islam yang moderat dan toleran. *Ahlussunnah wal Jama'ah* menjadi pijakan utama bagi NU dalam memberlakukan kebijakan dan program-programnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong partisipasi politik.

Pertama-tama, konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* menekankan pentingnya toleransi dalam menjalankan ajaran agama. Hal ini tercermin dalam pendekatan NU terhadap berbagai isu sosial-politik yang kompleks di Indonesia. NU tidak hanya mempromosikan pendekatan yang moderat dalam beragama, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pendekatan yang moderat ini memungkinkan NU untuk membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak dan memfasilitasi kerjasama lintas agama dalam mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* juga menekankan pada nilai-nilai toleransi dan inklusivitas. NU sebagai organisasi Islam yang besar di Indonesia telah secara konsisten mempromosikan dialog antaragama dan

kerukunan antarumat beragama. Melalui berbagai kegiatan interfaith dan dialog antarumat beragama, NU berusaha untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara umat Islam dan umat beragama lain serta memperkuat solidaritas di antara mereka.¹⁵¹

Konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* juga menekankan pada pentingnya keadilan sosial. NU telah aktif terlibat dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Melalui program-program seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur sosial, NU berupaya untuk membantu masyarakat yang lebih terdampak. Selain itu, konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* juga menekankan pada pentingnya partisipasi politik yang konstruktif. NU memandatkan partisipasi politik sebagai bagian integral dari tugas keagamaan dan sosialnya. Dengan memotivasi anggotanya untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan, NU berusaha untuk menghasilkan perubahan positif dalam kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Melalui partisipasi politik yang proaktif dan konstruktif, NU dapat menjadi suara yang mewakili aspirasi masyarakat yang lebih luas.

Namun, meskipun konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* memiliki banyak potensi dalam membentuk landasan ideologis untuk pembangunan sosial-politik oleh NU, tetap ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah adanya interpretasi

¹⁵¹ Abdul Rahman, "Pemikiran Politik Nahdlatul Ulama dalam Konteks Sosial-Politik Indonesia." *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 2024 1(2), 30-45.

yang beragam terhadap konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* itu sendiri. Sebagai konsep yang luas dan kompleks, Aswaja dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh individu dan kelompok, yang dapat mengakibatkan perbedaan dalam pemahaman dan implementasi prinsip-prinsipnya dalam konteks sosial-politik. Selain itu, NU juga dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam menerapkan konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam konteks pembangunan sosial-politik yang terus berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas *Ahlussunnah wal Jama'ah*, NU juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan-tantangan baru yang muncul, seperti kemajuan teknologi, globalisasi, dan dinamika politik nasional dan internasional.

Dengan demikian, konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* merupakan modalitas yang kuat bagi NU dalam menjalankan perannya dalam pembangunan sosial-politik di Indonesia. Dengan memperkuat pemahaman dan implementasi konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang sesuai dengan realitas sosial-politik yang berkembang, NU dapat terus menjadi kekuatan yang signifikan dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.¹⁵²

2. Implementasi Prinsip-Prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam Program Sosial-Politik NU

Implementasi prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam program sosial-politik Nahdlatul Ulama

¹⁵² Budi Santoso, "Strategi Pemberdayaan Perempuan oleh NU: Tinjauan Aswaja." *Jurnal Studi Gender*, 2020 8(2), 20-35

(NU) menjadi inti dari peran NU dalam membentuk landasan sosial-politik yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Konsep Ahlussunnah wal Jama'ah menjadi panduan bagi NU dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan berkeadilan. Salah satu prinsip utama dalam Ahlussunnah wal Jama'ah yang diimplementasikan oleh NU adalah moderasi. NU menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan menghindari ekstremisme dalam politik dan tindakan. Hal ini tercermin dalam pendekatan NU terhadap isu-isu sosial-politik yang kompleks seperti agama dan politik pluralisme, dan hak-hak sipil lainnya. Selain itu, prinsip toleransi juga menjadi salah satu nilai program-program NU.

Prinsip moderasi politik NU. NU mempromosikan dialog antar umat beragama dan kerukunan antar agama sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan antara komunitas agama di Indonesia. Program-program seperti dialog antar agama, pertemuan lintas agama, dan kerjasama antarumat beragama menjadi bukti konkret dari implementasi prinsip toleransi dalam kegiatan NU.

Prinsip keadilan sosial juga menjadi fokus utama dalam implementasi program sosial-politik NU. NU berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui berbagai program seperti bantuan sosial, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan masyarakat. Program-program ini dirancang untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari

pembangunan sosial-politik yang dilakukan oleh NU.¹⁵³ Selain itu, NU juga mengintegrasikan prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam program-program pendidikan dan dakwahnya. Prinsip-prinsip keagamaan dan moral *Ahlussunnah wal Jama'ah* ditanamkan dalam kurikulum pendidikan yang diselenggarakan oleh NU, baik di tingkat sekolah formal maupun lembaga pendidikan nonformal. Hal ini bertujuan untuk membina generasi yang berakhlak mulia dan mampu menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Namun, implementasi prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam program sosial-politik NU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah pemahaman yang beragam tentang konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* di kalangan anggota *Tasbehi*. Tidak semua anggota NU memiliki pemahaman yang sama tentang prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dalam pelaksanaan program-program sosial-politik.

Selain itu, kendala finansial juga menjadi hambatan dalam melaksanakan program-program sosial-politik NU. Meskipun NU telah berusaha menggalang dukungan finansial dari berbagai pihak, namun masih ada keterbatasan sumber daya yang membatasi ruang gerak NU dalam mengimplementasikan program-programnya secara optimal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, NU terus melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* di kalangan anggota dan kader NU melalui pelatihan dan pembinaan. Selain itu, NU juga terus mengembangkan

¹⁵³Bambang Saputra, "Strategi NU dalam Mendorong Kewirausahaan Sosial: Perspektif Aswaja." *Jurnal Kewirausahaan Sosial*, 2022. 7(1), 30-45.

strategi untuk mendiversifikasi sumber pendanaan agar dapat memastikan keberlanjutan program-program sosial-politik yang dilaksanakan.

Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam program sosial-politik NU menjadi pijakan yang kuat bagi NU dalam membentuk landasan sosial-politik yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, NU terus berupaya untuk memperkuat implementasi prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Implementasi prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam program sosial-politik Nahdlatul Ulama (NU) bertolak belakang nyata untuk menentang ajaran yang mengesampingkan, intoleran, dan eksklusif dalam menghadapi tantangan-tantangan sosial-politik yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, NU menitikberatkan berbagai program dan kegiatan yang didasarkan pada nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat partisipasi politik mereka.

Salah satu implementasi prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam program sosial-politik NU adalah melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif. NU mengakui keberagaman masyarakat Indonesia dan memperjuangkan keadilan sosial bagi semua golongan. Dalam menjalankan program-programnya, NU melibatkan berbagai pihak, termasuk pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah, untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terwakili dengan baik.

Selanjutnya, NU juga mengimplementasikan prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam

program- programnya dengan memperhatikan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Berbagai program sosial-politik NU, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan kesehatan, dan

pendidikan, dirancang dengan memperhitungkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah-wilayah tempat mereka dilaksanakan. Hal ini memungkinkan NU untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran dan efektif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, implementasi prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah dalam program sosial-politik NU juga tercermin dalam upaya mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. NU secara aktif terlibat dalam dialog antaragama dan kegiatan-kegiatan sebagai sarana untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang agama Islam dan umat beragama lain. Melalui pendekatan ini, NU berusaha untuk menciptakan suasana yang harmonis dan damai di tengah masyarakat yang beragam.

Selanjutnya, dalam memperkuat partisipasi politik masyarakat, NU mengimplementasikan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah dengan mendorong anggotanya untuk terlibat secara aktif dalam proses politik dan pemerintahan. NU membantu anggotanya untuk memahami pentingnya partisipasi politik sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial mereka. Melalui pelatihan, pendidikan politik, dan advokasi, NU berusaha untuk meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.¹⁵⁴ Namun, meskipun

¹⁵⁴ Budi Wahyudi, "Pendidikan Agama Islam Berbasis Aswaja dalam Era Digital: Studi Kasus Pesantren NU." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2022. 17(1), 30-45.

NU telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam program sosial-politiknya, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah tantangan dalam menghadapi perubahan sosial-politik yang cepat dan kompleks di Indonesia. NU perlu terus beradaptasi dan mengembangkan strategi-strategi baru untuk tetap relevan dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul.

Dengan demikian implementasi prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam program sosial-politik NU menjadi langkah yang penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui pendekatan yang efektif, inovatif, dan berbasis nilai-nilai NU dapat terus meningkatkan kapasitas dan posisi dalam pembangunan sosial-politik yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

3. Kontribusi NU dalam Mempromosikan Toleransi dan Moderasi Agama dalam Konteks Sosial-Politik

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran yang penting dalam mempromosikan toleransi dan moderasi agama dalam konteks sosial-politik di Indonesia. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki landasan ideologis yang kuat dalam *Ahlussunnah wal Jama'ah*, yang menekankan pentingnya moderasi, toleransi, dan inklusivitas dalam menjalankan ajaran Islam. Salah satu kontribusi utama NU dalam mempromosikan toleransi adalah melalui dialog antaragama. NU aktif dalam mengadakan forum-forum dialog antaragama di tingkat lokal, nasional, maupun internasional sebagai upaya untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara umat beragama di

Indonesia. Dialog antaragama ini memberikan ruang bagi pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk berdiskusi tentang isu-isu yang relevan dan mencari solusi bersama atas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, NU juga terlibat dalam berbagai kegiatan lintas agama yang bertujuan untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama. Melalui partisipasi dalam kegiatan keagamaan bersama, seperti perayaan hari besar agama, upacara keagamaan, dan kegiatan sosial bersama, NU membantu membangun ikatan yang erat antara umat beragama di Indonesia. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerja sama antar umat beragama dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi di Indonesia.¹⁵⁵

Seiring dialog antara agama dan kegiatan lintasagama, NU juga melakukan pendidikan tentang toleransi dan moderasi agama di kalangan pemuda dan kader NU. Program pendidikan ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan kedamaian dalam Islam, serta pentingnya menjaga moderasi dalam menjalankan ajaran agama. Melalui pendidikan ini, NU berusaha untuk membentuk generasi yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya toleransi dan moderasi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai.

Tantangan yang dihadapi NU dalam mempromosikan toleransi dan moderasi agama tidaklah sedikit. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya intoleransi dan radikalisme agama di kalangan sebagian kecil masyarakat Indonesia. NU

¹⁵⁵Ani Wardani, "Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Lokal: Peran NU sebagai Motor Penggerak." *Jurnal Politik Lokal*, 2023. 9(2), 78-91.

terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini melalui pendekatan yang inklusif dan edukatif, serta dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki visi yang sama dalam mempromosikan toleransi dan moderasi agama.¹⁵⁶ Selain itu, perubahan sosial-politik yang cepat juga menjadi tantangan tersendiri bagi NU dalam mempromosikan toleransi dan moderasi agama. NU terus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan mengembangkan strategi yang relevan untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan moderasi dalam berbagai konteks sosial-politik yang berubah-ubah.

Dengan demikian, kontribusi NU dalam mempromosikan toleransi dan moderasi agama dalam konteks sosial-politik di Indonesia sangatlah penting. Melalui berbagai program dan kegiatan, NU membantu membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan damai di Indonesia. Meskipun menghadapi pada sejumlah tantangan, NU terus berupaya untuk menjalankan perannya sebagai agen perdamaian dan toleransi dalam masyarakat Indonesia.¹⁵⁷

4. Peran NU dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Nahdlatul Ulama (NU) memainkan peran yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Pendekatan NU dalam hal ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi

¹⁵⁶Ahmad Yusuf, "Strategi NU dalam Mempromosikan Pembangunan Sosial-Politik yang Berkelanjutan: Perspektif Aswaja." *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 2024. 15(1), 45-58.

¹⁵⁷Wahyu Wibowo, "Strategi NU dalam Mempromosikan Toleransi dan Moderasi Agama: Tinjauan dari Perspektif Aswaja." *Jurnal Kajian Keagamaan*, 2019. 12(1), 30-45.

juga didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah, yang membentuk landasan ideologis dan operasional bagi NU dalam menjalankan kegiatan sosial-politiknya.

Pendekatan NU dalam mengentaskan kemiskinan bercirikan inklusifitas dan keadilan sosial, yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah*. NU percaya bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dan peluang yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, NU mengembangkan program-program yang bertujuan untuk merangai kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat, dengan memperhatikan keadilan ekonomi dan sosial seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu upaya terencana NU dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui program-program bantuan sosial dan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah. Program-program ini mencakup pemberian bantuan materiil, seperti pangan, pakaian, dan peralatan sekolah, kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, serta penyediaan pelatihan keterampilan dan modal usaha bagi masyarakat yang ingin memulai usaha mandiri. Dengan demikian, NU tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membantu membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, NU juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas yang diinspirasi oleh prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

NU mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan lokal, serta memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Pendekatan ini tidak hanya membantu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kebersamaan dalam komunitas.

Mediasi dan peran NU dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana maupun tenaga yang membuat ruang gerak NU dalam melaksanakan program-programnya secara maksimal relatif kecil, kendala birokrasi dan regulasi juga dapat menghambat efektifitas program-program NU dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, prospek peran NU dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat tetaplah cerah.

Dengan mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan terus berinovasi dalam pengembangan program-program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, NU memiliki potensi untuk terus menjadi motor penggerak dalam upaya membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya. Dengan dukungan yang tepat dari berbagai pihak, NU dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Ahmad Yusuf, "Kontribusi NU dalam Pembangunan Sosial-Politik di Indonesia: Perspektif Aswaja." *Jurnal Kebangsaan*, 2022. 6(2), 90-105.

5. Tantangan dalam Menjaga Keseimbangan Antara Agama dan Politik: Strategi NU dalam Konteks Pluralisme Indonesia

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam menjaga keseimbangan antara agama dan politik, terutama dalam konteks pluralisme yang kaya di Indonesia. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan dinamika internal organisasi, tetapi juga dengan perubahan sosial politik yang terjadi di tingkat nasional dan global. Salah satu tantangan utama yang dihadapi NU adalah menjaga independensinya sebagai lembaga agama yang bersifat otonom dalam konteks politik yang dinamis. NU berusaha untuk tetap mempertahankan independensinya dengan mengambil keputusan politik yang menjauhi kegiatan sosial-politiknya, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam ajaran NU. Hal ini penting untuk memastikan bahwa NU tetap menjadi lembaga yang independen dan netral dalam menghadapi berbagai isu politik yang kompleks. Selain itu, NU juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga hubungan yang seimbang antara agama dan politik dalam konteks pluralisme Indonesia. Di tengah keragaman agama dan keyakinan di Indonesia, NU berupaya untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan pemerintah dan lembaga politik lainnya, sambil tetap mempertahankan identitasnya sebagai organisasi Islam yang mempromosikan nilai-nilai moderasi dan toleransi. Tantangan ini memerlukan strategi yang

cermat dan sensitif dalam berinteraksi dengan berbagai pihak dalam ranah politik.

Salah satu strategi yang diadopsi oleh NU dalam menghadapi tantangan ini adalah memperkuat peran pendidikan dan dakwah. NU menganggap bahwa pendidikan dan dakwah memiliki peran yang penting dalam membentuk kesadaran politik dan sosial masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran melalui pendidikan dan dakwah yang tepat. NU berharap dapat membentuk generasi yang memiliki pemahaman yang baik tentang hubungan antara agama dan politik, serta komitmen untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, NU juga aktif dalam berbagai forum dialog antar agama dan kerukunan lintasagama. Dialog antar agama menjadi sarana bagi NU untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam kerangka pluralisme Indonesia. Melalui dialog sama lintasagama, NU berusaha untuk membangun sinergi dengan berbagai kelompok agama lain dalam rangka menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Namun, terdapat pula tantangan dalam mengimplementasikan strategi ini, terutama dalam membangun kepercayaan dan kerjasama antara berbagai kelompok agama. Keterbatasan dalam akses dan partisipasi, serta adanya ketegangan antarumat beragama dalam beberapa konteks, menjadi hambatan dalam upaya NU untuk memperkuat kerjasama lintasagama.

Secara keseluruhan, NU dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam menjaga keseimbangan antara agama dan politik dalam konteks pluralisme Indonesia. Dengan mengadopsi strategi

yang tepat, seperti memperkuat peran pendidikan dan dakwah, serta mengintensifkan dialog antaragama dan kerjasama lintasagama, NU memiliki potensi untuk menjalankan perannya sebagai agen perdamaian dan toleransi dalam masyarakat Indonesia yang beragam.¹⁵⁹

6. Adaptasi NU terhadap Dinamika Sosial- Politik: Perubahan dan Kontinuitas dalam Aplikasi *Ahlussunnah wal Jama'*

Nahdlatul Ulama (NU) terus berupaya untuk beradaptasi dengan dinamika sosial-politik yang terus berubah di Indonesia sambil mempertahankan prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'* sebagai landasan ideologi mereka. Proses adaptasi ini melibatkan serangkaian perubahan dan kontinuitas dalam aplikasi *Ahlussunnah wal Jama'* yang memungkinkan NU untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru. Salah satu aspek utama dari adaptasi NU adalah dalam konteks politik. NU telah mengalami evolusi dalam pandangan dan partisipasinya dalam politik nasional. Seiring dengan perkembangan sistem politik di Indonesia, NU telah mengubah pendekatan politiknya dari yang bersifat oposisi terhadap pemerintah menjadi yang lebih inklusif dan pragmatis.

Meskipun tetap mempertahankan independensinya sebagai organisasi nonpartisan, NU telah mengambil langkah-langkah konkret untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, NU juga terus mengadaptasi aplikasi *Ahlussunnah wal Jama'* dalam konteks

¹⁵⁹ Imam Sudarmanto, "Pengaruh NU dalam Pembangunan Infrastruktur Sosial: Perspektif Aswaja." *Jurnal Infrastruktur Sosial*, 2024. 14(1), 45-58.

pembangunan sosial. NU mengembangkan program-program sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. Misalnya, NU telah mengalihkan fokusnya dari program-program tradisional ke program-program yang lebih inovatif, seperti pendidikan inklusif, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini mencerminkan komitmen NU untuk terus beradaptasi dengan perubahan sosial-politik yang terjadi di Indonesia.

Melalui NU terus beradaptasi dengan dinamika sosial-politik, terdapat pula kontinuitas dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* seperti prinsip-prinsip demokrasi, toleransi, dan keadilan yang menjadi pijar utama dalam berbagai kegiatan NU. NU terus mendorong anggotanya untuk menjalankan ajaran Islam dengan semangat *Ahlussunnah wal Jama'ah* serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, NU juga tetap mempertahankan peran pendidikan dan dakwah sebagai instrumen utama dalam menyebarkan ajaran Islam yang moderat dan toleran. Melalui lembaga-lembaga pendidikan dan kegiatan dakwahnya, NU terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶⁰ Namun, adaptasi NU juga tidak terlepas dari tantangan. Perubahan sosial-politik yang cepat dan kompleks di Indonesia memerlukan respons yang cepat dan tepat dari NU. NU dihadapkan pada tuntutan untuk terus berinovasi dan

¹⁶⁰ Siregar, Fauzi. (2022). "Strategi Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama dalam Pemilu 2024: Tinjauan Aswaja." *Jurnal Komunikasi Politik*, 10(1), 30-45.

bertransformasi dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul, sambil tetap mempertahankan integritasnya sebagai lembaga agama yang mengikuti prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

Secara keseluruhan, adaptasi NU terhadap dinamika sosial-politik melibatkan perubahan dan kontinuitas dalam aplikasi *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Dengan terus mengambil langkah-langkah inovatif dan responsif, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai yang mendasarinya, NU memiliki potensi untuk terus menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam pembangunan sosial-politik di Indonesia.¹⁶¹

7. Prospek dan Relevansi NU dalam Pembangunan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan di Indonesia: Pendekatan Aswaja Dep

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki prospek yang cerah dan potensial dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan landasan ideologis *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang moderat dan toleran, serta pengalaman panjang dalam berkontribusi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, NU memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu prospek utama NU adalah dalam mempromosikan inklusivitas dalam masyarakat. Sebagai organisasi Islam yang mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan kerukunan, NU memiliki kapasitas untuk membangun jembatan antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antara umat Islam

¹⁶¹ Suryanto Surya, "Dinamika Politik NU dalam Konteks Pluralisme Indonesia: Pendekatan Aswaja." *Jurnal Politik*, 2023. 5(2), 78-91.

dengan kelompok agama lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan memperkuat dialog antaragama dan memfasilitasi kerjasama lintasagama, NU dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis di Indonesia.

Selain itu, NU juga memiliki peran yang penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan basis massa yang luas dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, NU memiliki potensi untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial-politik. Melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat, NU dapat membantu meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. NU juga memiliki kesempatan untuk menjadi garda terdepan dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Melalui fokus pada prinsip-prinsip keadilan sosial, perlindungan lingkungan hidup, NU dapat membantu membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan lestari. Melalui program-program yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, NU dapat membantu menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan. Namun, untuk mencapai prospek ini, NU perlu menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah tantangan dalam mengatasi ketimpangan dan diskriminasi dalam masyarakat. NU perlu terus berupaya untuk memperkuat upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta mempromosikan kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Selain itu, NU juga perlu terus beradaptasi

dengan perubahan sosial-politik yang terjadi di Indonesia, termasuk perubahan dalam dinamika politik dan perkembangan teknologi informasi.¹⁶²

Dengan demikian, NU memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak dalam membangun masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan di Indonesia. Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang dihadapi dan terus mengembangkan strategi/strategi yang tepat, NU dapat memainkan peran yang signifikan dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan di Indonesia untuk masa depan yang lebih baik.¹⁶³

CATATAN

Dalam konteks perubahan sosial politik di Indonesia, peran Nahdlatul Ulama (NU) sebagai representasi dari Ahlussunnah wal Jama'ah memiliki dampak yang signifikan. Penelitian ini terhadap peran NU dalam berbagai aspek pembangunan sosial-politik di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa NU tidak hanya menjadi agen keagamaan, tetapi juga mitra strategis dalam membangun masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. NU telah memainkan peran krusial dalam mempromosikan moderasi, toleransi, dan inklusivitas dalam masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah, NU telah berhasil mengembangkan program-program sosial-politik yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, promosi dialog antaragama,

¹⁶² Fauzi Siregar, "Dinamika Organisasi Nahdlatul Ulama: Antara Tradisi dan Modernitas." *Jurnal Sosiologi Politik*, 2023. 2(1), 20-35

¹⁶³ A. Rofiqul Hasan, "Inovasi Program Sosial-Politik NU dalam Masa Pandemi: Tinjauan dari Perspektif Aswaja." *Jurnal Ilmu Sosial*, 2021. 16(2), 110-125.

serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, NU juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga keseimbangan antara agama dan politik, serta dalam memperkuat partisipasi politik dan kesadaran politik masyarakat. Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang dihadapi, seperti kompleksitas dinamika sosial-politik dan tantangan dalam menghadapi perubahan sosial, NU terus beradaptasi dan mengembangkan strategi-strategi yang tepat untuk tetap relevan dalam mewujudkan visi pembangunan sosial-politik yang luas dan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa peran NU dalam pembangunan sosial-politik Indonesia tidak dapat diabaikan. NU bukan hanya sekadar wadah bagi pengelompokan nilai-nilai agama, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam menciptakan informasi sosial-politik yang lebih baik. Dalam era digital ini, peran lokal yang terus berkembang, NU tetap memiliki kekuatan yang relevan dan penting dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

C. Cendekiawan Muslim Dan Pemerintah Soeharto

ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia adalah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1990 di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan pemahaman Islam yang moderat dan progresif, serta berperan dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Pendirian ICMI pada tahun 1990 dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial Indonesia pada saat itu, khususnya dalam menghadapi tantangan dari gerakan Islamisme yang semakin aktif dan meningkatnya pengaruh Islam dalam politik. Salah satu

tujuan utama ICMI adalah mempromosikan wacana Islam yang moderat dan toleran, yang menghormati prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Organisasi ini juga berkomitmen untuk mempromosikan pendidikan, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam kerangka pemahaman Islam yang kontekstual dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, ICMI berperan sebagai wadah bagi para cendekiawan Muslim untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia, sambil mempertahankan identitas Islam yang khas.¹⁶⁴

Namun, peran ICMI tidak selalu tanpa kontroversi. Meskipun mempromosikan Islam yang moderat, organisasi ini telah ditentang oleh beberapa pihak sebagai alat politik yang digunakan untuk memperluas kekuasaan kelompok-kelompok tertentu dalam politik Indonesia. Selain itu, ada kritikus yang menganggap ICMI cenderung menjadi arena pertarungan politik antara kelompok-kelompok faksi di dalam organisasi, yang dapat mengesampingkan misi dan tujuan aslinya. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, ICMI telah berusaha untuk mereformasi diri dan menyesuaikan diri dengan dinamika politik dan sosial yang terus berubah di Indonesia. Organisasi ini terus berupaya memperkuat legitimasinya sebagai wadah yang merangkul pluralitas dan keragaman pandangan, serta sebagai pemain yang berperan dalam membangun negara yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan.¹⁶⁵

Periode 1990-1992 merupakan krusial dalam sejarah politik Indonesia. Pada era ini, terjadi interaksi yang dinamis antara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

¹⁶⁴ Azyumardi Azra, ICMI: Reinterpretasi Islam untuk Indonesia. Kompas, 2006

¹⁶⁵ Ibid.

(ICMI), kelompok Islam, dan pemerintahan Soeharto di bawah Orde Baru. Manuver-manuver kekuasaan yang dilakukan oleh ketiga entitas tersebut memberikan warna tersendiri bagi lanskap politik Indonesia pada dekade tersebut. ICMI, yang didirikan pada tahun 1990, muncul sebagai organisasi yang dianggap dapat menjembatani kepentingan Islam dan pemerintah Orde Baru. Kehadiran ICMI dilandasi oleh upaya Soeharto untuk merangkul kelompok Islam dan memperkuat posisinya di tengah perubahan politik yang terjadi. Pada masa itu, Soeharto menghadapi situasi yang semakin kompleks, di mana tekanan terhadap rezim Orde Baru mulai meningkat. Oleh karena itu, pemerintah ICMI dapat memandang sebagai salah satu strategi Soeharto untuk memperluas basis politiknya dan memperkuat legitimasi di tengah perubahan tersebut.¹⁶⁶

Di sisi lain, gerakan Islam dalam konteks politik Orde Baru juga menunjukkan dinamika yang dinamis. Kelompok Islam, yang sebelumnya ditekan dan marginalisasi, mulai menunjukkan pengaruhnya yang semakin kuat. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai organisasi dan tokoh Islam yang semakin vokal dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Salah satu contohnya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi lebih aktif dalam isu-isu politik pada masa itu.

Dalam konteks ini, Soeharto sebagai presiden Orde Baru berusaha memanfaatkan kekuatan ICMI dan Islam untuk memperkuat legitimasi serta memperluas basis politiknya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat tarik-menarik kepentingan di antara ICMI,

¹⁶⁶ Anwar, D. F. (2009). *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.

kelompok Islam, dan Soeharto itu sendiri. Hal ini tercermin dalam berbagai peristiwa politik yang terjadi selama periode 1990-1992, di mana terjadi negosiasi, kompromi, dan bahkan konflik di antara ketiga entitas tersebut.¹⁶⁷

ICMI sebagai organisasi yang dianggap dapat menjembatani kepentingan Islam dan pemerintah, rupanya menjadi kelompok Islam yang paling vokal di bawah rezim Soeharto yang berusaha mempertahankan kekuasaannya. Soeharto memanfaatkan ICMI dan kelompok Islam untuk memperkuat posisinya, serta bagaimana tarikan tarik kepentingan di antara ketiga entitas tersebut menjadi dalam ranah politik Indonesia pada masa itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kekuasaan yang terjadi antara Muslim, dan pemerintahan Soeharto pada periode tahun 1990-1992. Fokusnya adalah pada bagaimana ICMI, sebagai instrumen politik Soeharto berinteraksi dengan Islam sebagai kekuatan politik dan pemerintahan Soeharto yang otoriter. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi ini, kita dapat memahami dinamika politik yang terjadi di balik tirai kekuasaan pada masa itu.

Bahtiar Effendy, dalam buku "Islam and the State in Indonesia" menggambarkan bagaimana dinamika pemerintahan Soeharto (1966-1998), ia mengeksplorasi bagaimana rezim Orde Baru berinteraksi dengan kelompok-kelompok Islam. Effendy menjelaskan bahwa Soeharto awalnya bersikap hati-hati terhadap kelompok Islam, namun kemudian berubah sikap dengan membentuk ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada tahun 1990 sebagai strategi politik untuk

¹⁶⁷ Ramage, D. E. (1995). *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London: Routledge.

mendapatkan dukungan dari umat Islam. Effendy membahas secara rinci mengenai pembentukan ICMI, organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mengkomodasi aspirasi politik dan intelektual Muslim. Buku ini menganalisis bagaimana ICMI berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan komunitas Muslim serta peranannya dalam memperkuat dukungan politik untuk Soeharto. Bahtiar Effendy mengeksplorasi strategi politik Soeharto dalam memanfaatkan cendekiawan Islam dan mengajak ICMI untuk meredakan oposisi dari kelompok Islamis dalam memperkuat kontrolnya atas negara. Effendy¹⁶⁸ mengungkapkan bagaimana Soeharto berusaha menciptakan keseimbangan antara Islam dengan sekularisme negara untuk mengkomodasi aspirasi Islam. Effendy mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan dan apresiasi Islam di Indonesia, termasuk kebijakan pendidikan, hukum, dan ekonomi. Ia juga menilai bagaimana kebijakan-kebijakan ini berdampak pada hubungan antara Islam dan negara. Buku ini juga membahas kritik dan tantangan yang dihadapi oleh ICMI, baik dari kelompok sekuler maupun dari kelompok Islamis yang lebih radikal. Effendy menyoroti bagaimana organisasi ini harus beradaptasi dengan berbagai tekanan dan kritik untuk tetap relevan. Effendy menutup buku dengan refleksi mengenai perkembangan pasca-Soeharto, melihat bagaimana reformasi politik dan demokratisasi mempengaruhi hubungan antara Islam dan negara. Ia juga mempertimbangkan masa depan Islam dalam politik Indonesia yang lebih demokratis dan terbuka. "Islam and the State in Indonesia" oleh Bahtiar Effendy menawarkan

¹⁶⁸ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Printika, 2001

wawasan komprehensif tentang hubungan kompleks antara Islam dan negara di Indonesia, terutama selama era Orde Baru. Dengan analisis yang mendalam tentang peran ICMI dan strategi politik Soeharto, buku ini memberikan pemahaman yang kaya mengenai bagaimana Islam dan kekuasaan politik saling mempengaruhi dalam konteks sejarah dan politik Indonesia.¹⁶⁹

1. Perubahan Politik Islam di Era Soeharto

Tahun 1990-an merupakan masa dimana Soeharto berusaha mengurangi ketergantungan terhadap ABRI. Hal ini mungkin terjadi karena komandan kritis dari jenderalnya. Tahun 1990-an juga merupakan masa kejayaan Partai Hijau ketika Soeharto semakin dekat dengan Islam. Seperti yang kita ketahui, Faisal juga setia kepada Soeharto. Bagi Faisal, Soeharto diharapkan terpilih kembali sebagai presiden untuk ketujuh kalinya.¹⁷⁰

Sebagai peramal, Harold Crouch melakukan penyelidikan terhadap Soeharto dan menunjukan Faisal dan Hartono sangat isumer karena keduanya berasal dari Santoli dan memiliki ikatan yang erat dengan kelompok Islam.¹⁷¹ Panglima ABRI Feisal Tanjung dan KSAD R. Hartono merupakan dua jenderal ABRI kategori Hijau. Faisal Tanjung berasal dari keluarga Muhammadiyah asal pesisir barat Sumatera Utara. Ibunya, R. Hartono, adalah seorang aktivis Aishiyah (Cendekiawan Muhammadiyah) di Madura, Jawa Timur. Alasan ini juga sudah diduga oleh Soeharto

¹⁶⁹ Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998

¹⁷⁰ Aziz Ahmadi Solemanto, *Feisal Tanjung, Terbaik Untuk Rakyat Terbaik Bagi ABRI* (Jakarta: Yayasan Dharmapena Nusantara, 1999).

¹⁷¹ Harold Crouch, *Soeharto's New Order And Its Legacy: Essays In Honour* (Canberra: Australian National University Press, 2010).

pada tahun, yang ingin mendapatkan dukungan dari komunitas Muslim, yang selama ini "agak dijauhi" olehnya.

Faktor Habibi harus diperhatikan. Meskipun Pak Harto kemungkinan besar mengumumkan rencananya, seperti biasa, beberapa hari sebelum sidang paripurna MPR tahun 1998, Pak Habibie diliputi spekulasi tentang penggantinya. Ada yang berpendapat bahwa Soeharto menunjuk Habibie sebagai penggantinya pada tahun. Namun, beberapa kalangan politik tidak puas dengan pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998 dan mengharuskan Habibie menjadi wakil presiden. Meskipun Pak Habibie sangat populer di kalangan tertentu, khususnya di kalangan kelompok Islam dan teknokrat yang tertarik pada ICN, beberapa partai politik tidak sejalan dengan perlombanya sebagai presiden. Untuk persiapan pemilihan umum, komong-ngomong, sebagian besar dari 4.444 suara untuk Habibie berasal dari ABRI. Para perwira ABRI seperti Mayjen Sembirin Meliala sekitar tahun 1990-an masih mencerminkan sentimen banyak perwira ABRI saat ini. (Harold Crouch 1999) Jenderal Faisal dan Hartono tidak hanya dekat dengan golongan Ikon, tetapi juga berteman dengan Habibie.¹⁷²

Crouch mengatakan jelas bahwa tidak satu pun dari mereka yang melihat Habibie seperti petugas lainnya. Setidaknya mereka akan bekerja sama dengan Habibie.¹⁷³ Crouch juga mencatat bahwa kelompok-kelompok Muslim selalu merasa terpojok oleh ABRI, namun sejak akhir tahun 1980-an Suharto semakin

¹⁷² Harold Crouch, *Soeharto's New Order And Its Legacy: Essays In Honour* (Canberra: Australian National University Press, 2010).

¹⁷³ Harold Crouch, *Army and Politics In Indonesia*, Cetakan 1 (Oxford University Press, 1999).

memandang umat Islam yang terorganisasi di ICMI sebagai sekutu politik yang penting, tulis saya. Beberapa petinggi ABRI tidak menyukai sikap Soeharto terhadap ICMI, tapi dengan caranya sendiri Soeharto sendiri mengganti pejabat yang anti-ICMI dengan pejabat yang pro-ICMI.¹⁷⁴

Di akhir tulisannya, Crouch menekankan bahwa strategi Soeharto sangat efektif dalam jangka pendek, namun belum tentu dalam jangka panjang. Meski pimpinan ABRI saat ini masih memiliki hubungan baik dengan ormas-ormas Islam yang mewakili ICMI, namun sikap tersebut meninggalkan ABRI yang selama ini menaruh curiga terhadap ormas Islam yang dianggap Neo-Mayumi dan belum terpai pada generalisasi permasalahannya. Sulit membenarkan pendapat yang tilah "neo-mayumi". Memangnya siapa saja wakil dari Neo-Mashumi, Muhammad Hartono, atau siapa saja dari ICMI, atau Golkar (disebut juga neo-Mayumi pada Musyawarah Nasional tahun 1993). Kata Pak Crouch, ABRI Indikatornya apa? pernah berkata bahwa anda sudah lama memendam kebencian terhadap Islam sejak tahun ? Perkataan pejabat ABRI seperti Sembirin Meliala belum tentu mencerminkan posisi ABRI. Tidak apa-apa jika Crouch berpikir demikian.¹⁷⁵ Politik sering kali dicirikan oleh hak dan legitimasi. Dengan menggunakan logika Crouch, kita dapat menyimpulkan bahwa sikap Faisal dan Hartono dalam menjaga hubungan baik dengan umat Islam sejalan dengan sikap Soeharto

¹⁷⁴ Harold Crouch, *Soeharto's New Order And Its Legacy: Essays In Honour* (Canberra: Australian National University Press, 2010).

¹⁷⁵ Crouch, *Army and Politics In Indonesia*.

tetapi tidak mendapat dukungan dari ABRI. Ujungnya dengan ABRI Soeharto berpisah.

Crouch cenderung bijaksana. Dalam balasannya terhadap tulisan ini, ia menulis antara lain: "Anda pasti juga tahu bahwa apa yang Anda sebut 'tentara' juga bagi sebagian besar umat Islam. Bahkan banyak kepemimpinan mereka, sejak terbentuknya Pemerintahan, embrio militer. Dimulai dari Peta dan BKR, mereka adalah pemimpin Muslim Tapi begitu mereka masuk di militer mereka harus mematuhi disiplin militer yang Anda sebut kelompok Islam terpecah menjadi beberapa kelompok politik yang pernah memegang kekuasaan dan dalam waktu mereka pernah menjajah posisi perang.¹⁷⁶ Menurut pengamat politik yang mengeksploitasi kekuasaan ini, ketika Letnan Mayor Panggaban dan Sudomo menduduki posisi penting tidak ada yang mempromosikan mereka sebagai jenderal Kristen untuk mendapatkan perhatian.

Dari sudut pandang ini terlihat berbagai upaya sulit untuk mengambil sikap mengenai perbedaan pendapat bahkan konflik antara Jenderal Faisal Tanjung/Hartono dengan faksi lainnya di ABRI dan akhirnya hal yang sama terjadi antara Soeharto dan ABRI. Dalam bukunya, menjelaskan bahwa dukungan ABRI terhadap Soeharto semakin melemah. Ia mendukung Soeharto dengan mendukung pembentukan ICMI tepat pada saat Soekarno membutuhkan dukungan PKI setelah dukungan militer menyusut.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Z.A Maulani, 'Ramai-Ramai Mengeroyok Habibie', Majalah Media Dakwah, 1995.

¹⁷⁷ Adam Schwarz, *A Nation in Waiting : Indonesia's Search for Stability* (Singapore: Talisman Publishing, 2005).

Ketika kembali ke Indonesia dari Jerman atas permintaan Soeharto pada tahun 1974, Habibie dipandang sebagai pemecah masalah terkait program pembangunan ambisius Orde Baru Impian Soeharto tentang 'era' kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia dapat ditelusuri kembali ke dengan kedatangan Habibie. Citra memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan imtaq (iman dan taqwa) juga membuat Habibie mudah diterima dan diterima oleh umat Islam moderatis. Habibie dapat menerima dukungan dari masyarakat dan kelompok ini. Soeharto memahami hal ini dengan sangat baik. Pada saat yang sama, pada awal tahun 1990-an Soeharto mulai menengok ke ketertinggalan pada literasi dan kehilangan kepercayaan masyarakat ke pemerintah.

2. Hubungan Kelompok Cendekiawan Muslim dan Pemerintahan Soeharto

ICMI sebagai organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1990, memainkan peran penting dalam mewujudkan kepentingan dan aspirasi para cendekiawan Muslim di Indonesia. Namun, dalam konteks politik yang diwarnai oleh otoritarianisme rezim Soeharto, interaksi antara ICMI, Islam, dan pemerintahan Soeharto memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu aspek penting Era 1990-1992 dari dinamika kekuasaan Soeharto adalah hubungan yang kompleks antara ICMI dan pemerintahan Soeharto. Meskipun ICMI bertujuan untuk mempromosikan Islam yang moderat dan progresif, hubungan antara ICMI dan rezim Soeharto sering kali dipandang sebagai saling menguntungkan. Pemerintahan Soeharto memanfaatkan ICMI sebagai alat untuk memperkuat legitimasinya di kalangan

Muslim Indonesia, sementara ICMI dapat memperoleh akses ke kekuasaan dan sumber daya pemerintah.

Namun, dalam konteks politik yang semakin terbuka menjelang jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, hubungan antara ICMI dan pemerintah mulai mengalami ketegangan. Seiring munculnya gerakan reformasi dan peningkatan desakan untuk reformasi politik dan demokratisasi. ICMI secara bertahap mulai menunjukkan sikap lebih independen dan kritis terhadap rezim Soeharto. Beberapa anggota ICMI, terutama yang bergam cendekia dan intelektual, mulai memanfaatkan momentum politik dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, dinamika kekuasaan juga tercermin dalam interaksi antara ICMI dengan politik dan rezim Soeharto. Ketika rezim Soeharto secara resmi mengadopsi ideologi Pancasila yang menekankan pluralisme dan toleransi agama, ICMI dalam politik tetap memiliki pengaruh signifikan dalam politik Indonesia. Rezim Soeharto sering kali menggunakan retorika agama dan memanfaatkan institusi Islam untuk memperkuat otoritasnya. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan untuk reformasi politik, Islam politik semakin menjadi kekuatan yang mengancam dominasi rezim Soeharto.

Idealisme dan aktivisme aktivis politik Muslim generasi pertama diwarnai dengan formalisme dan legalisme. Ekspresi utama dari gagasan dan praktik ini adalah keinginan para militan untuk mendirikan negara Islam atau negara berdasarkan ideologi Islam. Kegagalan tujuan ini juga disebabkan karena tidak didukung oleh seluruh umat Islam dan hubungan

politik yang sumbang antara Islam dan negara masih terus terjadi di Indonesia.¹⁷⁸

Iklim politik yang tidak harmonis mempunyai dampak yang luas. Pada puncaknya, khususnya pada 25 tahun pertama pemerintahan Orde Baru, akses aktivis politik Islam terhadap koridor kekuasaan sangat berkurang dan status politik mereka melemah. Sebuah tanda yang jelas dari kegagalan politik Islam. Berikut beberapa contohnya: Pada tahun 1968, terjadi pengusiran mantan tokoh penting yang asumsi dari partai yang baru dibentuk, Partai Islam yang menggariskan Pancasila. Ia membatasi jumlah partai politik dari empat (NU, PSII dan Perti) menjadi satu partai yaitu PPP (1973). Mengurangi jumlah perwakilan Muslim di parlemen dan kabinet.

Demokrasi persatuan Pancasila, yang tidak lagi diakui sebagai dasar organisasi sosial politik (1985). Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, Politik Islam telah menjadi bagian dari politikologis. Negara kerap mencungkil aktivis politik Islam Pancasila mempunyai ideologi anti negara. (Bahtiar Effendy 2001) Sedikit banyak, kesimpulan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dalam kaitannya dengan apa yang sering disebut dengan adaptasi bangsa terhadap Islam. Kemudian Islam mulai "diterima" oleh negara pada akhir tahun 1980an dan 1990an.

Bahtiar Effendi, dalam "teori akomodasi", mengusulkan empat bentuk "penerimaan" Islam dalam suatu negara. Pertama, penyesuaian struktural ditandai dengan rekrutmen para pemikir dan aktivis politik Islam ke dalam birokrasi, baik eksekutif maupun

¹⁷⁸ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Printika, 2001

legislatif. Puncak dari penyesuaian struktural tersebut adalah berdirinya Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI) yang dipimpin oleh BJ Habibie pada tahun 1990.

Kedua, peraturan perundang-undangan, khususnya diundangkannya sejumlah peraturan dan undang-undang yang khusus mengatur kehidupan beragama umat Islam. Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pendidikan Agama dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kebijakan Kilab direvisi pada tahun 1991. Keputusan bersama Menteri dikeluarkan mengenai organisasi Amr al-Makam, Infaq dan Sadhaka (Bajis), dan jumatnya pada tahun 1991. Dito dibubarkan.

Ketiga, terdapat budaya, khususnya seringnya penggunaan simbol-simbol Islam, seperti seringnya “isti” “gama” dan idiom Islam lainnya dalam kosakata dokumen politik dan ideologi bangsa. Keempat, pembangunan infrastruktur seperti pembangunan masjid di keraton, Yayasan Amal Islam Pancasila 86, Majelis Ulama India (MUI), Bank Muamalat Indonesia (BMI).¹⁷⁹ Menurutnya, pendapat seperti yang dikemukakan Bakhtia Effendi menunjukkan bahwa Islam mendapat manfaat besar dari penyesuaian tersebut, karena menurutnya, semakin besarnya kesadaran dan minat Soeharto terhadap agama membuat pemerintah sangat ikhlas hadir.

Sekilas, “teori akomodasi” Bahtiar Effendi menarik perhatian umat Islam. Pada satu sisi, negara ini senang bahwa umat Islam bisa “menjinakkan diri mereka

¹⁷⁹ Ibid

sendiri" dalam keadaan euforia. Di sisi lain, umat Islam merasa puas bahwa perjuangan mereka dianggap berhasil berkat masuknya dan diterimanya sebagian kepentingan teologis mereka dalam struktur nasional.

Kebijakan politik pemerintahan Orde Baru membuat partai-partai Islam mengalami pasang surut karena tiga faktor. (Pertama, intervensi negara yang berlebihan (melalui birokrasi politik). Pada tahun 1968, lemahnya birokrasi dan kebijakan pemerintahan terlihat jelas pada awal Orde Baru ketika Parmus (Partai Islam Indonesia) dan Kuntama karena pemimpinnya dianggap melanggar pemimpin Masy

Pada tahun 1970 terjadi aktivasi partai-partai Islam yang pada tahun 1977 menentu Pedoman Pemahaman dan Perleytar Partilil (P4) yang kemudian menjadi T U I PF NO U tahun 1978, termasuk kepelekaan saat ini. Di tahun 1985, pemerintah melakukan pemecatan sebagai asas tunggal semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan (UU No.3/1985 dan UU No. 8/1985).

Kedua, diskriminasi sosial yang memecah belah umat Islam tidak hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang lain. Maraknya pendidikan Islam serta kebutuhan era modernisasi dan pembangunan yang dilakukan pemerintah memunculkan berbagai pemikiran ideologis, seperti keinginan untuk mendirikan negara Islam. Ketiga, ketidakjelasan konsep politik Islam itu sendiri, misalnya konsep pemerintahan dan konsep imamah atau khilafah. Perbedaan penafsiran (tafsir) ini disebabkan oleh perbedaan pengalaman umat Islam dalam bidang pendidikan dan perbedaan Firqah dalam keyakinan Islam. Mungkin karena fenomena-fenomena di atas yang menjadi kondisi munculnya Ikatan

Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI) sebagai kekuatan kelas menengah Islam yang diyakini mampu memahami dan mengedepankan nilai-nilai keislaman sebagai konsep keilmuan yang dapat bersaing dengan mengembangkan konsep-konsep pengetahuan sebagai gerakan intelektual yang lebih independen dan bebas yang berkontribusi terhadap aspirasi Islam.¹⁸⁰

Selain itu, karena ICMI diselenggarakan atas dasar agama Islam atau ikatan populis yang menimbulkan kekecewaan dan kekecewaan, maka ICMI merupakan produk intelektual terpelajar yang terjaga.¹⁸¹ Artinya, para ulama tersebut akan mampu memahami dan menghubungkan aspirasi umat Islam dengan pemerintah.

Seberita ini, ketika mengenai dirinya ICMI kerap digambarkan sebagai pembebasan spontan lima mahasiswa di Malang, Jawa Timur. (Pelita 2006). Menurut Sodirman Tebba, para ulama sangat taat dan terlebih lagi mereka adalah pemimpin Muslim luar biasa yang berusaha mengumpulkan cendekiawan Muslim untuk berdiskusi tentang masa depan negara dan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan ini, mereka mengusulkan sebuah pertemuan yang mengundang para pemimpin organisasi Muslim serta pemerintah dan media.

¹⁸⁰ Muhammad Abu Zahrah, Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam, terj. Abd Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, (Jakarta: Logos, 1996),

¹⁸¹ Sodirman Tebba, Islam Era Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993),

BAB VII

GERAKAN IDEOLOGI KHILAFAH DI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS HISTORIS DAN POLITIK KONTEMPORER

Gagasan tentang khilafah Islamiah sebagai sistem politik yang dipimpin oleh seorang khalifah merupakan bagian tak terpisahkan dari narasi politik dan keagamaan yang terus mewarnai sejarah politik Indonesia. Khilafah Islam sebagai suatu tawaran konseptual telah berhasil menggerakkan berbagai gerakan Islam sepanjang sejarah yang telah membentuk jalinan identitas yang kuat di kalangan umat Muslim Indonesia.¹⁸² Bahkan dalam kondisi zaman yang terus berubah pengaruhnya masih terasa kuat di masyarakat, terutama berkaitan dengan politik dan kultural yang terus memengaruhi politik lokal, regional dan pemikiran yang ada di dalam negeri ini.¹⁸³

Keberadaan ideologi khilafah di Indonesia merupakan hasil dari dinamika sosial yang terus berkembang dalam konteks sejarah dan politik negara ini. Sejak masa kemerdekaan, Indonesia telah menjadi saksi dari berbagai pergolakan ideologi, yang mencakup persaingan antara kekuatan sekuler dan religius.¹⁸⁴ Dalam keadaan ini, ideologi khilafah muncul sebagai sebuah alternatif bagi sistem demokrasi liberal yang dianggap tidak

¹⁸² Syah & Setia, "Radikalisme Islam: Telaah Kampanye Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pra-Pembubaran oleh Pemerintah". *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2021 1(4), 523-535.

¹⁸³ Achmad Nur, "Propaganda Dakwah Beraroma Khilafah". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2019 2(1), 49-60.

¹⁸⁴ Setia & Rahman, *Kekhilafahan Islam, Globalisasi dan Gerilya Maya: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia*. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 2021.9(2), 241-264

mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini.¹⁸⁵

Para pendukung ideologi khilafah meyakini bahwa sistem ini mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang memberikan landasan moral yang kuat. Selain itu, mereka juga mengkritik sistem demokrasi liberal yang dianggap korup dan tidak mampu mencerminkan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.¹⁸⁶ Menurut pandangan mereka, khilafah menjadi solusi yang lebih baik dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.¹⁸⁷ Ideologi khilafah, yang telah diimplementasikan di berbagai negara di seluruh dunia, tak hanya kali diwilayah Timur Tengah, telah menjadi sorotan utama dalam dunia geopolitik kontemporer. Namun, sayangnya, popularitasnya seringkali disertai oleh gelombang kekerasan dan konflik yang dapat memecahkan.¹⁸⁸

Di Indonesia, ideologi khilafah telah menjadi landasan bagi berbagai organisasi Islam yang antara lain termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Jamaah Anshorut Daulah (JAD) (Eunike & Putrawan, 2021). Tidak hanya sekadar mengadopsi ideologi tersebut, tetapi organisasi-organisasi ini juga telah mengambil langkah-langkah aktif dalam

¹⁸⁵ Sofianto, K., Herlina, N., & Falah, "Establishment Of The Ahmadiyya Caliphate And Spread Of Ideology In Indonesia Historical Review". PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 2020.17(5), 136-157.

¹⁸⁶ Zainal Arifin, & Lailatu Rohmah, "The Concept of Leadership of the Transnational Islamic Ideology Perspective and Responses to Democracy Practices in Indonesia". *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 2019. 24(1), 213-232.

¹⁸⁷ Bugi Kenoh Mulyar, *Diskursus Khilafah Islamiyah di Indonesia (Analisis Wacana Kritis Buletin Dakwah al-Islam, Kaffah, dan Tabloid Media Umat)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga, 2018).

¹⁸⁸ Wahyudin Hafid, "Geneologi Radikalisme Di Indonesia" (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal). *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, 2020 1(1), 31-48.

menyebarkan dan memperjuangkan gagasan khilafah melalui berbagai kegiatan seperti ceramah keagamaan yang luas, demonstrasi massa, serta publikasi yang mencakup literatur dan media sosial.¹⁸⁹ Dengan berbagai cara ini, mereka berupaya untuk merespons dan mempengaruhi opini publik serta mengajak masyarakat untuk mendukung visi mereka terkait khilafah.¹⁹⁰

Para pakar dan ahli memiliki berbagai pandangan mengenai ideologi khilafah di Indonesia. Berikut beberapa pendapatnya:

Sidney Jones dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC): Jones berpendapat bahwa ideologi khilafah di Indonesia telah mengalami evolusi. Awalnya, ideologi ini hanya dianut oleh kelompok kecil aktivis. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, popularitasnya semakin meningkat, terutama di kalangan anak muda. Jones mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong popularitas ideologi khilafah, yaitu ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi, maraknya korupsi, dan ketegangan politik.¹⁹¹

Greg Barton, Profesor Studi Islam di Universitas Durham: Barton berpendapat bahwa ideologi khilafah memiliki daya tarik bagi sebagian orang karena menawarkan solusi alternatif bagi berbagai permasalahan bangsa. Ideologi ini menjanjikan sebuah sistem pemerintahan yang adil, bersih, dan berdasarkan nilai-nilai Islam. Namun, Barton juga mengingatkan bahwa implementasi ideologi khilafah di

¹⁸⁹ Siti Muazaroh, "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Maqashid: Otoritas atau Otoritarianisme". *Justicia Islamica*, 2019 16(1), 103-120.

¹⁹⁰ Muhammad Chairul Huda, "Strengthening Pancasila as national ideology to implementate the balancing values to improve law's application in Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2018 5(1), 1-12.

¹⁹¹ Muhammmadin Muhammmadin, "Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dengan Sistem Negara Islam Modern, 2016. *Intizar*, 22(2), 365-392.

negara-negara lain sering kali diwarnai dengan kekerasan dan konflik.¹⁹²

Izzuddin Muchtar, Sosiolog Universitas Nasional: Muchtar berpendapat bahwa ideologi khilafah di Indonesia bukanlah fenomena baru. Ideologi ini telah hadir di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Namun, Muchtar juga mengatakan bahwa ideologi ini mengalami kebangkitan kembali dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan anak muda. Muchtar melihat beberapa faktor yang mendorong kebangkitannya, seperti digitalisasi, media sosial, dan maraknya kelompok radikal.¹⁹³

Febriana Indriani, Peneliti LIPIA Indriani berpendapat bahwa ideologi khilafah di Indonesia memiliki berbagai variasi. Ada kelompok yang hanya ingin menerapkan syariat Islam dalam aspek kehidupan pribadi, ada kelompok yang ingin mendirikan negara khilafah. Indriani juga mengatakan bahwa ideologi ini sering kali dikaitkan dengan gerakan radikal.¹⁹⁴

Ainun Hayati, Peneliti Universitas Islam Negeri Jakarta: Hayati berpendapat bahwa ideologi khilafah di Indonesia perlu dikaji secara komprehensif. Hayati mengatakan bahwa ideologi ini tidak boleh diidentikkan dengan kekerasan atau terorisme. Hayati juga menekankan pentingnya dialog dan edukasi untuk mencegah penyebaran ideologi yang keliru.¹⁹⁵

¹⁹² Ibi Satibi, "Akar Teologi-Politik Gerakan Radikalisme Islam Dan Terorisme Di Indonesia" *Politea: Jurnal Politik Islam*, 2023 6(1), 115-138.

¹⁹³ Benyamin Fleming Intan, "Religious Freedom and the Pancasila-Based State of Indonesia: A Neo-Calvinist Idea of Principled Pluralism. In *Calvin's and Neo-Calvinist Legal Theory in Indonesian Context*" (pp. 63-89). Brill Schöningh 2019.

¹⁹⁴ Rizqa Ahmadi, "The Politics of a Local Sufism in Contemporary Indonesia". *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2021 16(01), 59-82.

¹⁹⁵ L. C., Sebastian, & Othman Alkaff. *Ideologies and Their Importance in Shaping Islam, Muslims, and Activism in Indonesia. In Indonesia and Islam in Transition*, 2024 (pp. 71-131). Singapore: Springer Nature Singapore.

Menurut Hidayatullah bahwa akar ideologi khilafah di Indonesia dapat ditelusuri kembali pada masa penjajahan Belanda. Saat itu, Islam menjadi alat pemersatu bagi rakyat Indonesia melawan penjajah. Para ulama dan pemimpin Muslim memainkan peran penting dalam mengorganisir perlawanan dan menyebarkan semangat jihad. Dalam konteks ini, ideologi khilafah muncul sebagai alternatif bagi sistem pemerintahan kolonial yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁹⁶

Popularitas ideologi khilafah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh berbagai faktor kontemporer, antara lain:

1. Kekecewaan terhadap Sistem Demokrasi

Banyak masyarakat Indonesia yang merasa bahwa sistem demokrasi gagal ketika berhadapan dengan masalah bangsa, seperti korupsi, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Hal ini mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif sistem pemerintahan yang dianggap lebih adil, bersih, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Maraknya Korupsi: Korupsi merupakan salah satu masalah utama di Indonesia yang memicu kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif sistem pemerintahan yang dianggap lebih bersih dan adil.

Ketegangan Politik: Ketegangan politik yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga memicu munculnya ideologi khilafah. Sebagian masyarakat merasa bahwa sistem demokrasi tidak mampu menyelesaikan ketegangan politik dan membutuhkan sistem pemerintahan yang lebih kuat.

¹⁹⁶ Hidayatullah, "The Khilafah discourse on Aljazeera and Alarabiya: a valuable lesson for Indonesian online media" In International Conference on Culture and Language in Southeast Asia (ICCLAS 2017) (pp. 136-138). Atlantis Press.

2. Globalisasi dan Media Sosial:

Globalisasi dan media sosial memungkinkan ideologi khilafah untuk menyebar dengan cepat dan mudah di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini memudahkan organisasi-organisasi yang mengadvokasi ideologi khilafah untuk menjangkau dan merekrut anggota baru.¹⁹⁷

Karena alasan-alasan di atas ideologi khilafah memiliki tempat di dalam diskursus politik Indonesia. Ideologi ini dapat meningkatkan semangat religiusitas dan rasa persatuan umat Islam. Secara bersamaan ideologi ini dapat mempromosikan nasionalisme dan demokrasi. Penyebaran ideologi khilafah yang keliru merupakan tantangan bagi stabilitas dan keamanan negara. Upaya pencegahan harus dilakukan secara berkala jantan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan tokoh agama (Miftahul Jannah, 2020). Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kontemporer. Untuk memahami ideologi ini secara komprehensif dan kontekstual sangatlah penting untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mencegah penyebaran ideologi khilafah yang keliru dan menjaga stabilitas negara.

A. Akar Ideologi Khilafah Muncul Dan Berkembang Di Indonesia Perspektif Historis

Ideologi khilafah di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontemporer dan dinamika politik global dan lokal. Di Indonesia dapat ditelusuri kembali pada masa penjajahan

¹⁹⁷ Miftahul Jannah, Runtuhnya Khilafah Turki Utsmani 3 Maret 1924. MASA: Journal of History, 2019 1(1).

Belanda. Pada saat itu, Islam bukan hanya menjadi agama bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi alat pemersatu dalam perlawanan terhadap penjajah. Para ulama dan pemimpin Muslim memainkan peran penting dalam mengorganisir perlawanan dan menyebarkan semangat jihad melawan penjajah Belanda.¹⁹⁸

Dalam konteks perlawanan terhadap penjajah, ideologi khilafah muncul sebagai alternatif bagi sistem pemerintahan kolonial yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Khilafah dalam pemikiran para ulama dan pemimpin Muslim pada masa itu, bukan hanya merupakan sebuah sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah sistem yang mempromosikan penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat.

Para ulama seperti H. A. Listich, H. M. Abdul Karim Amrullah (yang dikenal sebagai LAM), dan banyak lagi, tidak hanya memimpin perlawanan fisik terhadap penjajah, tetapi juga aktif dalam penyebaran pemikiran-pemikiran keislaman yang menekankan pentingnya penerapan khilafah. Mereka menganggap bahwa khilafah bukan hanya solusi atas penjajahan politik, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan atas kebutuhan spiritual dan moral umat Islam.¹⁹⁹

Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, ideologi khilafah masih tetap bertahan. Meskipun tidak lagi terfokus pada perlawanan fisik terhadap penjajah, namun pemikiran-pemikiran keislaman yang mengadvokasi khilafah tetap dipertahankan oleh sejumlah kelompok.

¹⁹⁸ M. Jauhari, Y. S. Suryandaru. S., & R. Sugihartati, Dialektika Khilafah dan Politik Kebangsaan dalam Media Publik Siber. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 2021 5(2), 199-216.

¹⁹⁹ R. Hidayat, Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Alinea. id Tentang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang Menolak Mati. *Lingua: Jurnal Ilmiah* Vol. 2020 16 (1).

Mereka percaya bahwa khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam, dan bahwa negara-negara Muslim harus bersatu di bawah satu kepemimpinan yang mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah.

Dalam perkembangannya, pemikiran ini tidak hanya berdampak pada tingkat lokal, tetapi juga berpengaruh pada skala yang lebih luas. Pemikiran tentang khilafah di Indonesia tidak hanya muncul dari bagian dari gerakan lokal, tetapi juga terhubung dengan gerakan-gerakan sejenis di negara-negara lain di dunia Muslim. Ini mencerminkan bagaimana ideologi khilafah tidak hanya menjadi respons terhadap pemerintahan 'kolonial' tetapi juga menjadi bagian dari identitas yang lebih luas tentang identitas, kemerdekaan, dan pemerintahan dalam dunia Islam.

Setelah kemerdekaan mereka pada tahun 1945, ideologi khilafah masih tetap relevan bagi sebagian kelompok Islam di Indonesia. Meskipun demikian, popularitasnya mulai menurun seiring dengan perkembangan demokrasi dan modernisasi di Indonesia. Pada tahun 1950-an, ideologi khilafah kembali muncul dalam wujud Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo.²⁰⁰

Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan melawan pemerintahan Republik Indonesia yang secara resmi didirikan pada 17 Agustus 1945. Darul Islam (DI) muncul sebagai sebuah gerakan bersenjata yang memperjuangkan terbentuknya negara Islam di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip khilafah.

²⁰⁰ M. Masnun, & Z. E. Triantini, *Spiritualitas Islam, Khilafah Islamiyah dan Gerakan Politik Hukum Inkar Nkri (Studi terhadap Gerakan Politik Hizbut Tahrir di Indonesia)*. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 2016 15(2), 193-215

Gerakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo, seorang ulama asal Garut, Jawa Barat. Ia menyatakan dirinya sebagai imam atau pemimpin umat Islam dan mengklaim bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak memenuhi prinsip-prinsip Islam.²⁰¹

Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, dalam upayanya mendirikan negara Islam di Indonesia, mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang berbasis di Jawa Barat. DI/TII melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang ada untuk mendirikan negara Islam berdasarkan prinsip-prinsip khilafah.²⁰²

Perlawanan bersenjata DI/TII mencapai puncaknya pada awal tahun 1950-an. Konflik bersenjata antara DI/TII dengan pemerintah Indonesia menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan materi. Pemerintah Indonesia kemudian melakukan tindakan keras untuk menghadapi gelombang perlawanan pergerakan DI/TII ke wilayah pegunungan yang sulit dijangkau oleh pemerintah.

Meskipun demikian, DI/TII terus melancarkan perlawanan bersenjata, bahkan setelah kematian Kartosuwiryo pada tahun 1962. Perlawanan ini terus berlangsung hingga akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1962. Pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa gerakan DI/TII telah berhasil dihancurkan.

²⁰¹ Wahyudin Hafid, Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal). *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2020 1(1), 31-48.

²⁰² Yussukarno Wirayasa, Strategi pergerakan hizbut tahrir dalam menegakkan khilafah di indonesia pada periode tahun 2000-2016, 2017 (doctoral dissertation, upn" veteran"jawa timur).

Meskipun gerakan DI/TII berhasil ditumpas, namun idealisme ideologi khilafah tetap bertahan dalam beberapa kelompok Islam di Indonesia. Meskipun demikian, popularitasnya semakin menurun seiring dengan perkembangan demokrasi dan modernisasi di Indonesia. Gerakan DI/TII menjadi salah satu contoh perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Republik Indonesia yang didasarkan pada ideologi khilafah, namun akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia.²⁰³

B. Perspektif Berkeadilan

Pada dekade 1990-an, Indonesia menyaksikan kebangkitan ideologi khilafah dengan munculnya berbagai organisasi Islam yang menentang sistem pemerintahan ini. Salah satunya yang muncul sebagai salah satu organisasi gerakan tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Berdiri sejak tahun 1983, HTI muncul dengan tujuan untuk mendirikan Khilafah Islamiyah sebagai sistem pemerintahan global.

HTI, dengan basis pendukung yang kuat, telah menjadi salah satu kekuatan yang signifikan dalam panorama politik dan sosial Indonesia. Mereka secara terbuka menyuarakan visi mereka untuk menggulingkan sistem pemerintahan yang ada dan menggantinya dengan khilafah. Pendukung HTI memandang khilafah sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mereka anggap terkait dengan kepemimpinan sekuler.²⁰⁴

²⁰³ A. Sofanudin, A. Fanani, R. & Prihastuty, "Islamic Education and Islamic Revivalism in Indonesia: A Case Study of Kuttab Al-Fatih Purwokerto". Analisa: Journal of Social Science and Religion, 2021 6(1), 113-128.

²⁰⁴ M.Firdaus, Konstruksi Makna Ideologi Hizbut Tahrir (Studi Fenomenologi Tentang Makna Ideologi Khilafah dan Politik Aktivistis Hizbut Tahrir di Pekanbaru). Jurnal Ilmu Komunikasi, 2017 (JKMS), 6(1), 47-62.

Namun, di samping ketegasan mereka dalam menyuarakan visi mereka, HTI juga telah menjadi subjek kontroversi dan kritik. Banyak pihak menuduh mereka mencoba menggulingkan sistem demokratis Indonesia yang telah ditegakkan sejak reformasi. Kritik juga ditujukan pada metode HTI yang dianggap radikal dan menimbulkan potensi ketegangan antar-agama di negara yang dikenal dengan pluralitas agamanya ini. Selain HTI, ada juga gerakan-gerakan lain yang turut meramalkan wacana khilafah di Indonesia pada masa itu. Beberapa di antaranya memiliki pendekatan yang lebih moderat, namun masih menargetkan tujuan yang sama: mendirikan sistem pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Perkembangan ideologi khilafah di Indonesia juga tercermin dalam dinamika politik nasional. Meskipun tidak secara resmi diakui oleh pemerintah, keberadaan dan pengaruh organisasi-organisasi yang memperjuangkan khilafah tetap signifikan dan perlu diperhitungkan dalam menganalisis dinamika politik dan sosial di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa wacana khilafah ini tidak hanya mempengaruhi dunia politik, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan.²⁰⁵

Hal ini mencakup diskusi-diskusi tentang identitas kebangsaan, agama, dan hubungan antar-agama. Konflik dan ketegangan yang muncul dari perdebatan ini telah menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas sosial di Indonesia. Dengan demikian, kehadiran ideologi khilafah di Indonesia pada tahun 1990-an dan seterusnya bukanlah hanya sekadar fenomena politik, tetapi juga mencerminkan

²⁰⁵ Nilda Hayati, Konsep khilafah islamiyyah hizbut tahrir indonesia: Kajian living al-qur'an perspektif komunikasi. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2017 12(1), 169-200

kompleksitas dinamika sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat yang semakin terbuka dan beragama.

Popularitas ideologi khilafah di kalangan masyarakat Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh sejumlah faktor yang kompleks dan saling terkait. Faktor-faktor utama yang mendorong popularitas ideologi khilafah di Indonesia antara lain adalah kekecewaan terhadap sistem demokrasi, maraknya korupsi, ketiduran politik, serta pengaruh globalisasi dan media sosial.²⁰⁶

Kekecewaan terhadap sistem demokrasi: Banyak masyarakat Indonesia merasa bahwa sistem demokrasi yang dianut negara ini belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa secara efektif. Meskipun Indonesia telah menegakkan sistem demokrasi sejak Reformasi, namun masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan, seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan ketiduran politik. Kekecewaan ini mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif sistem pemerintahan yang dianggap lebih bersih dan adil, salah satunya adalah ideologi khilafah.

Maraknya korupsi: Korupsi merupakan salah satu masalah utama di Indonesia yang memicu kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Tingginya tingkat korupsi yang masih terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan membuat sebagian masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang ada. Mereka merasa bahwa sistem pemerintahan yang ada tidak mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, sehingga mencari alternatif sistem pemerintahan

²⁰⁶ N. Asnawi, Network society and trans-national radicalism: Case study on ISIS support in Indonesia. *International Review of Humanities Studies*, 2017 2(2), 181-188.

yang dianggap lebih bersih dan transparan, seperti ideologi khilafah.

Ketegangan politik: Ketegangan politik yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga turut memicu munculnya minat terhadap ideologi khilafah. Persaingan politik yang semakin intens antar partai politik dan elit politik membuat sebagian masyarakat merasa bahwa sistem demokrasi tidak mampu menyelesaikan ketegangan politik dengan efektif. Mereka percaya bahwa Indonesia membutuhkan sistem pemerintahan yang lebih kuat dan stabil untuk menjamin keamanan dan kestabilan negara, dan ideologi khilafah dianggap sebagai salah satu alternatif yang dapat memberikan solusi atas ketegangan politik yang sedang terjadi.

Globalisasi dan media sosial: Globalisasi dan perkembangan media sosial telah memainkan peran penting dalam penyebaran dan popularitas ideologi khilafah di Indonesia. Melalui media sosial, ideologi khilafah dapat menyebar dengan cepat dan mudah di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Organisasi-organisasi yang mengadvokasi ideologi khilafah dapat dengan mudah menjangkau dan merekrut anggota baru melalui media sosial, sehingga popularitas ideologi ini semakin meningkat di kalangan masyarakat Indonesia.²⁰⁷

²⁰⁷ Nunu Burhanuddin, Akar dan Motif Fundamentalisme Islam: Reformulasi Tipologi Fundamentalisme dan Prospeknya di Indonesia. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 2016 1(2), 199-210

C. Faktor-Faktor Yang Mendorong Popularitas Ideologi Khilafah Di Kalangan Masyarakat Indonesia

Popularitas ideologi khilafah di kalangan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan trend yang mengkhawatirkan. Ideologi ini menawarkan alternatif sistem pemerintahan yang dianggap lebih adil, bersih, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, ideologi ini juga dapat memicu radikalisme dan kekerasan. Sejumlah alasan yang mendorong popularitas ideologi khilafah di kalangan masyarakat Indonesia

1. Kekecewaan Masyarakat Terhadap Demokrasi

Banyak masyarakat Indonesia merasa bahwa sistem demokrasi belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa secara efektif seperti korupsi, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan ekonomi. Kekecewaan ini mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif sistem pemerintahan yang dianggap lebih efektif dan efisien. Salah satu alternatif yang muncul adalah ideologi khilafah.

Ideologi khilafah menawarkan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia dengan menarjikan sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam dan bebas dari korupsi. Khilafah, dalam pandangan mereka, merupakan sistem pemerintahan yang mampu memberikan solusi holistik atas permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi masyarakat. Para pendukung khilafah meyakini bahwa dengan menerapkan syariat Islam dalam sistem pemerintahan, maka berbagai permasalahan seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir bahkan dihilangkan sama sekali. Mereka percaya bahwa prinsip-prinsip Islam dalam mengatur kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, para pendukung khilafah juga menilai bahwa sistem demokrasi yang diterapkan saat ini telah gagal memberikan solusi yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Mereka menyoroti bahwa korupsi masih menjadi masalah yang merajalela di berbagai lapisan pemerintahan, kesenjangan sosial semakin membesar, dan ketimpangan ekonomi semakin terlihat jelas. Namun, di sisi lain, terdapat juga yang skeptis terhadap ideologi khilafah sebagai alternatif sistem pemerintahan di Indonesia. Mereka menilai bahwa menerapkan khilafah dapat membawa dampak negatif terhadap prinsip demokrasi, pluralisme, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, mereka juga khawatir bahwa implementasi khilafah dapat memicu polarisasi masyarakat dan konflik antaragama.²⁰⁸

2. Maraknya Korupsi

Korupsi merupakan salah satu masalah yang menjadi titik fokus utama di Indonesia, memicu kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat terhadap pemerintah. Fenomena ini telah menimbulkan keraguan terhadap sistem pemerintahan yang ada, mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif sistem yang dianggap lebih bersih, transparan, dan adil. Dalam pencarian solusi atas masalah korupsi yang kronis, ideologi khilafah muncul sebagai salah satu alternatif yang menarik bagi sebagian masyarakat.

Ideologi khilafah menawarkan solusi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariat Islam dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu janji

²⁰⁸ Najamuddin Khairur Rijal, Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2017 13(1), 45-60.

utama yang diberikan oleh ideologi ini adalah sistem pemerintahan yang tidak hanya bersih dari korupsi, tetapi juga adil dan transparan. Hal ini dikarenakan sistem pemerintahan yang dijanjikan berdasarkan pada ajaran Islam yang tidak mentolerir tindakan korupsi.

Masyarakat yang mendukung ideologi khilafah melihat bahwa implementasi syariat Islam dalam pemerintahan akan membawa perubahan mendasar dalam sistem yang saat ini korup dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka percaya bahwa dengan menerapkan hukum-hukum Islam, termasuk hukuman yang keras terhadap pelaku korupsi, akan mengurahi bahkan menghilangkan praktik korupsi yang saat ini mengkarut dalam sistem pemerintahan.

Sebelum dan sekarang, perpecahan juga menuai kontroversi. Meskipun ideologi khilafah menjanjikan sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi, banyak pihak yang menilai bahwa kewajiban syariat Islam dalam ranah politik dapat menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Selain itu, masih terdapat perdebatan mengenai interpretasi yang tepat terhadap syariat Islam dan bagaimana menerapkannya secara adil dalam konteks pemerintahan modern.²⁰⁹

²⁰⁹ Muhammad Arif Khudori, Konsep khilafah hizbut tahrir indonesia dalam perspektif fiqh siyasah dan relevansinya dengan negara kesatuan republik indonesia (nkri) 2018. (doctoral dissertation, uin raden intan lampung)

Dengan demikian, sementara ideologi khilafah menawarkan solusi menarik untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip syariat Islam, perdebatan mengenai keberlanjutannya dalam konteks keberagaman dan demokrasi masih terus berlangsung. Masyarakat Indonesia harus terus melakukan diskusi terbuka dan mendalam mengenai berbagai alternatif sistem pemerintahan, sambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia.

3. Ketegangan Politik

Ketegangan politik yang telah terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan berbagai ideologi, termasuk ideologi khilafah. Sebagian masyarakat berasa ketidakpercayaan terhadap demokrasi yang diterapkan karena belum mampu menyelesaikan ketegangan politik yang ada dan mereka percaya bahwa Indonesia membutuhkan pemerintahan yang lebih kuat dan stabil. Dalam konteks ini, ideologi khilafah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan solusi untuk permasalahan politik yang kompleks.

Ideologi khilafah menawarkan sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam dan dianggap mampu menegakkan hukum dengan tegas. Menurut para pendukungnya, khilafah akan memberikan keadilan, kedamaian, dan kestabilan yang lebih baik daripada sistem demokrasi yang ada saat ini. Mereka percaya bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan, negara akan menjadi lebih adil dan sejahtera.

Namun, di sisi lain, ideologi khilafah juga menuai kontroversi dan perdebatan. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam akan mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa khilafah dapat menjadi ancaman bagi pluralitas dan kebebasan beragama yang telah menjadi bagian penting dari identitas Indonesia.²¹⁰

4. Globalisasi dan Media Sosial

Globalisasi dan perkembangan media sosial telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penyebaran ideologi khilafah di kalangan masyarakat Indonesia. Keterseragaman global yang semakin meningkat dan keterbukaan akses informasi melalui media sosial telah turut meningkatkan ideologi khilafah untuk menyebarkan dengan cepat di mas.

Salah satu dampak dari globalisasi dan media sosial adalah munculnya organisasi-organisasi yang mengadvokasi ideologi khilafah untuk menjangkau dan merekrut anggota baru di Indonesia. Dengan adanya media sosial, organisasi-organisasi tersebut dapat dengan mudah mempromosikan ideologi khilafah, mengajak masyarakat untuk bergabung, dan menyebarkan propaganda yang mendukung ideologi tersebut.

Selain itu, media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang ideologi khilafah. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat

²¹⁰ Z. Darajat, Z. Harza, & M. Jamilah, Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Wacana Khilafah Islamiyah Yang Dibawa Oleh Hizbut Tahrir. Palito, 2022 1(01), 99-117

Indonesia terhadap ideologi tersebut, sehingga semakin memperkuat penyebarannya. Dengan demikian, peran globalisasi dan media sosial dalam memfasilitasi penyebaran ideologi khilafah di Indonesia sangatlah signifikan. Masyarakat Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman yang lebih baik tentang ideologi tersebut agar dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih efektif.²¹¹

5. Krisis Identitas

Krisis identitas merupakan fenomena yang tidak jarang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, yang mengalami dampak dari arus globalisasi dan modernisasi. Perubahan-perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang pesatnya seringkali membuat individu kehilangan akar identitasnya. Dalam situasi ini, beberapa individu rentan terhadap ideologi-ideologi ekstrem, salah satunya adalah ideologi khilafah.

Ideologi khilafah menawarkan sebuah identitas yang jelas dan tujuan hidup yang konkret, sesuatu yang mungkin dirasakan sebagai kebutuhan di tengah kebingungan dan kegelisahan yang dialami oleh sebagian masyarakat. Dengan menawarkan model kehidupan yang dianggap "ideal" berdasarkan interpretasi tertentu terhadap ajaran Islam, ideologi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian kalangan yang merasa kehilangan arah.

Para pemeluk ideologi ini seringkali percaya bahwa khilafah adalah satu-satunya solusi bagi masalah-masalah

²¹¹ M. N. L. Mahamid, Gerakan Ideologi Islam Transnasional di Indonesia dalam Film JKDN Karya Nicko Pandawa. *Muslim Heritage*, 2022 7(1), 83-109

yang mereka hadapi, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat umum. Mereka melihat khilafah sebagai sistem yang akan memberikan keadilan, kedamaian, dan kemakmuran bagi umat Islam. Dengan memperoleh identitas baru sebagai bagian dari "ummah" (komunitas Islam yang bersatu), serta tujuan hidup yang jelas untuk mendirikan khilafah, mereka merasa memiliki arah yang jelas dalam hidup.²¹²

Namun demikian penting untuk memahami bahwa kecenderungan penyebaran ideologi-ideologi ekstrem, termasuk ideologi khilafah, seringkali bukanlah hasil dari pemikiran yang rasional dan terinformasi secara baik. Lebih sering kecenderungan ini muncul dari keinginan akan stabilitas dan identitas dalam situasi dimana individu merasa kegelisahan kedua hal tersebut. Untuk komunitas, penting bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk memiliki pemahaman yang benar tentang nilai-nilai keberagaman, dan makna keadilan yang sebenarnya. Pendidikan yang inklusif, terbuka, dan mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang agama, budaya, dan sejarah, dapat menjadi kunci untuk mengatasi krisis identitas dan mencegah penyebaran ideologi-ideologi ekstrem di masyarakat.

²¹² A. Haryadi, & N. Muthia, Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya terhadap Indonesia. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 2017. 1(1), 1-19

6. Pengaruh Organisasi Islam Radikal

Organisasi-organisasi Islam radikal telah memainkan peran yang signifikan dalam menyebarkan ideologi khilafah di Indonesia. Dengan menggunakan berbagai metode, seperti ceramah, seminar, dan media sosial, mereka telah berhasil mengajarkan ideologi mereka kepada banyak orang. Namun, tidak hanya sebatas pada penyampaian ideologi, mereka juga sering terlibat dalam aksi-aksi teroris yang menguatkan secara faktual citra mereka sebagai kelompok militan dan berbahaya.

Ideologi khilafah yang mereka promosikan mengusung gagasan tentang pemulihan khilafah atau pemerintahan Islam yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan fungsinya. Mereka percaya bahwa hanya dengan menegakkan khilafah, masyarakat akan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Untuk masalah-masalah sosial dan politik, mereka menggunakan Metode yang digunakan oleh organisasi-organisasi ini sangat bervariasi.

Mulai dari ceramah-ceramah yang diselenggarakan di masjid-masjid, pusat-pusat kegiatan Islam, hingga seminar-seminar yang dihadiri oleh para pemimpin mereka. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana yang sangat efektif bagi mereka untuk menyebarkan ideologi mereka. Dengan memanfaatkan platform-platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, mereka dapat mencapai audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang lebih terkoneksi dengan dunia digital.²¹³

²¹³ Ihda Raudhatul Ihsaniah, Konsep khilafah dan nation state dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

Namun, tidak hanya mengandalkan upaya persuasif, organisasi-organisasi ini juga sering terlibat dalam aksi-aksi kekerasan. Serangan terhadap aparat keamanan, serangan teror, serta konflik bersenjata menjadi bagian dari strategi mereka dalam memperjuangkan ideologi khilafah. Aksi-aksi kekerasan ini tidak hanya menimbulkan ketakutan di masyarakat, tetapi juga memperkuat citra mereka sebagai kelompok yang militan dan berbahaya.

D. Pandangan Masyarakat Dunia Terhadap Ideologi Khilafah Di Indonesia

Ideologi khilafah di Indonesia telah menarik perhatian para pakar dari berbagai bidang. Pandangan mereka era ke ideologi ini beragam, mulai dari yang mendukung hingga yang mengkritiknya. Berikut beberapa pandangan para akademisi dan ahli terkait ideologi khilafah di Indonesia:

Sidney Jones, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). Jones berpendapat bahwa ideologi khilafah di Indonesia telah mengalami evolusi. Awalnya, ideologi ini hanya dianut oleh kelompok kecil aktivis Islam. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, popularitasnya semakin meningkat, terutama di kalangan anak muda. Jones mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong popularitas ideologi khilafah, seperti kekecewaan terhadap sistem demokrasi, maraknya korupsi, dan ketegangan politik. Jones juga mengingatkan bahwa implementasi ideologi khilafah di negara-negara lain sering kali diwarnai dengan kekerasan dan konflik.

Selain Jones ada Greg Barton, Profesor Studi Islam di Universitas Durham. Barton berpendapat bahwa ideologi khilafah memiliki daya tarik bagi sebagian orang karena

menawarkan solusi alternatif bagi berbagai permasalahan bangsa. Ideologi ini menjanjikan sebuah sistem pemerintahan yang adil, bersih, dan berdasarkan nilai-nilai Islam. Namun, Barton juga mengingatkan bahwa implementasi ideologi khilafah di negara-negara lain sering kali diwarnai dengan kekerasan dan konflik. Barton menekankan pentingnya dialog dan edukasi untuk mencegah penyebaran ideologi yang keliru.

Izzuddin Muchtar, Dosen Log Universitas Nasional Menurut Izzuddin Muchtar, bahwa ideologi khilafah di Indonesia bukanlah fenomena baru. Ideologi ini telah hadir di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Namun, Muchtar juga mengatakan bahwa ideologi ini mengalami kebangkitan kembali dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan anak muda. Untuk melihat beberapa faktor yang mendorong kebangkitan ini, seperti globalisasi, media sosial, dan media propaganda kelompok radikal. Muchtar menekankan pentingnya penelitian dan edukasi untuk memahami ideologi khilafah secara komprehensif.

Sementara Febriana Indriani, Peneliti LJPI berpendapat bahwa ideologi khilafah di Indonesia memiliki berbagai variasi. Ada kelompok yang hanya ingin menerapkan syariat Islam dalam aspek kehidupan pribadi, dan ada kelompok yang ingin mendirikan negara khilafah. Indriani juga mengatakan bahwa ideologi ini sering kali dikaitkan dengan gerakan radikalisme dan terorisme. Indriani menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang ideologi khilafah dan upaya pencegahan penyebaran ideologi yang keliru.

Juga ada Ainun Hayati, Peneliti Universitas Islam Negeri Jakarta. Hayati berpendapat bahwa ideologi khilafah merupakan fenomena kompleks yang perlu dikaji

secara komprehensif. Hayati mengatakan bahwa ideologi ini tidak boleh diidentikkan dengan kekerasan atau terorisme. Hayati juga menekankan pentingnya dialog dan edukasi untuk mencegah penyebaran ideologi yang keliru. Hayati mendorong penelitian lebih lanjut tentang ideologi khilafah dan faktor-faktor yang mendorong popularitasnya (Lufaei, 2019).²¹⁴

Pandangan para pakar dan ahli terkait ideologi khilafah di Indonesia beragam. Ada yang melihatnya sebagai solusi alternatif bagi permasalahan bangsa, ada yang khawatir dengan potensi radikalisme dan kekerasannya. Penting untuk memalui berbagai pandangan ini untuk dapat merumuskan strategi yang tepat dalam mencegah penyebaran ideologi khilafah yang keliru.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²¹⁴ Lufaei Lufaei, Jumping Conclusion Tafsir: Penyimpangan Ayat-Ayat Khilafah HTI dalam Kitab Daulah Islamiyyah. SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 2019 2(2), 139-150

BAB VIII

IDEOLOGI KANAN DAN KIRI DALAM PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Partai politik islam yang disatukan karena persamaan ketuhanan dan nilai agama, tampaknya dipisahkan karena perbedaan ideologi politik. Karenanya, tidak semua partai Islam di Indonesia memiliki persamaan ideologi dan fokus berjalan pada agenda dan visi misi memperjuangkan nilai-nilai Islam. Keaneekaragaman yang sudah menjadi ciri khas dari Indonesia sebagai negara yang pluralistik, bahkan beragama yang pluralistik masih memiliki keaneekaragaman seperti halnya dalam ideologi partai politik. Beberapa partai Islam di Indonesia memiliki partai yang masuk dalam parlemen maupun partai yang tidak masuk dalam parlemen dengan ideologi politik yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi politik dan tujuan dari partai tersebut.

Ideologi politik di Indonesia mengalami dinamika klasik yang mengakar sampai pada saat ini, dalam Sejarah Indonesia dimulai dari orde lama (orla), orde baru (orba), dan reformasi. Bahkan peran ideologi (islamisme dan nasionalisme), di tubuh partai politik turut mewarnai isu tahunan dalam perebutan kekuasaan.²¹⁶ Partai politik islam di Indonesia yang menganut ideologi kanan yang jelas berbeda dengan partai yang berpedoman terhadap ideologi kiri, dan, begitupun sebaliknya. Ideologi kanan dan kiri dalam partai islam berimplikasi adanya polarisasi terhadap masyarakat muslim di Indonesia. Terutama karena masyarakat muslim indonesia merupakan penduduk terbanyak. Sebagai agama

²¹⁵ Ilmi Amalia, Perbedaan Individual pada Ideologi Politik Berbasis Agama, *Jurnal Tazkiya : Jurnal of Psychology*, 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/tazkiya.v8i1.14851>

²¹⁶ Iswandi, *Studi Gerakan Partai Politik Pada Pemilu 2019*, *POLITICA*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2020, h.4.

mayoritas, islam memberikan pengaruh besar terhadap berdirinya negara khususnya dalam bidang politik. Munculnya beberapa partai politik islam baik partai lama yang berdiri sejak zaman kemerdekaan, maupun partai baru yang muncul pada era orde baru maupun reformasi.

Di Indonesia sebagian besar partai politik islam berdiri dan bermula dari organisasi kemasyarakatan (ormas). Indonesia yang menerapkan sistem multi-partai sejak pemilu pertama tahun 1955 dengan beberapa partai nasional dan partai islam memegang nilai-musyawarah spirit menjadi wadah bagi politik islam. Partai politik seperti PKS, PAN, partai masyumi, Partai Ulama (NU), Partai, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), PPP, dan lainnya dianggap sebagai partai islam yang ideologisasi partai politik terpecah menjadi dua ideologi yang sama-sama masih menjadi segmentasi politik keislaman di Indonesia, walaupun dukungan kepada partai Islam tidak dapat mencapai titik yang maksimal. Partai Islam ingin mempertebal identitas ideologi partai islam ke dalam ideologi partai kanan dan kiri. Istilah ini untuk mempermudah identifikasi kecenderungan, bukan identitas politik islam sebagai agama.

Menurut Abul Hasan Ali-Asy'ari, sebagaimana ditulis Husein Aziz, 2021, menjelaskan bahwa Islam kanan merupakan golongan yang kurang aktif dalam proses berfikir, seringkali mengkritik dan menolak-rasionalitas ulama serta para filosof hanya dengan mengacu pada satu dalil, tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas.²¹⁹ Sedangkan Leonard Binder

²¹⁷ Bustami Thalib, Menurunnya Suara Pemilih Terhadap Partai Islam, Doctrinal : Vol. 4 No. 1, Maret 2019, h. 989

²¹⁸ Khoiro Ummatin, Demokratisasi Dalam Politik Kepartaian Islam (Studi Komparatif PPP di Indonesia dan PAS di Malaysia), POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, h.23

²¹⁹ Muhammad Dalle & Muhammad Jundi, Penegakkan Syariat Islam dan Pertarungan Ideologi Islam Kanan vs Islam Tengah Pasca Reformasi di

mengemukakan mengenai islam kiri yang biasa disebut dengan islam liberal, dimana hal yang paling menjadi titik fokus yaitu adanya keterbukaan tafsir atas kitab suci Al-Qur'an yang tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang final dan apa adanya, tetapi membutuhkan penafsiran-penafsiran yang terus menerus sehingga islam tidak berhenti merespon masalah sosial atau dalam arti lain islam kiri ini lebih bersifat inklusif.²²⁰

Islam kanan juga dipahami sebagai Islam fundamentalis. Mereka umumnya bergerak secara paratis, sewenang-wenang, agresif dan mudah marah. Mereka intoleran dan eksklusif dan kerap menunjukkan sikap antagonis pada kelompok Islam kiri yang moderat atau kelompok yang melihat Islam sebagai jalan tengah atau yang di eal moderatis. Bahkan pada bagian tertentu cenderung meyakini takfir.²²¹

Diego Fossati pada tahun 2019 dalam sebuah jurnal menulis mengenai kebangkitan ideologi keagamaan dalam politik Indonesia, dengan fokus khusus pada kebangkitan politik islam, ideologi politik dan perilaku politik yang didasarkan pada survei awal pada tahun 2017, Diego Fossati menemukan bahwa identitas ideologi masih ada di kalangan pemilih di Indonesia, dengan perbedaan regional yang signifikan. Temuan dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa ideologi, khususnya Islam politik, memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku politik di Indonesia.²²²

Tanah Bugus, Al-Muktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin Vol. 01 No. 01, April 2024, h.8

²²⁰ Husein Aziz, Antologi Kritik Ideologi Islam : Kumpulan Kritik Ideologi Mahasiswa PASCARJANA, Dirosah Islamiah UIN Sunan Ampel Surabaya 2021, (Surabaya: Innofat Publishing, 2021), h.10

²²¹ Stephen Sulaiman Schwartz, *The Two Faces Of Islam: Saudi Fundamentalism and Its Role in Terrorism*, terjemah, (Jakarta:Penerbit Blantika, 2007), xvi

²²²Diego Fossati, *The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behavior*, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*Volume 38, Issue 2 August 2019 <https://doi.org/10.1177/1868103419868400>

Data survey menunjukkan terdapat perbedaan evaluasi ekonomi, prioritas politik, dukungan terhadap desentralisasi persetujuan presiden, dan keputusan partai berdasarkan kecenderungan ideologis terhadap politik Islam di Indonesia. Pengaruh politik Islam terhadap berbagai aspek opini dan perilaku masyarakat Indonesia, serta relevansi sejarah identitas ideologi politik yang dikenal dengan sebutan sekte dalam pembentukan identitas partai politik Indonesia. Lalu pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Dalle pada tahun 2023 menggunakan Teori Kubus Kekuatan (Powercube): Teori ini digunakan untuk menganalisis level, dimensi, dan wujud dari kekuasaan serta logika keterkaitannya dalam konteks konflik ideologi antara PKS dan PKS. Konflik ideologi antara NU dan PKS dalam konteks politik Indonesia. Hal ini merujuk ke konflik hubungan antara agama dan politik dalam politik Indonesia.

A. Partai Islam berakar Ideologi Konservatif

Partai Islam berakar ideologi konservatif cenderung memiliki pandangan yang konservatif terkait isu-isu politik. Mereka mendukung pelestarian nilai-nilai tradisional dan norma-norma agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konservatisme sosial ini sering kali terlihat dalam kebijakan yang mereka usulkan atau dukung, seperti regulasi yang lebih ketat terhadap moralitas publik dan penegakan syariah Islam dalam beberapa aspek kehidupan²²⁴

²²³ Muhammad Dalle, Deklarasi Anies - Muhaimin dan Konflik Ideologi NU Vs PKS di Pentas Politik Nasional, Jurnal Review Politik (JRP) Volume 13, Number 2, December 2023. 230-252 ISSN: 2088-6241 (Printed); 2615-6504 (Online)
<https://doi.org/10.15642/jrp.2023.13.2.230-252>

²²⁴ Isharyanto, "Ideologi Kanan Dan Kiri Dalam Partai Islam Di Indonesia, Hal. 14.," 2017, 269.

Partai Islam kanan biasanya mendorong penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Mereka mendukung sistem ekonomi yang berdasarkan pada larangan riba, distribusi zakat, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang dianggap lebih adil dan sejalan dengan ajaran Islam. Partai-partai ini sering kali menunjukkan ketegasan atau bahkan oposisi terhadap ideologi sekuler dan liberal. Mereka berpendapat bahwa sekularisme bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan dapat merusak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan beragama dan bernegara. Oleh karena itu, mereka lebih mendukung sistem pemerintahan yang lebih berbasis pada nilai-nilai agama.

Selain itu, mereka sering menerbitkan program-program yang bertujuan untuk memperkuat identitas keagamaan umat Islam di Indonesia baik melalui pembuatan undang-undang, kebijakan, kebijakan budaya, maupun registrasi yang mendukung kehidupan Islami masyarakat muslim Indonesia.²²⁵ Beberapa partai Islam berideologi kanan tidak hanya mendukung penerapan syariat Islam secara nilai dalam aspek-aspek tertentu dari kehidupan masyarakat, tetapi juga dalam beberapa kasus, mendorong pembentukan undang-undang yang mengakomodir kepentingan politik umat Islam. Partai Islam di Indonesia yang menganut dan menjalankan ideologi kanan yaitu PPP, PBB, PKB, dan PKS.²²⁶

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan didirikan pada 5 Januari 1973 sebagai hasil fusi (penggabungan) dari empat partai politik Islam: Partai Nahdlatul Ulama

²²⁵ Ibid

²²⁶ Ibid

(NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Penggabungan ini merupakan bagian dari kebijakan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang menghendaki penyederhanaan partai politik demi stabilitas politik dan efisiensi pemerintahan. PPP sejak awal berdirinya memiliki platform Islam moderat, berupaya mewakili aspirasi umat Islam dalam ranah politik Indonesia. Partai ini berkomitmen pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara, meskipun sering kali berada dalam tekanan pemerintahan yang cenderung sekuler pada masa Orde Baru, PPP aktif dalam berbagai bidang politik, sosial, dan keagamaan dalam bidang politik. PPP terlibat dalam pemerintahan umum dan berusaha mendirikan kurasi di DPR dan lembaga legislatif lainnya.²²⁷

PPP juga memiliki bagian dari koalisi pemerintahan atau oposisi bergantung situasi politik yang ada. Di bidang sosial, PPP aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama dalam hal pemahaman tentang demokrasi dan hak-hak warga negara. Mereka juga menjalankan berbagai program sosial yang berfokus pada kesejahteraan umat, seperti bantuan untuk fakir miskin, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam konteks keagamaan, PPP berupaya menjaga nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik dan legislasi. Mereka sering kali menyuarakan isu-isu yang

²²⁷ Ichlasul Amal, Politik dan Pemerintahan di Indonesia, hlm. 122., *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, vol. 6, 2017, <http://repository.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigu.e.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>

berkaitan dengan syariat Islam, moralitas, dan keadilan sosial. Sepanjang sejarahnya, PPP mengalami naik turun dalam hal perolehan suara dan kursi di parlemen. Pada masa awal reformasi, PPP mendapatkan dukungan cukup signifikan, tetapi kemudian mengalami penurunan suara di berbagai pemilu berikutnya. Meskipun demikian, partai ini tetap memiliki pengaruh dalam politik Indonesia, terutama dalam isu-isu keagamaan dan kebijakan yang berkaitan dengan Islam. PPP berhasil mendorong beberapa kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti regulasi tentang perbankan syariah dan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri. Namun mereka juga menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan relevansi mereka tengah persaingan dengan partai-partai Islam lainnya seperti partai-partai sekuler yang semakin dominan.²²⁸

2. Partai Bulan Bintang (PBB)

Selain PPP, partai yang berideologi kanan yaitu partai PBB. Partai Bulan Bintang (PBB) adalah salah satu partai politik di Indonesia yang berbasis pada ideologi Islam. PBB didirikan pada 17 Juli 1998 pada masa reformasi Indonesia yang ditandai dengan tumbanginya rezim Orde Baru²²⁹ Partai Bulan Bintang (PBB) adalah salah satu partai politik di Indonesia yang didirikan pada 17 Juli 1998. PBB merupakan partai yang berakar pada perjuangan Islam dan dikenal sebagai partai yang mempromosikan syariat Islam dalam bingkai negara Pancasila. Sejarah PBB tidak bisa dilepaskan dari

²²⁸ Ibid

²²⁹ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang (Jakarta: PBB, 2010), 45. Pdf, n.d.

sejarah partai-partai Islam di Indonesia, terutama dari pengaruh Masyumi. PBB didirikan oleh tokoh-tokoh yang sebagian besar adalah mantan anggota Masyumi, partai Islam besar di Indonesia yang dibubarkan pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno. Para pendiri PBB seperti Yusril Ihza Mahendra dan MS Kaban berupaya menghidupkan kembali cita-cita politik Islam yang pernah diperjuangkan oleh Masyumi.

PBB mengalami beberapa kali perubahan dalam struktur kepemimpinan dan basis massa. Awalnya, PBB didirikan di kalangan mahasiswa Islam, tetapi kemudian diperluas jangkauannya untuk menarik dukungan dari berbagai kelompok Muslim di Indonesia. Partai Bulan Bintang menjalankan aktivitas politik dengan fokus pada sosialisasi penerapan syariat Islam dalam sistem hukum dan kebijakan negara. Pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh PBB antara lain kampanye, pendaftaran politik, legislasi, serta kerjasama dengan organisasi Islam dengan menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi keagamaan dan sosial Islam untuk memperkuat basis dukungan dan memperluas pengaruh politik di kalangan umat Islam di Indonesia.

Sejak berdirinya, PBB telah mengalami berbagai dinamika politik dan pencapaian dalam sistem perpolitikan di Indonesia: antara lain saat pemilu 1999 PBB berhasil meraih 2,84% suara nasional dan mendapatkan 13 kursi di DPR. Hasil ini menunjukkan keberhasilan awal PBB dalam menarik dukungan umat Islam pada masa awal reformasi. Pada Pemilu 2004 dan 2009, PBB mengalami penurunan perolehan suara dengan hanya mendapatkan 2,62% suara pada 2004 (11 kursi) dan 1,79% pada 2009 (tidak mencapai ambang

batas parlemen 2,5%) . lalu saat Pemilu 2014 dan 2019 PBB semakin sulit bersaing dengan partai-partai besar lainnya dan gagal mendapatkan kursi di DPR, menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan dukungan pemilih.

3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai politik yang berideologi Islam Moderat.²³⁰ Hal ini terpotret secara jelas dalam proses PKB yakni berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semula, prinsip perjuangan Partai PKB adalah perabdian kepada Allah Subhan dan Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, serta keadilan, menjaga persatuan, menuruti persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah.²³¹ Juga, secara tegas PKB menyatakan identitasnya sebagai partai Nasionalis, Agamis dan Humanis dengan Watak Partai Moderat, Toleran dan Adil.²³²

PKB pada semula dalam mewujudkan tujuan politik mengusung prinsip politik *rahmatan lil alamin* yang berarti tujuan politik PKB adalah untuk menyemai

²³⁰ Nadia Bulkin, Indonesia's political parties, Oktober, 2013, *Islamic Parties*, diakses <https://web.archive.org/web/20210814010312/https://carnegieendowment.org/2013/10/24/indonesia-s-political-parties-pub-53414#PKB>

²³¹ Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa Bab II Asas dan Prinsip Perjuangan Pasal 4 dan 5

²³² Ibid

dan menyebarkan rahmat serta keselamatan bagi seluruh alam semesta tanpa terkecuali.²³³ Meskipun PKB merupakan partai berbasis agama, namun PKB memilih jalan ideologis bukan saja untuk kepentingan NU dan Islam, melainkan untuk kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Buah pikiran ini tentu saja tidak serta merta lahir begitu saja, melainkan lahir atas pijakan para pendiri partai PKB. Abdurrahman Wahid merupakan pendiri PKB. Partai yang didirikan pada awal reformasi tahun 1998 ini merupakan partai politik yang lahir dari rahim NU. Abdurrahman Wahid yang saat itu masih menjabat Ketua Umum PBN J (Pembus Besar Wahdatul Ulama) menjadi tokoh sentral partai ini. Abdurrahman Wahid telah memperjuangkan filosofi dan cita perjuangan ini sejak lama. Sebagai intelektual yang luas dan gagasannya banyak diartikulasikan di lingkungan NU, Abdurrahman Wahid juga merupakan kader terbaik yang dimiliki NU karena merupakan keturunan langsung dari pendiri NU, K. H. Hasyim Asy'ari. Melalui kepemimpinannya di organisasi keagamaan NU, Abdurrahman Wahid tidak hanya rajin melahirkan atau memperbanyak ide-ide kreatif melalui tulisan dan penggalan pidato, tetapi juga mempraktikkannya. PKB merupakan salah satu partai politik yang dapat menjaga komitmen Indonesia karena berkomitmen penuh terhadap kelangsungan eksistensi bangsa berdasarkan prinsip dasar ideologi Pancasila.

²³³ Hasnu, Firdaus Syam, *Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDIP dan Islam Moderat PKB*. Syntax Idea, Vol. 3, No.7, Juli 2021 Vol. 3, No. 7, Juli 2021. Hal 1629

Abdurrahman Wahid menggarisbawahi, bahwa PKB mengedepankan kepentingan nasional sekaligus berupaya menyelaraskan hukum fikih dan hukum nasional, maka hal itu merupakan perwujudan hubungan politik dan agama yang bisa berjalan beriringan.

Sebenarnya pikiran-pikiran tersebut sudah sejak awal bisa ditemukan pada Abdurrahman Wahid. Dalam Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid, ia membahas konsepsi Islam tentang bentuk negara dengan sangat rinci. Ia juga membicarakan pandangan mengenai budaya, politik, ekonomi, demokrasi, dan mungkin yang paling penting kemanusiaan yang kemudian dicirikan dengan pluralitas. Tidak kalah beranikan jika Abdurrahman Wahid pada Era Orde Baru mewakili sejumlah orang-orang yang keberatan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Soeharto saat itu. Abdurrahman Wahid menentang keterkaitan antara Islam dan totalitarisme. Ia menjelaskan bahwa ajaran Islam untuk menentang Negara tidak memiliki landasan yang kuat. Islam menempatkan prioritas tinggi untuk menanamkan prinsip-prinsip keadilan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Bagi Abdurrahman Wahid, mencapai tiga tujuan adalah hal yang terpenting. Tujuan tersebut adalah: Pertama, mengutamakan asas musyawarah. Kedua, memperjuangkan dan menegakkan Keadilan, dan Ketiga, kebebasan bagi warga negara yang terjamin (alhuriyyah). Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa tujuan bernegara adalah mensejahterakan masyarakat. Karena itulah pikiran-pikiran Abdurrahman Wahid mengilhami ideologi politik partai yang didirikannya. Dalam Statuta PKB ulama sebagai pimpinan tertinggi di antara fungsionaris partai. Hal ini

menandakan bahwa ulama adalah sosok yang kuat secara moral untuk mengawal perjuangan politik PKB. Hal ini juga bisa berarti upaya PKB dalam mempertahankan prinsip-prinsip agama walaupun pandangan intelektual tokoh-tokoh PKB tidak menganggap agama harus menjadi ideologi negara.

Namun secara politik PKB memperjuangkan nilai-nilai agama ialah bertujuan untuk mengintegrasikan agama ke dalam sistem nilai nasional. Abdurrahman Wahid mempromosikan integrasi tersebut sebagai sistem ekonomi untuk mengancam Islam pada status cita-cita nilai dan sumber inspirasi. Hal ini terlihat pada sistem perekonomian yang dikembangkan lewat sistem perbankan syariah yang secara inheren tidak menjajah bagian dan kebijakan resmi Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum partai ini karena reputasi dan kepemimpinan intelektualnya yang mampu meningkatkan PKB dan menjalin hubungan terstruktur antara Islam dan politik di dalam PKB. Abdurrahman Wahid sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan PKB.

Karena Abdurrahman Wahid mengendalikan bahkan memutuskan keputusan-keputusan politik yang telah dan akan diambil PKB, maka visi dan kebijakan politik PKB akan selalu berada di bawah bayang-bayangnya. Selain memberikan perlindungan dan keberkahan bagi ciptaan PKB, Abdurrahman Wahid mempunyai kapasitas intelektual dan kemampuan untuk membimbing PKB dalam setiap keputusan politik atau pengambilan kebijakan yang perlu diambil. Selain itu, Abdurrahman Wahid mempunyai reputasi yang kuat baik di dalam negeri maupun internasional sebagai pejuang kebebasan,

demokrasi, dan hak asasi manusia. Hal ini tentu saja memberikan kontribusi yang besar bagi PKB. Oleh karena itu, pengaruh Abdurrahman Wahid terhadap PKB cukup kuat. Oleh karena itu, PKB akan selalu menggunakan ideologi Abdurrahman Wahid sebagai model dan acuan dalam merumuskan kebijakan dan pilihan politiknya. Di lingkungan PKB, terjadi konflik yang cukup pelik pada tahun 2008. Tiba-tiba forum Mahfud MD yang hendak berpamitan dengan masa depannya sebagai Ketua Konstitusi di Mahkamah Konstitusi malah menjadi pertemuan rutin para Ketua DPP dan Ketua Partai-partai lain untuk mempertimbangkan topik yang sangat berkembang mengenai keinginan mereka untuk mengadakan Kongres nasional. Ketua Umum Majelis Syura PKB Abdurrahman Wahid diduga mendapat informasi mengenai persoalan ini. Muhaimin Iskandar akhirnya turun dari jabatan Ketua Umum Majelis Tanfidz PKB akibat rapat internal tersebut. Pertemuan terus berlanjut dan berdampak pada dikotomasasi PKB, khususnya PKB kubu Abdurrahman Wahid dan Muhaimin Iskandar. Putusan Kasasi MA yang menyatakan struktur kepemimpinan PKB akan kembali seperti hasil Kongres Semarang 2005.

Akhirnya, mengakhiri perselisihan tersebut. Muhaimin Iskandar melanjutkan perannya sebagai Ketua Umum Majelis Tanfidz dan Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Majelis Syura. Terlihat dari uraian di atas bahwa Abdurrahman Wahid mempunyai pengaruh yang besar dalam bagi perjuangan dan ideologi politik PKB serta banyak gagasan dan pandangannya yang diartikulasikan ke dalam perjuangan PKB.

Di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar PKB menjadi partai politik yang menegaskan diri sebagai jalan perjuangan warga *nahdiyyin*. Maka tak heran bila dalam hampir seluruh pemilu PKB bisa dianggap sebagai satu-satunya yang dinilai merepresentasikan kepentingan warga *nahdiyyin*. Walaupun terdapat PPP yang juga partai Islam yang memiliki akar historis dengan UN tetapi dalam kacamata warga *nahdiyyin* PKB merupakan yang paling identik dengan warga *nahdiyyin*.

Identitas partai telah sejak kemudian membuat basis massa PKB dalam pemilu di Indonesia adalah warga *nahdiyyin*. Basis massa PKB adalah warga Nahdlatul Ulama (NU). Karena PKB berhasil membuat platform sebagai garis perjuangan politik warga *nahdiyyin* dan NU. Kemudian dengan media politik warga NU yang banyak dari pengurus PKB dan kadernya merupakan Kiai atau masyarakat yang berlatar belakang NU. Selain itu, di masyarakat, ada juga komunitas pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang turut menjadi basis PKB. Juga ada lembaga pendidikan tradisional, seperti madrasah Islam, yang di dalamnya terdapat Kiai dan santri, serta masyarakat pedesaan, petani, buruh tani, dan masyarakat local pedesaan. Basis massa PKB tersebar di seluruh daerah terutama di daerah-daerah dengan kantong pemilih *nahdiyyin* seperti Jawa Timur.

Perolehan suara PKB di bawah Ketua Umum Muhaimin Iskandar pada tahun 2014 sebanyak 11.298.950 atau 9,04%. Pada tahun 2019 perolehan suara PKB naik menjadi 13.570.097 atau sebanyak 9,69%. Sementara di pemilu 2024 suara PKB naik signifikan

menjadi 16.115.655 suarat atau sebanyak 10.62% suaran nasional.²³⁴

Partai berideologi kanan lainnya yaitu PKB, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan pada tanggal 23 Juli 1998 oleh para tokoh Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pembentukan PKB bertepatan dengan era reformasi di Indonesia, setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto²³⁵. Tujuan pendirian PKB adalah untuk memberikan wadah politik bagi warga NU yang berkecenderungan ke arah kanan, serta untuk berperan aktif dalam proses demokratisasi di Indonesia. PKB memiliki narasi ideologis yang kuat dalam tradisi Islam moderat yang diajarkan NU, yang mengedukasi konsep prinsip kemanusiaan, toleransi, dan keadilan. Pada pemilu pertama setelah didirikan, yaitu pemilu 1999, PKB berhasil meraih posisi yang signifikan sebagai salah satu dari lima partai terbesar di Indonesia.

PKB aktif dalam berbagai kegiatan politik dan sosial di Indonesia. Beberapa aktivitas utama PKB meliputi: menjadi peserta pemilu di Indonesia sejak pemilu 1999. Partai ini telah menunjukkan performa yang konsisten dalam memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta memiliki perwakilan di berbagai tingkat pemerintahan daerah. Penyusunan Kebijakan, dengan terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan nasional, khususnya yang berfokus pada kepentingan umat

²³⁴<https://nasional.kompas.com/read/2024/03/22/12094371/perbandingan-suara-partai-pada-pemilu-2024-dan-2019-pdi-p-melot-golkar?page=all>

²³⁵Moch. Nurhasyim, "PKB: Sejarah Dan Perjuangan," 2018, <https://www.pkbid/cdn/download/buku->

Islam dan masyarakat pedesaan. Misalnya, PKB mendorong kebijakan yang mendukung pendidikan Islam dan kesejahteraan rakyat kecil. Pembinaan Kader dan Pendidikan Politik dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan politik bagi kader-kadernya. Hal ini bertujuan untuk membangun kader-kader yang berintegritas dan memiliki kemampuan memimpin yang baik

PKB berhasil memperoleh kursi di DPR pada setiap pemilu sejak 1990. Hal ini menunjukkan bahwa PKB mampu memperoleh dukungan yang kuat di kalangan masyarakat. Melalui berbagai program dan kebijakan yang didukung oleh PKB, terjadi peningkatan kesejahteraan terutama di kalangan warga NU dan masyarakat pedesaan. PKB juga berperan dalam memperjelas kebijakan-kebijakan yang mendukung pendidikan dan kesehatan. PKB telah terlibat dalam berbagai bidang dari koalisi pemerintahan di Indonesia, baik di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga merupakan salah satu pendiri PKB, maupun di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Keterlibatan dalam koalisi pemerintahan memberikan PKB kesempatan untuk lebih berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan nasional.

4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Kemudian partai terakhir yang memiliki ideologi kanan yaitu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai politik berbasis Islam di Indonesia yang memiliki sejarah dan ideologi yang khas. Partai ini didirikan pada 20 Juli 1998 dengan nama Partai Keadilan (PK). Pendirian PK dipicu oleh semangat

reformasi yang menggemakan setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998.

Partai ini dibentuk oleh aktivis-aktivis Muslim yang sebagian besar berasal dari latar belakang dakwah dan pendidikan Islam, serta dipengaruhi oleh gerakan tarbiyah yang memiliki akar pada ideologi Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Pada Pemilu 1999, Partai Keadilan tidak berhasil mencapai ambang batas parlemen sebesar 2%, sehingga pada tahun 2003 partai ini berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Transformasi partai PKS disertai dengan upaya untuk memperluas basis massa dan menarik lebih banyak kalangan, termasuk dengan mengadakan strategi politik yang lebih insif. PKS berhasil meraih kesuksesan signifikan pada Pemilu 2004, dengan meraih sekitar 7,34% suara yang mengantarkan 4 kursi di DPR RI. PKS mengusung tujuan dan misi untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ideologi partai ini adalah Islamisme, yang mencakup penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. PKS juga mengusung semangat reformasi, demokrasi, dan anti-korupsi dalam platform politiknya.

PKS dikenal dengan ideologinya yang konservatif dalam hal keagamaan namun memiliki pendekatan pragmatis dalam politik. PKS sering dikategorikan sebagai partai dengan ideologi kanan karena pandangannya yang konservatif terhadap isu-isu sosial dan budaya. Mereka mendukung penerapan syariat Islam dan sering mengambil posisi yang tegas terhadap isu-isu moral dan etika, seperti menentang legalisasi pernikahan sejenis dan pornografi. Partai ini menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan

perjuangan, namun seringkali menyesuaikan strategi politiknya dengan dinamika nasional.

Dalam urusan kebijakan, PKS mengawal isu-isu seperti keadilan sosial, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Seiring berjalannya waktu, PKS mengalami beberapa perubahan strategi politik. Pada awal 2010-an, PKS sering berada di depan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, terutama yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan umat Islam. Partai ini juga dikenal aktif dalam mengadvokasi isu-isu moral dan etika di masyarakat, termasuk kampanye anti-korupsi dan penegakan hukum.

Sebagai partai Islam di Indonesia, PKS menonjolkan berbagai aktivitas politik dan sosial yang mencerminkan ideologi mereka. Mereka sering terlibat dalam kampanye politik, pendidikan politik berbasis Islam, serta program sosial bagi masyarakat kurang mampu.²³⁶ Kegiatan yang selama ini dilakukan oleh partai PKS antara lain berupa kampanye politik dengan isu-isu keislaman, kegiatan sosial berbasis Islam, dan pendidikan politik. Hasil dari kegiatan yang telah dilakukan partai PKS sangat mempengaruhi keberhasilan peningkatan basis massa masyarakat terutama yang berada di kota atau masyarakat urban.

²³⁶ Budhy Munawar-Rachman, "Azra, Azyumardi. Islam Substantif: Dialog Peradaban Atas Isu-Isu Global. Bandung: Mizan, 2000." no. Icmi (2019): 5031.

B. Partai Islam Bercorak Kiri

1. Partai Amanat Nasional (PAN)

Sejarah Partai Amanat Nasional (PAN) terkait erat dengan gerakan reformasi di Indonesia. Mereka terdiri dari individu-individu yang setia pada cita-cita demokrasi, kebebasan dan keterbukaan. Karena itu, PAN menjadi jalan bagi masyarakat yang ingin melihat perubahan sistem politik Indonesia. PAN didukung komunitas intelektual, termasuk akademisi, peneliti, dan profesional.

PAN memiliki platform politik sebagai partai Islam yang moderat di mana mereka dapat membantu membentuk kebijakan yang lebih transformatif dan mendukung kesejahteraan. Selain itu, PAN dinilai sebagai partai yang neo atau neo-Islam yang moderat. Hal ini banyak menarik komunitas Islam moderat di Indonesia yang kebetulan mendukung PAN. PAN cenderung berakar pada partai berbasis agama yang juga mengedepankan toleransi, inklusivitas sebagai pilihan politik.

Hampir sama seperti PKB, PAN berhasil membuat platform partai politik sebagai jalan perjuangan warga Muhammadiyah. Karena itu Muhammadiyah kerap dikaitkan dengan basis massa utama Partai PAN. Hal ini dikarenakan secara kesejarahan, PAN tidak bisa lepas dari ikatan ideologis dengan Muhammadiyah sebagai ormas yang mula-mula menjadi bapak kandung dari PAN.

Mari kita lihat dalam konteks sejarah, PAN lahir dalam situasi organisasi Muhammadiyah yang mengalami kemajuan baik sosial maupun pendidikan. Muhammadiyah mula-mula berkonsentrasi terutama pada bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan.

Namun seiring perubahan situasi sosial politik dari waktu ke waktu di bawah rezim orde baru, organisasi ini mulai memilih jalan politik untuk memperjuangkan isu-isu politik nasional. Muhammadiyah memerakarsai pendirian partai politik di bawah kepemimpinan Amin Rais. PAN kemudian tumbuh sebagai sayap politik Muhammadiyah. PAN didirikan kala itu dengan tujuan untuk mengambil peran sebagai wakil politik Muhammadiyah yang memperjuangkan cita-cita reformasi.

Tahun 1998 PAN berdiri dengan prakarsa Amin Rais, G. W. Muhammad, Z. Allah Toha, Rizal Ramli, A. M. Hasibuan, Toey Heraty, Emil Salim, Faisal Basri, AM. Fatwa, Z. Mroti, Win Lie Piao dan lainnya dengan nama Partai Amanat Bangsa (PAB). PAN walau tidak didukung Majelis Amanat Rakyat sebagai organisasi gerakan reformasi saat era Presiden Soeharto.

Secara umum PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya, PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia baru, PAN berani melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara republik federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog PAN adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga

²³⁷ *Wajah 48 partai peserta Pemilu 1999: Nomor 15: Partai Amanat Nasional (PAN)*. *Kompas*. 12 Maret 1999. Diarsipkan dari *versi asli* tanggal 2017-09-05. Diakses tanggal 22-12-2024 via *Seasite.niu.edu* (Center for Southeast Asian Studies, NIU).

https://web.archive.org/web/20170104094508/http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/15pan.htm

rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.²³⁸

Secara ideologi partai ini menganjurkan bentuk Islam yang demokratis, toleran, dan moderat. PAN juga menyoroti pentingnya pembangunan keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Asas yang dibawa PAN adalah Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam.²³⁹Bahkan di pasal 6 AD/ART PAN disebutkan bahwa identitas partai PAN adalah sebagai partai yang menjunjung tinggi moralitas, agamawi, kemanusiaan dan kemajemukan.

Pada awal tahun 2000-an, PAN muncul sebagai salah satu kekuatan politik dan menjadi wadah bagi masyarakat Muhammadiyah. Sebagai partai yang lahir secara konstitusional pada tahun 1976, Muhammadiyah sejak beberapa pa isipada agenda politik PAN. Bahkan juga PAN dan Muhammadiyah juga kerap meminta masyarakat Muhammadiyah Muhammadiyah dalam mengembangkan platform partainya. Oleh karena itu, meski tidak memiliki afiliasi formal, Muhammadiyah dan PAN memiliki ikatan ideologi dan sejarah yang kuat. PAN berupaya menjadi platform politik gagasan dan cita-cita Muhammadiyah dalam kerangka politik Indonesia. Demikian juga Muhammadiyah membawa pengaruh yang besar bagi jalan politik PAN.

Dalam perjalanan politik Indonesia, PAN telah memosisikan diri sebagai partai yang berdedikasi pada demokrasi sejak awal berdirinya. Hal tersebut terlihat dari upaya PAN berkoalisi dengan berbagai

²³⁸ Ibid

²³⁹ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres IV PAN di Bali Tahun 2015. BAB III Pasal 4 Dasar dan Asa Ayat 2

faksi politik dan menumbuhkan kesepahaman dalam proses legislasi. Sikap inklusif PAN juga terlihat dalam upayanya memenuhi berbagai tujuan dan kebutuhan kelompok sosial dan ekonomi yang beragam di Indonesia. Hal ini menurut Muhammad Najib tidak lepas dari kesejarahan, bahwa PAN lahir atas situasi politik runtuhnya orde baru, krisis multidimensional dan gerakan reformasi yang dipimpin Amin Rais sebagai lokomotif.

PAN berupaya secara terus-menerus membangun masyarakat adil, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Mereka berpendapat bahwa kemajuan suatu negara dipengaruhi oleh kebijakan untuk menunjang nilai-nilai moral, keadilan sosial serta pembangunan ekonomi kerakyatan. Untuk meningkatkan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, PAN mendukung kebijakan yang melindungi kepentingan rakyat yang mengutamakan kesejahteraan petani dan nelayan serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Mereka juga menggarisbawahi betapa pentingnya bagi Indonesia untuk mengembangkan infrastrukturnya secara adil guna mendorong ekspansi ekonomi jangka panjang. Tujuan PAN secara keseluruhan adalah menciptakan keterkaitan antara cita-cita masyarakat Muhammadiyah dengan tuntutan modernitas, demokrasi, dan globalisasi. Dari semua partai Muslim, PAN merupakan satu-satunya partai Muslim yang memiliki perwakilan di majelis rendah dari Papua, dan partai ini juga telah mensponsori beberapa kandidat Kristen. Sejak tahun 1970-an, partai-partai di Indonesia telah dikategorikan sebagai "Islam" atau "nasionalis-sekuler," tergantung pada apakah partai tersebut secara eksplisit

mengidentifikasi dirinya sebagai partai Islam dan mendasarkan kebijakannya pada ajaran Islam. PAN menolak dikotomi Islam-sekuler standar ini, dengan mengklaim sebagai partai "terbuka" yang didasarkan pada filosofi nasional pluralis Indonesia Pancasila. PAN telah mendukung koalisi yang berkuasa di bawah pimpinan Yudhoyono sejak tahun 2004. PAN waktu itu dipimpin, Hatta Rajasa sebagai Ketua Umum, yang pada kala itu juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Peruntungan pemilu PAN cukup baik sejak tahun 1999. Partai ini memenangkan 46 kursi dalam pemilihan legislatif tahun 2009.²⁴⁰ Karer tambahan atas elektoral pencalonan presiden tahun 2011 lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 PAN bergabung dengan beberapa partai-partai lain untuk memunculkan syarat pencalonan presiden. Tahun 2014 PAN berkoalisi dengan partai-partai seperti Gerindra, Golkar, PKS, PPP, Demokrat, dan PBB PAN yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. PAN telah bersaing dengan PKS untuk mendapatkan suara dari kaum Muslim kelas menengah perkotaan. Juga bersaing dengan PKB dan PPP yang sama-sama berlatar partai Islam untuk berebut suara komunitas Islam moderat di perdesaan maupun perkotaan. Pada tahun 2014 PAN dalam pemilu electoral memperoleh suara 9.481.621 suara atau 7,59% suara nasional. Di Pemilu tahun 2019 suara PAN memperoleh suara 9.572.623 suarara atau sebanyak 6,84%. Sementara di tahun 2024

²⁴⁰ Nadia Bulkin, Indonesia's political parties, Oktober, 2013, *Islamic Parties*, diakses <https://web.archive.org/web/20210814010312/https://carnegieendowment.org/2013/10/24/indonesia-s-political-parties-pub-53414#PAN>

suara PAN naik menjadi 10.984.003 atau sebanyak 7,24% suara nasional.²⁴¹ Dalam prakteknya, partai islam di Indonesia yang menganut ideologi islam namun memiliki pandangan nasionalisme dan pluralisme (penulis sebut berideologi kiri) adalah Partai Amanat Nasional (PAN). PAN memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanan partai politik di Indonesia. PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 oleh beberapa tokoh reformasi. Pada awalnya adalah kelompok dari koalisi reformasi yang disebut Majelis Amanat Rakyat (MAR) yang juga memiliki kontribusi dalam meruntuhkan orde baru yang saat itu dipimpin Soeharto. Para peletak PAN salah satu yakni Amien Rais setelah menentang Soeharto mereka mencari jalan lain. Harapan reformasi mereka dengan membentuk partai baru Majelis Amanat Rakyat (MAR) adalah gabungan dari anggota PPKS Yogyakarta, organisasi keadipatian, dan juga kelompok tebet. Dalam sejarah PAN dibentuk tanggal 22 Juli tahun 1998, pada saat itu Amien Rais menandatangani pertemuan yang dilaksanakan di hotel borobudur. Di sana Amien Rais dan kelompok di atas membahas mengenai situasi politik terkini dan dari diskusi tersebut diputuskan agar mulai bersiap untuk pendirian partai.

Partai tersebut pada awalnya memiliki nama sebagai Partai Amanat Bangsa (PAB), namun kemudian diubah menjadi partai yang kita kenal sekarang yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Partai ini didirikan oleh 50 tokoh nasional seperti: Amien Rais;

²⁴¹<https://nasional.kompas.com/read/2024/03/22/12094371/perbandingan-suara-partai-pada-pemilu-2024-dan-2019-pdi-p-melot-golkar?page=all>

Faisal Basri M. A.; Hatta Rajasa; Goenawan Mohammad, Rizal Ramli; dan lainnya. Pendirian partai ini disahkan pada tanggal 27 Agustus tahun 2003. Sebagai partai politik yang didirikan setelah masa Orde Baru, PAN berambisi membawa perubahan di Indonesia dan menggantikan sistem pemerintahan otoriter Orde Baru.

Tujuan partai ini adalah menjaga kedaulatan rakyat, keadilan, kemakmuran material dan spiritual, serta menghormati nilai-nilai agama, kemanusiaan, dan pluralistik. Untuk itu, PAN berfokus pada pengesahan Undang-Undang No. 20. UM.06.08 oleh Departemen Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 Agustus 2003. PAN, partai yang muncul di penghujung era Orde Baru, didirikan dengan menanggapi tantangan Indonesia baru untuk menegakkan masa pemerintahan otoriter yang kentara di era Orba. Tujuan adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kedaulatan rakyat, keadilan, material, dan keadilan spiritual. Selain itu, nilai-nilai religious, humanity, dan pluralisme menjadi dasar ideologi partai. Sementara sebagian besar PAN mengartikan prinsip nonsektarian dan non-diskriminatif, ini adalah partai dengan prinsip "Akhlak Politik Berdasarkan Agama yang Membawa Rahmat ke Sekalian Alam".²⁴²

Dengan berdasarkan pada prinsip itulah, PAN menjadikan agama sebagai fondasi moral dan etika bangsa dan negara yang menghargai martabat manusia dan pluralisme. Mereka berjuang untuk kemerdekaan rakyat, keadilan sosial, dan kualitas hidup bangsa yang lebih baik pada saat itu, karena Amien Rais adalah

²⁴² <https://pan.or.id/sejarah-pan/>

pemimpin Muhammadiyah pada masa itu, tidak sedikit orang yang mengira jika PAN adalah partai Muhammadiyah.

Meskipun politik islam masih memiliki peran yang penting dalam membentuk sikap serta perilaku politik rakyat Indonesia.²⁹ Tetapi seiring berkembangnya waktu persaingan antar partai semakin sulit. Karena perubahan zaman pula banyak partai politik yang melakukan pendekatan dengan pemilihnya melalui platform media sosial. Membangun pencitraan, berarti melakukan komunikasi secara berkesinambungan, melakukan perbaikan dari waktu ke waktu.³⁰ PAN pun melakukan hal tersebut, tetapi dalam implementasinya banyak yang menganggap jika PAN tidak melupakan ideologi islamnya. IAIN masuk ke kategori sebagai partai islamis. Karena engkai memurut artis-artis untuk mendapatkan suara dari para pemilih, padahal secara ideologi partai ini berpegang teguh pada agama. Menurut data penelitian, setidaknya banyak komunitas artis yang memilih menjadikan PAN sebagai kendaraan politik.²⁴³

Pada AD/ART PAN pasal 19 ayat 1. Di dalamnya membahas mengenai sistem rekrutmen kader yang ada di partai PAN bersifat terbuka. dengan keanggotaan yang bersifat terbuka. Namun karena kebijakan keanggotaan ini bersifat subjektif dan unilateral, maka Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan anggota yang tidak mempunyai klasifikasi baku tertentu. Hal tersebut menimbulkan masalah baru yang menyebabkan banyak anggota kader PAN dipandang sebelah mata

²⁴³ Muhammad Irfan Dhiaulhaq, *Studi Kaderisasi Terhadap Partai Amanat Nasional (PAN): Problematika Calon Legislatif Artis*, Prosiding Seminar Hukum AktualDinamika dan Tantangan Pemilu 2024, hlm 163

dan tidak menerima kesempatan yang seharusnya mereka dapatkan. Anggota kader yang seharusnya memimpin dalam pemilihan umum telah dipinggirkan dan tidak menerima perhatian yang seharusnya mereka terima. Hakikat kader di Partai Amanat Nasional (PAN) dipengaruhi oleh isu-isu yang dihadapi dalam pengembangan kepribadian kader elit.

Dengan demikian, anggota PAN yang seharusnya berfungsi sebagai wajah partai dan mewakili nilai-nilainya, menjadi marginalisasi oleh kehadiran legislator partai yang menarik perhatian publik. PAN harus melakukan tindakan perbaikan yang menyeluruh untuk mengatasi masalah ini. Pertama, PAN perlu memperkuat proses seleksi dan evaluasi calon kader partai elite harus dilakukan pada pengabdian pada masyarakat, komitmen terhadap kepentingan masyarakat, dan integritas. Partai juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan bagi calon kader sehingga mereka memahami ideologi partai dan mampu mewakili partai secara efektif.

Selanjutnya partai PAN dapat memperkuat partai sekolah sebagai sarana pembentukan dan pengembangan kader-kader yang berkualitas. Partai sekolah dapat memberikan program pelatihan dan pendidikan komprehensif yang mencakup topik-topik seperti kepemimpinan, pemahaman ideologis, manajemen partai, dan keterampilan politik lainnya. Dengan partai sekolah yang efektif, partai PAN dapat menghasilkan kader-kader yang memiliki kualitas dan kompetensi sesuai dengan visi dan misi partai. Tantangan yang dihadapi dalam membawa partai.

Oleh karena itu, partai PAN perlu melakukan kampanye internal yang efektif untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih kader berdasarkan kemampuan dan kemampuan, bukan hanya popularitas. Dengan mengambil langkah perbaikan dan pemulihan identitas kader yang sebenarnya, partai PAN dapat memperkuat kadernya dan meningkatkan kepercayaan publik. Ini akan membantu membangun partai yang lebih kuat, memiliki kader yang berkualitas, dan dapat lebih mewakili aspirasi masyarakat²⁴⁴.

2. Partai Ummat

Selain PAN, partai yang diusulkan oleh Amien Rais muncul dengan latar belakang dan hasil Kongres V PAN yang dilaksanakan di Kota Kendal pada Februari tahun 2000. Partai Ummat ini didirikan pada tahun 2021, dan sebelumnya partai induknya pada tanggal 1 Oktober 2020, didirikan pada tanggal 24 April 2021, terdapat secara resmi pada tanggal 25 April 2021, dan terdapat secara resmi pada tanggal 29 April 2021 (Ramadhan 1442 dinyatakan dan disetujui oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2021. Meskipun kemudian partai Ummat memiliki ideologi yang berbeda dari partai induknya yakni partai PAN. Namun, pilihan ideologi yang berbeda bukanlah masalah utama tentang asal-usul faksialisasi, karena diskursus ideologis sejak awal tidak tampak mengubah dinamika faksi dalam partai. Meskipun partai Ummat relatif baru, figur Amien Rais tetap diperhatikan, karena untuk generasi 1990-an, figur Amien Rais sebagai lawan dari Orde Baru tampaknya masih kuat melekat dalam

²⁴⁴ Ibid

ingatan kolektif masyarakat²⁴⁵. Secara alami, dampak kepribadiannya masih tertanam di banyak lapisan orang-orang sezamannya dan setelahnya.

Partai Ummat ini masuk pada kelompok Islam kiri karena partai Ummat sendiri berasal dari partai PAN. Karena adanya konflik yang terjadi pada partai PAN. Yang dimulai pada pemilihan ketua PAN: Perselisihan antara Amien Rais dan Zulkifli Hasan dimulai dengan pemilihan ketua PAN untuk tahun 2020–2025. Amien Rais seorang tokoh penting dalam PAN, mendorong Zulkifli Hasan sebagai calon chairman, yang diharapkan dapat membawa PAN dari keterlibatan dalam pemerintahan. Namun, meskipun Amien Rais mendukung Mufachri Tanjung, Zulkifli Hasan akhirnya memenangkan pemilihan ketua umum PAN. Pemusatan kekuasaan di Ummat.

Amier Rais dan loyalisnya kemudian mundur dari PAN dan mendirikan Partai Ummat sebagai partai saingan yang lebih sesuai dengan pandangan politik mereka. Konflik antara Amien Rais dan Zulkifli Hasan dalam konteks PAN meliputi perbedaan dukungan dalam pemilihan ketua umum, perbedaan prinsip dan sikap politik, dan terakhir, perbedaan pemilihan ketua umum.

²⁴⁵ https://id.partaiummat.id/?page_id=26

BAB IX

PERGESERAN IDEOLOGI: REALITAS POLITIK DAN PILIHAN PRAGMATIS

A. Pilihan Politik Dan Pragmatis

Ideologi adalah konsep yang kompleks dan beragam, ideologi suatu komunitas sosial memainkan peran sentral dalam membentuk buah pemikiran dan tindakan manusia, baik dalam konteks sosial, ekonomi maupun politik.²⁴⁶ Dalam konteks politik, ideologi masuk ke dalam instrumen tujuan bersama untuk pencapaian tujuan bagi partai politik Islam prinsip-prinsip Islam biasanya menjadi yang melatarbelakangi pembentukan, kebijakan dan tujuan politiknya. Partai-partai Islam ini biasanya memperjuangkan penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka sering membawa isu-isu ke dalam instrumen politik untuk mendorong kebijakan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan mempromosikan identitas Islam dalam politik dan pemerintahan. Partai-partai Islam ini memiliki ciri khas yang bervariasi, tetapi umumnya bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan umat muslim dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks politik dan sosial.

Partai Islam adalah organisasi politik yang mencita-citakan prinsip-prinsip keislaman terakomodir dalam pembentukan kebijakan maupun tujuan politik bernegara. Partai-partai Islam ini biasanya berusaha menerapkan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan,

²⁴⁶ Yeby Ma'asan Mayrudin, Dnamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014, *Journal of Governance*, Volume 2, Nomor. 2 Desember 2017

termasuk hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.²⁴⁷ Mereka memperjuangkan kepentingan umat Muslim dan mempromosikan identitas Islam dalam politik dan pemerintahan. Secara umum, partai-partai Islam ini memiliki beberapa ciri khas:

1. Landasan Ideologis: Partai-partai Islam berdasarkan pada interpretasi agama Islam sebagai fondasi utama dalam menentukan kebijakan politik mereka. Mereka sering merujuk pada prinsip-prinsip Islam, seperti syariah, keadilan sosial, solidaritas umat, dan moralitas Islam dalam merencanakan platform politik dan menjalankan pemerintahan.
2. Diversitas Ideologis: Meskipun semua berakar pada Islam, setiap partai Islam dapat memiliki variasi ideologi. Contohnya, partai-partai yang mengusung Islamisme, yang mempromosikan penerapan syariah secara langsung dalam pemerintahan, ada juga yang menganut pendekatan moderat yang berusaha untuk berkolaborasi dengan pemerintah yang ada.
3. Organisasi dan Struktur: Partai-partai Islam biasanya memiliki struktur organisasi yang kuat, termasuk jaringan kelembagaan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Mereka sering memiliki basis dukungan yang luas di kalangan umat Muslim, baik dari kalangan elit maupun dari rakyat jelata.
4. Aktivisme Sosial: Selain berpartisipasi dalam proses politik formal, partai-partai Islam juga sering terlibat dalam aktivisme sosial dan amal. Mereka mungkin mendirikan lembaga pendidikan, amal, kesehatan, dan keagamaan untuk memperkuat posisi mereka dalam

²⁴⁷ Soly Gloria, "Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik di Tempat Kerja," *Journal of Politica Governo*. Vol. 1 No. 1 :February 2024

masyarakat dan mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam tindakan.

5. Peran dalam Sistem Politik: Partai-partai Islam beroperasi dalam berbagai konteks politik, termasuk sistem demokratis, otoriter, dan transisi. Mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, membentuk koalisi dengan partai-partai lain, atau bahkan menjadi bagian dari pemerintahan.²⁴⁸

Namun, tempo ini, perkembangan politik partai-partai Islam di Indonesia di era sekarang ini sekarang diwarnai dengan dinamika ideologis yang pasang surut. Awalnya, partai-partai ini lahir dengan semangat memperjuangkan agenda realisasi syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara.²⁴⁹ Ini ditentang dari berbagai gerakan politik Islam di masa kolonial, seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah, yang menyuarakan penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Istilah ideologi ini mengacu pada sistem gagasan yang dapat digunakan untuk memasionalisasikan, memberikan teguran, memaafkan, menyerang, atau menjelaskan keyakinan, kepercayaan, tindak, atau pengaturan kultural tertentu.²⁵⁰ Banyak pemikir politik Islam mengklaim bahwa Partai AK Turki merupakan model bagi semua negara Islam lainnya dalam bidang "Islam politik".²⁵¹

²⁴⁸ A. Bakir Ihsan, Corak Ideologi Partai Politik Islam, *Jurnal Review Politik*, Volume 07, Nomor 01, Juni 2017

²⁴⁹ Bahtiar Efendy, Islam and the State in Indonesia: Munawir Sjadzali and Development of a New Theological Underpinning of Political Islam, *Studia Islamica*. Vol 2, No 2 (1995)

²⁵⁰ David Kaplan and Albert A. Manners, in *Teori Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), 154.

²⁵¹ Nazmul Islam Dkk, "Toward Islam Through Political Parties, Ideology, and Democracy: A Discourse Analysis on Turkey's AK Party, Tunisian

Meskipun demikian, partai-partai Islam harus mengembangkan model pembangunan politik mereka sendiri yang sesuai dengan demokrasi dan menjamin “kesetaraan, keadilan sosial, partisipasi, kedaulatan, hak dan kebebasan. Termasuk di negara seperti Indonesia harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk terus survive bersaing di dalam arena politik kekuasaan.

Menghadapi realitas politik dan perubahan konteks sosial politik Indonesia, terjadi pergeseran sikap di kalangan partai-partai Islam. Beberapa partai mulai membuka diri terhadap nilai-nilai demokrasi dan pluralism.²⁵² Pergeseran ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti kegagalan gerak politik Islam di masa lampau, di era reformasi 1998 yang membuka ruang bagi demokrasi dan pluralisme, serta kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia.²⁵³ Partai-partai Islam harus memiliki *ability* dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi pada saat keadaan ekonomi sedang naik atau turun atau kondisi masyarakat sedang mengalami arus perubahan politik modern.

Pada mulanya politik di Indonesia senantiasa diwarnai oleh peran partai-partai Islam yang memiliki pengaruh dalam lanskap politik nasional.²⁵⁴ Sejak era Masyumi, Parmusi, Perti, PSII dan NU di awal-awal pasca terbukanya demokratisasi di negeri ini. Namun kini dalam

Ennahda, and Bangladesh Jamaat-e-Islami. 25 (1). Hal 26-51.,” in *Jadavpur Journal of International Relations*. vol. 25, 1, n.d., 26-51.

²⁵² Macmudi, “Discipline of Fear,” in *Islamising Indonesia*, 178-192, n.d., 12-18.

²⁵³ Rahmat, M.I., Nurdiansyah, O. “The Ideological Shifts of Islamic Parties in Indonesia’s Democratic Transition.” in *Journal of Islamic Studies*, vol. 31, 2 vols., 2020, 181-207

²⁵⁴ Anies Rasyid Baswedan, “Present and Future Trajectory. Asian Survey,” in *Political Islam in Indonesia*, vol. 44, 5., 2004, 669-90.

perjalanannya memudar dan berubah memilih jalan pragmatis. Kini pergeseran tersebut menjadi salah satu isu penting yang kerap menjadi sorotan adalah pergeseran ideologis yang terjadi di kalangan partai-partai Islam tersebut. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan transformasi nilai-nilai yang dianut, tetapi juga mencerminkan upaya partai-partai Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang dinamis. Ideologi merupakan hal terpenting yang membedakan partai politik.

Ketidapahaman atau kegagalan ideologi dalam memahami dan mengarahkan realitas adalah faktor utama terjadinya pergeseran ideologi atau ideological shift. Istilah ini oleh ini mengarah pada sistem gagasan yang dapat diartikan untuk nasionalis, memberikan teguran, kritik, mengayuh, atau menjelaskan keyakinan, kepercayaan, tindakan, atau pengaturan kultural tertentu.²⁵⁵ Pergerakan ini menjadi lebih pragmatis dan sekuler dalam pendekatan mereka.²⁵⁶ Mereka kini fokus pada transmisi nilai-nilai Islam melalui kebijakan negara dibandingkan berupaya mendirikan negara Islam dengan menerapkan syariat Islam secara resmi. Selain karena perlawanan dari komunitas pluralis yang cukup kuat dan tekanan agenda politik pemerintah untuk tidak terjadi ismialisasi ke dalam politik di Indonesia.

Dinamika ideologis ini mencerminkan upaya partai-partai Islam untuk tetap relevan dalam konteks Indonesia yang majemuk dan menghargai kebhinekaan. Adaptasi ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti merumuskan

²⁵⁵ David Kaplan and Albert A. Manners, in *Teori Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), 154.

²⁵⁶ Zuli Qodir, "Post-Islamism and Legal Reform," in *AHKAM, The Challenges and Future of Political Islam in Indonesia*, n.d., 281-99.

kembali platform politik yang lebih moderat, menjalin koalisi dengan partai politik lain, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Pergeseran ideologis partai-partai Islam di Indonesia telah menarik perhatian banyak pakar dan pengamat politik. Mereka menawarkan berbagai perspektif untuk memahami fenomena ini. Para ahli telah secara luas mengamati dan mendiskusikan dinamika ideologis yang dialami oleh partai-partai Islam dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Herdiana (2019), beberapa partai Islam di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam ideologi dan strategi politik mereka. Hal ini diungkapkan dengan meningkatnya orientasi ideologis dan penyesuaian terhadap tuntutan politik yang berkembang. Selain itu, Muwaffiq (2022) merincikan bahwa sebagian besar partai Islam di Indonesia cenderung mengalami pergeseran menuju arah yang lebih moderat, dengan menekankan pada isu-isu kebangsaan dan kesejahteraan. Namun, pendapat yang berbeda juga muncul, seperti yang diungkapkan oleh Faishal & Romel (2015), yang berargumen bahwa ada beberapa partai Islam yang justru semakin menguatkan narasi Islam konservatif dan menegaskan diri sebagai pembela nilai-nilai Islam tradisional. Sementara itu, menurut Salie & Dwi (2020), ada pandangan yang menyatakan bahwa pergeseran ideologis ini merupakan respons terhadap dinamika politik internal dan eksternal, termasuk tekanan dari kelompok-kelompok lain dan perubahan sosial di masyarakat.

Menurut Andi Bayuni Syukur, pergeseran tersebut merupakan bentuk penyesuaian diri partai-partai Islam terhadap tuntutan zaman dan upaya untuk memperluas basis pendukung. Di tengah dinamika sosial politik yang terus berkembang, partai-partai Islam perlu beradaptasi

agar tidak tertinggal. Salah satu caranya adalah dengan membuka diri terhadap nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, serta fokus pada isu-isu yang lebih luas dan menyentuh kepentingan masyarakat secara umum.²⁵⁷ Konsep post-Islamisme menekankan peralihan dari tujuan berdirinya negara Islam ke nilai-nilai agama yang lebih umum seperti keadilan dan kesejahteraan.²⁵⁸ Tren ini ditandai dengan fokus pada ide-ide keagamaan secara umum dibandingkan agenda politik Islam yang spesifik seperti legalisasi syariah Islam atau institusionalisasi Islam.

Luthfiyus Syam'ani dalam bukunya berjudul "*Islam and the Secular Transition in Indonesia*," pergeseran ini dari sudut pandang internal partai-partai Islam dan proses demokratisasi di Indonesia. Menurut Syam'ani, pergeseran ini dipengaruhi oleh dinamika internal partai, seperti perdebatan ideologi dan kebutuhan masa depan. Selain itu, proses demokratisasi yang membuka ruang bagi partisipasi politik telah mendorong partai-partai Islam untuk merumuskan platform politik yang lebih moderat dan inklusif. Berdasarkan ideologi, Partai memaksakan program politiknya, yang menjadi program kerja nyata yang dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat.²⁶⁰ Ideologi digunakan sebagai arah atau tindakan dalam menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat. Di dunia saat ini, terdapat tren yang sangat kuat dan minat terhadap demokrasi yang semakin

²⁵⁷ Syukur, A.B., "Transformasi Ideologi Partai Islam Di Indonesia.," in *Jurnal Wacana Politik*, vol. 3, 1., n.d 2018, 1-12.

²⁵⁸ Endang Turmudi, "Endang Turmudi. Islamic Twists and The Decline of Islamism In Indonesia," in *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 15, 3., n.d., 162-72.

²⁵⁹ Opcit

²⁶⁰ Imam Yudhi Prasetya, "Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik.," in *Jurnal Ilmu Politik Pemerintahan*, vol. 1, No.1. 2011, 30-40.

meningkat. Dan hal ini merupakan kekuatan pendorong di belakang hampir semua pemerintahan di negara-negara berkembang untuk melaksanakan reformasi politik dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat modern yang semakin kuat.²⁶¹

Salah satu partai pada saat sekarang yang menganut ideologi islamisme adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Parta ini memang sejak awal lahir atas respon kondisi social politik islam. PKS ikut berkontribusi dalam pertukaran ideologi. PKS merupakan salah satu partai yang diprakarsai oleh mahasiswa yang memiliki ikatan historis dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Menurut lima Terjemah "Mengenai Partai Keadilan Sejahter: Pergerakan dan Cita-cita yang Berakar dari Ikhwanul Muslimin". Diambil sebagai bahan bacaan pada mulanya PKS bernama Partai Keadilan. PKS berdiri tahun 1998 yang dalam perakarsaan kental dengan Islam dan Timur Tengah. Bahkan ketika PKS masih membantu tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin Movement Timur Tengah. PKS kemudian berkembang menjadi partai aktivisme Islam. Para aktivis PKS sebagian besar bergerak dari dalam kampus dan umumnya adalah kampus umum dan dalam skala terbatas pada lembaga pendidikan. Di kampus mereka mendirikan dan mengelola pengajian yang diwadahi dalam bentuk lembaga dakwah kampus (LDK). Menurut Muhammad Nasir untuk membimbing mahasiswa melalui pembuatan infrastruktur Masjid dan yang lainnya.²⁶²

PKS yang merupakan partai berideologi islamisme berorientasi pada basis massa dan asas. Basis massa yang

²⁶¹Moch. Muwaffiqillah, 10(2), Pergeseran Ideologi Politik Islam di Indonesia "Jurnal Al-Hikmah" Vol 10 No 2 Oktober (2022): 86.

²⁶² M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, (Yogyakarta: LKIS, 2008)

dimiliki PKS adalah jamaah tarbiyah yang berasal dari beberapa kalangan dengan karakteristik yang berbeda-beda, yang diantaranya militan, terdidik, muda, dan penduduk kota, serta mempunyai pandangan Islam yang konservatif dan merupakan hasil kaderisasi lembaga dakwah kampus. Di sisi lain, secara eksplisit PKS mengadopsi Islam sebagai platform partai. Islam sendiri diposisikan bukan hanya semata-mata konstruksi teologis, tapi juga menyediakan tingkat sosial politik yang tidak memisahkan antara agama dan negara. Maka, tidak aneh jika PKS sering mengadakan isu dan wacana kebijakan Islam dalam berbagai aksi politiknya.²⁶³

Menuju Kekuasaan, Kikue Hamayotsu, ketua PKS mewarisi organisasi Ikhwanul Muslimin, maka demikian PKS adalah konservatif Islam, berdasarkan prinsip kompas sosial dan politik. PKS adalah partai politik Indonesia, mewakili sayap kanan utama yang berujung untuk bersikap moderat. Sebagai partai politik yang dekat dengan Ikhwanul Muslimin secara historis, PKS sangat kritis terhadap tradisi lokal masyarakat Indonesia seperti tahlil, tarkin, barzanji, maulid, selamatan, dan ziarah makam karena alasan-alasan madzhab fiqh. Karena itulah PKS disebut sebagai gerakan *Tarbiyah* dengan semangat memurnikan tahayul, bid'ah, dan khrafat. Oleh karena itu, PKS menjadi salah satu genre Islam bercorak kanan di Indonesia. Ideologi *Tarbiyah* PKS menjadikan parpol ini sebagai Partai Dakwah yang mengklaim kepentingan masyarakat muslim Indonesia.²⁶⁴

²⁶³ Intan Suci Utari, Elektabilitas dan Politik Identitas (Faktor-faktor peningkatan suara PKS pada Pemilu 2019)

²⁶⁴ Kikue Hamayotsu, The Political Rise of the Prosperous Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia: Examining the Political Economy of

Menurut Cecep Suryana, PKS merupakan partai yang konsisten berada dalam bidang dakwah sebagai salah satu identitas politik, bukan hanya dari aspek administratif seperti tujuan partai politik yang terkandung didalam konstitusi atau anggaran rumah tangganya, melainkan juga kegiatan kelompok talbiyah dakwah. Idealisme ini memungkinkan mereka meresmikan dakwahnya dalam kerangka gerakan politik konkrit dan membangun peradaban Indonesia sesuai ajaran Islam. Semangat dakwah talbiyah yang menjadi misi PKS ialah agar gerakan dan program politik yang diusung partai tersebut tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, namun yang lebih penting tujuannya untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik. Bagi PKS, dakwah merupakan inti dari semua motivasi dalam politik. Bahkan cikal bakal partai ini adalah ketika dengan Gerakan Dakwah yang lahir dari diskusi-diskusi tentang kondisi Islam. Namun partai talbiyah ini bukanlah Indonesia bukanlah negara Islam, meski ajaran Islam di sini saja diformalkan.²⁶⁵

Namun ternyata perjalanan politik PKS tidak sebagaimana dibayangkan akan mudah bersaing dengan partai nasionalis maupun partai Islam, hasil riset yang dilakukan Burhanudin Muntadi menemukan bahwa partai berlambang Padi dan Bulan Sabit tersebut justru berada dalam dilema antara teguh di jalur ideologis atau membuka diri bagi siapa saja. Walaupun capai di Pemilu 2009 PKS sukses menjadi partai dengan suara terbanyak keempat. Padahal secara eksplisit Burhanudin mengatakan bahwa,

Islamist Mobilization in a Muslim Democracy, Asian Survey, Institute East Asian Studies, Volume 51, Issue 5 October 2011

²⁶⁵ Cecep Suryana, Politik sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol 5, No 1 (2021)

PKS tidak seperti partai lain, PKS membina kader dan simpatizan secara terus menerus melalui kegiatan organisasi dan aksi-aksi kolektif. Namun demikian faktanya menurut Burhan PKS juga ingin juga mencoba menjangkau semua kalangan dengan menyatakan diri sebagai partai yang terbuka bagi siapa saja.²⁶⁶

B. Membaca Kegagalan PPP Di Pemilu 2024

KPU RI sudah mengumumkan hasil akhir suara partai hasil Pemilu 2024. Terdapat 8 partai politik yang lolos ambang batas perolehan suara (*parliamentary threshold*) dengan perolehan yang beragam. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak termasuk di dalamnya. Suara PPP hanya 3,87 persen atau kurang dari 4 persen ambang batas minimal. Suara ini yang dinilai mengejutkan banyak pihak terutama karena ini adalah partai yang pernah adalah partai berpengalaman bertang yang sudah kali ikut Pemilu sejak 1973.²⁶⁷ Hal ini membuka mata bahwa faktor senioritas dan pengalaman ternyata tidak menjamin eksistensi partai untuk bertahan di Senayan. Tidak juga keterlibatan tokoh-tokoh nasional sebagai penjaga gawang partai berlogo Ka'ban ini. Meski demikian, gejala bakal tersingkirnya PPP sudah terlihat sebelum Pemilu digelar. Dari 9 partai yang eksis hasil Pemilu 2019, terdapat dua partai sering muncul dalam survey yang perolehannya di bawah 4 persen yakni PPP dan PAN. Beberapa lembaga survey seperti Republic Institute, LSI, Poltracking dan

²⁶⁶ Burhanudin Muhtadi, *Dileman PKS: Suara dan Syariah* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012)

²⁶⁷ Tulisan ini diterbitkan pasca penetapan hasil akhir Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Harian Disway.id yaitu setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinyatakan tidak lolos ambang batas perolehan suara di parlemen.

SMRC menempatkan keduanya di posisi terbawah. Prediksi terhadap PPP tepat namun PAN meleset.

Beberapa aspek yang dapat dicermati dari kegagalan PPP menembus parlemen dapat dilihat dari fenomena internal maupun eksternal. Beberapa kejadian justru kontra produktif dengan upaya PPP untuk mengembalikan citra partai Islam yang masih cukup layak bertengger di Senayan. Di tingkat internal, 'keseleo lidah' ketua umum Suharso Monoarfa di pertemuan tahun 2022 yang dikenal dengan 'amplop kawai' menjadi protok dari kalangan internal yang telah tidak termaafkan oleh pernyataannya. Beberapa organisasi PPP maupun simpatisan marah atas pernyataan tersebut karena dianggap menghina dan melecehkan kebijaksanaan yang sudah dihormati.

Kasus 'amplop kawai' tersebut memicu terjadinya gejolak yang berujung dengan letak ketua umum di tengah jalan. Publik terutama pesantren dan selalu menjadi penyokong suksesi PPP menjadi kecewa. Penunjukan secara cepat Munammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum tidak sepenuhnya dapat mengontrol coreng PPP di mata publik. Apalagi, latar belakang Mardiono sebagai pengusaha bertolak belakang dengan kebiasaan PPP yang menentukan pimpinan partai dari kalangan pesantren atau berkecimpung lama dengan NU.

Upaya partai untuk merangkul kembali Romahurmuziy sebagai penguat partai tidak banyak membantu menaikkan citra dan elektabilitas. Kehadirannya justru menimbulkan persepsi kurang baik atas posisinya yang pernah dipenjara karena kasus korupsi saat menjadi ketua umum PPP. Partai terlalu cepat menampilkan Romi-sapaan akrab Romahurmuziy di ruang publik di saat ingatan masyarakat masih cukup kuat pada peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya tahun 2019. Dalam

peristiwa tersebut, Romi diringkus oleh KPK dalam kasus jual beli jabatan. Kehadiran kembali Romi yang terlalu cepat tidak banyak membantu bahkan sebaliknya merugikan partai.

Begitu pula masuknya pendatang baru Sandiaga Uno pada bulan Juni 2023 atau tujuh bulan sebelum Pemilu di jajaran elit partai juga tidak banyak membantu. Persepsi publik tentang Sandi sebagai Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra belum sepenuhnya hilang. Apalagi pada saat bergabung bersama PPP berhadapan dengan Prabowo Subianto yang tahun 2019 menggandeng Sandi sebagai cawapresnya. Nalar publik tidak mudah menerima realitas tersebut. Apalagi sejak awal Sandi mengincar posisi Cawapres dari Ganjar Pranowo. Meskipun pada akhirnya malah bersaing dengan Mardiana Dikaena itu, kegagalan PPP di Pemilu 2024 dapat dilihat dari keputusan tersebut. Faktor keseleo lidah partai dalam pemilihan strategi marketing politik merupakan domain yang ikut memperburuk persepsi publik dan elektoral partai. Di luar itu, keputusan cepat partai bergabung dalam koalisi Ganjar-Marifud MD yang diusung PDIP menjadi pertanyaan publik. Secara politis PPP pernah menjadi bagian pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 dan berlanjut pada Pilpres 2019. Meskipun akhirnya partai menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, namun saat sebelum Pilpres, PPP menjadi partai yang berlawanan dengan PDIP.

Melihat dari latar belakang ideologi, PPP yang bercorak partai Islami (*islamist party*) menurut kategori Pepinsky, et. al. secara cepat bergandeng tangan dengan PDIP yang bercorak nasionalis-sekuler merupakan praktik di luar kebiasaan. Dalam catatan pasca Reformasi

1998, partai Islami seperti PKS, PBB dan PPP sangat berhati-hati dalam membangun koalisi dengan partai nasionalis-sekuler. Kalaupun terjadi, hal tersebut murni karena pertimbangan politik pragmatis (*office seeking istilah lain untuk mencari jabatan menurut Riker yang terjadi setelah Pilpres bukan sebelum, apalagi jauh sebelum Pilpres terjadi. Pertimbangan tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan partai dengan konstituen sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban atas posisi idologi dengan partai lain yang memiliki platform yang berangant.*

Pembaca bisa as kegagalan tersebut masih bisa dibantah karena banyak variabel yang perlu menyertai dalam Pemilu terutama faktor keajaiban logistik, kemampuan panggung dan kepatuhan konstituen. Namun dalam kasus ini sebelum partai-parti banding di atas dapat dijadikan referensi dalam menyusun strategi di Pemilu 2029 nanti agar tidak terabaikan di Senayan. Karena partai-partai Islam seperti PKS, PAN dan PKS juga menyusun strategi lain untuk mengambil alih suara PPP yang hangus di Pemilu 2024.

C. PPP Nasibnya Kini

Mahkamah Konstitusi secara resmi menolak gugatan PPP dalam sidang PHPU (21/05). Peluang untuk bertahan di gedung Senayan pupus. Sebentar lagi PPP akan menjadi cerita masa lalu. Cerita tersebut sama halnya terjadi pada PBB, Hanura dan PKPI yang pernah merasakan hingar-bingar politik namun perlahan terlempar. Namun cerita PPP lebih tragis karena termasuk partai paling senior karena sudah menjadi penghuni sejak 50 tahun lalu. Tidak ada hubungan antara usia dan kematangan partai dengan kemampuan bertahan di

Senayan. Begitu pula tidak jaminan partai yang didukung oleh tokoh-tokoh terkemuka dengan kenaikan elektoral. Tesis tersebut cukup tepat ditujukan pada PPP yang tidak lolos ambang batas parlemen (parliament threshold) karena hanya memperoleh 3,87 %. Sementara batas minimal ambang batas 4 %.²⁶⁸ PPP merupakan satu di antara 18 kontestan Pemilu 2024. Usianya sama seperti PDIP yang juga berdiri pada tahun 1973 dengan nama PDI. PPP merupakan gabungan (*fusion*) empat partai politik Islam yakni Partai Nasional Islam (NU), Partai Islam Islam Tarbiyah dan Taqwan (PIT), Partai Muslimin Indonesia (PDI) dan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Penggabungan partai politik merupakan bagian dari kebijakan Orde Baru untuk menyederhanakan partai. Pada awal berdirinya partai PPP cukup sukses dengan rata-rata perolehan 8 % pada pemilu 1973, 77 dan 1982. Pada Pemilu 1987 pemilihan partai merosot tajam yakni 15,97 % sebagai akibat dari kebijakan Orde Baru. PPP dan kembali sebagai organisasi sosial keagamaan hasil Muktamar ke-27 Situbondo tahun 1984. Pasca Pemilu 1987, suara PPP stagnan di angka 17 % dan naik kembali menjadi 22 % pada Pemilu 1997 di masa akhir Orde Baru.

PPP menjadi bagian dari partai politik yang ikut ambil dalam hiruk-pikuk Reformasi 1998 yang menandai berakhirnya rezim Soeharto. Pada Pemilu pertama era Reformasi suara PPP cukup menonjol di antara partai-partai Islam dengan perolehan 10,71 %. Posisi ini hanya selisih sedikit dengan PKB yang memperoleh 12,61 %. Setelah era itu suara PPP terus menurun. Pemilu 2019 hanya memperoleh 4,52 %, hasil terendah selama masa

²⁶⁸ Tulisan ini terbit setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Menolak Permohonan Partai Persatuan Pembangunan atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif tanggal 21 Mei 2024

Reformasi namun masih bisa bertengger di Senayan. Hingga akhirnya pada pemilu 2024 jatuh ke posisi 3.87 % yang tidak memenuhi syarat undang-undang untuk duduk kembali di parlemen. Dilihat dari basis massa PPP hampir nyaris sama dengan PKB yakni massa NU, pesantren dan perdesaan (Pepinsky;2010, Ufen:2008). Tokoh-tokoh penggerak adalah kyai dan santri, dan hanya sebagian dari kalangan profesional. Sementara tokoh-tokoh eks partai lain seperti PDI Perjuangan dan MI tidak terlalu menonjol terutama saat kepemimpinan PPP dipegang oleh tokoh NU seperti Hidayatullah, Saifullah Yusuf, dan Ali Romahurmuziy. Partai tersebut masih kuat hingga sekarang.

Beberapa wilayah yang cukup menonjol dengan kepemimpinan PPP adalah Jawa dan Jawa Tengah. Suara PPP juga cukup kuat di Jawa terutama di kalangan minor dengan partai nasional. Di provinsi gemuk ini PPP selalu berebut kue dengan PKB yang juga menangkan keduanya sebagai lumbung. Sementara di luar Jawa perolehannya cukup merata provinsi yang selama ini menjadi basis NU dan masyarakat memiliki wakil di parlemen. Kecuali provinsi yang tidak identik dengan nuansa keislaman seperti Bali, NTT, Sulut, Papua suara PPP cukup kecil. Bahkan dalam tiga Pemilu terakhir tidak ada wakil di parlemen.

PPP dikenal lincah dalam berpolitik. Sejak Reformasi tidak ada rezim tanpa kehadiran tokoh-tokoh partai di kabinet meskipun awalnya tidak menjadi partai pengusung dan pendukung koalisi. Pilpres 2014 PPP menjadi pengusung Capres Prabowo Subianto di bawah Koalisi Merah Putih (KMP). Nuansa pertarungan ideologis cukup ketat karena koalisi ini dihuni oleh partai Islam yang konservatif seperti PPP, PBB dan PKS. Meskipun KMP kalah dengan Koalisi Indonesia Hebat, PPP masih

mendapatkan jatah menteri di bawah Presiden Jokowi. Hal yang sama juga terjadi pada Pilpres 2004. PPP sejak awal tidak mendukung SBY-Kalla, namun pasca Pilpres mendapatkan jatah menteri di kabinet.

Di awal Reformasi, PPP salah satu partai yang mengusung Gus Dur sebagai Presiden. Dua tahun berikutnya PPP menjadi inisiator *Buloggate* yang menandai berakhirnya kekuasaan Gus Dur sebagai Presiden. Atas kelincahan dalam berpolitik waktu, Hamzah Haz terpilih sebagai Wapres dalam sidang Istimewa MPR. Kelincahan dan gaya politik yang zig-zag tahun-tahunnya tidak akan terlihat lagi di periode 2024-2029. PPP harus menerima kenyataan turun kelas sebagai partai kelas menengah sama halnya dengan partai lain yang tidak lolos ke parlemen. Mereka hanya bisa bermain lobi ke tingkat lokal baik di provinsi dan kabupaten/kota untuk wakil terealisasi.

Belajar dari beberapa partai yang berpengalaman turun kelas seperti PPP, PKB, dan PKI, tidak mudah bagi mereka untuk kembali gemerlap politik Senayan. Beberapa tokoh partai banyak yang tidak kuat menahan kursi kekuasaan, dan pada akhirnya berpindah ke partai lain yang lebih prospektif. Belum lagi berbicara soal nilai daya tarik partai terutama bagi media tidak sekuat sebelumnya untuk kepentingan pemberitaan dan sosialisasi ke publik. Meskipun demikian 'malapetaka' Pemilu 2024 bukan akhir segalanya bagi PPP. Cukup banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi 2029 dengan pola dan strategi berbeda. Dua strategi yang dapat dilakukan yakni dengan mempertahankan suara 3.87 % tersebut dan sekaligus mengembangkan sayap baru agar lebih diterima oleh publik. Untuk membidik pemilih muda yang jumlahnya cukup besar, PPP harus menghilangkan stigma partai 'golongan tua'. Begitu pula

platform partai yang bercorak konservatif tetap dipertahankan untuk merawat konstituen lama terutama dari kalangan santri.

D. Catatan

Bergeser dan beradaptasi itulah gambaran ideologi partai Islam pada masa Reformasi. Bergeser dari 'kanan' ke 'tengah', begitu pula dari 'kiri' ke 'tengah'. Juga menemukan pergeseran dari 'kanan' ke kiri, dan dari 'kanan' menuju ke 'tengah'. Namun tidak secara jelas menemukan pergeseran dari kiri ke 'kanan', atau dari 'tengah' ke 'kiri'. Beradaptasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan konstituen dan dinamika politik yang sangat cepat. Begitu pula yang terjadi pada Ormas Islam. NU, Muhammadiyah dan Ormas keagamaan lain terus mengalami pergeseran dan adaptasi namun tetap dalam bingkai ke-Indonesiaan. Sebaliknya Ormas yang tidak beradaptasi akan terpinggirkan dalam peraturan sosial-politik.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

BAB X

NEOLIBERALISME DAN POPULISME DALAM POLITIK ELEKTORAL INDONESIA

Globalisasi yang semakin berkembang membawa fenomena politik menjadi semakin kompleks. Di tengah arus globalisasi tersebut, ideologi neoliberalisme dan populisme telah menjadi dua kekuatan yang mempengaruhi politik elektoral di berbagai negara termasuk Indonesia. Peter Tan telah menyumbangkan pemahaman yang berharga terhadap kajian ini, dengan mengungkap hubungan antara neoliberalisme dan populisme dalam politik elektoral Indonesia. Dalam penelitiannya, Tan menyoroti bagaimana kebijakan-kebijakan neoliberal sering kali memperdalam ketimpangan ekonomi dan sosial di Indonesia, yang pada gilirannya dapat memicu respons populistis dari masyarakat yang terpinggirkan.²⁶⁹ Tan meneliti bagaimana penerapan kebijakan neoliberal seperti deregulasi pasar dan privatisasi, neoliberalisme adalah sebuah pendekatan ekonomi yang menekankan pentingnya pasar bebas, deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi. Ide-ide ini berakar pada pemikiran ekonomi klasik seperti karya Adam Smith, tetapi mendapatkan momentum baru pada akhir abad ke-20.

Kebangkitan neoliberalisme modern sering dikaitkan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Britania Raya pada tahun 1980-an, yang mendorong deregulasi pasar, pengurangan pajak, dan privatisasi perusahaan milik negara sebagai cara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan

²⁶⁹ Peter Tan, "Populisme, Pilkada dan Masa Depan Demokrasi". *Jurnal Administrasi Publik UNWIRA*, 2020 3(2), 80-94.

efisiensi pasar²⁷⁰. Neoliberalisme kemudian menyebar ke berbagai negara, mempengaruhi kebijakan ekonomi global dan mendorong adopsi reformasi pasar bebas di banyak negara berkembang. Di Indonesia, neoliberalisme mulai memiliki pengaruh yang penting setelah krisis ekonomi Asia 1997-1998, yang mendorong reformasi ekonomi besar-besaran termasuk privatisasi dan deregulasi.

Populisme, di sisi lain, adalah sebuah pendekatan politik yang mengklaim mewakili "rakyat" melawan "elite" yang dianggap korup dan tidak peduli terhadap kebutuhan masyarakat umum. Gerakan populisme dapat ditelusuri kembali ke gerakan *agraria* di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19, seperti Partai Populis yang berusaha mewakili kepentingan petani dan pekerja, menewarakan pengaruh besar dari bankir dan industri.²⁷¹ Populisme kemudian muncul dalam berbagai bentuk di seluruh dunia, baik dari spektrum politik kiri maupun kanan, sering kali sebagai respons terhadap ketidakadilan struktural *status quo* politik dan ekonomi. Di Eropa, misalnya, populisme kanan sering kali menekankan isu-isu imigrasi dan identitas nasional, sementara di Amerika Latin, populisme kiri lebih fokus pada redistribusi ekonomi dan anti-korupsi²⁷². Di Indonesia, populisme sering dikaitkan dengan retorika pro-rakyat yang melawan elite politik dan ekonomi, serta menekankan kedaulatan nasional dan keadilan sosial.

Di Indonesia, terdapat golongan-golongan yang dapat dikategorikan sebagai pendukung neoliberalisme dan populisme. Golongan neoliberalisme sering kali diwakili oleh partai politik dan tokoh yang mendorong liberalisasi

²⁷⁰ David Harvey, *"A Brief History of Neoliberalism"*, Oxford University Press, 2005

²⁷¹ Cas Mudde, "The Populist Zeitgeist". *Government and Opposition*, 2004 39(4), 541-563.

²⁷² Pippa Norris & Ronald Inglehart, *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Cambridge University Press, 2019.

ekonomi, privatisasi BUMN, dan kebijakan pro-pasar. Contoh dari tokoh ini bisa ditemukan dalam kebijakan ekonomi era reformasi yang menekankan deregulasi dan pasar bebas²⁷³. Sebaliknya, populisme di Indonesia dapat ditemukan pada partai-partai dan tokoh-tokoh yang menggunakan retorika pro-rakyat melawan elite, menekankan isu-isu kedaulatan nasional, keadilan sosial, dan anti-korupsi. Partai Gerindra dan beberapa tokoh independen sering menggunakan narasi populis dalam kampanye mereka, menawarkan solusi sederhana terhadap masalah kompleks untuk menarik dukungan dari pemilih yang merasa terabaikan oleh kebijakan neoliberal. Retorika populis ini sering kali merobatkan resonansi di kalangan pemilih yang merasa tidak terwakili oleh kebijakan politik yang ada.

Penggunaan narasi neoliberalisme dan populisme dalam politik elektoral Indonesia sangat penting. Neoliberalisme mempengaruhi preferensi pemilih terutama di kalangan kelas menengah ke atas yang mendukung kebijakan ekonomi pro-pasar. Dukungan terhadap partai-partai yang mendorong liberalisasi ekonomi mencerminkan pengaruh kuat dari kebijakan-kebijakan neoliberalis²⁷⁵. Di sisi lain, populisme sering kali menarik pemilih yang merasa diabaikan oleh kebijakan neoliberalisme, menawarkan solusi sederhana terhadap masalah kompleks dan menggali dukungan melalui retorika emosional dan anti-elite. Dinamika ini menciptakan polarisasi dan fragmentasi dalam politik elektoral, memperkuat sentimen anti-elite, dan

²⁷³ Vedy R. Hadiz, & Richard Robison, "Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidations: The Indonesian Paradox". *The Journal of Development Studies*, 2006 41(2), 220-241.

²⁷⁴ Marcus Mietzner, "Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia" East-West Center, 2015

²⁷⁵ Andrew Rosser, *The Politics of Economic Liberalization in Indonesia: State, Market and Power*. Curzon Press, 2002

mempengaruhi pola pemungutan suara serta komposisi partai politik di Indonesia. Akibatnya, baik neoliberalisme maupun populisme memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik dan preferensi pemilih di Indonesia.

Para pakar telah mengkaji secara mendalam pengaruh neoliberalisme dalam politik elektoral di Indonesia. Vedi R. Hadiz dan Richard Robison berpendapat bahwa reformasi ekonomi yang diimplementasikan setelah krisis Asia 1997-1998 mendorong adopsi kebijakan neoliberalis, seperti privatisasi BUMN dan deregulasi ekonomi, yang berkontribusi pada peningkatan ketidakefektifan ekonomi dan sosial. Mereka menyatakan bahwa kebijakan ini cenderung menguntungkan elite ekonomi dan politik, sementara masyarakat luas mengalami beban ekonomi yang semakin berat (Foley & Winters menyatakan bahwa oligarki di Indonesia memengaruhi kebijakan neoliberalis untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka melalui kontrol terhadap sektor-sektor ekonomi penting, yang memperkuat posisi politik mereka dan mempengaruhi hasil pemilihan umum. Edward Aspinall juga mencatat bahwa kebijakan neoliberalis sering diimplementasikan tanpa konsultasi publik yang memadai, menyebabkan resistensi dari kelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh perubahan kebijakan tersebut²⁷⁶. Richard Doner dan Ben Ross Schneider menunjukkan bahwa kebijakan ini sering kali diadopsi oleh partai politik dengan harapan menarik investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meskipun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat luas masih diperdebatkan.²⁷⁷

²⁷⁶ Edward Aspinall, "A Nation in Fragments: Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia". *Critical Asian Studies*, 2013. 45(1), 27-54.

²⁷⁷ Richar F. Doner & Schneider, "The Middle Income Trap: More Politics than Economics". *World Politics*, 2016 68(4), 608-644.

Di sisi lain, populisme juga menjadi fokus utama dalam studi politik elektoral di Indonesia. Marcus Mietzner mengamati bahwa populisme di Indonesia sering muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan publik terhadap korupsi dan ketidakadilan sosial yang dianggap tidak teratasi oleh pemerintah yang berkuasa. Figur-figur seperti Joko Widodo, menurut Mietzner, menggunakan retorika populis untuk menarik pemilih dengan menampilkan diri sebagai orang luar yang bersih dari korupsi dan dekat dengan rakyat. Evi Warburton mengamati bahwa populisme di Indonesia sering kali berakar pada nilai nasionalisme dan kedaulatan ekonomi, menolak dominasi asing dalam ekonomi nasional.

Warburton menjelaskan bahwa populisme ini menarik dukungan dari pemilih yang merasa ekonomi nasional telah dikendalikan oleh kekuatan asing dan elite domestik yang korup²⁷⁸. Mudde dan Kaltwasser juga mencatat bahwa populisme di Indonesia sering kali dikombinasikan dengan elemen-elemen religius, yang memperkuat daya tariknya di kalangan pemilih yang religius dan nasionalis. Hal ini menciptakan dinamika politik yang kompleks dan mempengaruhi pola pemungutan suara serta komposisi partai politik di Indonesia.

Selain itu neoliberalisme dan populisme membawa dampak kompleks dalam politik elektoral Indonesia. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa interaksi antara kedua aliran ini menciptakan dinamika politik yang kompleks dan sering kali bertentangan. Kami menggarisbawahi bahwa kebijakan neoliberal, yang didasarkan pada prinsip deregulasi dan pasar bebas, sering kali memicu respons populis yang menekankan kedaulatan

²⁷⁸ Evi Warburton, "Jokowi and the New Developmentalism". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 2016. 52(3), 297-320.

rakyat dan penolakan terhadap elite politik dan ekonomi. Novelty dari artikel ini terletak pada pendekatan holistik yang saya gunakan untuk menganalisis kompleksitas hubungan antara neoliberalisme dan populisme dalam konteks politik elektoral Indonesia. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dan sumber referensi, termasuk jurnal-jurnal bahasa Indonesia seperti tulisan-tulisan sebelumnya yang disebutkan, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika politik yang sedang berkembang di Indonesia.²⁷⁹

Dalam analisis kami juga menyoroti implikasi jangka panjang dari dinamika neoliberalisme dan populisme terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Kami menekankan bahwa kombinasi dari kedua elemen ini tidak hanya memengaruhi perekonomian tetapi juga membentuk struktur politik dan partai politik yang bersaing. Dengan memperhatikan keunikan konteks politik Indonesia, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana kebangkitan narasi politik yang diadopsi oleh pemerintah dan oposisi berdampak pada dinamika politik elektoral²⁸⁰. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting bagi literatur tentang politik Indonesia dan melahirkan pertanyaan-pertanyaan penting untuk penelitian lanjutan. Dengan menyajikan temuan-temuan baru dan memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika politik di negara ini, artikel ini memberikan dasar yang kuat untuk diskusi lebih lanjut dan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah ini. Dengan demikian, artikel ini berpotensi menjadi kontribusi yang berharga bagi

²⁷⁹ A. Budiman, "Populisme Ekonomi dalam Politik Prabowo Subianto di Indonesia" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2019 23(2), 151-165.

²⁸⁰ R. Pambudy, "Resurgence of Populism in Post-Reformasi Indonesia" dalam *Comparative Asian Development*, 2018. 2(2), 123-138.

pemahaman kita tentang politik elektoral di Indonesia dan mendorong perkembangan pengetahuan dalam bidang ini.

Penulis percaya bahwa fenomena neoliberalisme dan populisme dalam politik elektoral Indonesia merupakan refleksi dari tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh negara dalam proses demokratisasi dan liberalisasi ekonomi. Meskipun ada kekhawatiran akan potensi konflik antara kedua ideologi ini, namun penulis melihat bahwa dalam konteks Indonesia, keduanya seringkali dapat diintegrasikan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan kompleksitas hubungan antara neoliberalisme dan populisme dalam politik elektoral Indonesia, serta untuk memproteksi bagaimana kedua fenomena ini dapat berarungi dinamika politik dan kebijakan publik. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif studi literatur, dimana penulis melakukan analisis terhadap berbagai sumber dan pandangan para ahli untuk membentuk argumen dalam artikel ini. Penulis banyak meneliti terdahulu, atau sering disebut juga dengan literatur terdahulu atau tinjauan pustaka, merujuk pada kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya tentang topik masalah tertentu yang menjadi fokus penelitian saat ini. Ini mencakup studi-studi, artikel-artikel, buku-buku, laporan-laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan subjek yang sedang diteliti. Menurut Abdil dkk. (2017) dari judul "Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia" menjelaskan bahwa berkembangnya populisme kanan (Islam) di Indonesia serta implikasinya terhadap masa depan demokrasi. Sebagai fenomena umum dalam era pasar bebas, populisme kanan yang eksklusiver dan rasialis di Indonesia, seperti juga di berbagai tempat merupakan simptom dan tanggapan terhadap dislokasi neoliberalisme dan krisis representasi dalam konteks absennya gerakan politik

yang progresif. Tidak terbangunnya basis sosial multi kelas serta borjuasi Muslim yang kuat produk depolitisasi yang panjang serta dominasi ekonomi oleh borjuasi domestik Cina, menghasilkan aliansi populisme Islam di Indonesia yang terfragmentasi.

Dalam kajian politik, pemikiran Max Weber memiliki relevansi yang penting terhadap hubungan antara neoliberalisme dan populisme dalam politik elektoral di Indonesia. Weber, seorang tokoh klasik dalam sosiologi politik, menyoroti pentingnya birokrasi rasional-legal dalam menangani urusan publik di mana keputusan-keputusan diambil berdasarkan pertimbangan rasional dan prosedur yang jelas. Dalam konteks neoliberalisme, Weber mungkin akan menyoroti pentingnya legitimasi pemerintah jika kebijakan kebijakan ekonomi tidak dilakukan secara transparan dan efisien. Dengan birokrasi yang efektif merupakan landasan bagi stabilitas politik dan ekonomi. Dalam hal ini, pertanyaan yang dapat mempertanyakan apakah kebijakan neoliberal yang sering kali memperkuat otoritas pasar tanpa perhatian yang memadai terhadap kebutuhan sosial dapat menghasilkan hasil yang stabil dalam jangka panjang. Dengan memahami kontribusi Weber terhadap pemikiran politik, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan antara neoliberalisme, populisme, dan politik elektoral di Indonesia²⁸¹.

Dalam kajian politik kontemporer, Peter Tan telah menyumbangkan pemahaman yang berharga tentang hubungan antara neoliberalisme dan populisme dalam politik elektoral Indonesia. Dalam penelitiannya, Tan menyoroti bagaimana kebijakan-kebijakan neoliberal sering kali memperdalam ketimpangan ekonomi dan sosial di

²⁸¹ Richard Swedber, "Max Weber and the Idea of Economic Sociology". *The American Sociologist*, 2010 41(2), 203-220.

Indonesia, yang pada gilirannya dapat menghasilkan respons populis dari masyarakat yang terpinggirkan²⁸². Dia meneliti bagaimana penerapan kebijakan-kebijakan neoliberal, seperti deregulasi pasar dan privatisasi berdampak pada distribusi kekayaan dan keadilan sosial di Indonesia. Tan juga menggarisbawahi pentingnya memahami bagaimana respons populis terhadap neoliberalisme dapat membentuk politik elektoral di Indonesia dan mempengaruhi arah kebijakan publik¹⁴. Dengan demikian, melalui analisisnya, Peter Tan telah memberikan kontribusi yang penting dalam pemahaman kita tentang kompleksitas dinamika politik Indonesia dan tentang neoliberalisme dan populisme dalam politik elektoral di negara ini.

Berdasarkan terjemahan pada penelitian ini, dapatlah dikatakan bahwa Neoliberalisme dan Populisme dalam politik elektoral Indonesia mencerminkan dua kekuatan ideologis yang saling bertentangan namun memengaruhi dinamika politik di Indonesia. Neoliberalisme, dengan fokus pada pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi, sering diadopsi oleh kalangan elit yang percaya bahwa kebijakan ekonomi ini akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan. Di sisi lain, populisme muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan publik terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh kebijakan neoliberal. Populisme di Indonesia sering diwujudkan melalui retorika anti-elit dan janji-janji kesejahteraan rakyat yang diusung oleh tokoh-tokoh politik untuk mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Kedua pendekatan ini saling berinteraksi dalam setiap pemilihan umum, membentuk strategi

²⁸² Peter Tan, "Neoliberalism and Its Discontents: Exploring the Political Economy of Indonesia" *Journal of Southeast Asian Studies*, 2017 48(3), 437-460.

kampanye dan kebijakan para kandidat dalam usaha mereka meraih kekuasaan dan legitimasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori neoliberalisme dan teori populisme. Teori neoliberalisme adalah pandangan ekonomi dan politik yang menekankan pada kebebasan pasar, privatisasi, deregulasi, dan peran pemerintah yang terbatas dalam ekonomi¹⁵. Berakar dalam pemikiran ekonomi klasik, neoliberalisme percaya bahwa pasar bebas adalah mekanisme terbaik untuk alokasi sumber daya dan penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Teori ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah yang minimal dalam ekonomi dengan keyakinan bahwa pasar yang bebas dan kompetitif akan menghasilkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Neoliberalisme juga menyoroti pentingnya bisnis asing dan perdagangan bebas sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Namun, kritikus neoliberalisme sering kali menyoroti bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi, mengorbankan kepentingan sosial bagi keuntungan ekonomi, serta menyebabkan kerentanan terhadap krisis keuangan global.

Sementara itu, teori populisme menyoroti hubungan langsung antara "orang biasa" dan pemimpin politik, seringkali dengan mengecam dan menentang elit politik atau ekonomi yang dianggap korup atau tidak peduli dengan kepentingan rakyat. Populisme menekankan representasi langsung rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan menjanjikan perubahan radikal untuk melawan ketidakadilan sosial atau ekonomi. Populis sering menggunakan retorika emosional dan sederhana untuk menarik dukungan massa, dan mereka cenderung menawarkan solusi yang tampaknya langsung dan mudah

dipahami bagi masalah yang kompleks. Namun, kritik terhadap populisme menyoroti risiko terhadap stabilitas demokrasi, karena populisme sering mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi liberal, seperti supremasi hukum dan perlindungan hak minoritas, serta dapat memicu polarisasi dan konflik sosial²⁸³.

Baik teori neoliberalisme maupun populisme memiliki dampak yang penting dalam politik dan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Ditinjau dari interaksi antara kedua teori ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika politik lokal, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara dalam menanggapi aspirasi masyarakat dan mengejar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian tentang "Neoliberalisme dan Populisme dalam Politik Elektoral Indonesia" memiliki kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang dinamika politik di Indonesia, khususnya dalam konteks pertarungan ideologi dan strategi politik.

A. Pengaruh Neoliberalisme terhadap politik

Neoliberalisme adalah sebuah ideologi dan pendekatan kebijakan ekonomi yang menekankan pentingnya pasar bebas, privatisasi, deregulasi, dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi. Ideologi ini berpandangan bahwa kesejahteraan manusia dapat dicapai dengan memaksimalkan kebebasan individu, terutama dalam kegiatan ekonomi, yang sebaiknya diatur oleh mekanisme pasar. Neoliberalisme percaya bahwa intervensi pemerintah seringkali mengganggu efisiensi ekonomi dan pertumbuhan, sehingga kebijakan harus difokuskan pada penciptaan lingkungan yang

²⁸³ Vedi R. Hadiz, *Lokalisasi kekuasaan di Indonesia pascaotoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2022

mendukung persaingan pasar²⁸⁴. Neoliberalisme muncul sebagai respons terhadap pemikiran ekonomi Keynesian yang mendominasi kebijakan ekonomi di banyak negara Barat pada pertengahan abad ke-20. Ekonomi Keynesian, yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, menekankan peran aktif pemerintah dalam mengatur perekonomian, terutama melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi siklus ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi.

Istilah "neoliberal" sendiri mulai populer pada 1930-an, meskipun gagasan-gagasan neoliberalisme baru benar-benar mengambil bentuk pada akhir 1940-an dan 1950-an. Pada 1947, Friedrich Hayek, seorang ekonom Austria, mempublikasikan *Mont Pèlerin Society*, sebuah think tank internasional yang terdiri dari intelektual, ekonom, dan ilmuwan politik yang mendukung kebebasan ekonomi dan skeptis terhadap intervensi pemerintah. Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh dalam pengembangan neoliberalisme termasuk Milton Friedman dan ekonom dari Chicago School of Economics, yang mengadvokasi pentingnya kebijakan moneter ketat dan pasar bebas. Neoliberalisme mulai memperoleh pengaruh politik yang signifikan pada 1970-an dan 1980-an, khususnya di negara-negara Barat. Krisis ekonomi pada 1970-an, yang ditandai dengan stagflasi (kombinasi antara inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah), mengakibatkan banyak pemerintah mempertanyakan efektivitas kebijakan Keynesian. Dalam konteks ini, solusi yang ditawarkan oleh neoliberalisme, yang menekankan

²⁸⁴ Valentina Ausserladscheider, "Constructing a neoliberal exclusionary state: The role of far-right populism in economic policy change in post-war Austria". *Comparative European Politics*, 2024, 22(1), 128-152.

pada disiplin pasar dan pengurangan intervensi pemerintah, mulai menarik perhatian²⁸⁵.

Kebangkitan neoliberalisme secara politik ditandai oleh kepemimpinan Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat. Thatcher, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dari 1979 hingga 1990, menerapkan kebijakan-kebijakan yang mencakup privatisasi perusahaan milik negara, deregulasi pasar, dan pengurangan pengeluaran pemerintah.

Di Amerika Serikat, Ronald Reagan, yang menjabat sebagai Presiden dari 1981 hingga 1989, mengimplementasikan kebijakan-kebijakan serupa yang dikenal dengan istilah "Reaganomics" yang termasuk pemotongan pajak, deregulasi, dan penurunan peran pemerintah dalam ekonomi. Neoliberalisme tidak hanya terbatas pada negara-negara Barat melalui pengaruh lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), prinsip-prinsip neoliberalisme menyebar ke seluruh dunia, terutama ke negara-negara berkembang. IMF dan Bank Dunia seringkali mensyaratkan penerapan kebijakan-kebijakan neoliberalisme sebagai bagian dari program penyesuaian struktural yang harus diikuti oleh negara-negara yang menerima bantuan finansial dari lembaga-lembaga tersebut.

Di Amerika Latin, misalnya, banyak negara pada 1980-an dan 1990-an menerapkan kebijakan neoliberalisme sebagai bagian dari upaya untuk menstabilkan ekonomi mereka dan menarik investasi asing. Di Asia, negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan juga mengadopsi beberapa elemen neoliberalisme, terutama

²⁸⁵ Husnul Isa Harahap, Neoliberalisme: Sebuah Konsep Pemerintahan Publik Swasta. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 2023 2(2), 57-61.

setelah krisis finansial Asia pada akhir 1990-an. Meskipun neoliberalisme telah diadopsi secara luas, ideologi ini juga menghadapi banyak kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa kebijakan-kebijakan neoliberalisme cenderung meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi. Privatisasi dan deregulasi seringkali menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan besar dan individu kaya, sementara kelompok-kelompok yang lebih miskin tidak mendapatkan manfaat yang sama²⁸⁶. Di banyak negara, penerapan kebijakan-kebijakan neoliberal juga diiringi dengan pemotongan anggaran program-program sosial dan layanan publik, yang semakin memperburuk kondisi hidup bagi masyarakat miskin.

Di sisi lain, neoliberalisme sering dikritik karena mengurangi kekuasaan nasional dan mengalihkan kekuasaan dan kekuasaan ekonomi ke tingkat korporat dan pasar global. Ini dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang melindungi kepentingan publik dan merespons kebutuhan warga negara mereka. Sebagai tanggapan terhadap kritik-kritik ini, beberapa negara dan gerakan politik telah mencari alternatif terhadap neoliberalisme. Misalnya, di Amerika Latin, munculnya pemerintahan sayap kiri di negara-negara seperti Venezuela, Bolivia, dan Ekuador pada awal abad ke-21 menandai upaya untuk mengembangkan model ekonomi yang lebih fokus pada redistribusi kekayaan dan intervensi pemerintah dalam ekonomi. Di negara-negara Barat, krisis finansial 2008 memicu debat luas tentang kegagalan neoliberalisme dan mendorong beberapa pemerintah untuk kembali mempertimbangkan peran yang lebih besar bagi regulasi

²⁸⁶ Muchtar Haboddin, Populisme, politik pertahanan, dan pemimpin lokal. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 2019. 1(2), 173-180.

pemerintah dan kebijakan fiskal ekspansif. Gerakan-gerakan seperti Occupy Wall Street di Amerika Serikat dan protes anti-penghematan di Eropa juga mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap dampak negatif dari kebijakan-kebijakan neoliberal.

Neoliberalisme adalah ideologi yang menekankan pentingnya pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi sebagai jalan menuju kemakmuran ekonomi. Muncul sebagai respons terhadap ekonomi Keynesian, neoliberalisme mendominasi momentum pada akhir abad ke-20 dan mendorong cara-cara luas di banyak negara melalui pengaruh politik dan lembaga internasional. Meskipun demikian, neoliberalisme juga menghadapi kritik tajam karena ketidakadilan yang mendasar dalam ketidaksetaraan ekonomi, ketidakadilan finansial, respon terhadap neoliberalisme terus berlanjut, dengan banyak negara dan gerakan mencari model alternatif yang lebih berkeadilan.

B. Kebangkitan Populisme

Populisme adalah sebuah ideologi politik yang menekankan hubungan langsung antara pemimpin atau partai politik dengan rakyat, seringkali dengan mengesampingkan atau menentang elit yang dianggap korup atau tidak peduli dengan kepentingan masyarakat umum. Populisme mencakup berbagai spektrum ideologis, baik kiri maupun kanan, dan dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana ia muncul. Ciri khas populisme adalah klaim bahwa populis mewakili "suara rakyat" dan

²⁸⁷ R. D. A. Parmitasari & Z. Alwi, Aliran Ekonomi Neoliberalisme: Suatu Pengantar. *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)*, 2020 1(3), 59-69.

berdiri melawan "elit" atau "kasta politik" yang dianggap memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok mereka²⁸⁸. Populisme sebagai gerakan politik memiliki akar yang dalam dan dapat ditemukan di berbagai tempat dan periode sejarah. Salah satu contoh awal populisme adalah Gerakan Populis di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Gerakan ini, yang juga dikenal sebagai Partai Rakyat, muncul sebagai respons terhadap penderitaan petani di Midwest dan Selatan Amerika yang tertekan oleh kebijakan ekonomi yang menguntungkan industri dan perbankan. Para petani ini menuntut reformasi dalam kebijakan moneter, regulasi kereta api, dan pajak yang lebih adil.

Pada awal abad ke-20 di Rusia, gerakan Narodniks pada akhir abad ke-19 berkembang menjadi populis. Narodniks adalah kelompok intelektual yang menentang pemerintahan Tsar dan mendukung petani serta pekerja dengan visi utopis tentang masyarakat yang egaliter dan berbasis agraris²⁸⁹. Meskipun gagal mencapai tujuan mereka, Narodniks menunjukkan bagaimana populisme dapat menjadi gerakan radikal yang menantang tatanan politik dan ekonomi yang ada. Populisme terus berkembang pada abad ke-20, seringkali sebagai respons terhadap krisis ekonomi dan ketidakpuasan publik terhadap elit politik. Salah satu contoh yang menonjol adalah gerakan populis di Amerika Latin, yang seringkali dipimpin oleh tokoh-tokoh kharismatik yang menjanjikan perubahan radikal. Misalnya, di Argentina, Juan Domingo Perón, yang menjabat sebagai presiden tiga kali,

²⁸⁸ Restu Rahmawati, Populisme di Aras Demokrasi Indonesia. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 2018 2(1).

²⁸⁹ Andai Eka Putra, Populisme islam: Tantangan atau Ancaman bagi Indonesia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(02), 218-227.

memanfaatkan dukungan dari pekerja dan kelas bawah untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang inklusif dan redistributif. Peronisme, yang menggabungkan elemen-elemen nasionalisme, sosialisme, dan populisme, menjadi kekuatan politik utama di Argentina hingga hari ini.

Di Eropa, populisme juga muncul dalam berbagai bentuk. Di Jerman, Nazi di bawah Adolf Hitler menggunakan retorika populis untuk menggali dukungan massa dengan menentang elit Weimar dan mengusung agenda nasionalisme yang ekstrem. Meskipun dalam kasus ini nasionalisme digabungkan dengan ideologi fasis yang berbahaya, elemen populis mencari retorika Nazi seperti klaim untuk mewakili rakyat melawan elit korup sangat penting pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, populisme mengalami peningkatan banyak bagian dunia, seringkali sebagai respons terhadap globalisasi, krisis ekonomi, dan imigrasi. Populisme modern seringkali memanfaatkan media massa dan teknologi komunikasi untuk memengaruhi pemilih secara langsung, memotong jalur tradisional politik representatif. Di

Eropa, partai-partai populis sayap kanan seperti Front Nasional di Prancis, yang dipimpin oleh Jean-Marie Le Pen dan kemudian putrinya, Marine Le Pen, menentang imigrasi dan Uni Eropa dengan retorika nasionalis dan proteksionis. Partai-partai ini mengklaim mewakili "rakyat asli" melawan elit politik dan ekonomi yang mereka tuduh mengkhianati kepentingan nasional.²⁹⁰

Di Amerika Serikat, fenomena populis terlihat jelas dalam kampanye dan kepresidenan Donald Trump. Trump menggunakan retorika populis dengan menyerang

²⁹⁰ Bayu Mirta Adyaksa Kusuma, Resensi buku keluar dari ortodoksi kajian islam politik: komparasi mesir, turki, dan indonesia. Global insight journal: *jurnal hubungan internasional*, 2016 1(1), 55-59

"elit Washington" dan media mainstream, serta menekankan isu-isu seperti perdagangan yang tidak adil dan imigrasi ilegal. Slogan kampanyenya, "Make America Great Again," menggema sebagai seruan populis untuk memulihkan kemakmuran rakyat biasa yang dianggap hilang karena kebijakan elit²⁹¹. Populisme memiliki dampak yang penting terhadap politik kontemporer, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, populisme dapat meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang merasa diabaikan oleh elit politik. Populisme juga dapat mendorong reformasi politik dan sosial yang penting dengan menyoroti isu-isu yang diabaikan.

Di sisi lain, populisme seringkali membawa risiko bagi demokrasi. Klaim populis bahwa mereka satu-satunya wakil yang dapat mengatasi masalah masyarakat dapat mengarah pada kecenderungan otoriter dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan pers dan supremasi hukum. Populis juga dapat memperpolarisasi masyarakat, membelah rakyat ke dalam kelompok-kelompok yang saling bermusuhan berdasarkan identitas atau ideologi²⁹². Di Indonesia, populisme memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Sejak era kemerdekaan, para pemimpin Indonesia telah menggunakan retorika populis untuk menggalang dukungan rakyat. Soekarno, presiden pertama Indonesia, menggunakan retorika anti-kolonial dan nasionalis untuk memobilisasi massa dan menentang elit kolonial dan kapitalis asing. Soeharto, yang menggantikan

²⁹¹ Machael A. Peters, The end of neoliberal globalisation and the rise of authoritarian populism. *Educational Philosophy and Theory*, 2018 50(4), 323-325.

²⁹² A. Ardipandanto, Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 2020 11(1), 43-63.

Soekarno, juga menggunakan elemen populis dalam pembangunan orde barunya, meskipun dengan gaya yang lebih otoriter.

Dalam era reformasi, populisme tetap menjadi elemen penting dalam politik Indonesia. Misalnya, Joko Widodo (Jokowi), yang menjabat sebagai presiden sejak 2014, seringkali menggunakan citra populis sebagai "pria biasa" yang peduli dengan rakyat kecil. Retorika dan kebijakannya yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi bertujuan untuk menunjukkan komitmen keadilan sosial yang banyak.

C. Golongan-Golongan yang Termasuk Neoliberalisme dan Populisme Di Indonesia

Di Indonesia terdapat golongan-golongan yang mewakili ideologi neoliberalisme dan populisme. Meskipun kedua ideologi ini memiliki perbedaan yang signifikan, mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam politik dan ekonomi Indonesia.

1. Golongan yang termasuk neoliberalisme di Indonesia

yaitu

- a. Pengusaha dan Elit Ekonomi, golongan ini termasuk perusahaan besar, investor, dan elit ekonomi yang mendukung kebijakan ekonomi neoliberal seperti pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi. Mereka cenderung mengadvokasi untuk pembukaan pasar dan investasi asing sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi²⁹³.
- b. Kelompok Konservatif dan Kanan, beberapa partai politik dan kelompok kepentingan yang menganut ideologi konservatif atau kanan di Indonesia juga

²⁹³ Peters Tan, "Populisme, Pilkada dan Masa Depan Demokrasi" *Jurnal Ad, inistrasi Publik UNWIRA*, 2020 3(2), 80-94.

cenderung mendukung prinsip-prinsip neoliberalisme. Mereka percaya pada peran yang terbatas bagi pemerintah dalam ekonomi dan lebih menekankan pada inisiatif swasta dan pasar bebas.

- c. Organisasi Internasional dan Lembaga Keuangan, lembaga-lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, yang sering memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada Indonesia, mendorong penerapan kebijakan neoliberal sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan mereka. Mereka mendorong reformasi struktural yang meliputi privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi pasar.
- d. Beberapa anggota Pemerintahan Birokrasi, meskipun tidak semua anggota pemerintah dan birokrasi Indonesia menganut ideologi neoliberal, beberapa diantaranya cenderung kebijakan yang lebih mempromosikan sektor swasta dan mempromosikan investasi asing sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Golongan yang Termasuk Populisme di Indonesia:

- a. Pemimpin Populis dan Partai Populis, ada sejumlah tokoh politik dan partai politik di Indonesia yang mengadopsi retorika populis untuk memenangkan dukungan rakyat. Mereka sering menekankan janji-janji kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan peningkatan akses ke layanan publik. Contoh tokoh politik populis di Indonesia termasuk Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
- b. Kelompok Petani dan Buruh, golongan petani dan buruh sering menjadi sasaran retorika populis karena mereka merupakan bagian yang besar dari populasi Indonesia yang rentan dan memiliki

kepentingan ekonomi yang kuat. Para pemimpin populis sering berjanji untuk memperjuangkan kepentingan mereka melawan elit politik dan ekonomi²⁹⁴.

- c. Gerakan Sosial dan Aktivistis Hak Asasi Manusia, gerakan sosial dan aktivis hak asasi manusia di Indonesia juga sering mengadopsi pendekatan populis dalam menyuarakan tuntutan mereka terhadap pemerintah dan elit politik. Mereka menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menekankan solidaritas dengan masyarakat yang terpinggirkan.
- d. Kelompok Agama dan Adanya beberapa kelompok agama di Indonesia juga memiliki elemen-elemen populis dalam retorik mereka, terutama dalam kontes mereka memperjuangkan kepentingan dan nilai-nilai tradisional mereka melawan globalisasi dan modernitas.

D. Pengaruh Neoliberalisme dan Populisme Pada Politik Elektoral

Neoliberalisme dan populisme memiliki dampak yang signifikan terhadap politik elektoral di berbagai negara. Neoliberalisme merujuk pada pendekatan ekonomi yang menekankan pasar bebas, deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi. Pengaruh neoliberalisme dalam politik elektoral dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, kebijakan ekonomi yang pro-pasar sering kali diadopsi oleh partai politik yang menganut neoliberalisme, menarik pemilih kelas menengah dan atas yang mendapatkan manfaat langsung dari deregulasi dan pajak yang lebih rendah.

²⁹⁴ Muhtar Haboddin, Populisme sebagai Bentuk Politik Pertahanan Pemimpin Lokal. *Jurnal Politik Walisongo*, 2019 1(1), 21-28.

Swank (2006) menunjukkan bahwa partai-partai neoliberalis cenderung memperoleh dukungan dari pemilih yang percaya pada efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi²⁹⁵.

Kedua, neoliberalisme mempengaruhi pergeseran ideologis baik di partai kiri maupun kanan, di mana partai-partai kiri sering kali menyesuaikan platform mereka untuk memasukkan elemen-elemen pro-pasar guna memenangkan pemilih yang lebih luas, sehingga mengaburkan perbedaan antara partai kiri dan kanan tradisional. Hall dan Soskice (2001) mencatat bahwa bahkan partai kanan kini mengadopsi kebijakan yang lebih ramah pasar dalam konteks neoliberalisme global²⁹⁶. Ketiga, media neoliberalis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yang juga sering kali dikaitkan dengan ketidaksetaraan pendapatan yang meningkat, yang dapat menimbulkan ketidaksetaraan sosial. Brown dan Jacobs (2008) menunjukkan bahwa ketidakpuasan ini dapat memengaruhi preferensi pemilih dan meningkatkan dukungan terhadap partai-partai yang menawarkan alternatif kebijakan yang lebih inklusif²⁹⁷.

Sebaiknya, populisme adalah pendekatan politik yang mengklaim mewakili "rakyat" melawan "elite" yang dianggap korup. Populisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik dari spektrum kiri maupun kanan, dan memiliki pengaruh yang kuat dalam politik elektoral. Pertama, populisme sering muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan neoliberalisme dan ketidaksetaraan

²⁹⁵ Duane Swank, "The Political Consequences of Neoliberalism in Western Democracies". *Annual Review of Sociology*, 2006. 32, 401-426.

²⁹⁶ Peter A. Hall & David Soskice, *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford University Press. 2001

²⁹⁷ C. Brown & M. Jacobs, "Globalization and the Politics of Redistribution". *Comparative Political Studies*, 2008. 41(6), 797-821.

yang dihasilkannya, menawarkan solusi sederhana terhadap masalah kompleks, sehingga menarik pemilih yang merasa diabaikan oleh elite politik. Mudde (2004) mencatat bahwa populisme sering mendapatkan dukungan di kalangan pemilih yang merasakan ketidakamanan ekonomi dan sosial.²⁹⁸ Kedua, pemimpin populis cenderung menggunakan retorika yang langsung dan emosional untuk menarik pemilih, menampilkan diri sebagai orang luar yang melawan sistem, yang dapat menarik pemilih yang tidak puas dengan partai-partai tradisional.

Norris dan Inglehart (2019) menggambarkan bagaimana retorika populis berhasil menciptakan resonansi dengan pemilih yang merasa tidak terwakili oleh insani politik yang ada (Norris & Inglehart²⁹⁹, Ketiga, populisme cenderung menimbulkan polarisasi politik dengan menekankan perbedaan antara "rakyat" dan "elite", yang dapat menyebabkan fragmentasi politik dan munculnya partai-partai baru yang menantang hegemoni partai-partai tradisional. Gidron dan Bonikowski (2013) menunjukkan bahwa populisme dapat mengubah lanskap politik dengan menciptakan dinamika baru yang lebih terfragmentasi dan terpolarisasi.³⁰⁰

²⁹⁸ Cas Mudde, "The Populist Zeitgeist". *Government and Opposition*, 2004 39(4), 541-563

²⁹⁹ Pippa Norris, & Inglehart, *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Cambridge University Press. (2019)

³⁰⁰ Idron, N., & Bonikowski, B. "Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda". Weatherhead Center for International Affairs Working Paper, No. 13-0004 2013.

EPILOG "MENOLAK MATI"

Ketika buku ditulis, genosida di Gaza sedang gencar-gencarnya. Israel menggunakan segala cara untuk menghancurkan Hamas. Semua alat perang tercanggih digunakan, dan tiada habisnya. Begitu peralatan perang mengalami defisit, AS dan sekutunya di Eropa memasok ulang. Begitu seterusnya. M... menyebut peristiwa ini sebagai perang brutal... menyamai atau melebihi kekejaman... Perang tidak menggunakan atau... perang tanpa...

Namun, hingga menjelang sore... 7 Oktober 2023, atau seingat... Hamas ke Israel... dikenal dengan sebutan... Operasi al Aqsa... menunjukkan tanda-tanda keber... Hamas begitu kokoh dan... di dalam... di luar Gaza, meskipun beberapa... politiknya terbunuh dan dibunuh termasuk... oleh Gaza. Serangan balasan dan sporadis Hamas tetap terjadi di beberapa lokasi yang sebelumnya diklaim Israel sudah 'War Ended', perang sudah berakhir. Di tengah Gaza yang nyaris rata dengan tanah, perlawanan tetap saja terjadi yang begitu sulit dideteksi oleh mesin perang Israel.

Pertanyaannya, mengapa Hamas begitu sulit dikalahkan karena ia bukan saja kumpulan paramiliter atau sekelompok orang untuk melakukan perlawanan senjata akan tetapi Hamas adalah sebuah 'keyakinan' atau mungkin juga 'keimanan' yang dalam bahasa akademik disebut dengan ideologi. Hamas adalah ideologi yang menjadi *lifestyle* dalam kehidupan masyarakat Gaza di semua segi kehidupan yang tidak ditembus dengan peralatan perang canggih manapun. Kehidupan masyarakat Gaza itu sangat

identik dengan Hamas yang sudah melebur jadi darah, nadi, daging dan tulang-belulang. Hamas bukan saja al-Qassam, pasukan terlatih yang dipersiapkan untuk melawan Israel tetapi Hamas itu para ibu rumah tangga, anak-anak sekolah, penjual sayur di Rafah dan Han Yuonis, petani dan nelayan dan semua orang yang merasa ditindas dan dihinakan oleh Israel dan sekutunya selama puluhan tahun.

Dalam konteks itulah pengakuan juru bicara militer Israel menyatakan bahwa Hamas sulit dimusnahkan karena bersifat keyakinan. *"Ideas are hard to destroy. You can't destroy an idea. The political echo of Hamas will remain - or it [Hamas] will remain,"* kata Juru Bicara Daniel Hagari (Jerusalem Post, 19 Juni 2024). Pernyataan jujur tersebut menunjukkan bahwa Israel tidak mungkin memenangkan perang. Perang tidak bisa dikalahkan dengan F-35 atau pesawat perang canggih lainnya. Ia tetap bersenjata dan bisa mati tua atau fisik hancur-lebur sebagaimana Gaza hari ini, pada esoknya akan bangkit lagi setelah situasi di Gaza selesai.

Tampaknya Hagari merenungkan dan belajar dari sejarah sebelumnya. Belajar dari beberapa negara yang jatuh bangun dalam membasmi ideologi namun pada akhirnya gagal. Siapa yang tidak mengenal Vladimir Lenin. Dia dikenal sebagai pendiri Uni Soviet. Lenin adalah pendorong gerakan revolusioner dengan membentuk Gerakan Bolshevik dari pecahan Partai Pekerja Sosial Demokratik Rusia. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Bolshevik berhasil menggulingkan Kekaisaran Rusia dan mengambil alih pemerintahan. Lenin pun naik menjadi pemimpin dan mendirikan negara Republik Sosialis Uni Soviet (USSR) pada 1922. Dia memerintah selama dua tahun hingga akhir hayatnya. Begitu pula Stalin. Bersama Lenin, Stalin turut melakukan kudeta untuk menjatuhkan pemerintahan Kekaisaran Rusia. Setelah Lenin wafat, Stalin naik menjadi

pemimpin dan membuat ideologi politiknya sendiri bernama Stalinisme. Selain menjadi pemimpin, Stalin juga menjadi tokoh yang menguasai salah satu ekonomi terbesar di dunia. Di tangannya, Uni Soviet berhasil menguasai 9,5 persen perekonomian dunia.

Sebagai bagian dari kampanye anti agama mereka, kaum Bolshevik menutup, menghancurkan, atau membongkar puluhan ribu bangunan gereja. Jika sebelum Revolusi 1917 terdapat 54.000 gereja yang berfungsi dan lebih dari 1.000 biara di Rusia, pada awal perestroika (restrukturisasi ekonomi dan politik yang diluncurkan Mikhail Gorbachev pada 1980-an) jumlah gereja masing-masing turun menjadi 68 gereja dan 15 biara. Gereja-gereja yang masih berfungsi ditutup dan digunakan untuk tujuan yang sangat berbeda yakni banyak yang digunakan kembali menjadi rumah tinggal dan apartemen untuk para pionir. Adapun beberapa biara diubah menjadi penjara dan kamp Gulag. Kondisi ini menimbulkan penderitaannya. Masjid dialihfungsikan menjadi gudang tempat piaraan ternak dan kamar lapangan sepak bola.

Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika Soviet hancur dan berganti menjadi Rusia. Kehidupan keagamaan masyarakat tetap sedia kala. Gereja dan Masjid hidup kembali. Muslim Kosovo, Chechnya, Moscow dan Dagestan dapat hidup seperti sedia kala. Bahkan Islam lebih semarak dibandingkan dengan sebelumnya. Penghancuran Masjid dan Gereja tidak berdampak pada perubahan keyakinan masyarakat. Begitu seterusnya. Keyakinan tetaplah keyakinan yang secara kuat dipegang teguh oleh masyarakat meskipun gedung dan tempat ibadah dihancurkan.

Cerita di Soviet juga terjadi di tempat lain. Di Turki setelah puluhan tahun di bawah rezim sekuler yang membatasi penggunaan atribut keagamaan secara ekstrim

akhirnya kembali hampir sedia kala. Ketika agama menjadi *life style* masyarakat, senjata perang canggih tak sanggup merubahnya. Jikalau dipaksa oleh rezim yang sedang berkuasa melalui cara-cara revolusioner, pada saatnya akan tumbuh kembali ketika momentum itu tiba.

Tesis Fukuyama sama sekali tidak relevan untuk konteks saat ini dan (mungkin) sampai tahun-tahun akan datang. Ideologi tidak 'pernah mati' dan 'tidak mau mati' karena mesin perang atau bukan revolusioner rezim. Yang terjadi bukan kematian ideologi tetapi modifikasi atau adaptasi dengan perkembangan pengetahuan dan peradaban baru dengan caranya sendiri untuk terus eksis.

Itulah yang terjadi pada permasaian partai Islam di Indonesia. Yang terbaru adalah ketika PDIP pertengahan 2023 secara sistematis melakukan perkawinan politik dengan PDIP yang baru pernah terjadi sebelumnya pada masa Reformasi. Kedua partai ibarat langit dan bumi. PDIP dikenal sebagai partai Islam moderat dan PDIP dikenal sebagai partai Islam konservatif. Momentum Rupres 2024 publik dikagetkan dengan akrobat politik PPP yang bergabung dengan PPP di saat kondisi internal partai 'tidak sedang baik-baik saja' karena keseleo lidah sang ketua Sunarso Manoarfa yang berujung pengunduran diri sebagai ketua umum. Akrobat tersebut disebut dengan perkawinan politik 'terpaksa' atau *marriage by accident* dalam bahasa anak muda. Karena di luar kebiasaan PPP yang secara ideologis berseberangan. Jikalau berkoalisi pun terjadi di akhir bukan di awal.

Lantas apakah dengan perkawinan politik menandakan bahwa ideologi PPP dan PDIP sudah tamat? Tentu saja tidak. Keduanya tetap membawa beban sejarah partai yang cukup kuat. Konstituen dan pemilih ideologis keduanya tetap masih berpegang pada prinsip yang dibangun sebagaimana dalam

platform partai. Jalinan kasih keduanya bisa jadi sebagai ‘uji nyali’, ‘uji loyalitas’ dan ‘uji ketahanan’ ideologi. Berdampak atau tidak ketika pola perkawinan politik yang ekstrim pada konstituen. Begitu kira-kira gambaran yang sesungguhnya. PPP sudah merasakan bagaimana kemarahan pemilih tradisional yang merasa dikecewakan dengan keputusan tersebut. Akrobat politik berujung pada lepasnya kursi Senayan yang sudah pernah dalam pelukannya selama 50 tahun atau sejak PPP berdiri pada tahun 1973.

Belajar dari sejarah politik massa dan partai-partai di Indonesia perbincangan ideologi politik tetap menjadi wacana yang tertanam terus hidup dan mewarnai konteks demokrasi Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BIBLIOGRAFI

- Azra, A. (2006). *ICMI: Reinterpretasi Islam untuk Indonesia*. Kompas.
- Basaid, H., et al. (2015). *Mengapa partai Islam kalah?: Perjalanan politik Islam dari pra-pemilu '99 sampai pemilihan presiden*. Bandung: Pustaka Alvabeta.
- Bawazir, T. (2015). *Jalan menuju demokrasi: Antara fundamentalisme dan sekularisme*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Brown, C., & James, M. (2008). Globalization and the politics of redistribution. *Comparative Political Studies*, 41(6), 797-821.
- Brown, C., & James, M. (2008). Globalization and the politics of redistribution. *Comparative Political Studies*, 41(6), 797-821.
- Budiman, A. (2019). Populisme ekonomi dalam politik Prabowo Subianto di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 151-165.
- Budiman, A. (2019). Populisme ekonomi dalam politik Prabowo Subianto di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 151-165.
- Budiman, B. (2020). Tantangan dan peluang NU dalam pengentasan kemiskinan: Perspektif Aswaja. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(1), 45-58.

Burhanuddin, N. (2016). Akar dan Motif Fundamentalisme Islam: Reformulasi Tipologi Fundamentalisme dan Prospeknya di Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2), 199-210.

Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME). (2016, August). Saudi Arabia and Wahhabism. Factsheet Series No. 201. Retrieved April 22, 2021, from http://www.cjpme.org/fs_201

Crouch, H. (1999). *Democracy and politics in Indonesia* (1st ed.). Oxford University Press.

Crouch, H. (2000). *Democracy and politics in Indonesia*.

Crouch, H. (2010). *Soeharto's new order and its legacy: Essays in honour*. Australian National University Press.

Crouch, H. (2010). *Soeharto's new order and its legacy: Essays in honour*. Australian National University Press.

Dalle, M. (2023). Deklarasi Anies – Muhammadiyah dan Konflik Ideologi NU Vs PKS di Pentas Politik Nasional. *Jurnal Review Politik (JRP)*, 13(2), 230-252. <https://doi.org/10.15642/jrp.2023.13.2.230-252>

Dalle, M., & Jundi, M. (2024). Penegakkan Syariat Islam dan Pertarungan Ideologi Islam Kanan vs Islam Tengah Pasca Reformasi di Tanah Bugis. *Al-Muktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin*, 1(1), 8.

- Darajat, Z., Harza, Z., & Jamilah, M. (2022). Respon pemerintah Indonesia terhadap wacana khilafah Islamiyah yang dibawa oleh Hizbut Tahrir. *Palito*, 1(01), 99-117.
- Darajat, Z., Harza, Z., & Jamilah, M. (2022). Respon pemerintah Indonesia terhadap wacana khilafah Islamiyah yang dibawa oleh Hizbut Tahrir. *Palito*, 1(1), 99-117.
- Daud, S. (2021). *Transformasi politik Indonesia masa Orde Baru: Analisis strategi politik tahun 1984-1998*. Banda Lampung: PUSAT A MEDIA.
- Dewan Redaksi. (2001). *Encyclopedia of Islam* (p. 156). Jakarta: Penerbit Al-Hayat.
- Dewan Redaksi. (2001). *Encyclopedia of Islam* (p. 158). Jakarta: Penerbit Al-Hayat.
- Dhiaulhaq, M. I. (2024). Studi Kaderisasi Terhadap Partai Amanat Nasional (PAN): Problematika Calon Legislatif Artis. Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024*, 163.
- Dwimaputra, S. (n.d.). Agama, negara, ekonomi dan kesejahteraan: Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989). *Jurnal Saqifah*, 6(1).
- Effendy, B. (1998). *Islam dan negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*. Paramadina.

Effendy, B. (2001). *Teologi baru politik Islam: Pertautan agama, negara, dan demokrasi*. Galang Printika.

Etania, R. B., & Indrawari, T. (2023). Operasi Penumpasan G30S. *Kompas*.

Facchini, F. (2016). *Political ideological shift: A theoretical approach*. *Social Science Information*, 55(4), 7.

Fatayati, S., & Mahardika, A. (2021). Peneleian Pancasila dari norm me... es sebagai integ... Pancasila dan Islam. *Triestiti: Jurnal Pemikiran dan Agama*, 32(1), 1-16. <https://doi.org/10.33367/triestiti.v32i1.1404>

Fealy, G. (2001). *Kitab adab politik di Indonesia: Sejarah 1952-1967*. Yogyakarta: LKI.

Feillard, A. (1997). *Demokrasi dan sipil*. LkiS.

Firdaus, A. (2024). Strategi dakwah media sosial NU dalam masa pandemi COVID-19: Perspektif Aswaja. *Jurnal Media Sosial*, 12(1), 45-58.

Fleming, B. I. (2019). Religious freedom and the Pancasila-based state of Indonesia: A neo-Calvinist idea of principled pluralism. In *Calvin's and neo-Calvinist legal theory in Indonesian context* (pp. 63-89). Brill Schöningh.

Fossati, D. (2019). The resurgence of ideology in Indonesia: Political Islam, aliran, and political behavior. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(2), 163-184. <https://doi.org/10.1177/1868103419868400>

George, A. (1939). *The Arabs awakening*. Gordon Press.

Gifiya Sandi, R. N. (2020). Konsep Pancasila Dalam Pemikiran Mohammad Yamin 1945. Diakses pada 22 April 2021, dari <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/13083>

Gilang, M. I. (2018). Dasar Negara Islam Atau Pancasila: Sikap Politik Partai Nahdlatul Ulama Dalam Majelis Konstituante. *Jurnal Candrasangkala Pendidikan Sejarah*, 11(1), 41-49. <https://doi.org/10.30605/candrasangkala.v4i1.3433>

Gili, A. (2020). Genealogis si parda' Islam Radikal di Indonesia. *Jurnal Politikon Inovative*, 1(1).

Haboddin, M. (2019). Populisme sebagai Bentuk Politik Pertahanan Pemimpin Lokal di Politik Walisongo, 1(1), 2

Haboddin, M. (2019). Populisme, politik pertahanan, dan pemimpin lokal. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JiSoP)*, 1(2), 173-180.

Hadiz, V. R. (2022). *Lokalisasi kekuasaan di Indonesia pasca-otoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2006). Neo-liberal reforms and illiberal consolidations: The Indonesian paradox. *The Journal of Development Studies*, 41(2), 220-241.

Hafid, W. (2020). Geneologi radikalisme di Indonesia: Melacak akar sejarah gerakan radikal. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), 31-48.

Hall, P. A., & Soskice, D. (2001). *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford University Press.

Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.

Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.

Haryadi, A., & M. (2017). Gerakan politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan pengaruhnya terhadap Indonesia. *TRANSBORDER: International Relations Journal*, (1), 1-11.

Hasan, A. M. (2020, November 2). Membaca arah reformasi sosial di Arab Saudi. *Tirto*.
<https://tirto.id/membaca-arah-reformasi-sosial-di-arab-saudi-czos>

Hasan, A. R. (2020). Kontribusi Nahdlatul Ulama dalam pendidikan karakter bangsa: Perspektif Aswaja. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 45-58.

Hasan, A. R. (2021). Inovasi program sosial-politik NU dalam masa pandemi: Tinjauan dari perspektif Aswaja. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 110-125.

Hasan, A. R. (2021). *Inovasi program sosial-politik NU dalam masa pandemi: Tinjauan dari perspektif Aswaja*. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 110-125.

Hidayat, R. (2020). Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Alinea.id Tentang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang Menolak Mati. *Lingua: Jurnal Ilmiah*, 16(1).

Hidayat, W. (2021). Pengaruh NU dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat: Pendekatan Aswaja. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 25(2), 110-125.

Hidayatullah, A. (2017). The Wahabiah discourse on Aljazeera and Alarabiyah: A valuable lesson for Indonesian online media. In *International Conference on Culture and Language in Southeast Asia* (pp. 136-138). Atlantis Press.

Hidayatullah, A. (2023). Modelisasi dan buah konsep perbandingan kebudayaan Islam. *Jurnal Studi Pembangunan*, 2(2), 5-61.

Hidayatullah, A. (2017). The Wahabiah discourse on Aljazeera and Alarabiyah: A valuable lesson for Indonesian online media. In *International Conference on Culture and Language in Southeast Asia, ICCLAS 2017* (pp. 136-138).

Hidriyah, S. (2016). Reformasi ekonomi Arab Saudi. *Majalah Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei, 6.

Hilmy, M. (2017, November 22). Menggeser Pendulum Peradaban ke Tengah. *Opini Jawa Pos*, 4.

- Huda, M. C. (2018). Strengthening Pancasila as national ideology to implementate the balancing values to improve law's application in Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 5(1), 1-12.
- Husein, A. (2021). *Antologi kritik ideologi Islam: Kumpulan kritik ideologi mahasiswa Pascasarjana, Dirosah Islamiah UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: Innofat Publishing.
- Idris, M. R. (2020). Kontrol UIN dalam Pendidikan Politik Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, (1) 30-35.
- Ihda, R. I. (2016). *Konsistensi nilai-nilai Pancasila dalam pandangan Ibnu Taimiyah Indonesia*. Undergraduate's thesis, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ilma Mahanani, Q. F. (2020). *Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo tentang Islam dan Negara dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953)*. *Jurnal El Tarikh*, 1, 1-14.
- Imdadun Rahmat, M. (2017, November 29). Reformasi Keagamaan Arab Saudi dan Wahabisme di Indonesia. *Opini NU Online*. Diakses pada 22 April 2021, dari <http://www.nu.or.id/post/read/83753/reformasi-keagamaan-arab-saudi-dan-wahabisme-di-indonesia>
- Ismail, F. (2024). *Panorama sejarah Islam dan politik di Indonesia*. [Google Books]. Retrieved June 4, 2024, from <https://books.google.co.id/books?id=c1FHEAAAQBAJ&hl=id>

Jannah, M. (2019). Runtuhnya Khilafah Turki Utsmani 3 Maret 1924. *MASA: Journal of History*, 1(1).

Jauhari, M., Suryandaru, Y. S. S., & Sugihartati, R. (2021). Dialektika khilafah dan politik kebangsaan dalam media publik siber. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5(2), 199-216.

Kesatuan Bangsa Dan Politik. (2023). Sejarah dan hasil pemilihan umum 1955. <https://esip.polkapuasnara.go.id/sejarah-dan-hasil-pemilihan-umum-1955/>

Khudori, M. (2017). Konsep khilafah menurut Tahrir Indonesia dan perspektif politik syariah dan relevansinya bagi negara kesatuan republik Indonesia (KRI) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Kusuma, B. M. A., & Adyaksa, K. (2016). Resensi buku keluar dari ortodoksi kajian Islam politik: Komparasi Mesir, Turki, dan Indonesia. *Global Insight Journal: Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1), 55-59.

Lothrop, S. (1966). *Dunia baru Islam* (M. Djojomartono, Trans.). T.P.

Mahamid, M. N. L. (2022). Gerakan Ideologi Islam Transnasional di Indonesia dalam Film JKDN Karya Nicko Pandawa. *Muslim Heritage*, 7(1), 83-109.

Mahbub, M. (2023). *NU Tulang Punggung Negara: Strategi NU Pasca-Khittah dalam Membangun Relasi Sosial, Politik, dan Keagamaan*. Yogyakarta: Sulus Pustaka.

Malik Abdul, A. (2024). New variants of ultra-conservative Islamic schools in Indonesia: A study on Islamic school endeavor with Islamic group movement. *Power and Education*, 16(1), 14-28. <https://doi.org/10.1177/17577438231163042>

Mangasing, M. (2008). Muhammad Ibn Abd Wahab dan Gerakan Wahabi. *Jurnal Hunafa*, 5(3). Diakses pada Mei 2021, dari <http://jurnalhunafa.uin-suka.ac.id/index.php/hunafa/article/view/187>

Mariaty, U., Melani, F., & Saiman, M. (2016). History the movement of Muhammadiyah Indonesia at 1943-1960. *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(2).

Masnun, M., & Nurhikmah, S. (2011). Signifikansi Islam, Khilafah Islamiyah dan Gerakan Politik Hukum Ingkar Negara (GKI) dalam Gerakan Politik Hizbut Tahrir di Indonesia. *Isi-jah: jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 15(2), 195-215.

Maududi, A. A. (2019). Hak-hak asasi manusia dalam Islam. Bumi Aksara

Mauladi, V. Y. (2019). Niat PKI untuk menganyang membubarkan HMI. Detik News. <https://detik.com>

Mauladi, V. Y. (2021). Niat PKI untuk menganyang membubarkan HMI. *Detik News*.

Maulani, Z. A. (1995). Ramai-ramai mengeroyok Habibie. *Majalah Media Dakwah*.

- Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia. *East-West Center*.
- Miftahuddin, M., & Mawardi, H. (2021). Dinamika Perjuangan Badan Federasi Umat Islam Menuju Kemerdekaan Indonesia, 1937-1945. *Jurnal Istoria*, 17(2).
- Minarno, S. (2011). *Strategi PNI dalam memenangkan pemilihan umum 1955 di Jawa Tengah* (Krisni: Universitas Negeri Semarang).
- Moesa, A. M. (2017). Kiai NU dan paradigma politik keberagaman. *Jurnal Al-Falah*.
- Mortimer, J. (1988). *The Republic of Islam* (H. H. & R. Astuti, Trans.). Rizka.
- Muazaroh, S. (2016). Demokrasi dan 'Tahrik' Tahrir Indonesia perspektif maqasid al-syar'iat atau otoritarianisme. *Justicia Islamica*, 16(1), 103-120.
- Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist. *Government and Opposition*, 39(4), 541-563.
- Mudde, C. (2004). *The populist Zeitgeist. Government and Opposition*, 39(4), 541-563.
- Muhtarom, A. (2020). Ideologi dan lembaga pendidikan Islam transnasional di Indonesia. Zahir Publishing.
- Mujiburohman, D. A. (2012). *Pengisian jabatan presiden pasca amandemen UUD 1945*. Intan Media.

Mulyar, B. K. (2018). Diskursus khilafah Islamiyah di Indonesia (Analisis wacana kritis Buletin Dakwah al-Islam, Kaffah, dan Tabloid Media Umat) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Munawar-Rachman, B. (2019). Azra, Azyumardi. *Islam substantif: Dialog peradaban atas isu-isu global*. Bandung: Mizan.

Musaropah, U. (2019). Pendidikan kebangsaan dalam pesantren penerbitan Al-Falaah. Hasyim. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 1-22. <https://doi.org/10.47200/ulmud.v9i1.284>

Musaropah, U. (2019). Pendidikan kebangsaan dalam pesantren perspektif Abdul Munir Hasbi. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 1-22. <https://doi.org/10.47200/ulmud.v9i1.284>

Nasution, H. (1979). *Islam ditinjau dari berbagai aspek*. UI Press.

Noor, F. (2016). *Islamic party and pluralism: The view and attitude of Masyumi towards pluralism in politics (1945-1960)*. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 54(2), 273-310. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.273-310>

Nur, A. (2019). Propaganda dakwah beraroma khilafah. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(1), 49-60.

Pambudy, R. (2018). Resurgence of Populism in Post-Reformasi Indonesia. Dalam *Comparative Asian Development*, 2(2), 123-138.

- Parmitasari, R. D. A., & Alwi, Z. (2020). Aliran Ekonomi Neoliberalisme: Suatu Pengantar. *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)*, 1(3), 59-69.
- Perdana, Y., & Pratama, R. A. (2019). *Sejarah pergerakan nasional Indonesia*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha.
- Permadi, S. B. (2014). *Proses pemilihan umum 1955 di Indonesia* (Skripsi, Universitas Jember Yogyakarta).
- Peters, M. A. (2015). The end of neoliberal globalization and the rise of authoritarian populism. *Educational Philosophy and Theory*, 53(4), 325-341.
- Pratiwi, S. E. (2015). Perkembangan partai Islam di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Unesa*, 4(3).
- Pratiwi, S. E. (2015). Perkembangan partai Islam di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Unesa*, 4(3).
- Pribadi, Y. (2021) Politik identitas dan potret demokrasi di Indonesia (Book review). *Studia Islamika*, 28(2), 109. <https://doi.org/10.31000/nyimakov4i1.2220>
- Putra, A. E., Sulistiyon, S. T., & Alamsyah, A. (2020). Populisme Islam: Tantangan atau ancaman bagi Indonesia? *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(02), 218-227.
- Putra, D. A. G., Hatama, D., & La Batia, A. (2022). Perkembangan komunisme di Indonesia tahun 1914-1927. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO*, 7(1).

- Putra, D. A. G., Hatama, P. D., & La Batia, A. (2021). *Perkembangan komunisme di Indonesia 1914-1927. Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO*, 7(1).
- Putra, M. (2024). Peran Nahdlatul Ulama dalam Mengatasi Tantangan Sosial-Politik di Indonesia: Tinjauan Sejarah. *Jurnal Sejarah Nasional*, 3(1), 45-58.
- Putri, M. (2022). Dinamika Hubungan NU dengan Pemerintah Studi Kasus Peran NU dalam Kebijakan Pembangunan di Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 30-
- Putri, M. (2022). *Dinamika hubungan NU dengan pemerintah: Studi kasus peran NU dalam kebijakan pembangunan daerah. Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 30-45.
- Rahman, A. (2024). Peran Nahdlatul Ulama dalam konteks sosial-politik Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 1(2), 30-45.
- Rahmawati, F. (2020). *Dinamika organisasi Nahdlatul Ulama dalam era digital: Perspektif Aswaja. Jurnal Sosiologi Politik*, 15(1), 20-35.
- Rakhman, A. S. (2021). Dinamika perkembangan politik Nahdlatul Ulama pasca khittah tahun 1984-1999. *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(1).
- Rakhman, A. S. (2021). *Dinamika perkembangan politik Nahdlatul Ulama pasca Khittah tahun 1984-1999. Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(1).

Ramage, D. E. (1995). *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London: Routledge.

Raudhatul Ihsaniah, I. (2016). *Konsep khilafah dan nation state dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia*. Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Robison, R., & Hadiz, V. F. (2006). Neo-liberal reforms and illiberal consolidation: The Indonesian paradox. *The Journal of Development Studies*, 42(2), 220-241.

Rosser, A. (2001). *The politics of economic liberalization in Indonesia: State, market and power*. Cornell Press.

Rosser, A. (2001). *The politics of economic liberalization in Indonesia: State, market and power*. Cornell Press.

Samsuri, S. (2004). *Politik Islam anti komunis*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.

Santoso, E. (2020). Strategi pemberdayaan perempuan oleh NU: Tinjauan Aswaja. *Jurnal Studi Gender*, 8(2), 20-35.

Santoso, T., & Budhiati, I. (2018). *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Savitri, K. (2019). *Why are Indonesians prone to support the Islamic State of Iraq and Syria?* Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 10(20), 27-56.

Schwartz, S. S. (2007). *The two faces of Islam: Saudi fundamentalism and its role in terrorism* (M. S. Sulaiman, Trans.). Jakarta: Penerbit Blantika.

Schwartz, S. S. (2007). *The two faces of Islam: Saudi fundamentalism and its role in terrorism*. (Trans.). Jakarta: Penerbit Blantika.

Schwarz, A. (2005). *A nation in waiting: Indonesia's search for stability*. Telisman Publishing.

Schwarz, A. (2005). *A nation in waiting: Indonesia's search for stability*. Telisman Publishing.

Setia, & Rahim, Z. (2021). *Radikalisme dan globalisasi, dan gerakan militan di kasus Hizbut Tahrir Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Al-Falah dan Studi Keagamaan*, 1(1), 1-10.

Setia, Z., & Syah, M. (2021). *Radikalisme Islam: Telaah kampanye khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pra-pembubaran oleh pemerintah*. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(4), 523-535.

Setiawan, Z. (2021). *Peran tokoh Nahdlatul Ulama dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia*. *Spektrum*, 18(2), 80-95. <http://www.indonesia.go.id>

Shobacha, N. (2012). *Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru*. *Jurnal Review Politik*, 2(1).

- Shobacha, N. (2012). Strategi politik Nahdlatul Ulama di era Orde Baru. *Jurnal Review Politik*, 2(1).
- Siregar, F. (2022). Strategi komunikasi politik Nahdlatul Ulama dalam Pemilu 2024: Tinjauan Aswaja. *Jurnal Komunikasi Politik*, 10(1), 30-45.
- Soedarmo, R. (2019). Perkembangan politik Partai Komunis Indonesia (1948-1965). *Jurnal Unigal*, 2(1).
- Sofanudin, A., Nur Hafidza, A., & Pinastika, R. (2021). Islamic education and Islamic revivalism in Indonesia: A case study of Kutab Al-Fatih di Prokerto. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 1(1), 113-128.
- Sofianto, K., Fauziana, M., & Lailah, M. (2020). Establishment of the Ahmadiyah Caliphate and its spread of ideology in Indonesia. *Journal of Islamic Archaeology*. *Arch's Journal of Archaeology of Egum/Ferology*, 17(5), 136-157.
- Sonhaji, M., & Maulida, F. H. (n.d.). Komunikasi Politik dan Kecenderungan Pilihan Partai Kaum Santri dan Abangan pada Pemilu 1955. *Nyimak: Journal of Communication*, 4(1).
- Stenslie, S. (2018). The end of elite unity and the stability of Saudi Arabia. *The Washington Quarterly*, Spring, 65-79.
- Stenslie, S. (2018). The end of elite unity and the stability of Saudi Arabia. *The Washington Quarterly*, Spring, 66.
- Stenslie, S. (2018). The end of elite unity and the stability of Saudi Arabia. *The Washington Quarterly*, 41(2), 65-79.

Suciyani, R. (2017). Diskursus tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Diakses pada 22 April 2021, dari https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/27861/2/1420311069_BAB-I_IV-atau-v_daftar-pustaka.pdf.

Sudarmanto, I. (2024). Pengaruh NU dalam pembangunan infrastruktur sosial: Perspektif Aswaja. *Jurnal Infrastruktur Sosial*, 1(1), 45-58.

Sulaiman Schwar (2007). *The two faces of Islam: Saudi fundamentalism and its role in terrorism*. (Jakarta: Blantika)

Surya, S. (2020). Dinamika politik NU dalam konteks pluralisme Indonesia: Pendekatan Aswaja. *Jurnal Politik*, 5(2), 78-91.

Suryanto, S. (2025). *Dinamika politik NU dalam konteks pluralisme Indonesia: Pendekatan Aswaja*. *Jurnal Politik*, 5(2), 78-91.

Suwarno, S. (2015). Muhammadiyah dan Masyumi di Yogyakarta, 1945-1960. *Jurnal Patrawidya*, 16(3).

Swank, D. (2006). The political consequences of neoliberalism in Western democracies. *Annual Review of Sociology*, 32, 401-426.

Syam, N. (2020). Islam Dan Pancasila Dalam Pertarungan Ideologi Dunia: Perspektif Sosiologis. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 18(1), 100-125.

- Syarif, N. (n.d.). Islam Dan Masalah Kenegaraan Menimbang Posisi Syariat.
- Tan, P. (2017). Neoliberalism and Its Discontents: Exploring the Political Economy of Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(3), 437-460.
- Tan, P. (2020). Populisme, Pilkada dan Masa Depan Demokrasi. *Jurnal Administrasi Publik UNWIRA*, 3(2), 80-94.
- Tebba, S. (1998). *Islam dan Perubahan politik dan keagamaan*. Yogyakarta: Tiara Pustaka.
- Van Diemen, R. (2012). Politics and Religion in Saudi Arabia (Undergraduate text). Loughborough University. Diakses pada 21 April 2021, dari <http://www.lboro.ac>
- Wahyudi, B. (2018). Pendidikan berbasis Aswaja dalam era digital: Studi kasus pesantren NU. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(1), 30-45.
- Wahyudi, C. (2011). Tipologi Islam moderat dan puritan: Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 1(1).
- Wahyudi, C. (2011). *Tipologi Islam moderat dan puritan: Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl*. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 1(1), 29-45.
- Waskito, A. (2012). *Bersikap adil kepada Wahabi*. Pustaka Al-Kautsar.

Waskito, A. (2012). *Bersikap adil kepada Wahabi*. Pustaka Al-Kautsar.

Waskito, A. (2012). *Bersikap adil*. Pustaka Al-Kautsar.

Wibowo, W. (2019). *Strategi NU dalam mempromosikan toleransi dan moderasi agama: Tinjauan dari perspektif Aswaja*. *Jurnal Kajian Keagamaan*, 12(1), 30-45.

Widjajanti, R. S., & SS, M. (2021). *Pemikiran Rizieq Syihab Tentang Islam*. Pancasila. <http://repository.uinjkt.ac.id>.

Wirayasa, Y. (2011). *Strategi Pergeseran Hubungan Tahrir dalam menentang khilafah di Indonesia pada periode tahun 2000-2011*. Doctoral Dissertation, PIA “Veteran” Jawa Timur.

Yenuri, A. A. (2022). *Peran NU dalam Piagam Jakarta*. *Jurnal Inarumis*, 1(1), 1-10.

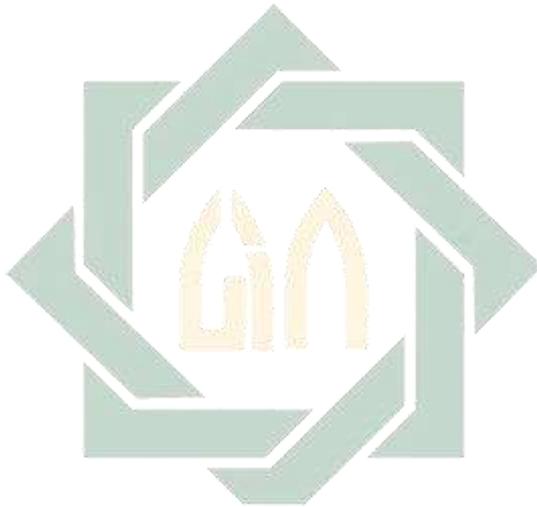
Yuda, H. (2013). *Presidensialisme setengah hati*. Gramedia Pustaka Utama.

Yusuf, A. (2022). *Kontribusi NU dalam pembangunan sosial-politik di Indonesia: Perspektif Aswaja*. *Jurnal Kebangsaan*, 6(2), 90-105.

Zaprul Khan, Z. (2014). *Relasi agama dan negara dalam perspektif Islam*. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 105-132. <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.261>

Zudi Setiawan, & Z. A. Maulani. (2021). *Peran tokoh Nahdlatul Ulama dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Spektrum*, 18(2), 80-95.

Zuhri, A., & Kholil, S. (2019). Pandangan ulama ormas Islam kekinian di Indonesia. *Analytica Islamica*, 21(1), 1-17.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

PROFIL PENULIS DAN EDITOR



PROF. ABDUL CHALIK adalah Guru Besar Ilmu Politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Selain itu juga sebagai Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada universitas yang sama periode 2022-2026. Sudah banyak melakukan riset dan pengembangan masyarakat sesuai dengan keahliannya. Bidang keilmuan yang diteliti yakni politik Islam, partai Islam, Politik Lokal dan Community Engagement. Beberapa karyanya diterbitkan dalam bentuk buku, artikel dan media populer. Karya tulis terkininya *the role of religion and Defending Women's Empowerment of Through Women in Indonesia Local Elections* (JWS, Vol. 2, No. 5, 2023), *New Trajectory of Kyai's Political Participation in Contemporary Indonesia: Rises, Challenges, and Opportunities* (IPS, Vol. 2, No. 2, 2022), dan *The Half-Hearted Compromise within Indonesian Politics: The Dynamics of Political Coalition among Islamic Political Parties (1999-2019)* (JIS, Vol. 15, No. 2, 2021). Korespondensi melalui email : abdulchalik73@gmail.com.



ZAKY ISMAIL lahir di Lombok Timur 30 Desember 1982 merupakan Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Menyelesaikan S1 dan S2 di Fakultas di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selesai tahun 2007 dengan konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam.

Saat ini, sedang menempuh Program Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: *Gerakan Radikalisme Islam Kontemporer; Sebuah Analisa Sosiologis dan Politis* (Jurnal Cahroh Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor ISSN: 999-9608), *Kerajaan Politik dan Politisasi Syariat Islam di Lombok Timur* (Jurnal Review Politik Prodi Politik Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, Volume 1, No. 02, Agustus 2011, ISSN: 2088-6241), *Ahmadiyah dan Politik di Lombok: Respon Pemerintah Daerah Terhadap Gerakan Ahmadiyah-Hak Sipil Jemaat Ahmadiyah di Mataram Pasca S1* (Jurnal Review Politik Volume 4 Nomor. 2 Tahun 2014, ISSN: 2088-6241). *Perempuan dan Politik pada Masa Awal Islam* (Jurnal Review Politik, Vol 6. No. 1 2016. [Doi.org/10.15642/jrp.2016.6.1](https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.1) dan, *Cerakan Salafi dan Deradikalisasi Islam di Indonesia* (Religio: Jurnal Studi Agama-agama, Vol. 9 Nomor 2 Tahun 2019. [Doi https://doi.org/10.15642/religio.v9i2.1207](https://doi.org/10.15642/religio.v9i2.1207)

Karya-karya lain berupa *book chapter* banyak diterbitkan oleh penerbit-penerbit nasional. Sejak tahun 2011, Penulis mengabdikan diri sebagai pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis bisa dihubungi di zakyismail@uinsby.ac.id atau zaky.politikislam@gmail.com No. HP. 081803684804



MOH. KHOIRUL UMAM lahir di Sumenep 27 Oktober 1994 merupakan Staf Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Menyelesaikan S1 di Program Studi Ilmu Politik dan S2 di Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Bidang Kajian

Hukum Tata Negara.

Karya Ilmiah yang telah dipublikasi antara lain: *Analisis Politik Hukum Omnisetor Cipta Kerja Baru, Kritik Dekonstruksi Jacques Derrida* (Jurnal Review Politik, dan Politik Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya Vol. 1 No. 01 Desember 2020, ISSN: 2621-5764), *DoI* <https://doi.org/10.25642/jrj.v1i01.2014>, dan *Kyai Pesantren dan Politik Pilkada di Indonesia* (Jurnal Resolusi, Jurnal Sosial dan Politik Vol. 5 No.2 Juli 2022, ISSN.2621-5764) *DoI* <https://doi.org/10.52699/resolusi.v5i2.2900>

Selain sebagai Staf Pengajar, juga sebagai penulis kolom pada Media Nasional seperti KOMPAS dan JAWA POS, dan Media Lokal seperti Koran Radar dan Media Online. Editor bisa dihubungi melalui email khoirulu330@gmail.com

